



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RPJP DAERAH

Pasal 2

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
 - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Penjabaran sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJP Daerah dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan evaluasi.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025, tetap berlaku sampai dengan masa perencanaannya selesai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07 Tahun 2008 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERI SULISTYANTO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 210-5/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

a.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATOR INDRA B, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19820215 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2045

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan Visi Pembangunan yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 menyebutkan Visi Jangka Panjang Jawa Timur “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”. Visi pembangunan nasional mengarah pada pencapaian tujuan nasional sedangkan visi Jawa Timur lebih menggambarkan tentang tujuan Jawa Timur yaitu sebagai provinsi yang berdaya saing dan termaju di Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam

konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap ke-1 Tahun 2025-2029;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap ke-2 Tahun 2030-2034
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap ke-3 Tahun 2035-2039;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap ke-4 Tahun 2040-2045.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Secara garis besar, materi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 Bab, dan 7 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLINGGO



**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD)**

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya Sekretaris Daerah, Bappedalitbangda dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 memiliki tujuan untuk memenuhi dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang Kabupaten Probolinggo agar terarah dan sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Akhir kata, kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Probolinggo, September 2024

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Daftar Isi

Sampul Depan

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xii

BAB I Pendahuluan

I-1

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3	Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-12
1.4	Maksud dan Tujuan	I-16
1.5	Sistematika Penulisan	I-17

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

II-1

2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Geografi	II-2
2.1.2	Demografi	II-87
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-90
2.2.1	Fokus Kesejahteraan Ekonomi	II-90
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya	II-105
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-114
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-114
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-125
2.3.3	Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-127
2.3.4	Daya Saing Iklim Berinvestasi	II-130
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-132
2.4.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-132
2.4.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-185

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

2.4.3	Urusan Pemerintah Pilihan	II-230
2.4.4	Penunjang Urusan Pemerintah.....	II-251
2.5	Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025.....	II-267
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-277
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-288
BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2	Isu Strategis.....	III-18
Bab IV	Visi dan Misi Daerah	IV-1
4.1	Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045	IV-2
4.2	Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045	IV-7
4.3	Hubungan antara Isu Strategis dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045	IV-15
Bab V	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah	V-1
5.1	Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.2	Sasaran Pokok	V-17
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah.....	V-18
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi.....	V-20
5.2.3	Indikator Utama Pembangunan Daerah	V-37
Bab VI	Penutup	VI-1
6.1	Kaidah	VI-2
6.1.1	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	VI-2
6.1.2	Kerangka Pengendalian	VI-3
6.1.3	Mekanisme Perubahan	VI-4
6.1.4	Komunikasi Publik	VI-4
6.2	Pendanaan Pembangunan	VI-5

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Per Kecamatan (km ²) Tahun 2023	II-3
Tabel 2.2	Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo	II-6
Tabel 2.3	Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo (Ha)	II-7
Tabel 2.4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	II-9
Tabel 2.5	Sungai di Kabupaten Probolinggo	II-11
Tabel 2.6	Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo	II-12
Tabel 2.7	Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023	II-14
Tabel 2.8	Luas Peruntukan Kawasan Lindung (Ha) di Kabupaten Probolinggo	II-17
Tabel 2.9	Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo	II-18
Tabel 2.10	Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo	II-20
Tabel 2.11	Wilayah Rawan Bencana	II-26
Tabel 2.12	Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo	II-28
Tabel 2.13	Arahan Ketentuan Perijinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Disinsentif dan Arahan Sanksi pada Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo	II-31
Tabel 2.14	Kejadian dan Dampak Bencana yang Terjadi di Kabupaten Probolinggo	II-33
Tabel 2.15	Jumlah SMAB Kabupaten Probolinggo	II-34
Tabel 2.16	Sebaran Risiko Banjir	II-35
Tabel 2.17	Sebaran Risiko Banjir Bandang	II-37
Tabel 2.18	Sebaran Risiko Kebakaran Hutan	II-38
Tabel 2.19	Sebaran Risiko Kekeringan	II-40

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Tabel 2.20	Sebaran Risiko Cuaca Ekstrim.....	II-41
Tabel 2.21	Sebaran Risiko Gempa.....	II-43
Tabel 2.22	Sebaran Risiko Gelombang.....	II-45
Tabel 2.23	Sebaran Risiko Letusan Gunung Api	II-46
Tabel 2.24	Sebaran Risiko Longsor	II-47
Tabel 2.25	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo	II-50
Tabel 2.26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-51
Tabel 2.27	Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Probolinggo	II-54
Tabel 2.28	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kabupaten Probolinggo	II-57
Tabel 2.29	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kabupaten Probolinggo	II-59
Tabel 2.30	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Probolinggo	II-61
Tabel 2.31	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim di Kabupaten Probolinggo	II-64
Tabel 2.32	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Probolinggo	II-66
Tabel 2.33	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Probolinggo.....	II-68
Tabel 2.34	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dari Bencana di Kabupaten Probolinggo	II-70
Tabel 2.35	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pengaturan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Probolinggo.....	II-73
Tabel 2.36	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Probolinggo	II-75
Tabel 2.37	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pembetulan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan di Kabupaten Probolinggo.....	II-78

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Tabel 2.38	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Probolinggo	II-80
Tabel 2.39	Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Probolinggo	II-82
Tabel 2.40	Status Daya Dukung Air Kabupaten Probolinggo.....	II-85
Tabel 2.41	Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023	II-88
Tabel 2.42	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo 2019-2023	II-92
Tabel 2.43	Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan Komponennya Tahun 2019-2023	II-94
Tabel 2.44	Capaian Pembangunan Aspek Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.45	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2.46	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.47	Data Jumlah Pemuda dan Atlet Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2.48	Kasus Penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023	II-107
Tabel 2.49	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2022	II-113
Tabel 2.50	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019— 2023	II-115
Tabel 2.51	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Probolinggo Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023.....	II-118
Tabel 2.52	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-120
Tabel 2.53	Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo.....	II-121
Tabel 2.54	Hasil Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-121

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Tabel 2.55	Hasil Kinerja Fokus Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-126
Tabel 2.56	Hasil Kinerja Fokus Wilayah/infrastruktur Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2.57	Fasilitas Cagar Budaya Kabupaten Probolinggo	II-128
Tabel 2.58	Hasil Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-131
Tabel 2.59	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-132
Tabel 2.60	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021-2023	II-152
Tabel 2.61	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-153
Tabel 2.62	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2.63	Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-158
Tabel 2.64	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021-2023	II-166
Tabel 2.65	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-167
Tabel 2.66	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022-2023	II-176
Tabel 2.67	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-177
Tabel 2.68	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2023	II-179
Tabel 2.69	Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-180

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Tabel 2.70	Standar Pelayanan Minimum Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2023	II-183
Tabel 2.71	Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-184
Tabel 2.72	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2023	II-185
Tabel 2.73	Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-186
Tabel 2.74	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-187
Tabel 2.75	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-188
Tabel 2.76	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2023	II-193
Tabel 2.77	Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-195
Tabel 2.78	Tren Pengelolaan Sampah di Kabupaten Probolinggo	II-198
Tabel 2.79	Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-200
Tabel 2.80	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-202
Tabel 2.81	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-204
Tabel 2.82	Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-206
Tabel 2.83	Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-212

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Tabel 2.84	Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-214
Tabel 2.85	Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-217
Tabel 2.86	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019- 2023	II-221
Tabel 2.87	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-223
Tabel 2.88	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-225
Tabel 2.89	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-228
Tabel 2.90	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-230
Tabel 2.91	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-233
Tabel 2.92	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-235
Tabel 2.93	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-247
Tabel 2.94	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-248
Tabel 2.95	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-251
Tabel 2.96	Hasil Kinerja Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-254
Tabel 2.97	Hasil Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022	II-257

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Tabel 2.98	Hasil Kinerja Urusan Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-259
Tabel 2.99	Capaian Indikator opini BPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-261
Tabel 2.100	Hasil Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II-265
Tabel 2.101	Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2022	II-268
Tabel 2.102	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-279
Tabel 2.103	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-280
Tabel 2.104	Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-281
Tabel 2.105	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-282
Tabel 2.106	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-283
Tabel 2.107	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-284
Tabel 2.108	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-285
Tabel 2.109	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	II-285
Tabel 2.110	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Probolinggo	II-286
Tabel 2.111	Tahapan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044	II-297
Tabel 2.112	Kegiatan Pembangunan Drainase Tahap II, III, IV Tahun 2023 – 2037 dalam Masterplan Drainase Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 - 2037	II-351
Tabel 3.1	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo dengan Isu Strategis	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

	Internasional, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025-2045	III-36
Tabel 4.1	Sasaran Visi Kabupaten Probolinggo dan Keselarasannya dengan Sasaran Visi Provinsi Jawa Timur	IV-10
Tabel 4.2	Keselarasan Misi Kabupaten Probolinggo dengan Misi Provinsi Jawa Timur dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045	IV-14
Tabel 4.3	Hubungan Isu Strategis dan Visi – Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	IV-15
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Penyelenggaraan Misi (Agenda Transformasi) di Setiap Tahapan/Periode Pembangunan Lima Tahun	V-14
Tabel 5.2	Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	V-18
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Probolinggo dan Targetnya Berdasarkan Misi dan Arah Pembangunan Tahun 2025 – 2045	V-37

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	I-13
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah	II-1
Gambar 2.2	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten probolinggo	II-2
Gambar 2.3	Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo	II-3
Gambar 2.4	Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo	II-5
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang	II-10
Gambar 2.6	Peta Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) Kabupaten Probolinggo	II-15
Gambar 2.7	Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (%) Kabupaten Probolinggo	II-19
Gambar 2.8	Peta Pola Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2011	II-21
Gambar 2.9	Peta Pola Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2024	II-22
Gambar 2.10	Peta Kawasan Risiko Bencana Banjir Kabupaten Probolinggo	II-36
Gambar 2.11	Peta Kawasan Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Probolinggo	II-37
Gambar 2.12	Peta Kawasan Risiko Bencana Karhutla Kabupaten Probolinggo	II-39
Gambar 2.13	Peta Kawasan Risiko Bencana Kebakaran Kabupaten Probolinggo	II-41
Gambar 2.14	Peta Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Probolinggo	II-42
Gambar 2.15	Peta Kawasan Risiko Bencana Gempa Kabupaten Probolinggo	II-44
Gambar 2.16	Peta Kawasan Risiko Bencana Gelombang Kabupaten Probolinggo	II-45
Gambar 2.17	Peta Kawasan Risiko Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Probolinggo	II-46

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Gambar 2.18	Peta Kawasan Risiko Bencana Longsor Kabupaten Probolinggo.....	II-48
Gambar 2.19	Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Probolinggo	II-48
Gambar 2.20	Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Probolinggo	II-49
Gambar 2.21	Rekapitulasi Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Probolinggo	II-56
Gambar 2.22	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Probolinggo.....	II-58
Gambar 2.23	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Probolinggo.....	II-60
Gambar 2.24	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Probolinggo.....	II-63
Gambar 2.25	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Iklim di Kabupaten Probolinggo	II-65
Gambar 2.26	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air di Kabupaten Probolinggo.....	II-67
Gambar 2.27	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Probolinggo.....	II-69
Gambar 2.28	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian air di Kabupaten Probolinggo.....	II-72
Gambar 2.29	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pengelohan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Probolinggo	II-74
Gambar 2.30	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Probolinggo	II-77
Gambar 2.31	Peta Jasa Lingkungan Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan di Kabupaten Probolinggo	II-79
Gambar 2.32	Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Probolinggo.....	II-81

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Gambar 2.33	Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Probolinggo.....	II-83
Gambar 2.34	Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Kabupaten Probolinggo.....	II-84
Gambar 2.35	Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-87
Gambar 2.36	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo 2023	II-89
Gambar 2.37	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-91
Gambar 2.38	Indeks Gini Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-93
Gambar 2.39	Capaian Pembangunan Aspek Pendidikan Kabupaten Probolinggo.....	II-96
Gambar 2.40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Probolinggo	II-102
Gambar 2.41	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-104
Gambar 2.42	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Probolinggo Tahun 2019-2023	II-106
Gambar 2.43	IPG Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-111
Gambar 2.44	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-112
Gambar 2.45	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-135
Gambar 2.46	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-136
Gambar 2.47	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-137
Gambar 2.48	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-138
Gambar 2.49	Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-139
Gambar 2.50	Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-140

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Gambar 2.51	Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-141
Gambar 2.52	Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-142
Gambar 2.53	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-143
Gambar 2.54	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-144
Gambar 2.55	Fasilitas Pendidikan dengan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-145
Gambar 2.56	Rasio Siswa Terhadap Kelas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-146
Gambar 2.57	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-147
Gambar 2.58	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-156
Gambar 2.59	Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-157
Gambar 2.60	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-160
Gambar 2.61	Cakupan Persalinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-161
Gambar 2.62	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-162
Gambar 2.63	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-163
Gambar 2.64	Rumah Tangga Sehat Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-164
Gambar 2.65	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-169

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Gambar 2.66	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Probolinggo	II-170
Gambar 2.67	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-171
Gambar 2.68	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-172
Gambar 2.69	Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-174
Gambar 2.70	Ketersediaan Energi Per kapita di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-189
Gambar 2.71	Ketersediaan Protein Per kapita di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-190
Gambar 2.72	Pola Pangan Harapan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-191
Gambar 2.73	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-192
Gambar 2.74	Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-207
Gambar 2.75	Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang Lampu Traffic Light Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-208
Gambar 2.76	Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang Utama dan Penunjang Terminal Penumpang Barang dan Kepelabuhan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-209
Gambar 2.77	Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-210
Gambar 2.78	Jumlah Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-215

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Gambar 2.79	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-218
Gambar 2.80	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019- 2023 (Triliun)	II-219
Gambar 2.81	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-220
Gambar 2.82	Presentase Realisasi Investasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-221
Gambar 2.83	Persentase Atlet Berprestasi yang dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-222
Gambar 2.84	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-224
Gambar 2.85	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-225
Gambar 2.86	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-226
Gambar 2.87	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023.....	II-227
Gambar 2.88	Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-228
Gambar 2.89	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-229
Gambar 2.90	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II-234
Gambar 2.91	Data Objek Wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-235
Gambar 2.92	Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-238

Gambar 2.93	Kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022	II-239
Gambar 2.94	Jumlah Produksi Telur, Susu, daging Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-245
Gambar 2.95	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten	II-248
Gambar 2.96	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-249
Gambar 2.97	Capaian Kontribusi Sub Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-250
Gambar 2.98	Pertumbuhan Industri Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 - 2023	II-251
Gambar 2.99	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022	II-258
Gambar 2.100	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022	II-259
Gambar 2.101	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023	II-262
Gambar 2.102	Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020	II-266
Gambar 2.103	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk per Tahun Probolinggo Tahun 2025-2045	II-280
Gambar 2.104	Peta Pusat Pemukiman di Kabupaten Probolinggo	II-290
Gambar 2.105	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Probolinggo	II-292
Gambar 2.106	Kawasan Strategis di Kabupaten Probolinggo	II-294
Gambar 2.107	Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Probolinggo	II-296

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Gambar 2.108	Zonasi Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Jawa Timur dalam RPJPN 2025-2045	II-354
Gambar 2.109	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Tapal Kuda Jawa Timur dalam RPJPN 2025-2045	II-355
Gambar 2.110	Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045	II-356
Gambar 2.111	Proyeksi Perkembangan Pusat Kawasan Perkotaan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-204	II-357
Gambar 3.1	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010–2023	III-2
Gambar 3.2	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo dan Pasuruan Tahun 2010 – 2023	III-3
Gambar 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011 - 2023	III-5
Gambar 3.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Situbondo, Probolinggo dan Pasuruan Tahun 2010-2023	III-6
Gambar 3.5	Rasio Gini Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2023	III-8
Gambar 3.6	IPM Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2023	III-10
Gambar 3.7	IPM Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Situbondo dan Pasuruan Tahun 2010-2023	III-11
Gambar 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	III-12
Gambar 4.1	Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Probolinggo dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.....	IV-4
Gambar 5.1	Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045	V-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan utama penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Undang-undang tersebut mengamanahkan agar dokumen rencana pembangunan daerah mengacu pada perencanaan pembangunan nasional (pusat), perencanaan pembangunan daerah di level yang lebih rendah mengacu pada perencanaan pembangunan daerah di level yang lebih tinggi. Demikian juga dengan perencanaan pembangunan jangka pendek harus mengacu pada perencanaan pembangunan jangka menengah yang mengacu pada perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong proses pembangunan daerah maupun pusat/nasional yang terpadu dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD memuat visi daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang, misi-misi pembangunan untuk mencapai visi yang telah ditentukan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan setiap lima tahunan (tahap). Dokumen ini akan menjadi acuan saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) – dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan, baik pada periode 5 (lima) tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Arah kebijakan dan sasaran pokok di setiap tahap dalam RPJPD ini kemudian harus dirujuk saat menyusun RPJMD di periode yang bersesuaian. Harapannya, visi pembangunan daerah jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD dapat tercapai secara bertahap melalui pelaksanaan RPJMD yang terarah.

Ketersediaan RPJPD menjadi sangat penting untuk menjelaskan visi atau kondisi daerah yang dicita-citakan di 20 (dua puluh) tahun mendatang,

merumuskan misi pembangunan untuk mencapainya, serta bagaimana arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan secara bertahap sehingga diharapkan dapat mencapai visi tersebut. RPJPD memberikan pedoman bagi arah pembangunan jangka menengah (RPJMD). Jika tidak tersedia RPJPD, maka fokus/prioritas pembangunan dalam RPJMD tidak akan tearahkan dengan baik untuk mencapai kondisi daerah yang dicita-citakan dalam jangka panjang.

Beberapa daerah yang memiliki RPJPD periode tahun 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2025, termasuk di dalamnya Kabupaten Probolinggo. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 telah mengarahkan bagaimana tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, termasuk RPJPD Kabupaten/Kota. Pasal 18 dan 28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJPD disusun maksimal 1 (satu) tahun sebelum berakhir dan ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan setelah berakhir masa berlaku (periode)-nya. Seiring dengan akan berakhirnya periode RPJPD Kabupaten Probolinggo di tahun 2025, maka pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo harus segera menyusun RPJPD periode 20 (dua puluh) tahun selanjutnya, yaitu RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045.

Permendagri nomor 86 Tahun 2017 secara terperinci telah menguraikan pendekatan maupun tata cara penyusunan dokumen rencana daerah. Proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, tidak terkecuali RPJPD, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik berarti bahwa dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif berarti bahwa dalam proses perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis berarti bahwa proses perencanaan dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas berarti bahwa dokumen rencana merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Secara substansi, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah berarti bahwa dalam penyusunan dokumen dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif berarti bahwa dalam penyusunan dokumen rencana dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara itu, pendekatan spasial berarti bahwa harus mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan.

Tata cara penyusunan RPJPD secara terperinci dituangkan dalam Bab II, Bagian Ketiga, Pasal 17 hingga 40 Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Dengan mengikuti ketentuan tersebut, maka terdapat beberapa tahap dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045. *Pertama*, tahap Persiapan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan Surat Keputusan (SK) tim penyusun, Orientasi RPJPD untuk semua personil tim, penyusunan agenda kerja, hingga penyiapan data dan informasi berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Kedua, tahap penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Kurun waktu atau periode RPJPD Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sehingga memudahkan penyelarasan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan nasional. Dalam tahap ini, dilakukan proses analisis gambaran umum kondisi daerah, pemasalahan pembangunan

daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan daerah yang tersedia dan terkait untuk merumuskan berbagai isu pembangunan, perumusan Isu Strategis, Visi-Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah selama 20 tahun yang dipecah ke dalam 4 (empat) tahap/periode lima tahunan. Pada tahap ini pula hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan dalam rangka penyusunan RPJPD dianalisis dan dielaborasi dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah jangka panjang. Luaran dari proses ini adalah Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Ranwal dibahas oleh tim dengan perangkat daerah (PD). Masukan dan saran dari pembahasan tersebut menjadi bahan perbaikan Ranwal. Selanjutnya, Ranwal dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik. Masukan dan saran dari forum ini pun menjadi bahan penyempurnaan Ranwal. Bupati mengajukan Ranwal RPJPD untuk konsultasi pada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ketiga, tahap penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan Ranwal berdasarkan masukan hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengajukan Rancangan RPJPD ke Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Keempat, tahap pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasi Musrenbang dengan mengundang *stakeholders*, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan unsur terkait sebagai peserta atau narasumber. Hasil Musrenbang dirumuskan dalam Berita Acara Musrenbang yang menjadi bahan masukan penyempurnaan Rancangan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.

Kelima, tahap perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Rancangan Akhir RPJPD merupakan hasil penyempurnaan Rancangan RPJPD berdasarkan masukan Musrenbang.

Selanjutnya, Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir dalam Rancangan Peraturan Daerah (Rapperda) RPJPD kepada Sekretaris Daerah, yaitu ke bidang hukum. Bupati menyampaikan Raperda tersebut ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan. *Keenam*, tahap terakhir berupa penetapan RPJPD. Pada tahap ini, Bupati menetapkan Raperda RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Secara khusus, Inmendagri ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi. Dikeluarkannya Inmendagri ini pun merupakan upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Harapannya, dapat tersusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah serta dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional.

Terdapat pengembangan tahapan dalam penyusunan RPJPD menurut Inmendagri ini dibandingkan dengan Permendari 86 Tahun 2017. Pada tahap penyusunan Ranwal RPJPD, terdapat proses pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Ranwal RPJPD. Proses ini dilakukan setelah Ranwal RPJPD dibahas dan direvisi berdasarkan masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), serta sebelum dilakukan konsultasi RPJPD ke Gubernur melalui Bappeda provinsi. Inmendagri pun mengarahkan agar FKP serta proses penyampaian Ranwal ke DPRD dilakukan paling lambat minggu pertama Januari 2024. Pembahasan dengan DPRD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menyepakati visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan, serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan periode pertama untuk menjadi dasar dalam perumusan rancangan Teknokratik RPJMD tahap I, yaitu Tahun 2024-2029. Sementara

itu, konsultasi Ranwal RPJPD dengan Bappeda provinsi dilakukan paling lambat minggu IV Januari 2024.

Inmendari ini pun mengarahkan linimasa tahapan/proses penyusunan RPJPD hingga penetapannya. Penyempurnaan Ranwal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi dengan Bappeda provinsi dan Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024. Perumusan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang dilaksanakan paling lambat Minggu IV bulan Mei 2024. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Juli Tahun 2024. Pembahasan dan persetujuan bersama RPJPD kabupaten/kota, dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi dilaksanakan paling lambat Minggu III bulan Agustus Tahun 2024. Sementara itu, penetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJPD kabupaten oleh Bupati paling lambat dilakukan pada minggu IV Agustus tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Probolinggo adalah semua perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia maupun perundangan terkait. Peraturan perundangan yang dimaksud antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Perubahannya;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

- Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta Perubahannya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tahun 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Permen LHK No. 69 Tahun 2017);
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
38. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 600.11.2/8755/Bangda tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam RPJPD/RPJMD;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

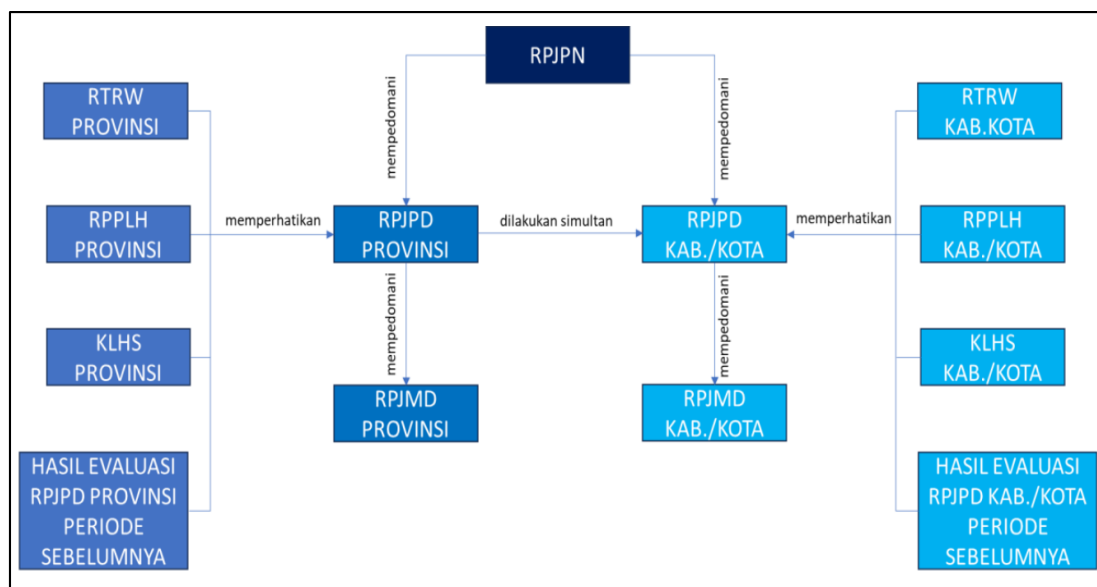
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.
44. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Undang-Undang nomor 25 tahun 2024, Permendagri nomor 86 Tahun 2017, maupun Inmendagri Nomor 1 tahun 2024 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN maupun RPJPD pemerintahan daerah di level yang lebih atas. RPJPD pun harus memperhatikan rencana pembangunan (khususnya jangka panjang) yang lain yang tersedia, sehingga memastikan keterpaduan antar dokumen rencana dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen rencana yang dimaksud adalah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo yang berlaku, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupate Probolinggo, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Probolinggo, dan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Probolinggo periode sebelumnya (Tahun 2005-2025). Setelah RPJPD Kabupaten Probolinggo 2025-2045 ditetapkan, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo selama 4 tahap/periode (Gambar 1.1).

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. RPJPN Tahun 2025-2045 telah menguraikan permasalahan dan isu strategis,

visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk memastikan keselarasannya, perumusan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 dapat mengacu pada permasalahan dan isu strategis RPJPN 2025-2045 yang relevan dengan kondisi serta kewenangan kabupaten. Bagaimana pun, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 akan menjadi isu eksternal dan strategis nasional bagi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Visi, misi dan pentahapan pembangunan (arah kebijakan serta sasaran pokok) pembangunan Kabupaten Probolinggo juga menyelaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPN. Pun demikian dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan maupun indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo yang harus selaras dengan RPJPN.

RPJPD Kabupaten Probolinggo juga harus terkait dan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 juga akan menjadi isu eksternal dan strategis regional bagi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Probolinggo harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Timur yang mencakup Kabupaten Probolinggo dan telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Dokumen lain yang harus diacu oleh RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 adalah RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 – 2031 yang saat ini sedang diproses review dan revisi menjadi RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 – 2044. Amanah RTRW, khususnya yang terkait dengan pengembangan (struktur dan pola ruang) wilayah, seperti pusat-pusat layanan, kawasan strategis, baik untuk kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup atau pun lainnya harus diperhatikan. Dalam perencanaan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, kawasan-kawasan strategis ini dapat menjadi arah kebijakan pengembangan kewilayahan kabupaten. Demikian juga dengan pengaturan zonasi di RTRW

memberikan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan penyediaan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan tata ruang wilayah kabupaten.

Secara tidak langsung, RPJPD Kabupaten Probolinggo juga terhubung dengan RTRW Provinsi Jawa Timur. Bagaimanapun, pembangunan – khususnya pembangunan kewilayahan Probolinggo – merupakan bagian dari pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur, khususnya yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo. RTRW Kabupaten Probolinggo terbaru (Tahun 2024-2042) seharusnya telah merujuk kepada RTRW Provinsi Jawa Timur, demikian juga dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 yang telah merujuk arahan RTRW Provinsi Jawa Timur. Karenanya, saat RPJPD Kabupaten Probolinggo telah merujuk pada arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur maupun RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044, maka secara tidak langsung dokumen ini pun telah merujuk pada RTRW Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.11.2/8755/Bangda tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam RPJPD/RPJMD, tanggal 7 Agustus 2023, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 juga memperhatikan dokumen KLHS dalam rangka penyusunan RPJPD. Subtansi KLHS lebih fokus pada evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Probolinggo. Dokumen KLHS akan memuat isu strategis KLHS serta berbagai rekomendasi pembangunan ramah lingkungan dan rencana kerja/program lainnya dalam rangka pencapaian TPB. Karenanya, isu-isu strategis serta rekomendasi KLHS akan menjadi isu yang harus diperhatikan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Selain itu, Kabupaten Probolinggo memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023 – 2052 yang juga dapat menjadi acuan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, isu-isu strategis maupun rekomendasi arah kebijakan maupun strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

akan menjadi masukan dalam menyusun permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Dengan demikian, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akan terakomodasi dalam RPJPD.

Dokumen lain yang juga harus dipertimbangkan atau menjadi acuan dalam menyusun RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 adalah Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD Tahun 2005-2045. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang faktor penghambat maupun pendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang periode sebelumnya sekaligus rekomendasi bagi penyusunan RPJPD Kabupaten periode selanjutnya. Informasi dan rekomendasi tersebut menjadi masukan juga saat merumuskan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan dalam waktu 20 atau empat periode/tahap pembangunan lima tahunan yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen RPJMD pada periode yang bersesuaian. Secara rinci, tujuan dari penyusunan RPJPD ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi terkini pembangunan Kabupaten Probolinggo pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir maupun hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025.
2. Memproyeksikan kondisi demografi dan kebutuhan sarana-prasarana publik sampai dengan tahun 2045.
3. Menganalisis kebijakan pembangunan kewilayahan nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Probolinggo yang harus diacu dan/atau diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang sampai dengan tahun 2045

4. Merumuskan permasalahan-permasalahan daerah serta isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo untuk periode 20 tahun mendatang
5. Merumuskan visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045 dan menentukan misi-misi pembangunan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan
6. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan di setiap tahap (lima tahunan) selama empat periode/tahap hingga tahun 2045.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Probolinggo 2025 – 2045 mengikuti arahan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 meliputi 6 (enam) Bab dengan isi masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan RPJPD. Pada bagian Latar Belakang diuraikan pengertian RPJPD, alasan penyusunan RPJPD – termasuk resiko jika RPJPD tidak tersedia, pendekatan serta proses penyusunan RPJPD. Pada bagian Dasar Hukum Penyusunan diuraikan semua aturan perundangan yang mendasari urgensi dan tata cara perencanaan pembangunan daerah, substansi penting yang harus dijadikan acuan hingga aturan lain terkait pembangunan daerah yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan RPJPD. Bagian Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya menjelaskan apa dan bagaimana substansi RPJPD mengacu dan atau diacu oleh dokumen rencana pembangunan lainnya, baik yang dimiliki daerah maupun milik pemerintah daerah provinsi maupun nasional. Bagian Maksud dan Tujuan menguraikan maksud serta tujuan rinci disusunnya dokumen RPJPD bagi Kabupaten Probolinggo pada periode perencanaan. Sementara itu, bagian Sistematika Penulisan menguraikan isi dari RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menguraikan beberapa hal.

Pertama, kondisi terkini Kabupaten Probolinggo dalam empat aspek, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah. Berbagai data dan informasi dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, khususnya perkembangan capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir, diuraikan sebagai dasar analisis potensi maupun permasalahan pembangunan daerah di keempat aspek tersebut.

Kedua, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025, baik capaian pembangunan maupun rekomendasi terhadap penyusunan RPJPD periode selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Ketiga, proyeksi tentang tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Proyeksi demografi mencakup jumlah penduduk, baik secara total, berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok umur selama periode perencanaan. Proyeksi ini akan memberikan gambaran kondisi penduduk kabupaten hingga tahun 2045 beserta implikasinya, khususnya pada penyelenggaraan pembangunan yang pada hakekatnya adalah membangun manusia di daerah. Dengan data proyeksi jumlah penduduk ini pula dapat diproyeksikan gambaran kebutuhan sarana prasarana atau infrastruktur publik yang harus dipenuhi selama periode perencanaan.

Keempat, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang menguraikan rencana pusat-pusat pertumbuhan maupun rencana pembangunan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Probolinggo berdasarkan dokumen RTRW maupun dokumen rencana jangka panjang (masterplan) pembangunan lainnya yang telah tersedia. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang melibatkan/mencakup Kabupaten Probolinggo dalam RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Diuraikan pula arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang telah direncanakan dan masih berlaku di Kabupaten Probolinggo selama periode perencanaan RPJPD. Hal ini dilakukan

untuk memberikan gambaran tentang rencana pembangunan kewilayahan dan/atau lintas sektor, termasuk di dalamnya indikasi program dalam mengimplementasikan rencana, yang telah ada sekaligus menjadi informasi saat penentuan arah kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

menjelaskan rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang akan dihadapi dan dijawab penyelesaiannya melalui rencana pembangunan dalam waktu 20 tahun mendatang (jangka panjang). Permasalahan dirumuskan berdasarkan data dan informasi yang telah disajikan dalam Bab II. Sementara itu, isu strategis dirumuskan berdasarkan isu internal (permasalahan) daerah maupun isu-isu eksternal, baik regional, nasional maupun global/internasional yang mempengaruhi ketercapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Probolinggo. Isu strategis adalah permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun isu eksternal yang memiliki prioritas tinggi untuk dihadapi/diselesaikan dalam waktu 20 tahun mendatang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH menguraikan visi atau cita-cita Kabupaten Probolinggo di tahun 2045 yang ingin dicapai serta misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi menggambarkan kondisi yang diinginkan/dicita-citakan tercapai di tahun 2045 sebagai hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH menguraikan arah kebijakan prioritas dan sasaran pokok pokok pembangunan di setiap tahap (lima tahunan) selama 20 tahun (4 tahap). Untuk setiap misi yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya diuraikan arah kebijakan tiap lima tahun selama empat periode. Selanjutnya, di setiap arah kebijakan diuraikan sasaran

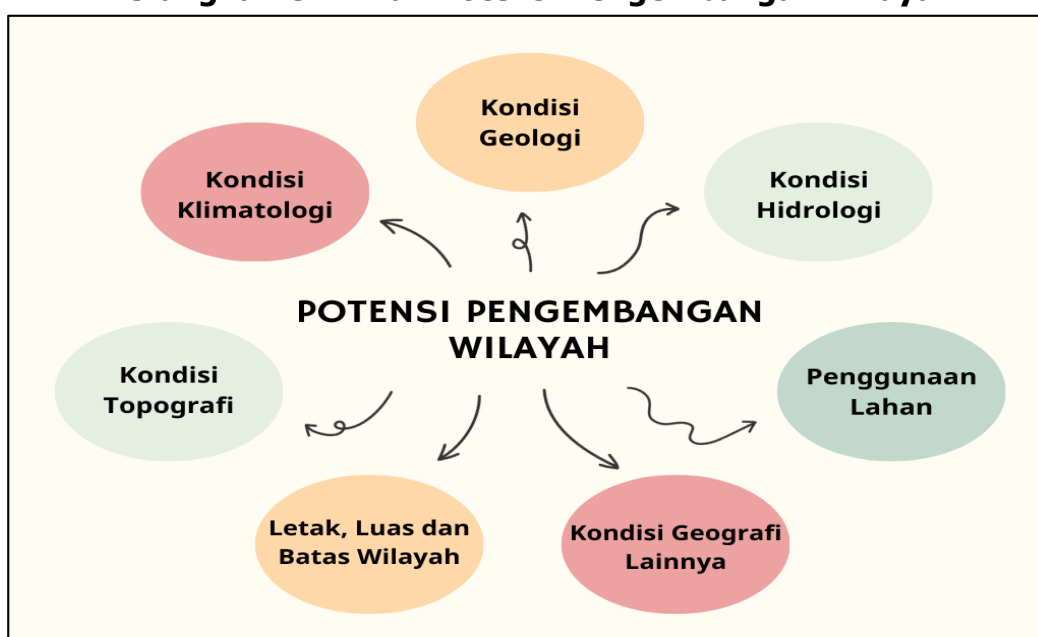
pokok pembangunan yang akan dicapai dengan dilengkapi dengan indikator kinerja beserta targetnya masing-masing.

BAB VI PENUTUP menguraikan kesimpulan dari RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045 serta arahan tindak lanjut untuk pengimplementasiannya. Dalam bab ini pula diuraikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

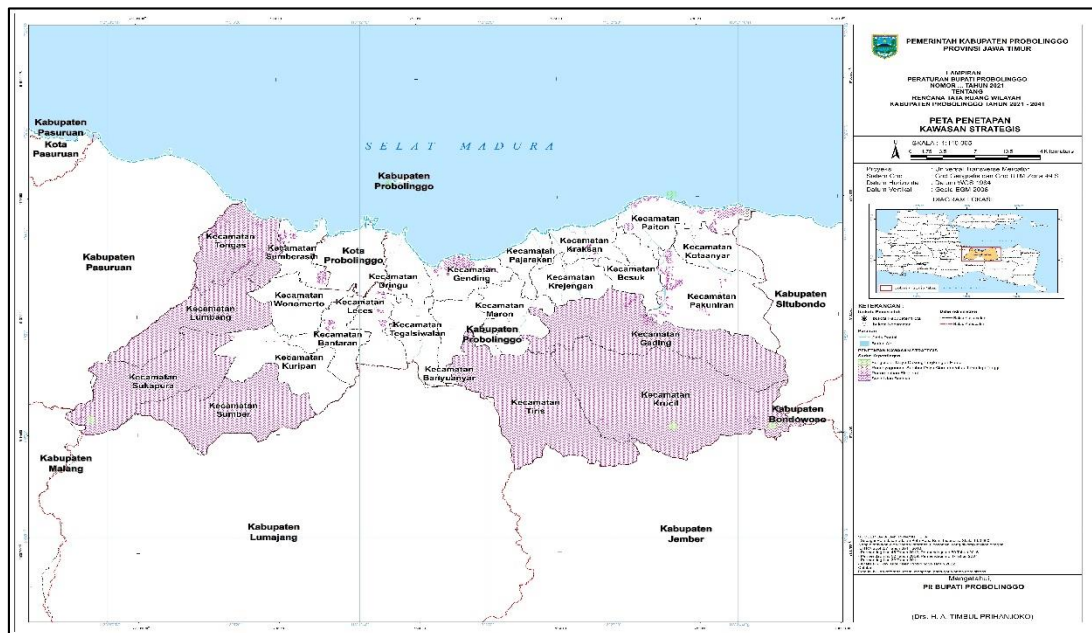
Analisis aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Probolinggo digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

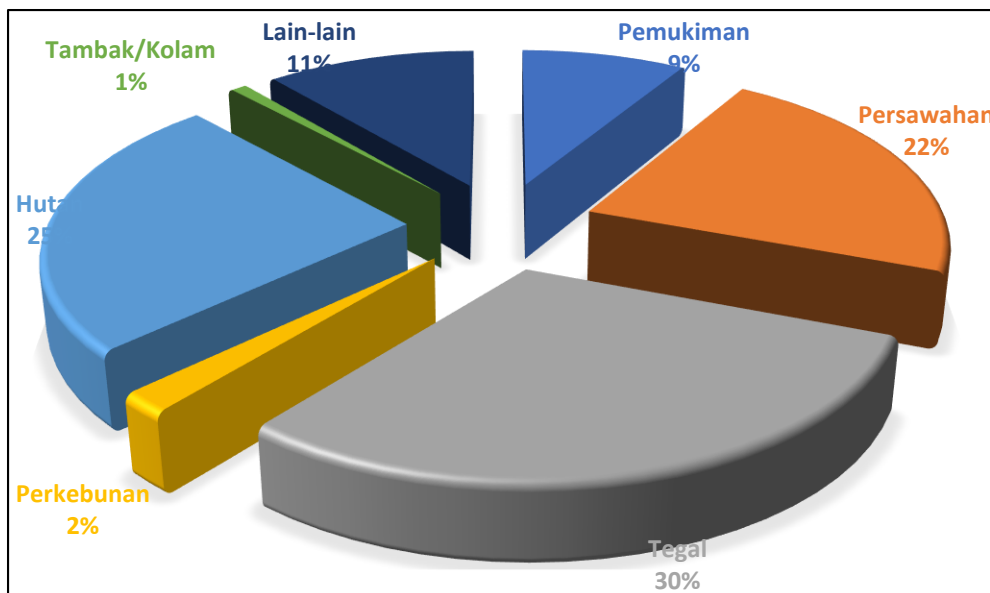
Gambar 2. 2
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Probolinggo



BABII-2

- 4) Perkebunan : 32,81 km²
5) Hutan : 426,46 km²
6) Tambak/Kolam : 13,99 km²
7) Lain-lain : 188,23 km²

Gambar 2. 3
Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo



Sumber : Probolinggokab.go.id

Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 24 Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.375 Dusun, 1.643 Rukun Warga (RW) dan 5.869 Rukun Tangga (RT) dengan pembagian luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kabupaten Per Kecamatan (km²)
Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sukapura	102,09	6,02
2.	Sumber	141,88	8,36
3.	Kuripan	66,75	3,94
4.	Bantaran	42,13	2,48
5.	Leces	36,81	2,17
6.	Tegalsiwalan	41,74	2,46
7.	Banyuanyar	45,70	2,69

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
8.	Tiris	165,67	9,77
9.	Krucil	202,53	11,94
10.	Gading	146,85	8,66
11.	Pakuniran	113,85	6,71
12.	Kotaanyar	42,58	2,51
13.	Paiton	53,28	3,14
14.	Besuk	35,04	2,07
15.	Kraksaan	37,80	2,23
16.	Krejengan	34,43	2,03
17.	Pajarakan	21,34	1,26
18.	Maron	51,39	3,03
19.	Gending	36,61	2,16
20.	Dringu	31,13	1,84
21.	Wonomerto	45,67	2,69
22.	Lumbang	92,71	5,47
23.	Tongas	77,95	4,60
24.	Sumberasih	30,25	1,78
Jumlah		1 696,17	100

Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2024

Secara astronomis, Kabupaten Probolinggo berada pada posisi 07°40'- 08°10' Lintang Selatan (LS) dan 112°50'-113°30' Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan:

1. Utara : Selat Madura
2. Barat : Kabupaten Pasuruan
3. Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
4. Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang

Sedangkan di sebelah utara bagian tengah terdapat daerah otonom yaitu Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo

Gambar 2. 4



Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo

B. Kondisi Topografi

Ditinjau dari aspek topografi, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung membujur dari Barat ke Timur, yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Tengger dan Gunung Lamongan. Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Menurut keadaan fisik wilayah bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- 1) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan
- 2) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan
- 3) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro.

Tabel 2. 2
Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)					Jumlah (Ha)
		0-25	25-100	100-500	500- 1000	>1000	
1	Sukapura	-	-	208,34	1.666,70	8.333,49	10.208,53
2	Sumber	-	-	150,62	3.898,15	10.139,36	14.188,13
3	Kuripan	-	137,27	4.324,01	1.870,30	343,18	6.674,76
4	Bantaran	-	2.948,98	1.263,85	-	-	4.212,83
5	Leces	-	2.439,20	1.241,77	-	-	3.680,97
6	Tegal Siwalan	357,18	2.073,48	1.742,90	-	-	4.173,56
7	Banyuanyar	92,25	2.859,91	1.617,47	-	-	4.569,63
8	Tiris	-	-	7.013,17	9.101,22	452,30	16.566,69
9	Krucil	-	-	3.039,40	7.497,18	9.716,08	20.252,66
10	Gading	-	2.569,81	6.450,75	2.989,38	2.674,70	14.684,64
11	Pakuniran	-	2.340,84	6.011,70	2.234,39	798,07	11.385,00
12	Kotaanyar	93,25	2.548,28	1.616,47	-	-	4.258,00
13	Paiton	4.535,35	792,59	-	-	-	5.327,94

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)					Jumlah (Ha)
		0-25	25-100	100-500	500- 1000	>1000	
14	Besuk	572,49	2.564,75	366,39	-	-	3.503,63
15	Kraksaan	3.739,11	40,64	-	-	-	3.779,75
16	Krejengan	2.268,22	1.174,62	-	-	-	3.442,84
17	Pajarakan	1.920,91	213,44	-	-	-	2.134,35
18	Maron	743,78	3.311,01	1.084,48	-	-	5.139,27
19	Gending	3.598,98	62,50	-	-	-	3.661,48
20	Dringu	2.943,71	169,83	-	-	-	3.113,54
21	Wonomerto	-	2.721,65	1.845,19	-	-	4.566,84
22	Lumbang	-	340,08	6.029,79	1.632,34	1.268,79	9.271,00
23	Tongas	1.761,64	3.764,73	2.268,83	-	-	7.795,20
24	Sumberasih	1.367,65	1.657,76	-	-	-	3.025,41
Jumlah (Ha)		23.994,52	34.731,37	47.542,92	30.889,66	32.457,18	169.616,65
Porsentase (%)		14,14	20,47	27,28	18,21	19,88	100

Sumber: Profil Kabupaten Probolinggo, 2024

Apabila dilihat dari kondisi kemiringan tanah per kecamatan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo (Ha)

No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
1	Sukapura	856,56	541,58	414,69	8.395,70	10.208,53
2	Sumber	-	349,89	1.858,58	11.979,66	14.188,13
3	Kuripan	616,29	5.908,05	150,42	-	6.674,76
4	Bantaran	2.807,70	1.158,21	201,10	45,82	4.212,83
5	Leces	1.834,57	1.846,40	-	-	3.680,97
6	Tegal Siwalan	2.790,49	1.348,00	35,07	-	4.173,56
7	Banyuanyar	1.716,98	2.816,67	8,88	27,10	4.569,63
8	Tiris	231,81	4.213,28	2.356,73	9.764,87	16.566,69
9	Krucil	-	197,87	8.164,83	11.889,96	20.252,66
10	Gading	727,29	5.315,90	1.368,53	7.272,92	14.684,64
11	Pakuniran	1.784,29	1.463,37	1.949,72	6.187,62	11.385,00
12	Kotaanyar	1.491,58	1.267,20	650,69	848,53	4.258,00
13	Paiton	4.411,57	557,10	219,03	140,24	5.327,94
14	Besuk	2.579,23	924,40	-	-	3.503,63

No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
15	Kraksaan	3.779,75	-	-	-	3.779,75
16	Krejengan	3.328,61	114,23	-	-	3.442,84
17	Pajajaran	2.134,35	-	-	-	2.134,35
18	Maron	3.567,63	1.493,06	78,58	-	5.139,27
19	Gending	3.001,48	660,00	-	-	3.661,48
20	Dringu	3.034,96	78,58	-	-	3.113,54
21	Wonomerto	2.317,50	1.942,50	222,00	84,84	4.566,84
22	Lumbang	2.317,50	2.256,87	2.690,67	2.185,95	9.271,00
23	Tongas	-	7.163,20	599,00	33,00	7.795,20
24	Sumberasih	2.920,41	105,00	-	-	3.025,41
Jumlah (Ha)		48.070,55	41.721,36	20.968,52	58.856,22	169.616,65
Porsentase (%)		28,34	24,60	12,36	34,69	100,00

Sumber: Kabupaten Probolinggo dalam Angka, 2024

C. Kondisi Geologi

1. Struktur dan Karakteristik

Struktur geografis Kabupaten Probolinggo terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan.

2. Potensi

Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750-2500 m di atas permukaan laut. Tanah yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150-750 m di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan

buah-buahan lainnya. Wilayah kecamatan yang sangat tepat untuk tanaman buah-buahan ini adalah Kecamatan Krucil dan Tiris.

3. Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan upaya sistematis untuk mengelola dan mengatur penggunaan ruang secara efektif dan berkelanjutan. Dengan mengikuti pedoman RTRW, wilayah dapat berkembang dengan cara yang harmonis, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Proses ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

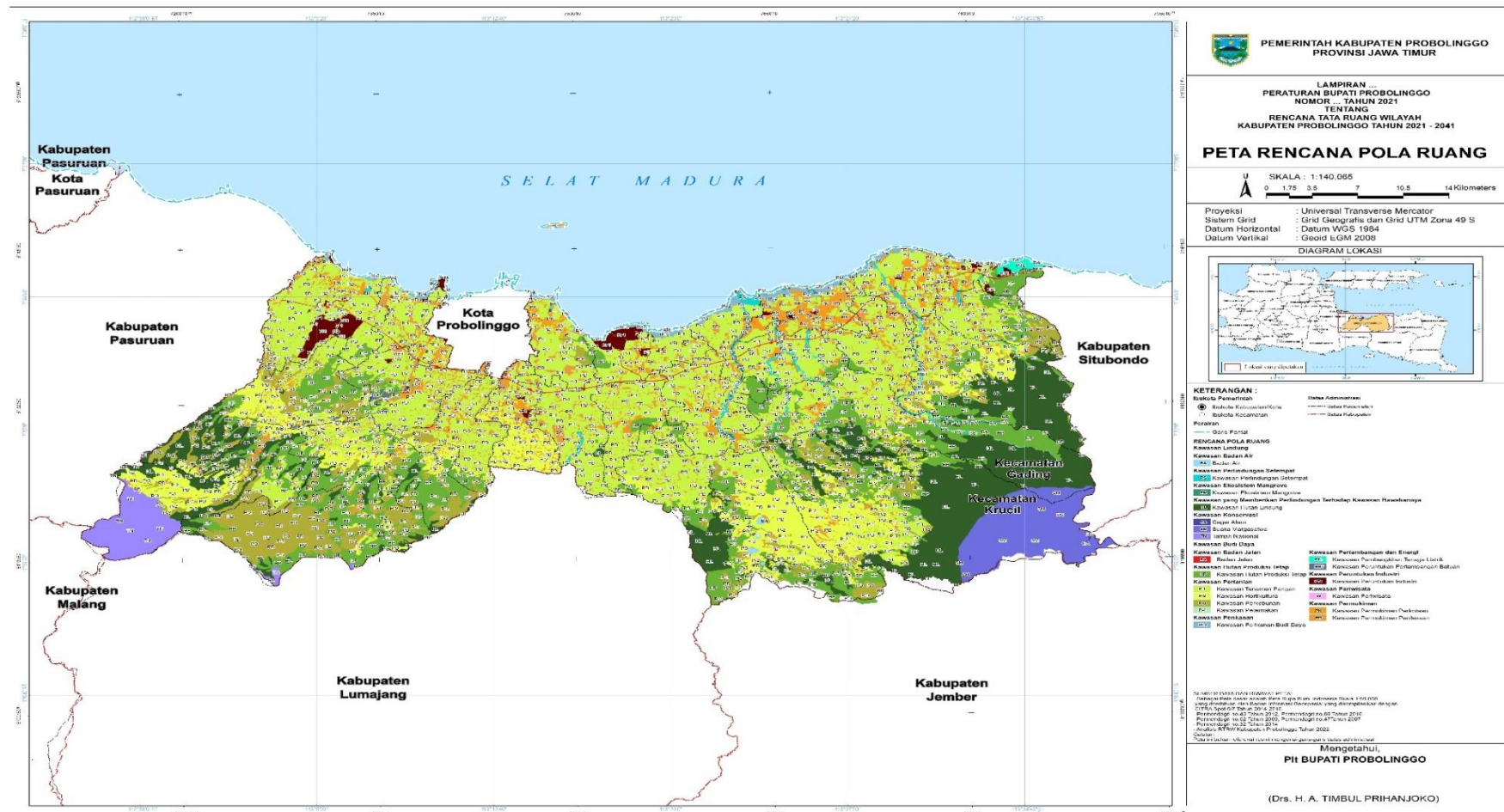
Tabel 2. 4
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW

Indikator	Satuan	Baseline 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	%	74	74,1	74,2	74,5	71	75

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, 2024

Kabupaten Probolinggo dalam penyesuaian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2022. Namun secara keseluruhan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik.

Gambar 2. 5
Peta Rencana pola Ruang



Sumber: RTRW Kabupaten Probolinggo

D. Kondisi Hidrologi

1. Daerah Aliran Sungai

Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Ranu Bujel dengan panjang 2 km. Hulu sungai-sungai tersebut kebanyakan berada di bagian tengah maupun selatan wilayah Kabupaten Probolinggo (merupakan daerah agak tinggi dan banyak terdapat hutan) yang bermuara di Selat Madura. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Probolinggo sebagian besar digunakan irigasi disamping untuk industri, air minum dan mandi cuci. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya.

2. Sungai, Danau, dan Rawa

Tabel 2. 5
Sungai di Kabupaten Probolinggo

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (M)	Debit Air (Minimum) (M ³ /detik)	Baku Lahan (Ha)
1	Rondoningo	95,20	26,00	± 200	3.36
2	Pandan Laras	43,50	26,00	± 1.300	2.85
3	Kertosono	39,70	25,00	± 100	570
4	Kandang Jati	8,00	8,00	± 100	507
5	Besuk	13,20	8,00	± 100-200	173
6	Jabung	20,50	8,00	± 300	465
7	Pancarlagas	85,70	50,00	± 200	3.3
8	Paiton	18,00	20,00	± 100	454
9	Kresek	24,50	25,00	± 100	786
10	Taman	24,10	12,00	± 5-10	240
11	Legundi	12,50	6,00		
12	Curah Manjangan	5,00	9,00	± 50	34

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (M)	Debit Air (Minimum) (M ³ /detik)	Baku Lahan (Ha)
13	Klumprit	12,50	12,00	± 50	53
14	Lumbang/ Bayeman	17,50	13,00	± 75	125
15	Blibis	20,00	15,00		
16	Blabo	10,00	10,00	± 50	213
17	Besi	15,50	15,00	± 5-10	183
18	Patalan/Spaser	22,50	18,00	± 50	72
19	Kedung Galeng	38,00	35,00	± 100	564
20	Banyubiru	11,00	18,00	± 300	697
21	Gending	20,00	20,00	± 300	149
22	Klaseman	11,00	15,00	± 100-200	128
23	Pekalen	35,10	35,00	± 3.300	6.98
24	Afour Bujel	2,00	5,00		
25	Laweyan	16,70	25,00	± 200	369

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedang yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya.

Tabel 2. 6
Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Ranu Segaran	30.00	Desa Segaran, Kec. Tiris
2.	Ranu Agung Segaran Agung	20.81	Desa Ranuagung, Kec. Tiris
3.	Ranu Segaran Duwas	23.00	Desa Tlogoargo, Kec. Tiris
4.	Ranu Merah	18.00	Desa Andungsari, Kec. Tiris
5.	Ranu Gedang	18.00	Desa Andung Sari, Kec. Tiris
6.	Ranu Betok	18.00	Kecamatan Tiris
7.	Ranu Wurung	25.00	Kecamatan Gading
8.	Danau Ronggojalu	2.50	Kecamatan Tegalsiwalan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m.

Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60m.

3. Debit Air

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m.

E. Kondisi Klimatologi

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Di antara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba, di mana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut "Angin Gending".

Sepanjang tahun 2023 rata-rata curah hujan per bulan terbanyak terjadi di bulan Januari, Maret dan November dengan rata-rata hari hujan perbulannya

diantara 13-15 hari. Secara rinci data tersebut dapat di lihat pada Tabel 2. 7 sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023

Bulan	Rata-rata Curah Hujan Per Bulan (mm)	Rata- rata Hari Hujan Per Bulan (hari)
Januari	324	13
Februari	175	10
Maret	344	15
April	85	5
Mei	169	8
Juni	198	9
Juli	22	1
Agustus	34	2
September	39	3
Oktober	141	8
November	255	13
Desember	179	9

Sumber: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2024

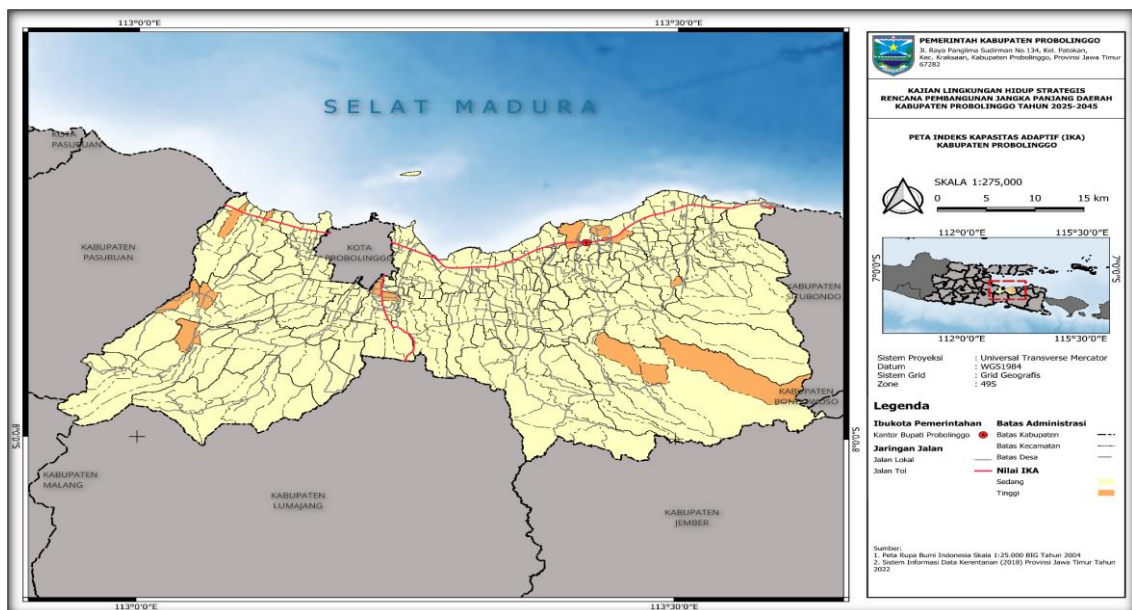
Anomali cuaca berfluktuatif yang terjadi di Kabupaten Probolinggo seperti hujan lebat disertai angin dan petir menjadikan banjir dan longsor menjadi ancaman, dampak pohon tumbang akibat angin kencang juga perlu diwaspadai mengingat beberapa waktu belakangan kejadian pohon tumbang tercatat berdampak hingga menyebabkan adanya korban. Melihat kondisi tersebut dihimbau bagi masyarakat untuk tetap berwaspada dan berhati-hati sebagai sikap antisipasi menghadapi dampak musim penghujan dan kondisi cuaca yang berubah-ubah.

Perubahan iklim dapat memberikan dampak bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, diantaranya adalah adanya penurunan kualitas udara dan peningkatan intensitas bencana. Perubahan iklim memiliki potensi ancaman timbulnya bencana yang didominasi oleh bencana banjir, longsor, dan puting beliung. Hal ini dikarenakan terjadinya musim kemarau basah yang meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Wilayah yang memiliki potensi ancaman lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya akibat adanya perubahan

iklim merupakan wilayah yang berpotensi memiliki tingkat polusi udara yang tinggi serta termasuk dalam wilayah rawan bencana.

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketika faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi geografi dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi dan pencegahan dampak perubahan iklim.

Gambar 2. 6
Peta Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) Kabupaten Probolinggo



Sumber : <http://sidik.menlhk.go.id/> Tahun 2022

Peta diatas menunjukan indeks kapasitas adaptif Kabupaten Probolinggo, skor indeks kapasitas adaptif di Kabupaten Probolinggo menunjukan rentang skor 0.327 – 0.679, dengan nilai tertinggi terdapat di Desa Sumberlele Kecamatan

Kraksaan sedangkan yang terendah di Desa Gunggungan Kidul Kecamatan Pakuniran. Rentang indeks kapasitas adaptif Kabupaten Probolinggo termasuk kedalam kategori sedang dan tinggi, hal ini dapat diartikan Kabupaten Probolinggo memiliki kemampuan tinggi atau cukup baik dalam menghadapi fenomena perubahan iklim. Indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks kapasitas adaptif antara lain ketersediaan fasilitas-utilitas listrik, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan (KLHK, 2015).

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo diantaranya:

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Adapun jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan adalah kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 8
Luas Peruntukan Kawasan Lindung (Ha) di Kabupaten Probolinggo

No	Pola Ruang Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kawasan Hutan Lindung	22.650,80	23,86
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:		
	a. Kawasan bergambut	-	-
	b. Kawasan resapan air	2.507,79	2,64
3	Kawasan perlindungan setempat:		0,00
	a. Sempadan pantai	1.087,622	1,15
	b. Sempadan sungai	2.507,794	2,64
	c. Kawasan sekitar danau atau waduk	237.906	0,25
	d. Kawasan sekitar mata air	899.208	0,95
	e. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal	-	-
	f. Kawasan perlindungan setempat lainnya		
	1) Sempadan rel kereta api	72.827	0,08
	2) Sempadan SUTET	0,003	0,00
	3) Hutan mangrove	209.31	0,22
4.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		
	a. Kawasan suaka alam	-	-
	b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya	-	-
	c. Hutan konservasi	11.052,31	11,64
	1) Suaka Margasatwa	7.452	7,85
	2) Taman nasional BTS (Bromo, Tengger, Semeru)	3.600,37	3,79
	d. Cagar alam	18,8	0,02
	e. Kawasan pantai berhutan bakau	258.459	0,27
	f. Taman hutan raya	-	-
	g. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut	-	-
	h. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	-	-
5.	Kawasan rawan bencana alam		
	a. Kawasan rawan tanah longsor	32.423,50	34,16
	b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir	1.461,07	1,54
	c. Kawasan rawan bencana alam lainnya		

No	Pola Ruang Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
	1) Abrasi pantai	596.742	0,63
6.	Kawasan lindung geologi		
	a. Kawasan cagar alam geologi	-	-
	b. Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah		
	1) Letusan Gunung Tipe A	3.165,45	3,33
	2) Letusan Gunung Tipe B	2.356,89	2,48
	3) Letusan Gunung Tipe C	2.364,95	2,49
	JUMLAH	94.923,80	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya berdasarkan Rencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 9
Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo

No	Pola Ruang Wilayah	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Kawasan Hutan Produksi	23.971,50	14,13
	a. Peruntukan Hutan Produk Terbatas	-	-
	b. Peruntukan Hutan Produksi Tetap	-	-
	c. Peruntukan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	-	-
2	Kawasan Hutan Rakyat	-	-
3	Kawasan Peruntukan Pertanian		
	a. Peruntukan Pertanian Lahan Basah	29.009,563	17,10
	b. Peruntukan Pertanian Lahan Kering	697,644	0,41
	c. Peruntukan Peruntukan Hortikultura	-	-
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	28.137,58	16,59
5	Kawasan Peruntukan Perikanan		
	a. Peruntukan Perikanan Tangkap	51.908,79	30,60
	b. Peruntukan Budi Daya Perikanan	1.996,76	1,18
	c. Peruntukan Kawasan Pengolahan Ikan	-	-
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan		
	a. Peruntukan Mineral dan Batu Bara	-	-
	b. Peruntukan Minyak dan Gas Bumi	-	-
	c. Peruntukan Panas Bumi	-	-
	d. Peruntukan Air Tanah di Kawasan Pertambangan	-	-
7	Kawasan Peruntukan Industri		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

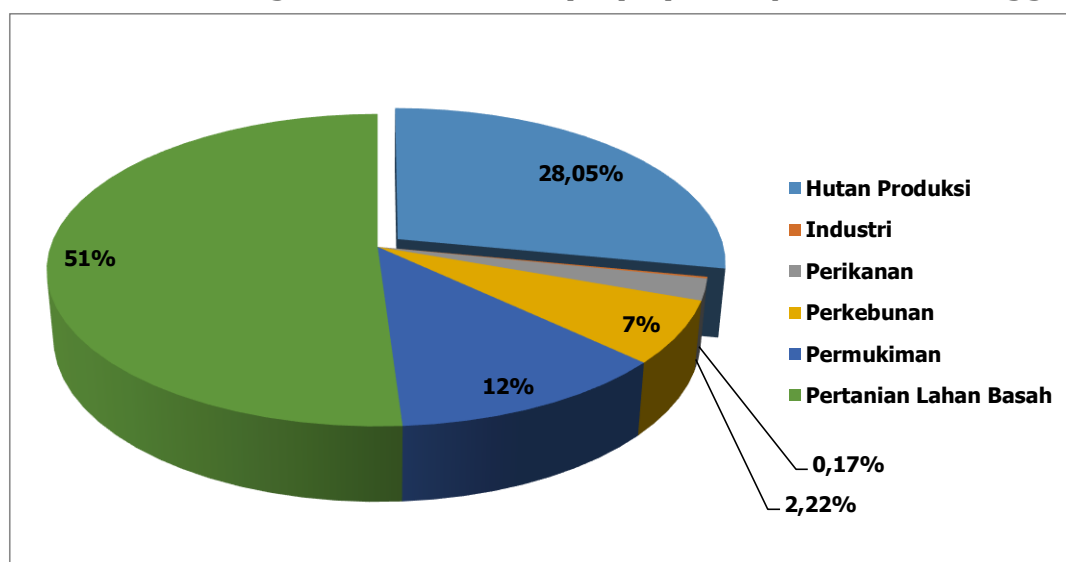
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No	Pola Ruang Wilayah	Luas (Ha)	Persentase(%)
	a. Peruntukan Industri Besar	77.801,00	0,05
	b. Peruntukan Industri Sedang	1.204,53	0,71
	c. Peruntukan Industri Rumah Tangga	-	-
8	Kawasan Peruntukan Pariwisata	-	-
9	Kawasan Peruntukan Permukiman		
	a. Peruntukan Permukiman Perkotaan	4.715,23	2,78
	b. Peruntukan Permukiman Perdesaan	12.052,56	7,11
10	Kawasan Peruntukan Lainnya		
	a. Kawasan Peternakan	-	-
	b. Kawasan Khusus	-	-
	c. Rencana Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir dan Pulau Giri Ketapang	-	-
	d. Kawasan Terbuka Hijau	13.368,75	7,88
	e. Lahan Cadangan	2.714,24	1,60
	JUMLAH	169.616,65	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo digunakan untuk perikanan tangkap (30.60%), pertanian lahan basah (17.10%), perkebunan (16,59%), serta kawasan hutan produksi (14,13%). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangun, baik di perkotaan dan perdesaan hanya meliputi 9,89% dari seluruh luas lahan. Berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020, kawasan budidaya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 7
Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (%) Kabupaten Probolinggo



Sumber: Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Probolinggo Th 2017

Adapun kebijakan yang melindungi keberadaan lahan pertanian telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Konversi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian terkait stabilitas pangan nasional. Peraturan ini juga menjadi salah satu bahan masukan yang harus diimplementasikan dalam peraturan tata ruang setempat.

Tabel 2. 10
Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo

No	Pola Ruang Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	27.331,3	28,05
2	Kawasan Peruntukan Industri	162,28	0,17
3	Kawasan Peruntukan Perikanan	2.160,85	2,22
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	6.326,6	6,49
5	Kawasan Peruntukan Permukiman	11.729,3	12,04
6	Pertanian Lahan Basah	49.735,5	51,04
JUMLAH		97.445,83	100,00

Sumber: Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanian lahan basah mendominasi kondisi eksisting kawasan budidaya di Kabupaten Probolinggo. Pembagian peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional harus disikapi secara positif oleh tiap-tiap pemerintah daerah, termasuk didalamnya adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Peran yang diemban oleh Kabupaten Probolinggo dalam hal ini adalah kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian beririgasi seluas $\pm 49.735,5$ Ha. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 – 2029. Oleh karena itu penting

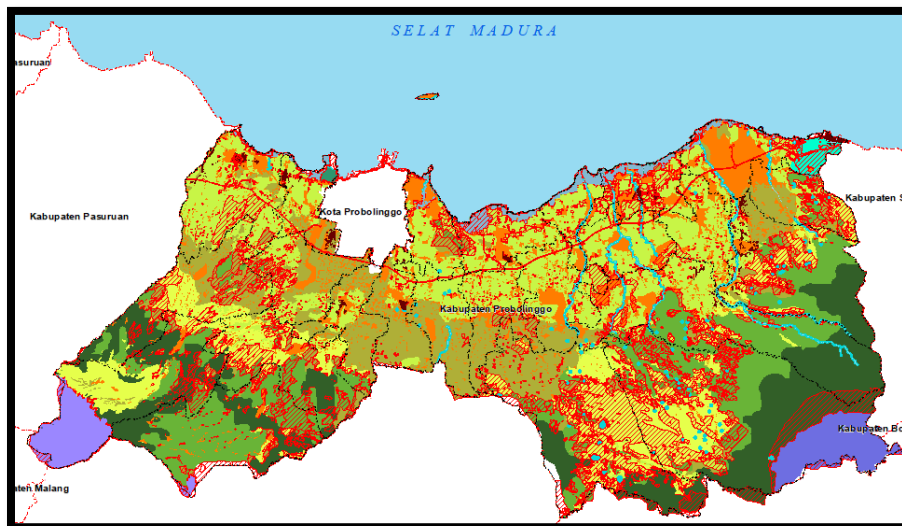
untuk segera menetapkan suatu kebijakan terhadap permasalahan yang akan mengancam keberadaan lahan pertanian pangan agar tetap berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo serta menjabarkan Perda RTRW dimaksud, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo.

3. Kawasan Alih Fungsi Lahan

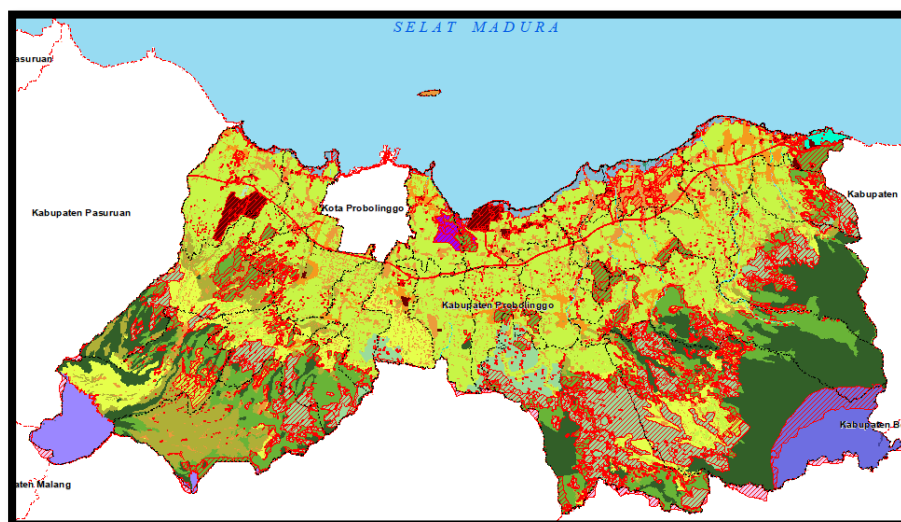
Alih fungsi lahan merupakan fenomena penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang memerlukan perhatian cermat terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Proses ini sering terjadi sebagai hasil dari kebutuhan pembangunan, perubahan ekonomi, atau pergeseran sosial. Pengelolaan yang bijaksana dan perencanaan yang baik diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan bahwa perubahan fungsi lahan mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel alih fungsi lahan di Kabupaten Probolinggo.

Gambar 2. 8
Peta Pola Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2011



Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo

Gambar 2. 9
Peta Pola Ruang Kabupaten Probolinggo Tahun 2024



Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo

Keterangan Peta Ruang Kabupaten Probolinggo

Kawasan Lindung	Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Badan Air	HPT Kawasan Hutan Produksi tetap
BA Badan Air	Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	KR Kawasan Perkebunan Rakyat
HL Hutan Lindung	Kawasan Pertanian
Kawasan Perlindungan Setempat	P1 Kawasan Tanaman Pangan
PS Kawasan Perlindungan Setempat	P-2 Kawasan Holtikultura
Kawasan Konservasi	P-3 Kawasan Perkebunan
CA Cagar Alam	P-4 Kawasan Peternakan
SM Suaka Margasatwa	Kawasan Perikanan
TN Taman Nasional	IK 2 Kawasan Perikanan Budidaya
Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Pembangkit Listrik
EM Kawasan Ekosistem Mangrove	PTL Kawasan Pembangkit Listrik
Kawasan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Badan Jalan	KPI Kawasan Peruntukan Industri
BJ Badan Jalan	Kawasan Pariwisata
	W Kawasan Pariwisata
	Kawasan Permukiman
	PK Kawasan Permukiman

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan alih fungsi lahan pada lahan pertanian basah khususnya pada sawah irigasi dan sawah tadah hujan di sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Luas lahan yang mengalami alih fungsi mencapai 55,07 persen atau 26.851,33 Ha dari total pertanian lahan basah. Adapun alih fungsi lahan pada tahun 2019 sebagian besar berubah menjadi area permukiman yang berada di 94 titik lokasi. Sementara itu sesuai dengan rancangan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024 – 2044 sebagian besar lahan akan dialihkan untuk menjadi kawasan pangan di sepanjang 108 titik lokasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan mengantisipasi kebutuhan pangan masa depan. Perubahan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan secara lebih efisien. Dengan mengalihkan lahan ke kawasan pangan, diharapkan akan terwujud sistem ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

G. Potensi Sumber Daya Alam dan Pengembangan Wilayah

Adapun potensi pengembangan wilayah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut.

- 1) Potensi kawasan hutan lindung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Cagar Alam Pegunungan Argopuro.
- 2) Potensi kawasan perdagangan dan jasa yaitu lebih dari sepuluh buah pasar yang terdiri dari sepuluh jenis pasar (pasar buah, pasar sayur, pasar buah-sayur, pasar hewan, pasar hewan dan umum, pasar induk, pasar ikan/daging, pasar palawija, pasar pelelangan ikan, pasar sayur, dan pasar umum), potensi pasar Semampir yang ada di Kecamatan Kraksaan dan pasar kelas II yaitu 3 unit yaitu Pasar Maron, Pasar Leces, dan Pusat Perbelanjaan Kraksaan, potensi Pasar Bawang merah di Dringu.
- 3) Potensi kawasan pertambangan dan energi berupa PLTU Paiton sebagai salah satu sumber energi listrik Jawa-Bali dan pertambangan gas bumi terbesar di Jawa Timur yang terdapat di kawasan pegunungan Hyang/ pegunungan Argopuro.

- 4) Potensi kawasan industri kecil, industri kerajinan dan industri menengah. Potensi industri kecil dan kerajinan antara lain: industri konvensi di Tongas, industri kerajinan meubel di Tongas dan Dringgu. Potensi industri menengah dan pergudangan di sepanjang jalur Pantura terutama di Tongas, Dringu dan Paiton.
- 5) Potensi kawasan pariwisata berupa kawasan pariwisata alam (antara lain: Gunung Bromo, Pantai Bentar, Arung Jeram Sungai Pekalen dan Pulau Giliketapang) dan pariwisata budaya (antara lain: candi, Upacara Adat Kasodo, Upacara Larung Sesaji, Tarian Kuda Kecak, Tari Glipang).
- 6) Potensi kawasan perikanan antara lain kawasan perikanan darat (perikanan kolam dan keramba di Kecamatan Paiton, Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas dan Sumberasih). Potensi kawasan perikanan laut di Kecamatan Paiton, Krakasan, Pajarakan, Gending, Dringu, Tongas, Sumberasih.
- 7) Potensi kawasan perkebunan sebagian besar terdapat di wilayah bagian selatan yaitu: tanaman semusim (antara lain: tembakau, tebu, jarak, kapas, jahe) dan tanaman tahunan (antara lain: kelapa, kopi, aren, asem, cengkeh, lada, kapuk randu, jambu mente, pinang)
- 8) Potensi kawasan pertanian tanaman pangan pada umumnya terdapat di wilayah utara (misalnya: padi jagung, kedelai, kacang tanah) dan tanaman hortikultura pada umumnya terdapat di wilayah selatan (misalnya: kentang, kobis dan cabe, durian dan mangga).
- 9) Potensi kawasan peternakan sebagian besar terdapat di wilayah selatan antara lain: ternak besar (sapi, kuda, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi) dan unggas (ayam ras, ayam kampung, itik, entok, kelinci).
- 10) Potensi kawasan militer TNI AL di Paiton sebagai kawasan khusus untuk pertahanan dan keamanan.

H. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam. Penetapan kawasan rawan bencana bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh

perbuatan manusia meliputi rawan letusan gunung berapi, kawasan gerakan tanah longsor, rawan banjir, daerah rawan abrasi pantai, dan rawan angin ribut. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam. Beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai berikut:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

Tabel 2. 11
Wilayah Rawan Bencana

No	Nama Bencana	Lokasi	Peraturan Daerah tentang Kebencanaan	Keterangan
1.	Letusan Gunung Berapi	Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sukapura, dan Kecamatan Tiris	Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang	1. Terdapat dua gunung berapi yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan 2. Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. 3. Daerah rawan bencana luas kurang lebih 7.887 ha
2.	Gerakan Tanah (Longsor)	1. Tipologi Gerakan Tertinggi : Daerah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris. 2. Kawasan Rawan longsor : Kecamatan Krejengan, Kecamatan Gading, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Besuk, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Paiton dan Kecamatan Kutoanyar, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Kuniran dan Kecamatan Tiris 3. Rawan Gerakan Tanah : Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Gading	Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang	1. Tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. 2. Daerah rawan bencana luas kurang lebih 32.423 Ha
3.	Banjir	Kecamatan Sukapura, Kecamatan Lumbang,	Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo	Daerah Rawan Bencana luas kurang lebih 1.461 Ha

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No	Nama Bencana	Lokasi	Peraturan Daerah tentang Kebencanaan	Keterangan
		Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gading, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Sumber, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kotanyar, Kecamatan Wonokerto, Paiton dan Tegalsiwalan	Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang	
4.	Abrasi Pantai	Seluruh Kawasan pesisir di Kabupaten Probolinggo	Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang	1. Faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, diantaranya yang sangat dominan adalah ketahanan pantai dalam menghadapi gelombang air laut. 2. Salah satu ekosistem pantai yang berperan dalam menciptakan ketahanan pantai adalah keberadaan hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai 3. Daerah Rawan Bencana luas kurang lebih 71,893 Km
5.	Angin Ribut	Kecamatan Lumbang dan angin puyuh di Kecamatan Krucil.	Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang	Daerah Rawan Bencana luas kurang lebih 597 Ha

Sumber : Disarikan dari beberapa sumber peraturan

Tabel 2. 12
Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo

No.	Kemiringan	Luas Kawasan (Ha)	Persen (%)
1	0 - 2 %	48.070,55	28,34
2	2 – 15 %	41.721,36	24,59
3	15 – 40 %	20.968,52	12,36
4	> 40 %	58.856,22	34,69
Jumlah		169.616,65	100

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Dari tabel 2.12 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga telah diatur jelas terkait ketentuan umum zonasi untuk kawasan bencana, diantaranya:

a. Zonasi untuk kawasan rawan longsor

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

- (1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- (2) Mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
- (4) Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;

- (5) Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
- (6) Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- (7) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

b. Zonasi untuk kawasan rawan banjir

Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

- (1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- (2) Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
- (3) Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
- (4) Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
- (5) Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- (6) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- (7) Penetapan batas dataran banjir;
- (8) Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- (9) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

c. Zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai

Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

- (1) Pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan;
- (2) Pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.

d. Zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi

Untuk kawasan rawan letusan gunung berapi, ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
- (2) Menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
- (3) Dalam peruntukan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi harus memperhitungkan tingkat risiko;
- (4) Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan letusan gunung berapi dengan tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan fungsi lindungnya.

Tabel 2. 13
Arahan Ketentuan Perijinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Disinsentif dan Arahan Sanksi pada Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo

Kawasan	Arah Kegiatan		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Disinsentif dan Arahan Sanksi
	Diizinkan	Dilarang/ Diizinkan dengan Syarat		
Rawan Bencana banjir	Pembangunan saluran drainase dan kegiatan pencegahan bencana banjir.	Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
		Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya.		
Rawan bencana erosi/longsor		Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
Rawan Bencana Gunung Api	Pada zona waspada dan zona siaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenankan adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan.	Zona bahaya dan zona waspada ditetapkan sebagai daerah tertutup bagi permukiman penduduk. Bila terdapat permukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
	Pada zona siaga masih diperkenankan adanya permukiman, namun perlu selalu			

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

Kawasan	Arah Kegiatan		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Disinsentif dan Arahan Sanksi
	Diizinkan	Dilarang/ Diizinkan dengan Syarat		
	waspada dan siap mengadakan pengungsian apabila sewaktu-waktu gunung berapi menunjukkan aktifitas yang membahayakan			
	Bangunan pengamat aktifitas gunung berapi dan bangunan yang mendukung mitigasi bencana			

Sumber: Perda Kabupaten Probolinggo No 3 Tahun 2011 Tentang RTRW

Jenis bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 dan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo antara lain banjir, banjir bandang, karhutlah, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, letusan gunung berapi dan gempa bumi. Pada tahun 2023, telah terjadi 91 kejadian bencana yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Adapun wilayah terdampak paling parah adalah Tongas, Lumbang, Sukapura, Kotaanyar, dan Pakuniran dengan >7 kejadian. Adapun kejadian bencana di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14
Kejadian dan Dampak Bencana yang Terjadi di Kabupaten Probolinggo

Kejadian dan Dampak Bencana yang Terjadi di Kabupaten Probolinggo					
No	Kejadian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Kejadian Bencana				
	a. Gempa Bumi Dirasakan	kejadian	1	1	-
	b. Kebakaran Hutan & Lahan	kejadian	2	-	19
	c. Banjir/Genangan	kejadian	24	43	20
	d. Cuaca Ekstrem	kejadian	25	34	13
	e. Tanah Longsor	kejadian	49	58	36
	f. Gelombang Ekstrem & Abrasi	kejadian	4	14	-
	g. Laka/Musibah	kejadian	1	9	1
	h. Kekeringan/Krisis Air Bersih	kejadian	1	-	1
i. Pandemi COVID-19	kejadian	1	1	1	
2	Dampak Kejadian Bencana				
	A. Terhadap Populasi				
	a. Meninggal dunia	jiwa	2	10	12
	b. Hilang	jiwa	6	1	
	c. Menderita dan Terluka	jiwa		51	1
	d. Menderita dan Mengungsi	jiwa	261	2.765	175.771
	e. Positif COVID-19	jiwa	7.212	9.222	9.360
	B. Terhadap Infrastruktur				
	a. Rumah Tergenang	rumah	11.239	11.282	2.583
	b. Rumah Rusak Berat	rumah	36	15	7
	c. Rumah Rusak Sedang	rumah	36	24	6
	d. Rumah Rusak Ringan	rumah	49	390	40
	e. Pohon Tumbang	pohon	45	236	20
	f. Lahan Rusak Akibat Bencana	hektar	166,00	91,15	1.113,79
	g. Infrastruktur Rusak	bangunan	46	47	28
	1. Rusak ringan	bangunan	14	21	23
2. Rusak sedang	bangunan	13	15	3	

No	Kejadian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
	3. Rusak Berat	bangunan	19	11	2
	h. Fasilitas Pendidikan Rusak	bangunan	2	7	3
	i. Fasilitas Umum/Sosial Rusak	bangunan	2	10	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2024

Dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana utamanya di lingkungan Sekolah/Madrasah sewilayah Kabupaten Probolinggo dan juga demi menumbuhkan kesadaran masyarakat di lingkungan sekolah, perlu diadakannya Sekolah/Madrasah yang tanggap dan aman terhadap bencana (SMAB). Berikut merupakan jumlah SMAB yang tersebar berdasarkan kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 2. 15
Jumlah SMAB Kabupaten Probolinggo

Kecamatan	Jumlah SPAB terbentuk
Tongas	0
Sumberasih	0
Dringu	1
Gending	1
Pajarakan	0
Kraksaan	1
Paiton	0
Kotaanyar	0
Pakuniran	1
Besuk	1
Krejengan	0
Maron	0
Banyuanyar	0
Tegalsiwalan	1
Leces	1
Bantaran	0
Kuripan	0
Wonomerto	0
Lumbang	1
Sukapura	1
Sumber	1
Tiris	1
Krucil	1
Gading	0
Total	9

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

Sebaran risiko berdasarkan jenis bencana alam yang berpotensi tinggi mengancam wilayah Kabupaten Probolinggo selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Banjir

Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering, akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada (BNPB).

Daerah yang risiko bencana banjir di Kabupaten Probolinggo umumnya terjadi pada kawasan permukiman yang berdekatan dengan Sungai dan berada pada Kawasan yang padat penduduk ataupun aktivitas masyarakat. Untuk mengetahui sebaran daerah risiko banjir dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

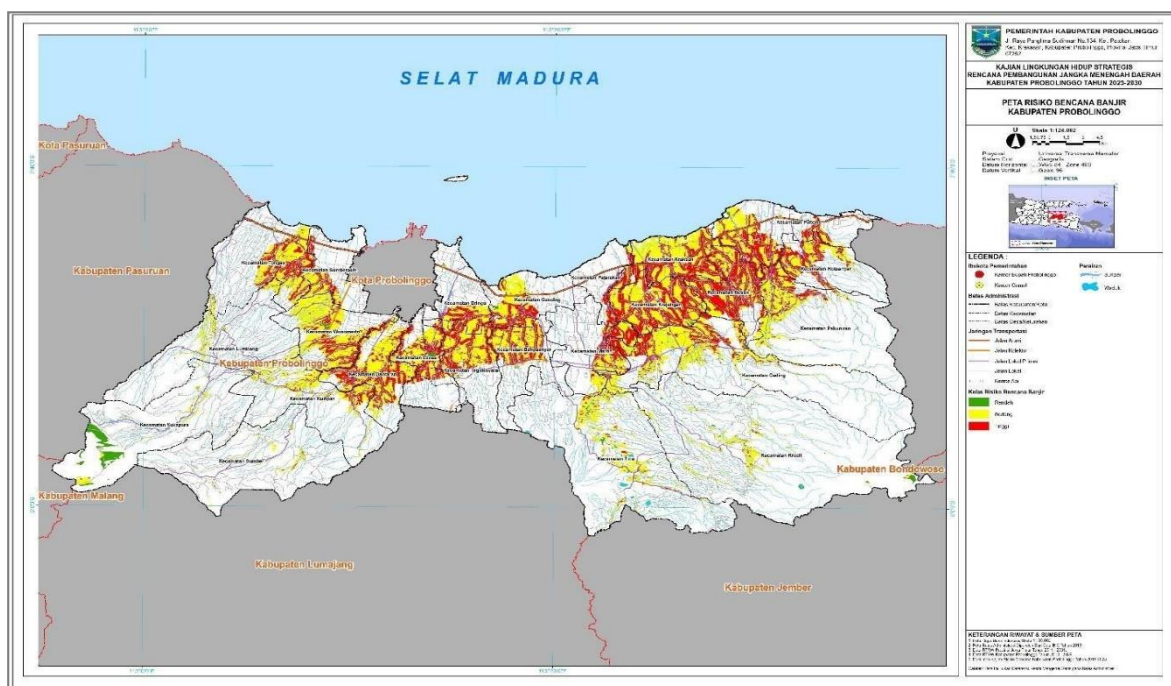
Tabel 2. 16
Sebaran Risiko Banjir

Kecamatan	Luas Risiko Banjir			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bantaran	8,38	1776,58	1392,65	3177,61
Banyuwanyar	6,48	982,28	809,26	1798,03
Besuk	36,61	1177,48	2064,72	3278,81
Dringu	1,94	515,9	481,53	999,37
Gading	109,08	2744,28	1306,38	4159,73
Gending	42,06	868,72	661,39	1572,17
Kota Anyar	21,06	740,8	799,22	1561,08
Kraksan	81,41	1954,33	1523,56	3559,3
Krejengan	83,96	1706,36	2030,81	3821,14
Krucill	118,07	1049,52	81,37	1248,95
Kuripan	11,33	1261,76	358,84	1631,93
Leces	52,59	848,91	853,31	1754,81
Lumbang	10,97	553,04	63,86	627,88
Maron	39,51	803,6	698,88	1541,99
Paiton	62,54	1189,09	1349,57	2601,2
Pajarak	13,1	82,02	285,18	380,3
Pakuniran	102,7	1472,89	748,2	2323,78
Sukapura	478,84	357,16	14,63	850,63
Sumber	16,31	304,21	28,27	348,8

Kecamatan	Luas Risiko Banjir			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Sumberasih	2,26	455,58	407,57	865,41
Tegalsiwalan	6,06	1125,02	1048,33	2179,41
Tiris	123,07	1588,79	223,53	1935,39
Tongas	16,26	1511,13	1054,67	2582,05
Wonomerto	30,09	2283,01	909,47	3222,56
Grand Total	1474,7	27352,46	19195,19	48022,34

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

Gambar 2. 10
Peta Kawasan Risiko Bencana Banjir Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai (BNPB). Daerah yang risiko bencana banjir di Kabupaten Probolinggo umumnya terjadi pada kawasan permukiman yang berdekatan dengan Sungai. Untuk mengetahui sebaran daerah yang memiliki risiko bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2. 17
Sebaran Risiko Banjir Bandang

Kecamatan	Luas Risiko Banjir			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Besuk	20,87	48,28	5,88	75,04
Gading	77,35	304,86	320,42	702,63
Kota Anyar	1,02	15,11	30,03	46,16
Kraksan	45,66	122,3	104,26	272,22
Krejengan	72,79	213,95	255,14	541,88
Krucill	23,23	149,4	263,9	436,53
Kuripan	2,63	31,55	96,33	130,51
Lumbang	2,94	75,59	173,95	252,49
Maron	22,62	32,27	56,13	111,03
Paiton	40,76	165,15	189,05	394,96
Pajarakan	26,91	71,88	72,32	171,11
Pakuniran	86,94	329,31	269,18	685,43
Sukapura	19,76	125,98	197,69	343,43
Sumber		2,56	30,29	32,85
Sumberasih	7,43	99,86	69,04	176,33
Tiris	18,49	58,97	118,19	195,65
Tongas	0,93	14,15	44,12	59,2
Wonomerto	9,88	125,44	127,23	262,55
Grand Total	480,22	1986,62	2423,16	4890

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

Gambar 2. 11
Peta Kawasan Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB). Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta,2008). Daerah yang memiliki kerawanan kebakaran yaitu Kabupaten Probolinggo didominasi pada dengan vegetasi tinggi dan terbangun. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan persebaran wilayah yang memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

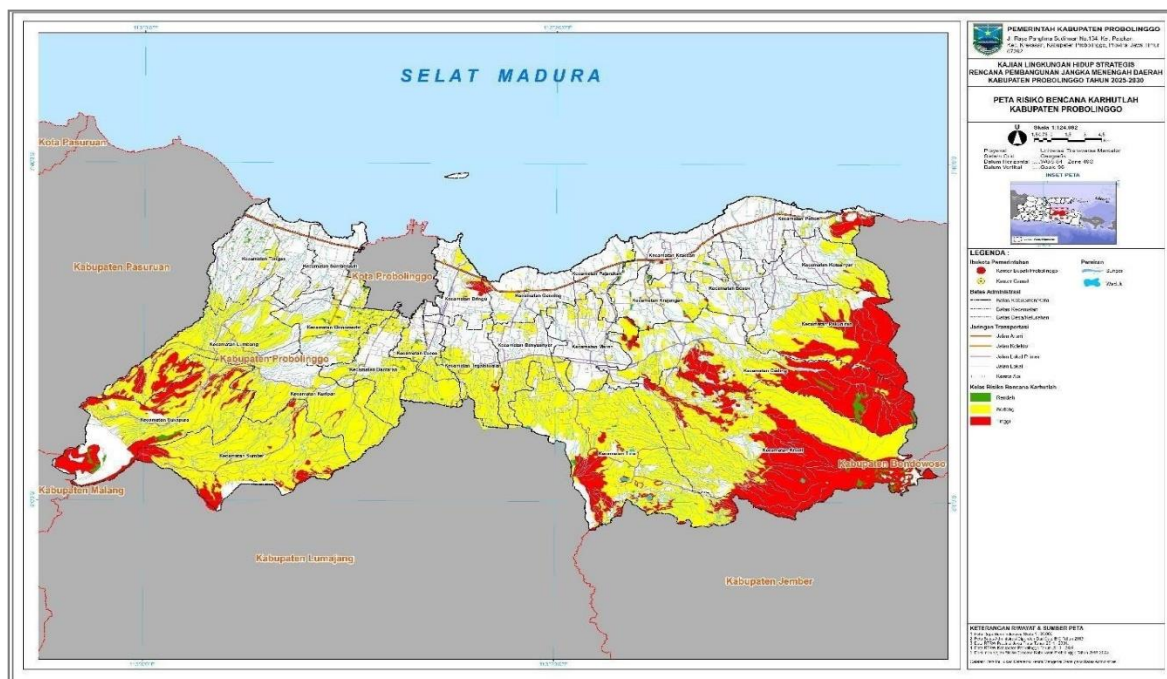
Tabel 2. 18
Sebaran Risiko Kebakaran Hutan

Kecamatan	Luas Risiko Kebakaran Hutan			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bantaran	100,89	2716,88	0	2817,77
Banyuwangi	44,02	1875,21	2,19	1921,42
Besuk	32,86	470,87	0	503,73
Dringu	14,6	339,96	184,5	539,06
Gading	377,38	3520,5	6565,78	10463,66
Gending	14,47	371,83	57,36	443,66
Kota Anyar	15,73	1414,79	155,23	1585,75
Kraksaan	79,59	198,05	0	277,64
Krejengan	87,18	680,17	35,12	802,48
Krucill	302,52	11570,41	10013,15	21886,08
Kuripan	36,36	5838,12	123,34	5997,81
Leces	109,83	2283,11	0	2392,94
Lumbang	79,51	5501,31	1053,48	6634,31
Maron	30,27	906,17	87,58	1024,03
Paiton	41,3	379,74	482,2	903,24
Pajarakan	28,16	256,98	0	285,14
Pakuniran	83,16	3330,83	4115,74	7529,74
Sukapura	256,95	5873,56	2666,08	8796,58

Sumber	82,81	8813,39	1233,26	10129,46
Sumberasih	44,7	176,44	0	221,14
Tegalsiwalan	57,53	2239,21	30,83	2327,57
Tiris	146,94	11303,6	2186,38	13636,92
Tongas	203,82	732,49	0	936,31
Wonomerto	177,1	2044,75	0	2221,85
Grand Total	2447,67	72838,37	28992,22	104278,25

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

Gambar 2. 12
Peta Kawasan Risiko Bencana Karhutla Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

4. Kekeringan

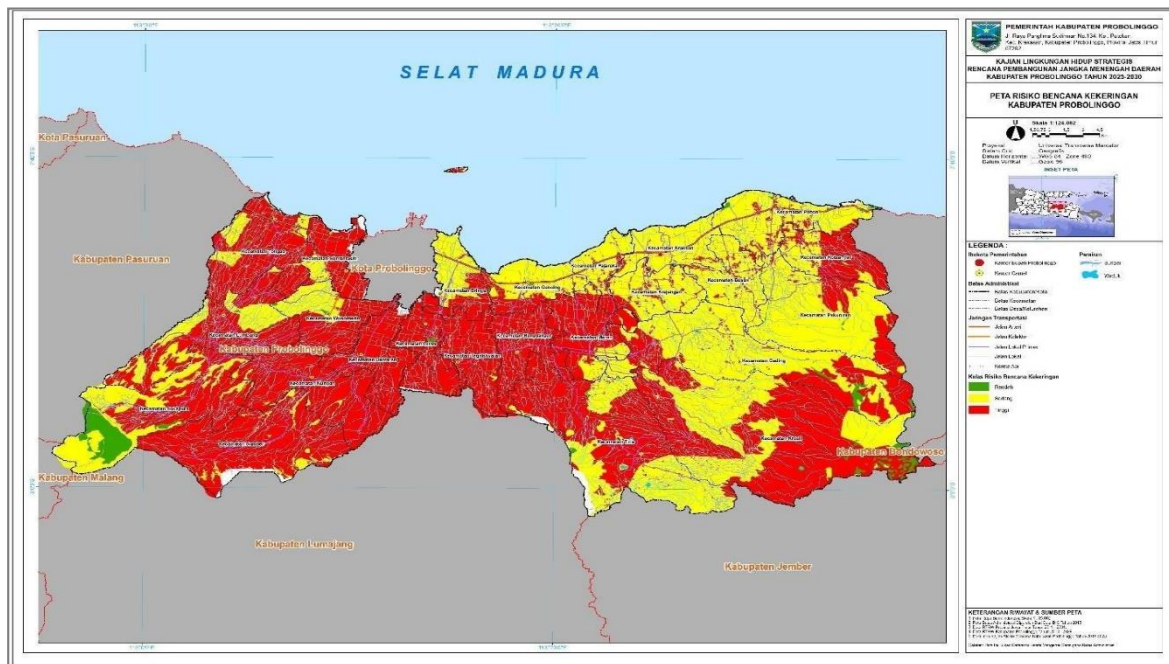
Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan (BNPB). Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan persebaran wilayah yang memiliki risiko kekeringan dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 2. 19
Sebaran Risiko Kekeringan

Kecamatan	Luas Risiko Kekeringan			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bantaran	52,03	0	4369,49	4421,52
Banyuanyar	52,51	52,47	4196,75	4301,74
Besuk	87,8	3324,56	398,66	3811,02
Dringu	68,8	1958,32	1231,29	3258,41
Gading	466,18	9690,84	4530,37	14687,38
Gending	87,5	2596,58	1084,87	3768,95
Kota Anyar	64,97	1387,8	2594,8	4047,57
Kraksan	120,16	3450,02	166,97	3737,16
Krejengan	100,06	3086,73	720,36	3907,15
Krucill	532,97	9017,32	14439,56	23989,85
Kuripan	36,75	183,26	7400,56	7620,58
Leces	97,28	2,39	3748,57	3848,24
Lumbang	81,42	2799,86	5801,1	8682,38
Maron	87,67	1015,69	4010,41	5113,77
Paiton	221,4	4617,98	814,09	5653,48
Pajarakan	64,6	1693,51	502,29	2260,4
Pakuniran	144,95	8272,19	2124,32	10541,46
Sukapura	1515,65	4373,64	5392,57	11281,86
Sumber	40,24	653,69	9800,55	10494,48
Sumberasih	48,96	465,26	2668,69	3182,91
Tegalsiwalan	53,87	31,28	4329,85	4415,01
Tiris	205,94	6262,82	9207,26	15676,02
Tongas	135,65	1017,72	6234,54	7387,92
Wonomerto	92,31	1634,9	3096,6	4823,81
Grand Total	4459,7	67588,83	98864,53	170913,07

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

Gambar 2. 13
Peta Kawasan Risiko Bencana Kebakaran Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

5. Cuaca Ekstrem

Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menyebutkan bahwa cuaca ekstrim berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana, yaitu meliputi kejadian angin tornado, badai siklon tropis dan angin puting beliung.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan persebaran wilayah yang memiliki risiko bencana cuaca ekstrem dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

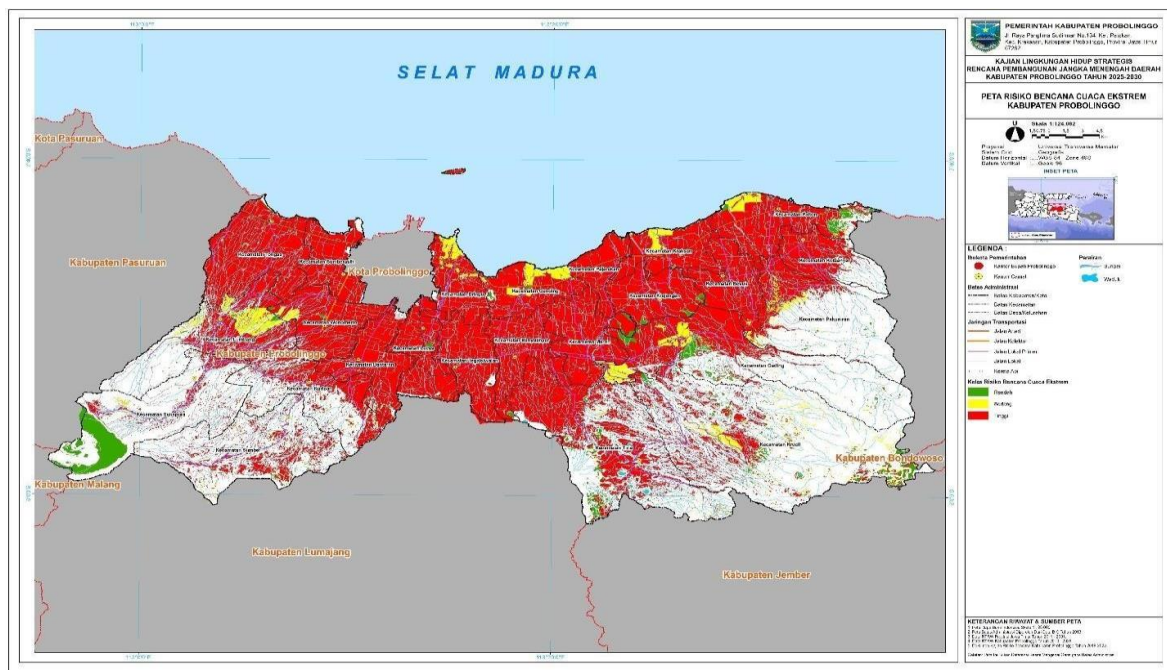
Tabel 2. 20
Sebaran Risiko Cuaca Ekstrem

Kecamatan	Luas Risiko Cuaca Ekstrem			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bantaran	32,22	24,12	4215,65	4271,99
Banyuwanyar	62,56	0,49	4197,99	4261,04
Besuk	58,43	24,11	3722,27	3804,81
Dringu	51,44	397,04	2797,66	3246,14
Gading	691,88	899,05	4899,75	6490,68
Gending	109,57	674,93	2959,52	3744,02

Kecamatan	Luas Risiko Cuaca Ekstrim			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kota Anyar	44,24	28,13	2679,22	2751,59
Kraksan	115,26	324,13	3308,13	3747,51
Krejengan	195,94	1,11	3683,01	3880,05
Krucill	740,22	964,37	3665,3	5369,89
Kuripan	26,71	88,48	3152,98	3268,17
Leces	74,8	0,1	3747,38	3822,28
Lumbang	113,32	980,38	3501,97	4595,68
Maron	150,21	4,48	4856,33	5011,03
Paiton	453,19	400,22	4402,29	5255,7
Pajarakan	57	0,45	2227,16	2284,61
Pakuniran	192,04	396,04	2406,88	2994,95
Sukapura	1600,19	68,07	1027,24	2695,51
Sumber	87,9	108,46	2210,01	2406,37
Sumberasih	36,68	0	3191,66	3228,34
Tegalsiwalan	37,16	0,08	4286,81	4324,06
Tiris	524,09	168,68	7525,3	8218,07
Tongas	106,84	15,04	7148,13	7270,01
Wonomerto	74,44	149,31	4506,46	4730,21
Grand Total	5636,33	5717,27	90319,11	101672,71

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

Gambar 2. 14
Peta Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

6. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan guncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunungapi akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit (misalnya meteor dan asteroid), dan/atau ledakan bom akibat ulah manusia (BNPB). Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan persebaran wilayah yang memiliki risiko bencana Gempa Bumi dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

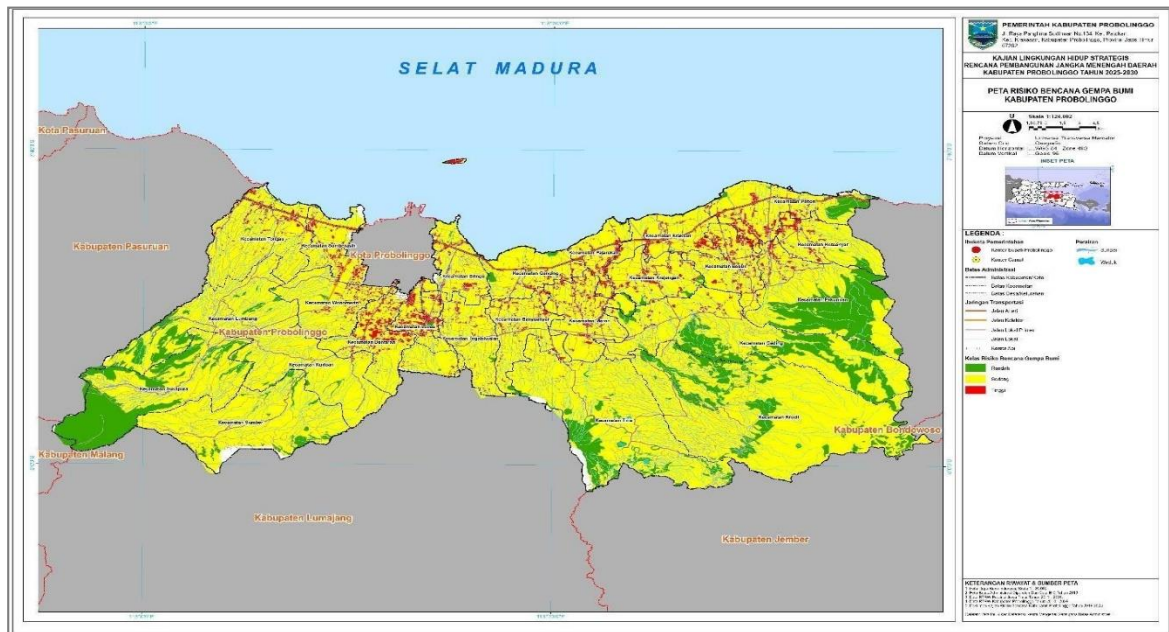
Tabel 2. 21
Sebaran Risiko Gempa

Kecamatan	Luas Risiko Gempa Bumi			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bantaran	18,6	3656,35	752,09	4427,04
Banyuwang	70,98	3887,15	343,6	4301,74
Besuk	50,42	3201,15	559,44	3811,02
Dringu	88,73	2886,54	302,76	3278,03
Gading	4055,2	10431,19	207,62	14694,02
Gending	178,21	3398,94	232,72	3809,88
Kota Anyar	205,41	3508,63	343,61	4057,65
Kraksan	122,08	3271,35	394,88	3788,31
Krejengan	195,3	3279,34	432,52	3907,15
Krucill	3702,96	20325,7	0	24028,66
Kuripan	199,09	7406,79	18,82	7624,7
Leces	72	3155,42	630,26	3857,68
Lumbang	1407,09	7295,48	0,64	8703,2
Maron	148,23	4384,23	581,31	5113,77
Paiton	748,22	4325,6	661,82	5735,64
Pajarakan	58,23	1906,92	335,64	2300,78
Pakuniran	4484,8	5802,51	277,08	10564,39
Sukapura	5192,77	6101,99	0	11294,76
Sumber	680,18	9831,54	0	10511,71
Sumberasih	26,65	2700	514,82	3241,47
Tegalsiwalan	57,63	4134,55	223,92	4416,1
Tiris	2357,17	13309,29	39,97	15706,42
Tongas	93,08	6845,38	493,87	7432,33
Wonomerto	64,34	4443,5	325,22	4833,06

Kecamatan	Luas Risiko Gempa Bumi			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Grand Total	24277,36	139489,53	7672,61	171439,5

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo

Gambar 2. 15
Peta Kawasan Risiko Bencana Gempa Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

7. Gelombang Tinggi

Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras (BNPB).

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan persebaran wilayah yang memiliki risiko bencana Gelombang dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 2. 22
Sebaran Risiko Gelombang

Luas Risiko Gelombang				
Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
Kecamatan Dringu	26,06	94,35	10,49	130,9
Kecamatan Kraksan	20,69	121,23	0,08	142
Kecamatan Gending	31,1	136,49	3,51	171,1
Kecamatan Paiton	60,08	174,69	93	327,77
Kecamatan Pajarakan	20,69	120,32	4,46	145,47
Kecamatan Sumberasih	11,29	151,39	44,21	206,9
Kecamatan Tongas	27,87	94,25	1,14	123,27
Grand Total	197,8	892,72	156,89	1247,41

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

Gambar 2. 16
Peta Kawasan Risiko Bencana Gelombang Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

8. Letusan Gunung Api

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar (BNPB).

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan persebaran wilayah yang memiliki risiko bencana Letusan gunung api dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 2. 23
Sebaran Risiko Letusan Gunung Api

Kecamatan	Luas Risiko Letusan Gunung Api		Total (Ha)
	Rendah	Sedang	
Kecamatan Lumbang	45,48	0	45,48
Kecamatan Sukapura	3487,55	1528,76	5016,32
Kecamatan Sumber	148,06	0	148,06
Kecamatan Tiris	4912,86	820,35	5733,21
Grand Total	8593,96	2349,12	10943,07

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

Gambar 2. 17
Peta Kawasan Risiko Bencana Letusan Gunung Api
Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

9. Longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun

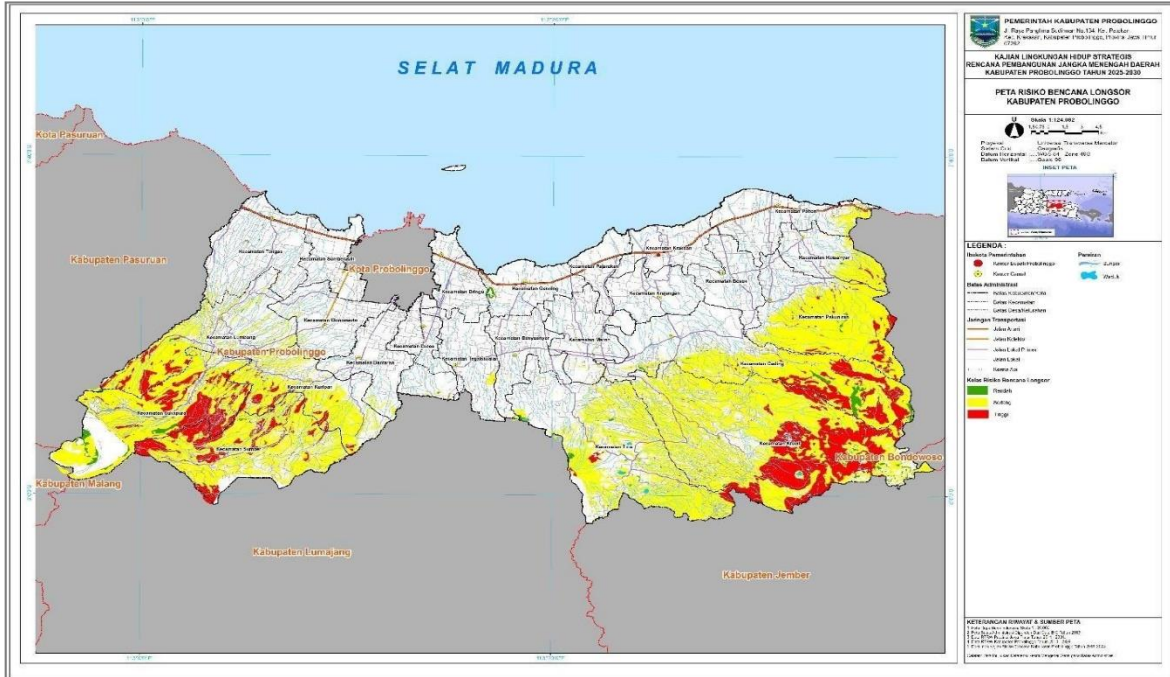
lereng (BNPB). Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan persebaran wilayah yang memiliki risiko bencana Longsor dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini:

Tabel 2. 24
Sebaran Risiko Longsor

Kecamatan	Luas Risiko Longsor			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bantaran	3,24	148,66	0	151,91
Banyuwangi	7,61	33,28	0,28	41,17
Besuk	5,07	0,48	0,43	5,97
Dringu	11,93	5,82	0	17,75
Gading	354,29	5846,05	1970,36	8170,71
Gending	41,58	18,06	0,49	60,13
Kota Anyar	13,74	1236,59	52,36	1302,69
Kraksaan	12,43	19,47	2,03	33,94
Krejengan	6,78	12,75	5,47	25
Krucill	181,91	12640,47	5792,67	18615,04
Kuripan	18,94	3791,86	525,46	4336,26
Leces	4,83	19,37	0	24,21
Lumbang	33,51	3383,56	645,72	4062,79
Maron	14,79	83,95	3,15	101,88
Paiton	42,37	405,93	15,09	463,39
Pajarakan	5,58	1,94	2,08	9,59
Pakuniran	59	6956,15	544,99	7560,14
Sukapura	327,53	6099,19	2033,5	8460,22
Sumber	25,11	6058,71	1983,93	8067,76
Sumberasih	0,85	1,11	0	1,95
Tegalsiwalan	2,39	82,54	0,37	85,3
Tiris	93,31	7087,56	245,73	7426,6
Tongas	9,21	124,09	3,08	136,38
Wonomerto	0,44	101,95	0,41	102,81
Grand Total	1276,45	54159,56	13827,58	69263,59

Sumber : Data Risiko Bencana oleh BPDB Kabupaten Probolinggo, 2023

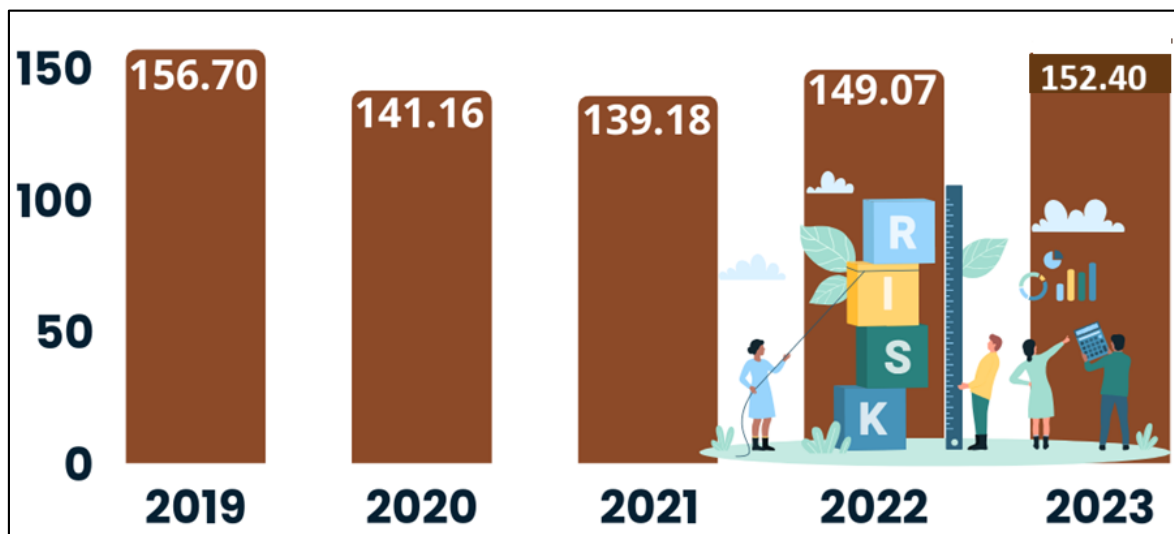
Gambar 2. 18



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2023

Sementara itu Kabupaten Probolinggo jika dilihat dari nilai indeks resiko bencana sebagai berikut:

Gambar 2. 19

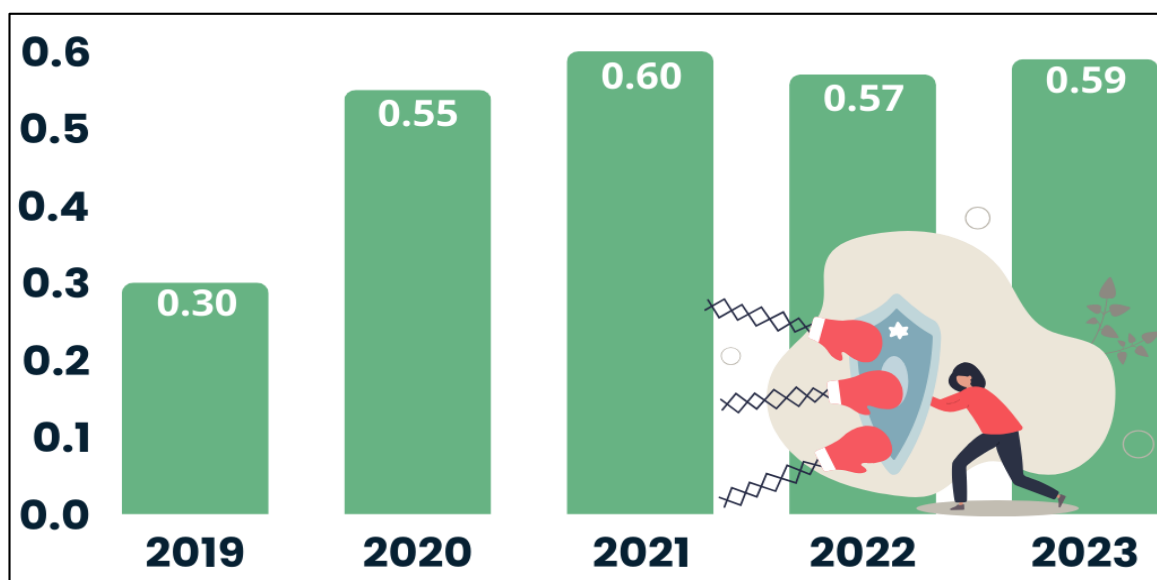


Sumber: IRBI Tahun 2023, 2024

Dalam periode 2019 hingga 2023, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Probolinggo menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan penurunan yang diikuti

oleh peningkatan risiko. Pada tahun 2019, indeks berada pada angka 156.7, menunjukkan tingkat risiko bencana yang relatif tinggi. Selama dua tahun berikutnya, indeks mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai 139.18 pada tahun 2021. Penurunan ini mencerminkan peningkatan dalam strategi mitigasi bencana, perbaikan infrastruktur, atau kondisi alam yang lebih stabil. Namun, sejak tahun 2022, terjadi peningkatan Indeks Risiko Bencana, dengan nilai mencapai 149.07 pada tahun tersebut dan melonjak lebih jauh menjadi 152.40 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa risiko bencana kembali meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, penurunan efektivitas program mitigasi bencana, atau kejadian bencana baru yang lebih signifikan. Penting untuk mencermati faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi ini untuk memahami penyebab utama di balik perubahan angka tersebut. Peningkatan risiko pada 2022 dan 2023 harus menjadi perhatian utama bagi pembuat kebijakan dan pengelola risiko bencana, dengan fokus pada evaluasi dan penguatan strategi mitigasi bencana untuk mengurangi dampak potensi bencana di masa depan. Penurunan di tahun-tahun awal diikuti oleh peningkatan menunjukkan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan adaptasi strategi manajemen risiko bencana untuk menjaga keselamatan dan ketahanan masyarakat.

Gambar 2. 20
Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Probolinggo



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2024

Indeks ketahanan daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 fluktuatif namun cenderung meningkat meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022. Tercatat pada awal periode tahun 2019 nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Probolinggo sebesar 0.30 yang kemudian menjadi 0.59 pada tahun 2023.

Tabel 2. 25
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2019	2020	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	69,15	72,09	71,19	59,8	-	-
Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	72	74,5	75	78,8	79,80	81

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Probolinggo sesuai dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 tercatat sampai pada tahun 2020 sebesar 59,8. Kemudian pada dokumen RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 Indeks Ketahanan Pangan tidak dihitung lagi dan digantikan dengan Skor Pola Pangan Harapan sebagai indikator capaian kualitas konsumsi pangan masyarakat yang pada tahun 2022 mencapai 79,80 dan meningkat menjadi 81 poin pada tahun 2023.

I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Probolinggo sebesar 61,31. Dan pada tahun 2020-2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan kembali dari tahun 2019 menjadi 63,4 dan 64,17 secara berurutan. Sayangnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 60,38. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 64,14. Berikut data IKLH Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2. 26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,31	63.4	64,17	60,38	64,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Capaian kinerja lingkungan hidup dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA), dan indeks tutupan lahan (IKTL). Pada tahun 2019, rumus perhitungan IKLH adalah: $(0,3 \times \text{IKU}) + (0,3 \times \text{IKA}) + (0,4 \times \text{IKTL})$. Namun, mulai tahun 2020 hingga 2023, rumus ini mengalami perubahan menjadi: $\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$. Perubahan rumus ini berdampak pada evaluasi capaian kinerja, yang mungkin tidak sepenuhnya sebanding dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, penurunan IKLH ini juga disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan aktivitas industri, konversi lahan, urbanisasi yang tidak terkendali, serta tantangan dalam pengelolaan sampah dan pencemaran. Kondisi ini menekankan perlunya perhatian lebih terhadap upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Probolinggo, seperti pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Untuk membalikkan tren penurunan ini, Pemerintah Daerah perlu memperkuat kebijakan dan program lingkungan yang berkelanjutan, termasuk memperketat pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah, serta memperluas area hijau dan ruang terbuka. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kembali IKLH di tahun-tahun mendatang, sehingga lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo tetap terjaga dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

J. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dilakukan pada skala 1:25.000 dengan unit analisis berupa satuan Ekoregion yang disajikan dalam lingkup administrasi. Terdapat 20 jenis jasa ekosistem yang dikaji menggunakan metode expert opinion yang dikelompokkan ke dalam empat jasa ekosistem yakni jasa ekosistem penyedia, pengatur, budaya, dan pendukung. Kajian ini menghasilkan nilai indeks dan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta ontok terapan dari indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem yang dihasilkan di Kabupaten Probolinggo. Kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan menggunakan asumsi dasar sebagai berikut:

- a) Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya (jasa penyediaan, jasa budaya, dan pendukung)
- b) Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (jasa pengaturan).

Salah satu hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem adalah menghasilkan nilai indeks. Nilai ini merupakan representasi dari tinggi rendahnya nilai jenis-jenis jasa ekosistem pada suatu wilayah. Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara 0 (sangat rendah) sampai 1 (sangat tinggi) yang ditampilkan menurut administrasi dan ekoregion.

1. Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan

Konsep jasa lingkungan yang diadopsi oleh *Millenium Ecosystem Assessment* (MA) yang dipublikasi tahun 2005 mengilustrasikan bahwa organisme berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem, pada prosesnya mereka menghasilkan, memperoleh, atau menguraikan biomassa dan berinteraksi dengan senyawa organik atau berbasis karbon yang terkait dengan organisme tersebut. Barang yang berasal dari ekosistem (seperti pangan) dan

jasa (pemuerni air) mewakili manfaat yang diperoleh manusia secara langsung maupun tidak langsung dari fungsi-fungsi ekosistem (Costanza et al.,1997). Berdasarkan konsep tersebut lahirlah konsep jasa lingkungan ataupun *ecosystem services* yang didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem, baik yang *tangible* maupun *intangible*. Operasionalisasi konsep jasa lingkungan dikategorikan oleh *Millenium Ecosystem Assessment* (MA) kedalam empat fungsi jasa lingkungan, yaitu fungsi penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), pendukung (*supporting*) dan fungsi budaya (*cultural*),

Informasi pada peta jasa lingkungan antara lain dapat mengindikasikan dimana jasa lingkungan penyedia yang harus diperbaiki dan dimana daerah yang bisa diprioritaskan dalam hal sumber daya alam dan konservasi keanekaragaman hayati. Tantangan yang dihadapi untuk memetakan jasa lingkungan adalah bagaimana mengkuantifikasi dan bagaimana kualifikasinya. Seiring dengan perkembangan literatur ilmiah, maka dikembangkan indikator jasa lingkungan untuk memonitori kondisi maupun tren ekosistem dalam periode waktu tertentu. Menurut Vihervaara et al., dalam Burkhard (2017) bahwa pendekatan untuk mengkuantifikasi stok dan aliran (*flow*) dapat dilakukan melalui :

1. Pengukuran langsung dengan cara mengukur langsung kondisi saat ini, melalui observasi, *monitoring*, *survey*, maupun kuisioner
2. Pengukuran tidak langsung dapat dilakukan melalui proses interpretasi, melibatkan asumsi tertentu, atau perlu dikombinasikan dengan model dari sumber lain sebelum digunakan untuk mengukur jasa lingkungan.
3. Pemodelan, digunakan jika tidak tersedia pengukuran langsung maupun tidak langsung. Pemodelan membantu pengguna informasi untuk mengetahui simulasi ketersediaan, penggunaan dan kebutuhan berdasarkan *input* data ekologis dan sosial budaya.

Terdapat 4 jasa ekosistem meliputi Jasa Penyediaan (*Provisioning*), Jasa Pengaturan (*Regulating*), Jasa Budaya atau Kultural (*Culture*), dan Jasa Pendukung (*Supporting*). Berdasarkan parameter tersebut, sebaran daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem di Kabupaten Probolinggo dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 2. 27
Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Probolinggo

Kode	Jasa Ekosistem	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)
P1	Penyedia Bahan Pangan	12.005,17	7,00%	35.376,07	20,64%	57.092,83	33,31%	39.056,39	22,79%	27.870,63	16,26%	169.616,65
P2	Penyedia Air Bersih	5.101,03	2,98%	32.678,24	19,07%	59.972,57	34,99%	65.344,52	38,12%	8.304,74	4,85%	169.616,65
P3	Penyedia Serat Fiber	19.622,50	11,45%	23.000,70	13,42%	59.247,93	34,57%	19.320,55	11,27%	50.209,41	29,29%	169.616,65
P4	Penyedia Bahan Bakar	385,64	0,22%	17.675,02	10,31%	19.433,44	11,34%	110.614,73	64,54%	23.292,27	13,59%	169.616,65
P5	Penyedia Sumber Daya Genetik	-	0,00%	19.254,55	11,23%	50.912,12	29,70%	77.865,77	45,43%	23.368,65	13,63%	169.616,65
R1	Pengaturan Iklim	2.788,38	1,63%	20.327,49	11,86%	80.076,81	46,72%	39.731,84	23,18%	28.476,57	16,61%	169.616,65
R2	Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	2.342,42	1,37%	18.052,90	10,53%	56.413,93	32,91%	52.189,41	30,45%	42.402,44	24,74%	169.616,65
R3	Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	19.124,41	11,16%	18.377,57	10,72%	37.024,01	21,60%	58.625,20	34,20%	38.249,91	22,32%	169.616,65
R4	Pengaturan Pemurnian Air	7.635,12	4,45%	31.167,79	18,18%	66.131,33	38,58%	39.159,02	22,85%	27.307,84	15,93%	169.616,65
R5	Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah	3.190,93	1,86%	14.033,61	8,19%	54.371,02	31,72%	66.294,54	38,68%	33.511,00	19,55%	169.616,65
R6	Pengaturan Kualitas Udara	19.924,85	11,62%	8.761,56	5,11%	43.524,58	25,39%	36.426,82	21,25%	62.763,28	36,62%	169.616,65
R7	Pengaturan Penyerbukan Alami	6.006,22	3,50%	23.173,00	13,52%	43.291,70	25,26%	53.797,36	31,39%	45.132,82	26,33%	169.616,65
R8	Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	4.780,74	2,79%	9.526,58	5,56%	46.469,99	27,11%	89.920,05	52,46%	20.703,73	12,08%	169.616,65

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

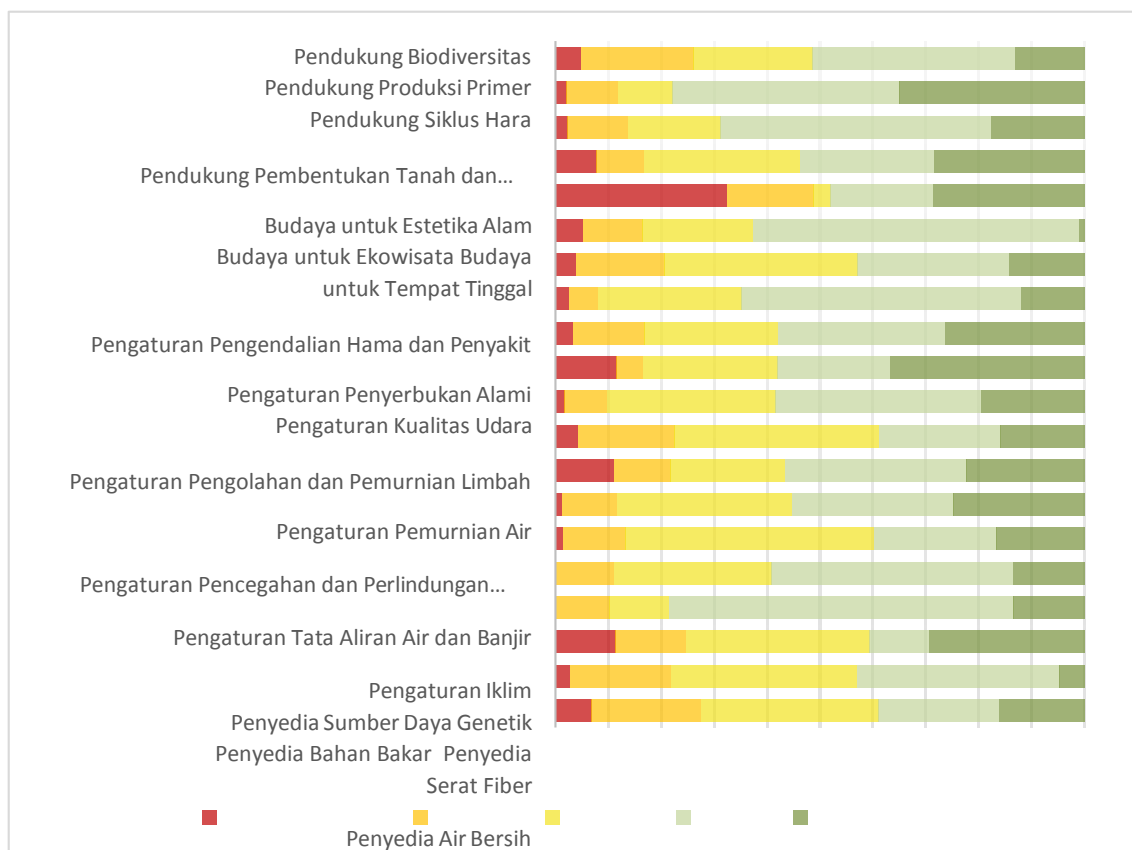
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

Kode	Jasa Ekosistem	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)
C1	Budaya untuk Tempat Tinggal	6.969,19	4,07%	28.580,36	16,67%	62.316,81	36,36%	48.941,52	28,55%	24.593,20	14,35%	169.616,65
C2	Budaya untuk Ekowisata	9.317,74	5,44%	19.335,59	11,28%	35.658,37	20,80%	104.839,68	61,17%	2.249,71	1,31%	169.616,65
C3	Budaya untuk Estetika Alam	55.173,02	32,19%	28.394,46	16,57%	5.720,26	3,34%	33.292,86	19,42%	48.820,50	28,48%	169.616,65
D1	Pendukung Pembentukan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	13.588,62	7,93%	15.541,41	9,07%	50.240,10	29,31%	43.311,54	25,27%	48.719,42	28,42%	169.616,65
D2	Pendukung Siklus Hara	4.289,64	2,50%	19.669,08	11,48%	29.944,02	17,47%	87.116,18	50,83%	30.382,19	17,73%	169.616,65
D3	Pendukung Produksi Primer	3.953,33	2,31%	16.669,07	9,73%	17.903,99	10,45%	73.220,86	42,72%	59.653,85	34,80%	169.616,65
D4	Pendukung Biodiversitas	8.552,38	4,99%	36.322,39	21,19%	38.609,56	22,53%	65.355,73	38,13%	22.561,04	13,16%	169.616,65

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Semakin tinggi sebuah jasa lingkungan maka semakin tinggi pula fungsi penyedia, penganturan/pengendali, budaya dan pendukung pada suatu ekosistem. Adapun rekap kinerja jasa lingkungan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 21
Rekapitulasi Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan 20 jasa lingkungan di Kabupaten Probolinggo, mayoritas jenis jasa mencakup lebih dari 50% luas wilayah. Oleh karena itu, kinerja jasa lingkungan sangat mempengaruhi daya tampung dan daya dukung lingkungan Kabupaten Probolinggo. Adapun jasa ekosistem berdasarkan jenisnya akan dijabarkan sebagai berikut,

- **Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P1)**

Kemampuan suatu ekosistem memberikan fungsi lingkungan berupa penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang diolah, yang

diperuntukkan sebagai makanan atau minuma bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Jasa lingkungan penyedia pangan tinggi memberikan gambaran bahwa suatu ekosistem memiliki kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi.

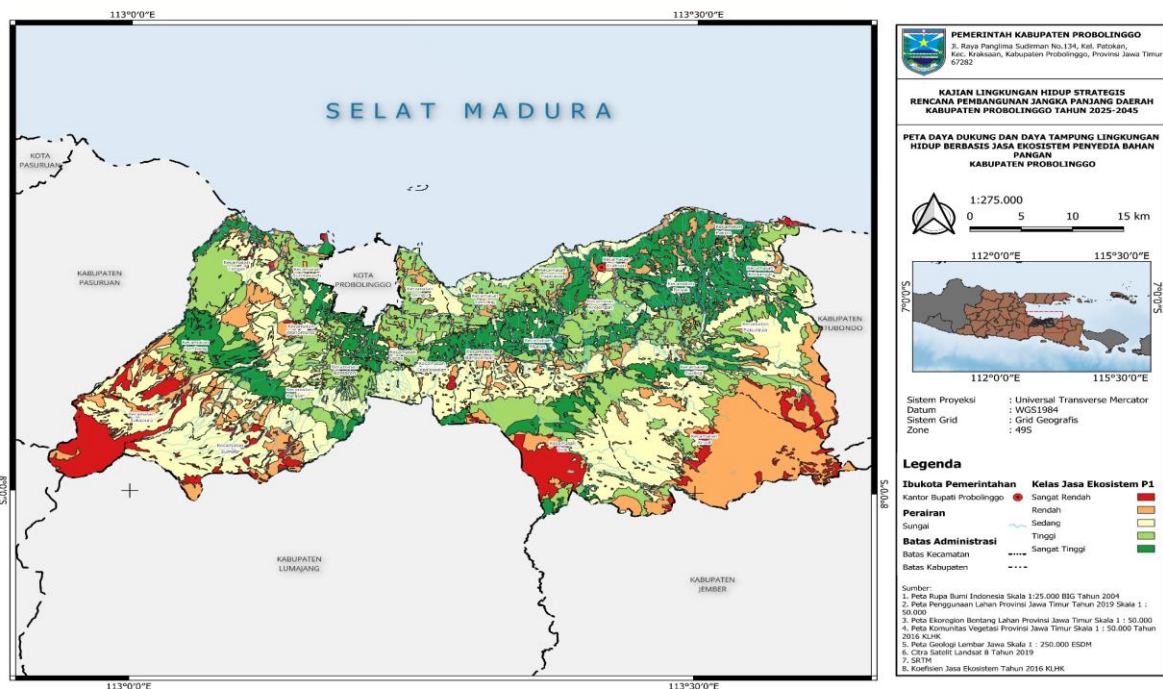
Tabel 2. 28
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kabupaten Probolinggo

Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan P1 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	0	626,3	320,76	2260,02	1309,87	4516,95
Banyuwani	39,51	674,19	319,02	1788,51	1480,51	4301,74
Besuk	0	892,29	23,82	930,17	1964,74	3811,02
Dringu	0	668,85	557,3	1659,45	506,2	3391,81
Gading	36,5	1851,23	4918,25	5598,84	2291,33	14696,16
Gending	0	637,17	420,93	2066,27	702,95	3827,33
Kota Anyar	0	531,63	602,13	1133,02	1792,61	4059,39
Kraksaan	0	1036,37	250,31	684,82	1829,21	3800,7
Krejengan	0	650,41	47,7	1500,16	1708,89	3907,15
Krucill	634,97	6265,63	12295,79	4428,02	416,85	24041,26
Kuripan	0	531,59	1079,86	4116,76	1898,26	7626,46
Leces	0	731,18	9,25	2591,58	599,93	3931,95
Lumbang	309,85	1791,14	1875,39	2471,47	2283,97	8731,82
Maron	0	926,79	141,27	1858,98	2186,74	5113,77
Paiton	179,77	1368,98	381,57	988,62	2885,96	5804,9
Pajarakan	7,53	427,45	40,56	1463,15	367,19	2305,89
Pakuniran	0	849,05	2251,8	5043,93	2423,38	10568,15
Sukapura	4056,53	4374,02	1859,66	902,9	146,76	11339,88
Sumber	513,72	3045,43	6035,05	1216,51	89,75	10900,47
Sumberasih	119,38	869,93	137,11	661,16	1666,01	3453,59
Tegalsiwalan	91,9	562,28	10,28	3110,61	644,14	4419,21
Tiris	3206,36	1289,01	3366,14	4646,26	3668,68	16176,45
Tongas	0	897,65	186,11	4183,87	2216	7483,62
Wonomerto	0	513,94	329,8	2917,56	1083,88	4845,19
Total (Ha)	12.005,17	35.376,07	57.092,83	39.056,39	27.870,63	169.616,65
Persentase	7,00%	20,64%	33,31%	22,79%	16,26%	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai kelas jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Probolinggo didominasi dengan nilai sedang sebesar 57.092,83 Ha atau 33,31% dari total luas wilayah. Hal ini dikarenakan proporsi lahan untuk fungsi pertanian masih lebih tinggi daripada proporsi lahan untuk fungsi perkotaan/non pertanian. Berdasarkan penggunaan lahan eksisting Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa luas lahan sawah adalah sekitar 56.617,03 Ha atau sekitar 32,72% dari total keseluruhan penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo masih dapat mendukung penyediaan pangan untuk wilayahnya. Namun perlu diperhatikan bahwa alih fungsi lahan dari Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman, Industri maupun Kawasan non terbangun lainnya. Kedepannya akan dapat mempengaruhi kemampuan ekosistem Kabupaten Probolinggo dalam hal penyediaan pangan.

Gambar 2. 22
Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Probolinggo



Sumber : Hasil Analisis, 2023

• Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih (P2)

Kemampuan suatu ekosistem memberikan fungsi penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang mendapat penyimpanan air (akuifer) serta fakto yang dapat mempengaruhi system penyimpanan air tanah seperti ekorogion bentang lahan. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan penyediaan air bersih semakin tinggi kemampuan suatu ekosistem dalam memproduksi dalam memproduksi/menyedakan air bersih dan sebaliknya.

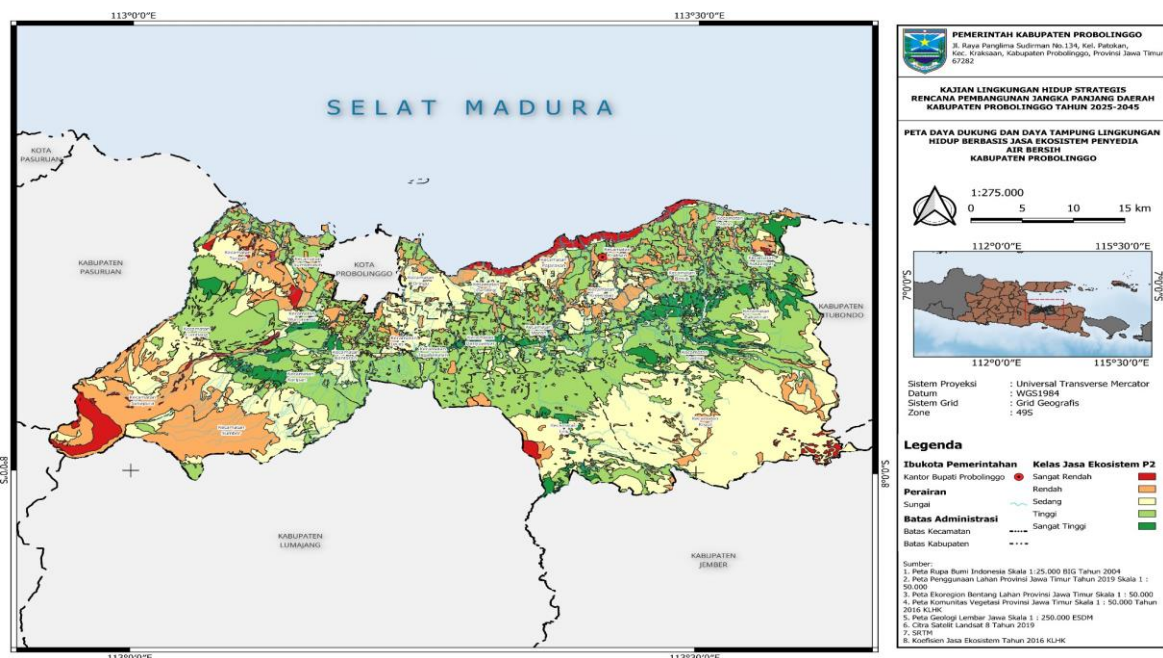
Tabel 2. 29
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kabupaten Probolinggo

Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan P2 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	0	626,3	320,76	2260,02	1309,87	4516,95
Banyuwang	39,51	674,19	319,02	1788,51	1480,51	4301,74
Besuk	0	892,29	23,82	930,17	1964,74	3811,02
Dringu	0	668,85	557,3	1659,45	506,2	3391,81
Gading	36,5	1851,23	4918,25	5598,84	2291,33	14696,16
Gending	0	637,17	420,93	2066,27	702,95	3827,33
Kota Anyar	0	531,63	602,13	1133,02	1792,61	4059,39
Kraksan	0	1036,37	250,31	684,82	1829,21	3800,7
Krejengan	0	650,41	47,7	1500,16	1708,89	3907,15
Krucill	634,97	6265,63	12295,79	4428,02	416,85	24041,26
Kuripan	0	531,59	1079,86	4116,76	1898,26	7626,46
Leces	0	731,18	9,25	2591,58	599,93	3931,95
Lumbang	309,85	1791,14	1875,39	2471,47	2283,97	8731,82
Maron	0	926,79	141,27	1858,98	2186,74	5113,77
Paiton	179,77	1368,98	381,57	988,62	2885,96	5804,9
Pajarakan	7,53	427,45	40,56	1463,15	367,19	2305,89
Pakuniran	0	849,05	2251,8	5043,93	2423,38	10568,15
Sukapura	4056,53	4374,02	1859,66	902,9	146,76	11339,88
Sumber	513,72	3045,43	6035,05	1216,51	89,75	10900,47
Sumberasih	119,38	869,93	137,11	661,16	1666,01	3453,59
Tegalsiwalan	91,9	562,28	10,28	3110,61	644,14	4419,21
Tiris	3206,36	1289,01	3366,14	4646,26	3668,68	16176,45
Tongas	0	897,65	186,11	4183,87	2216	7483,62
Wonomerto	0	513,94	329,8	2917,56	1083,88	4845,19
Total (Ha)	5.101,03	32.678,24	59.972,57	65.344,52	8.304,74	169.616,65
Persentase	2,98%	19,07%	34,99%	38,12%	4,85%	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai kelas jasa lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Probolinggo didominasi dengan nilai tinggi sebesar 65.344,52 ha atau 38,12 % dari total luas wilayah. Berdasarkan data curah hujan RTRW Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029 diketahui bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Probolinggo dominan memiliki curah hujan tahunan yang cukup tinggi yaitu antara 2000-3000 mm, pada beberapa wilayah bahkan mencapai hingga >3000 mm pertahun. Hal ini berarti ekosistem di Kabupaten Probolinggo sangat bisa/mampu untuk memproduksi/menyediakan air bersih. Selain itu di Kabupaten Probolinggo terdapat beberapa danau yang dapat menjadi sumber air untuk masyarakat maupun pertanian. Danau tersebut meliputi Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas, Ranu gedong, Ranu Gunungparang, Ranu Kembar, Ranu Gedong, Ranu Betok, Danau Taman Hidup, dsb.

Gambar 2. 23
Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

• **Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik (P5)**

Kemampuan suatu ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumber daya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti

dengan sumber daya genetik yang melimpah. Sumber daya genetik yang terlihat dari keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi dimana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Semakin tinggi jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik, semakin melimpah sumberdaya genetik yang dapat dihasilkan suatu ekosistem dan/atau daerah.

Tabel 2. 30
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Probolinggo

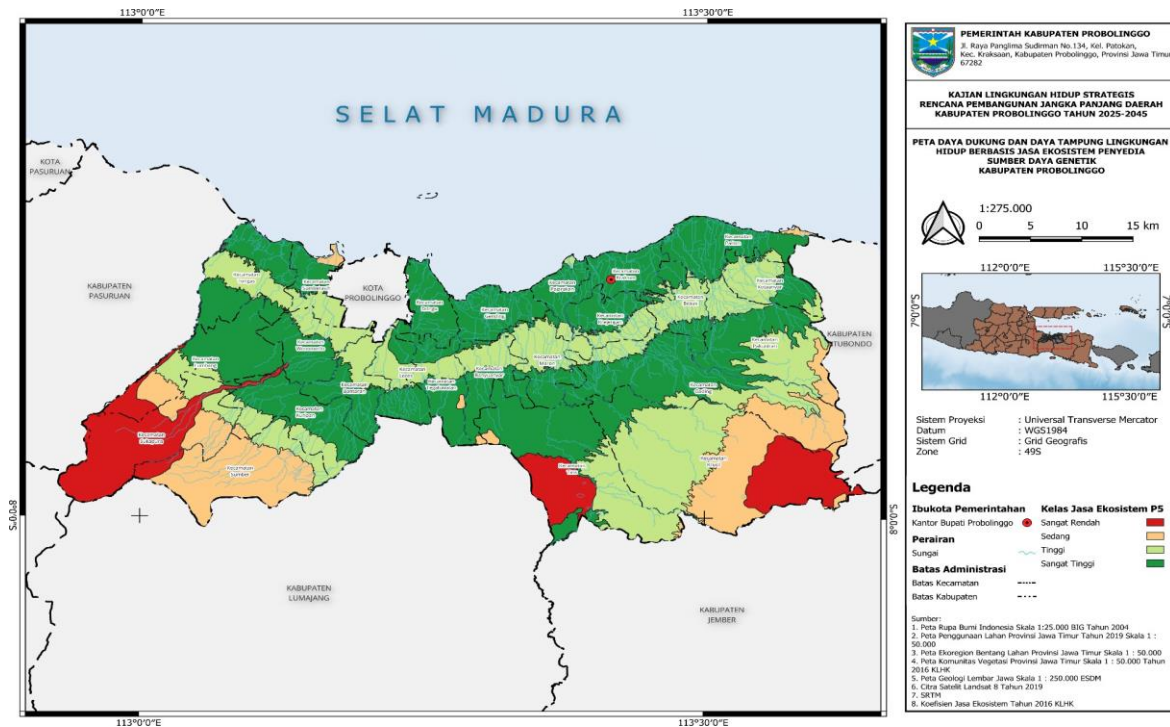
Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan P5 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	0	626,3	303,93	2634,55	952,18	4516,95
Banyuwang	0	646,97	78,37	1615,24	1961,17	4301,74
Besuk	0	694,2	205,19	2185,25	726,38	3811,02
Dringu	0	0	668,85	112,42	2610,54	3391,81
Gading	0	889	1965,83	3580,31	8261,02	14696,16
Gending	0	1,83	635,34	659,42	2530,73	3827,33
Kota Anyar	0	445,24	58,68	1571,09	1984,39	4059,39
Kraksaan	0	65,38	970,98	666,86	2097,48	3800,7
Krejengan	0	141,84	529,84	1039,63	2195,84	3907,15
Krucill	0	522,56	1584,02	3165,24	18393,98	24041,26
Kuripan	0	292,88	373,96	2777,5	4182,13	7626,46
Leces	0	562,5	207,37	725,15	2436,93	3931,95
Lumbang	0	299,08	1452,16	4987,01	1985,03	8731,82
Maron	0	904,27	22,52	2501,82	1685,16	5113,77
Paiton	0	107,94	1243,18	681,25	3592,76	5804,9
Pajarakan	0	145,91	360,57	503,64	1288,23	2305,89
Pakuniran	0	689,4	697,73	2223,83	6957,2	10568,15
Sukapura	0	905,39	4537,28	3613,74	226,46	11339,88
Sumber	0	394,4	1384,93	7237,58	1866,44	10900,47
Sumberasih	0	600,51	652,78	715,73	1402,66	3453,59
Tegalsiwalan	0	431,71	133,86	788,85	3064,79	4419,21
Tiris	0	559,92	1283,61	6213,95	7293,05	16176,45

Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan P5 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Tongas	0	188,42	729,24	3475,36	3090,6	7483,62
Wonomerto	0	513,22	129,07	2361,48	1841,42	4845,19
Total (Ha)		19.254,55	50.912,12	77.865,77	23.368,65	169.616,65
Persentase	0,00%	11,23%	29,70%	45,43%	13,63%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai kelas jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik di Kabupaten Probolinggo didominasi dengan nilai tinggi sebesar 77.865,77 Ha atau 45,43 % dari total luas wilayah. Kawasan Hutan yang ada di Kabupaten Probolinggo seluas 60.338,66 Ha atau sekitar 34,87 % dari total luas wilayah berdasarkan peta penggunaan lahan eksisting Kabupaten Probolinggo. Data fauna di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Dokumen IKPLHD tahun 2020 meliputi kelompok Reptil (Ular Sanca bodo, Penyu), Mamalia (Rusa, Kucing Hutan, Macan Tutul, Kijang, Lutung Jawa, Kancil, Trenggiling, dsb), Aves (Alap-Alap, Julang Emas, Elang Hitam, Raja Udang, Cerek Jawa, Elang Ular, Elang Jawa, dsb), 29 diantaranya merupakan satwa yang dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki potensi penyediaan sumber daya genetik yang cukup tinggi.

Gambar 2. 24
Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

• Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (R1)

Jasa Lingkungan Pengatur Iklim mencakup di dalamnya adalah pengaturan iklim secara regional maupun global. Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban, dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan terletak di ketinggian seperti pegunungan, emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca, serta penurunan dampak pemanasan glonal seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan pengaturan iklim, semakin tinggi manfaat yang diberikan penggunaan lahan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatur kondisi iklim lokal dan global.

Tabel 2. 31
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
di Kabupaten Probolinggo

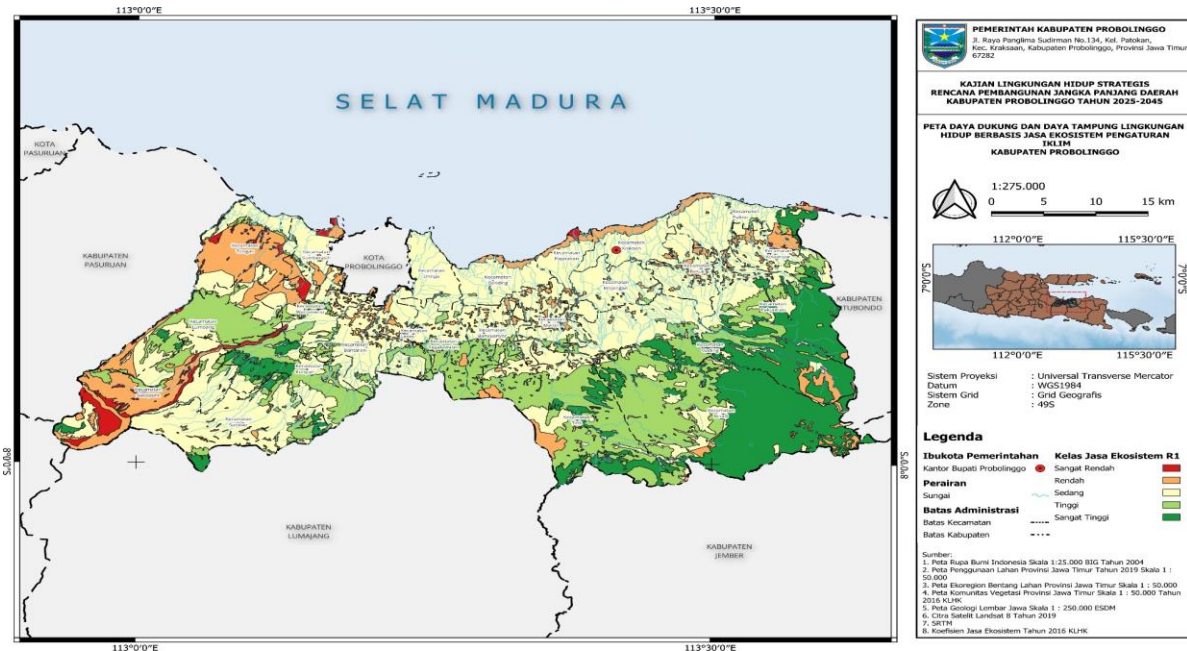
Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan R1 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	0	626,3	898,9	2360,34	631,41	4516,95
Banyuwanyar	0	641,38	65,28	2031,91	1563,18	4301,74
Besuk	0	892,29	279,83	2627,72	11,18	3811,02
Dringu	0	644,68	124,42	2579,67	43,03	3391,81
Gading	0	848,39	1041,65	5201,43	7604,69	14696,16
Gending	0	616,97	617,39	2536,76	56,22	3827,33
Kota Anyar	0	503,91	43,68	2814,95	696,85	4059,39
Kraksan	0	979,14	625,92	2182,96	12,68	3800,7
Krejengan	0	640,83	1872,81	1198,44	195,08	3907,15
Krucill	0	798,4	827,15	1606,98	20808,73	24041,26
Kuripan	154,97	272,63	494,24	2509,44	4195,18	7626,46
Leces	0	658,48	43,36	1373,06	1857,06	3931,95
Lumbang	94,89	1060,29	995,58	4452,84	2128,22	8731,82
Maron		918,62	24,6	3175,17	995,38	5113,77
Paiton	88,97	1435,12	306,02	3190,92	783,87	5804,9
Pajarak	71,05	442,96	314,39	1474,89	2,6	2305,89
Pakuniran	0	689,4	192,19	3494,21	6192,36	10568,15
Sukapura	265,01	4833,92	1222,6	3833,51	1184,83	11339,88
Sumber	17,12	362,55	190,43	8195,47	2134,9	10900,47
Sumberasih	288,82	1061,14	87,7	1624,56	391,37	3453,59
Tegalsiwalan	0	440,61	100,91	1362,9	2514,79	4419,21
Tiris	88,89	1272,3	287,86	1270,93	13256,47	16176,45
Tongas	0	875,53	694,16	3800,1	2113,83	7483,62
Wonomerto	23,08	442,42	1786,07	1067,59	1526,03	4845,19
Total (Ha)	2.788,38	20.327,49	80.076,81	39.731,84	28.476,57	169.616,65
Persentase	1,63%	11,86%	46,72%	23,18%	16,61%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai kelas jasa lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Probolinggo didominasi dengan nilai sedang sebesar 80.076,81 ha atau 46,72 % dari total luas wilayah. Hal ini berarti manfaat penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo sangat baik dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca maupun masih rendah dalam mengatur kondisi iklim mikro maupun makro di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Penggunaan Lahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 diketahui bahwa luasan lahan non

terbangun sekitar 154.574,70 Ha atau sekitar 89,32% dari total keseluruhan lahan. Lahan non terbangun ini meliputi sawah irigasi, sawah non irigasi, kawasan perkebunan campuran, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, tegalan, semak belukar dll. Hal ini menjadikan nilai jasa ekosistem pengatur iklim di Kabupaten Probolinggo didominasi kelas sangat tinggi.

Gambar 2. 25
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Iklim di Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

• Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir (R2)

Kemampuan ekosistem di suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir sangat dipengaruhi oleh siklus hidrologi (*hydrology cycle*). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan tata aliran air dan pengendali banjir, semakin tinggi kemampuan

suatu wilayah/daerah dalam mendukung siklus hidrologi yang efektif dan mengendalikan banjir dan sebaliknya.

Tabel 2. 32
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Probolinggo

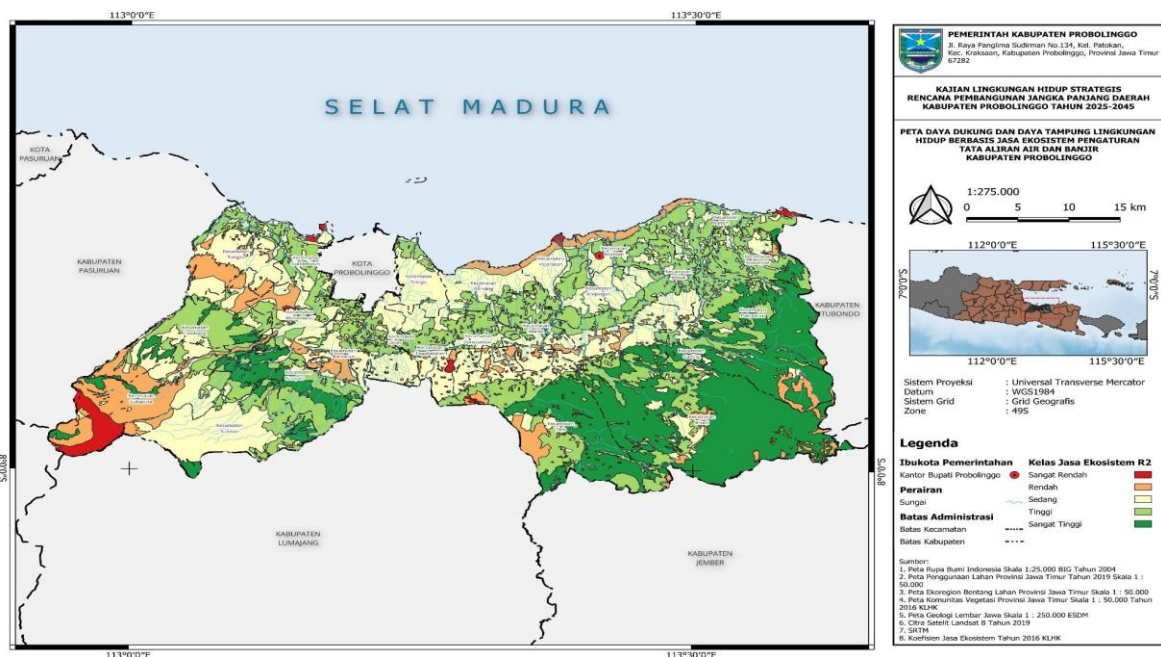
Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan R2 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	288,84	842,72	1356,9	1887,22	141,27	4516,95
Banyuwanyar	317,3	394,93	669,46	2803,22	116,83	4301,74
Besuk	216,13	676,16	1125,74	1360,14	432,85	3811,02
Dringu		765,37	2070,53	549,24	6,67	3391,81
Gading	628,44	288,4	4118,83	3396,17	6264,32	14696,16
Gending	0	1250,88	1825,06	751,39	0	3827,33
Kota Anyar	23,85	501,06	117,98	1365,15	2051,35	4059,39
Kraksan	0	1584,55	328,9	1772,12	115,13	3800,7
Krejengan	0	650,41	2132,96	943,35	180,43	3907,15
Krucill	383,48	676,55	3029,65	984,96	18966,61	24041,26
Kuripan	84,3	703,24	1049,98	2274,23	3514,71	7626,46
Leces	75,46	655,73	775,53	2054,57	370,67	3931,95
Lumbang	61,41	1459,84	4661,11	1450,29	1099,17	8731,82
Maron	298,56	628,23	649,7	3419,88	117,4	5113,77
Paiton	179,77	1839,56	54,95	2886,14	844,48	5804,9
Pajarakan	76,12	723,08	1118,06	368,9	19,73	2305,89
Pakuniran	306,35	417,76	1352,31	1658,06	6833,67	10568,15
Sukapura	2086,9	4586,16	3176,74	742,43	747,64	11339,88
Sumber	336,75	535,24	6862,03	1997,99	1168,47	10900,47
Sumberasih	234,58	1158,55	59,79	1691,35	309,32	3453,59
Tegalsiwalan	276,02	289,55	991,71	2211,5	650,44	4419,21
Tiris	1070,99	927,28	1305,35	3833,43	9039,41	16176,45
Tongas	40,63	1362,1	1803,02	3179,99	1097,88	7483,62
Wonomerto	226,27	1317,47	1052,84	1951,62	296,98	4845,19
Total (Ha)	2.342,42	18.052,90	56.413,93	52.189,41	42.402,44	169.616,65
Persentase	1,37%	10,53%	32,91%	30,45%	24,74%	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai jasa lingkungan pengaturan tata aliran dan banjir di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh nilai sedang seluas 56.413,93 Ha atau 32,91 % dari total luas wilayah. Hal ini berarti siklus hidrologi di Kabupaten Probolinggo sangat baik dan sangat efektif dalam pengelolaan daur air. Berdasarkan Penggunaan Lahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 diketahui

bahwa luasan lahan non terbangun sekitar 154574,70 Ha atau sekitar 89,32% dari total keseluruhan lahan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan kemampuan lahan untuk mengatur air dan banjir karena tutupan lahan non terbangun atau berupa vegetasi mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air yang ada sehingga tidak terjadi banjir di permukaan. Selain itu terdapat sejumlah 23 sungai besar dengan lebar >25 meter serta beberapa danau/ranu, antara lain sebagai berikut : Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas, Ranu Gedong, Ranu Gunungparang, Ranu Kembar, Ranu Gedong, Ranu Betok, Danau Taman Hidup.

Gambar 2. 26
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air
di Kabupaten Probolinggo



Sumber : Hasil Analisis, 2023

- **Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (R3)**

Kemampuan suatu ekosistem dalam mencegah dan melindungi masyarakat dari bencana yang disebabkan faktor alam. Jasa lingkungan pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, banjir, tsunami, dsb. Walaupun bentuk lahan seringkali berkorelasi positif dengan jenis bencana (bencana erosi dan

longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural atau denudasional dengan morfologi perbukitan), tempat-tempat dengan vegetasi rapat dapat mengurangi risiko bahkan mencegah terjadinya bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, semakin tinggi kemampuan suatu ekosistem dalam melindungi mahluk hidup dan bangunan disekitarnya dari bencana yang disebabkan faktor alam.

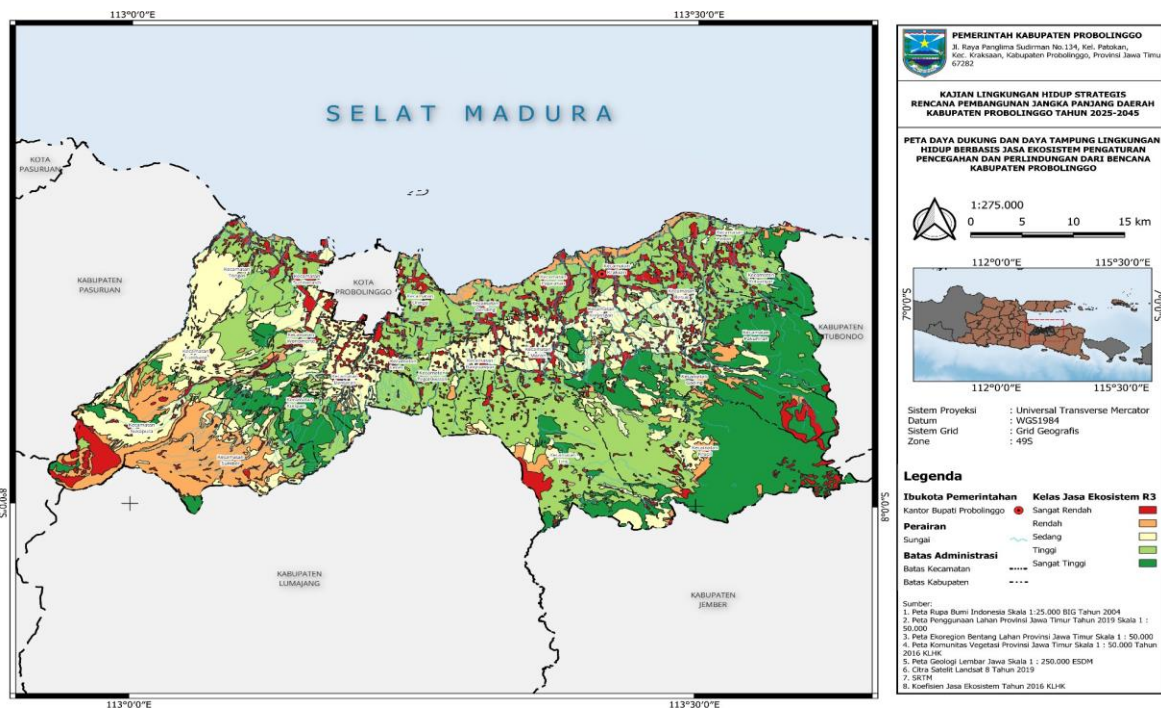
Tabel 2. 33
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Probolinggo

Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan R3 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	626,3	303,93	2634,55	574,99	377,19	4516,95
Banyuanyar	603,74	77,14	1560,21	2059,18	1,47	4301,74
Besuk	694,2	205,19	1847,36	1028,68	35,59	3811,02
Dringu		757,1	24,17	2560,84	49,7	3391,81
Gading	884,89	1572,23	3269,45	1992,96	6976,63	14696,16
Gending	1,83	1227,37	67,4	2474,52	56,22	3827,33
Kota Anyar	445,24	58,68	48,74	2199,92	1306,82	4059,39
Kraksan	65,38	1490,37	127	2059,91	58,04	3800,7
Krejengan	139,17	603,73	1903,96	1112,39	147,91	3907,15
Krucill	885,44	1207,91	2208,34	1638,9	18100,68	24041,26
Kuripan	292,88	412,48	1223,01	1998,66	3699,44	7626,46
Leces	489,79	224,44	780,79	2427,23	9,69	3931,95
Lumbang	294,9	994,59	4068,04	2884,31	489,98	8731,82
Maron	896,1	30,41	2476,27	1415,27	295,73	5113,77
Paiton	183,92	1626,19	267,23	2867,89	859,67	5804,9
Pajarakan	134,23	660,6	208,52	1280,22	22,32	2305,89
Pakuniran	689,4	565,78	867,53	1661,12	6784,33	10568,15
Sukapura	1887,02	3879,96	4084,3	768,03	720,57	11339,88
Sumber	379,54	6655,61	1658,35	1020,57	1186,4	10900,47
Sumberasih	650,76	487,92	912,25	1329,99	72,67	3453,59
Tegalsiwalan	315,75	228,13	645,48	3089,7	140,15	4419,21
Tiris	1362,89	616,13	1835,45	6723,98	5638,01	16176,45
Tongas	166,88	858,14	3322,15	2245,61	890,83	7483,62
Wonomerto	464,78	174,66	2364,32	1542,3	299,12	4845,19
Total (Ha)	19.124,41	18.377,57	37.024,01	58.625,20	38.249,91	169.616,65
Persentase	11,16%	10,72%	21,60%	34,20%	22,32%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Probolinggo cenderung memiliki kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana yang tergolong tinggi, yaitu masing-masing sebesar 34,20% atau sebesar 58.625,20 Ha Berdasarkan data kelerengan dari RTRW Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029 diketahui pula bahwa dominasi kemiringan lahan berada pada 0-8% atau katageri landai dengan luasan sebesar 83032,82 Ha atau sekitar 47,81% dari luas Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data diatas mengindikasikan bahwa secara fisik wilayah Kabupaten Probolinggo sangat baik dalam pencegahan dan perlindungan dari bencana, ditambah lagi dominasi vegetasi/kawasan non terbangun yang besar dapat membantu mengurangi risiko terjadinya bencana.

Gambar 2. 27
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

- **Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air (R4)**

Kemampuan suatu ekosistem untuk “membersihkan/menetralkan” pencemaran melalui proses - proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (self purification) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan

teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Secara fisik, pemurnian air terjadi karena siklus hidrologi penguapan/evaporasi, akibat interaksi antara air dan panas dari matahari. Air yang sudah tercampur dengan material terlarut akan dipisahkan karena molekul air murni akan menguap dan terkondensasi menjadi awan yang kemudian turun kembali dalam bentuk hujan. Secara biologis, alam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai, dan menyerap pencemar meningkat. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan pengatur pemurnian air, semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam pemurnian air dan sebaliknya.

Tabel 2. 34
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dari Bencana di Kabupaten Probolinggo

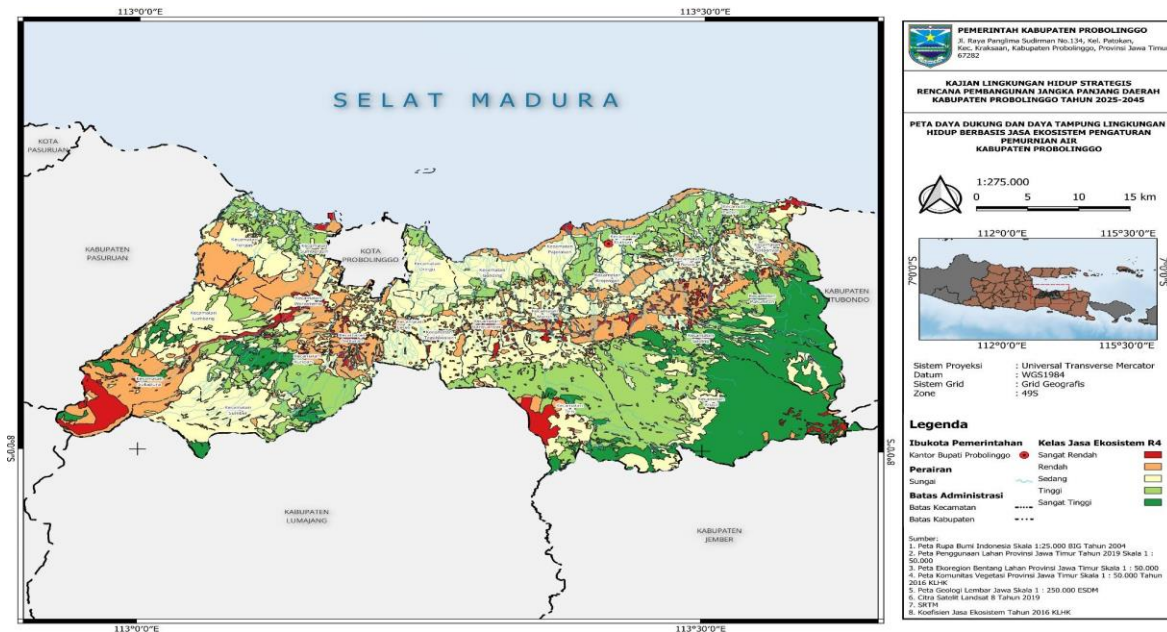
Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan R4 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	626,3	794,77	1324,07	1713,47	58,34	4516,95
Banyuwanyar	598,26	48,68	659,81	2894,04	100,94	4301,74
Besuk	694,2	203,84	1024,37	1347,25	541,36	3811,02
Dringu		765,37	15,89	2560,84	49,7	3391,81
Gading	732,8	287,47	4175,76	3269,09	6231,03	14696,16
Gending	1,83	1249,05	38,92	2481,31	56,22	3827,33
Kota Anyar	428,46	96,45	525,03	2192,56	816,9	4059,39
Kraksan	65,38	1519,17	137,2	267,07	1811,88	3800,7
Krejengan	139,17	532,5	1873,52	535,3	826,66	3907,15
Krucill	393,28	653,61	740,5	8101,42	14152,45	24041,26
Kuripan	122,95	772,37	762,25	2218,08	3750,82	7626,46
Leces	492,94	276,93	196,41	2955,98	9,69	3931,95
Lumbang	290,42	1305,28	2048,81	3957,66	1129,66	8731,82
Maron	903,98	22,81	649,67	3521,8	15,51	5113,77
Paiton	363,13	1656,2	83,84	650,07	3051,65	5804,9
Pajarakan	134,23	664,97	56,29	1274,42	175,98	2305,89
Pakuniran	574,92	234,88	1156,41	2835,43	5766,51	10568,15
Sukapura	2520,89	4170,06	2223,68	1476,31	948,93	11339,88
Sumber	682,98	364,6	5936,3	2474,87	1441,72	10900,47
Sumberasih	679,15	472,19	301,58	1904,4	96,27	3453,59
Tegalsiwalan	321,71	147,11	307,01	3358,73	284,66	4419,21
Tiris	1075,53	1155,44	2377,18	2692,88	8875,43	16176,45

Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan R4 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Tongas	164,41	1251,93	1723,64	2895,03	1448,61	7483,62
Wonomerto	511,1	1160,99	1209,21	1949,49	14,41	4845,19
Total (Ha)	7.635,12	31.167,79	66.131,33	39.159,02	27.307,84	169.616,65
Persentase	4,45%	18,18%	38,58%	22,85%	15,93%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan data distribusi luasan jasa lingkungan pemurnian air, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki kelas jasa lingkungan pemurnian air yang dominan sedang sebesar 38,58% atau sebesar 66.131,33 ha. Kemampuan tanah meresapkan air pada lahan hutan lebih cepat dibandingkan dengan lahan kebun campuran dan sawah (Dewi Liesnoor, 2007) sehingga mempercepat proses pengisian dan pemurnian air tanah, selain itu dominasi kawasan non terbangun seperti hutan, semak belukar, sungai, dsb merupakan habitat bagi mikroba/organisme yang dapat mendukung fungsi pemurnian air. Hal ini mengindikasikan bahwa baik secara fisik kawasan, tutupan lahan, jenis vegetasi dan organisme yang ada di Kabupaten Probolinggo sangat berpengaruh dalam proses pemurnian air. Kawasan hutan/Kawasan non terbangun mempunyai peran penting dalam hal ini, sehingga perlu memperhatikan luasan kawasan hutan dan Kawasan non terbangun. Berdasarkan Rencana pola ruang, kawasan hutan direncanakan dengan luas total 47.439,03 Ha. Kawasan hutan ini perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kedepannya kemampuan dalam pemurnian air tanah dan permukaan terus terjaga.

Gambar 2. 28
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian air
di Kabupaten Probolinggo



Sumber : Hasil Analisis, 2023

• **Jasa Lingkungan Pengatur Pengelolaan dan Penguraian Limbah (R5)**

Kemampuan sebuah ekosistem dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Tutupan lahan di Kabupaten Probolinggo yang didominasi Kawasan non terbangun seperti sungai, danau, hutan, tambak, semak belukar, dsb memungkinkan menjadi tempat hidup mikroba tersebut. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah.

Tabel 2. 35
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pengaturan dan
Penguraian Limbah di Kabupaten Probolinggo

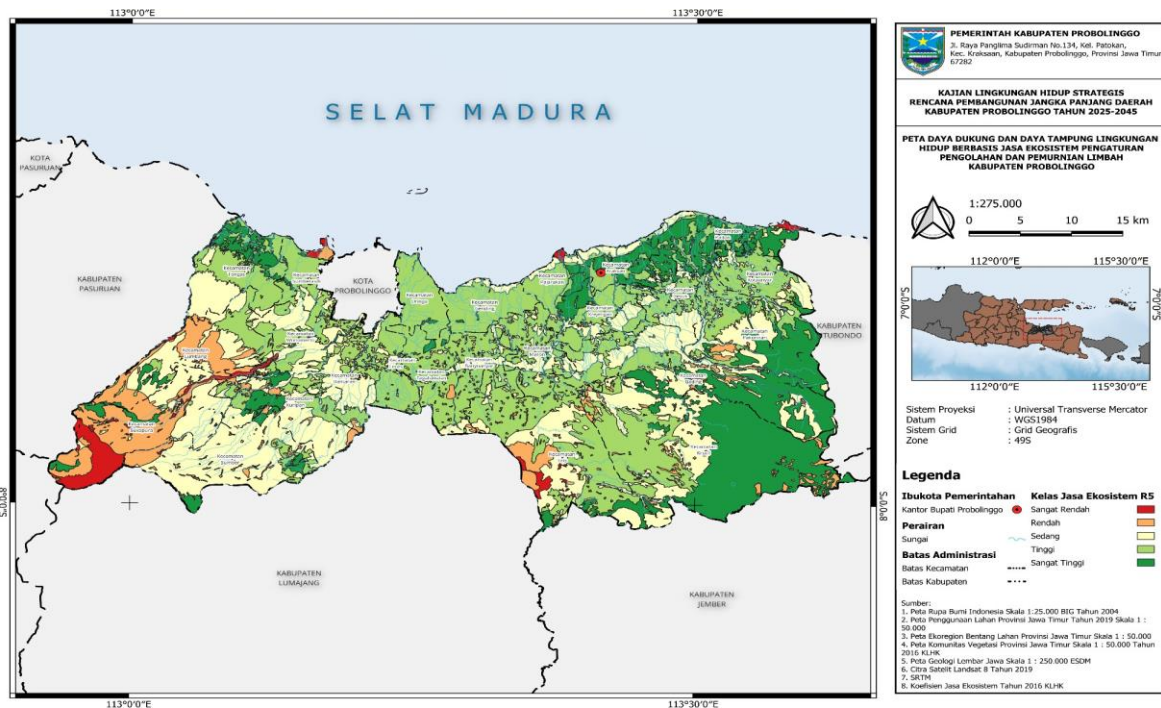
Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan R5 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	0	930,22	567,42	2127,39	891,92	4516,95
Banyuwangi	5,48	679,12	40,73	2065,46	1510,94	4301,74
Besuk	0	898,04	1,35	1936,99	974,64	3811,02
Dringu	0	721,93	59,34	506,2	2104,33	3391,81
Gading	118,14	963,36	1912,47	3822,35	7879,83	14696,16
Gending	0	1206,6	66,88	711,49	1842,36	3827,33
Kota Anyar	16,78	487,13	21	767,56	2766,93	4059,39
Kraksaan	0	1506,85	126,6	93,9	2073,35	3800,7
Krejengan	0	664,76	87,73	2138,4	1016,27	3907,15
Krucill	723,14	354,8	2297,49	8924,63	11741,21	24041,26
Kuripan	208,58	411,96	973,3	3562,73	2469,9	7626,46
Leces		769,87	13,92	750,67	2397,49	3931,95
Lumbang	253,86	1018,46	3574,89	2653,09	1231,53	8731,82
Maron	0	926,79	0	2826,88	1360,1	5113,77
Paiton	179,77	1603,71	244,63	116,77	3660,02	5804,9
Pajarakan	71,05	728,15	25,28	243,65	1237,75	2305,89
Pakuniran	114,48	679,69	717,88	2044,99	7011,12	10568,15
Sukapura	2202,33	4514,47	2694,69	1926,91	1,47	11339,88
Sumber	377,62	689,61	6018,18	2867,62	947,44	10900,47
Sumberasih	156,46	982,88	256,4	1642,8	415,05	3453,59
Tegalsiwalan	5,41	555,31	4,85	790,52	3063,13	4419,21
Tiris	1140,76	715,25	2693,97	5813,73	5812,74	16176,45
Tongas	2,46	963,28	600,01	3178,26	2739,61	7483,62
Wonomerto	23,08	618,48	1031,25	1361,63	1810,74	4845,19
Total (Ha)	3.190,93	14.033,61	54.371,02	66.294,54	33.511,00	169.616,65
Persentase	1,86%	8,19%	31,72%	38,68%	19,55%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan ekosistem Kabupaten Probolinggo mampu mendukung dalam pengaturan pengolahan dan penguraian limbah, hal ini terlihat dari distribusi luasan jasa lingkungan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang cenderung berada pada kelas tinggi sebesar 38,68% atau sebesar 66.294,54 ha. Sehingga dalam perencanaan kedepan lokasi-lokasi dengan nilai jasa lingkungan pengaturan

pengolahan dan penguraian limbah sangat tinggi dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pengelolaan limbah. Berikut merupakan distribusi jasa lingkungan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah.

Gambar 2. 29
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pengelohan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

• **Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (R6)**

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor -faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara semakin tinggi kemampuan wilayah/daerah dalam menjaga kualitas udara dan sebaliknya.

Tabel 2. 36
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan
Kualitas Udara di Kabupaten Probolinggo

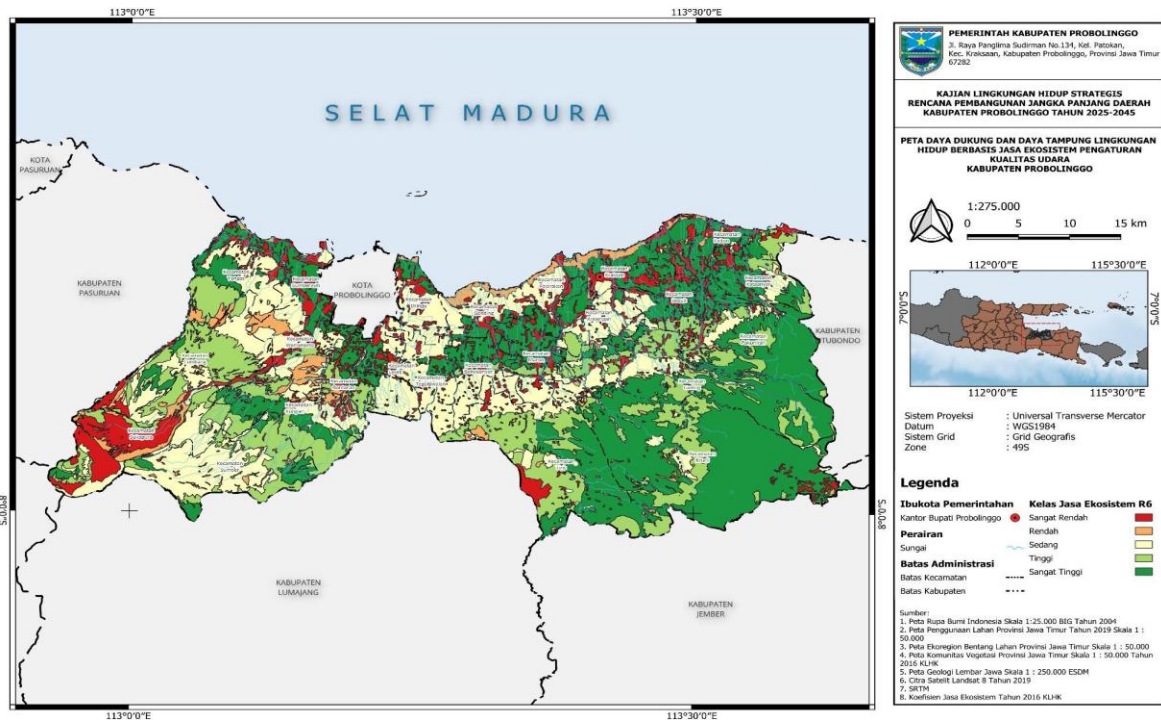
Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan R6 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	288,84	1966,07	1725,34	478,36	58,34	4516,95
Banyuwangi	277,79	641,24	3251,29	18,82	112,59	4301,74
Besuk	216,13	1401,89	1185,98	1007,03	0	3811,02
Dringu	0	668,85	2122,62	600,33	0	3391,81
Gading	630,99	1902,92	2172,12	2347,07	7643,06	14696,16
Gending	0	661,25	2713	453,08	0	3827,33
Kota Anyar	23,85	491,87	237,67	2549,33	756,68	4059,39
Kraksaan	0	1056,84	677,73	2066,13	0	3800,7
Krejengan	0	650,41	2142,05	1114,7	0	3907,15
Krucill	17,82	724,14	183,04	2773,07	20343,19	24041,26
Kuripan	122,95	631,1	653,15	1774,92	4444,34	7626,46
Leces	78,61	842	2630,98	380,37		3931,95
Lumbang	64,46	1190,53	2034,5	3201,56	2240,78	8731,82
Maron	306,45	1139,86	3237,04	430,42	0	5113,77
Paiton	192,76	1655,58	304,04	3088,45	564,06	5804,9
Pajarakan	81,5	432,52	1605,5	186,37	0	2305,89
Pakuniran	306,35	715,4	647,59	2067,48	6831,34	10568,15
Sukapura	1367,85	2459,16	2233,81	3581,49	1697,57	11339,88
Sumber	0	377,62	558,03	6040,86	3923,96	10900,47
Sumberasih	317,2	1048,02	1682,31	406,06	0	3453,59
Tegalsiwalan	195,49	335,97	3117,72	615,25	154,78	4419,21
Tiris	224,02	962,75	2159,64	1171,71	11658,33	16176,45
Tongas	40,63	2807,32	1898,26	2737,42	0	7483,62
Wonomerto	295,67	1623,49	2343,25	582,78	0	4845,19
Total (Ha)	19.924,85	8.761,56	43.524,58	36.426,82	62.763,28	169.616,65
Persentase	11,62%	5,11%	25,39%	21,25%	36,62%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan distribusi luasan jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara, dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Probolinggo didominasi pada kelas layanan sangat tinggi. Kelas layanan jasa ekosistem pengaturan dan pemeliharaan kualitas udara sangat tinggi memiliki proporsi sebesar 36,62 % dengan luas 62.763,28 Ha. Berdasarkan luasan tersebut menggambarkan bahwa vegetasi menjadi kunci dalam pengaturan dan pemeliharaan kualitas udara. Berdasarkan tabel diatas juga secara langsung menggambarkan bahwa vegetasi

di Kabupaten Probolinggo masih melimpah. Hal ini didukung data luas kawasan non terbangun dari data penggunaan lahan eksistitng tahun 2018 sekitar 15.4574,70 Ha dari total keseluruhan lahan. Oleh karena itu, kedepannya dalam pembangunan kawasan terbangun perlu memperhatikan ketersediaan vegetasi, khususnya vegetasi yang memiliki kemampuan penyerapan polutan. Selain itu pelestarian ekosistem pesisir dan laut juga penting dalam mendukung pengaturan kualitas udara, hal ini disebabkan apabila ekosistem pesisir dalam kondisi baik organisme (mangrove, fitoplankton,dsb) akan melimpah dan mendukung penyerapan karbondioksida. Sehingga pelestarian ekosistem pesisir dan laut juga perlu dilakukan salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meminimalisir pencemaran limbah domestik/non domestik ke aliran sungai dan laut.

Gambar 2. 30
Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara di
Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

• **Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan Pemeliharaan Kesuburan (S1)**

Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah maka pembentukan tanah semakin cepat.

Tabel 2. 37
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan di Kabupaten Probolinggo

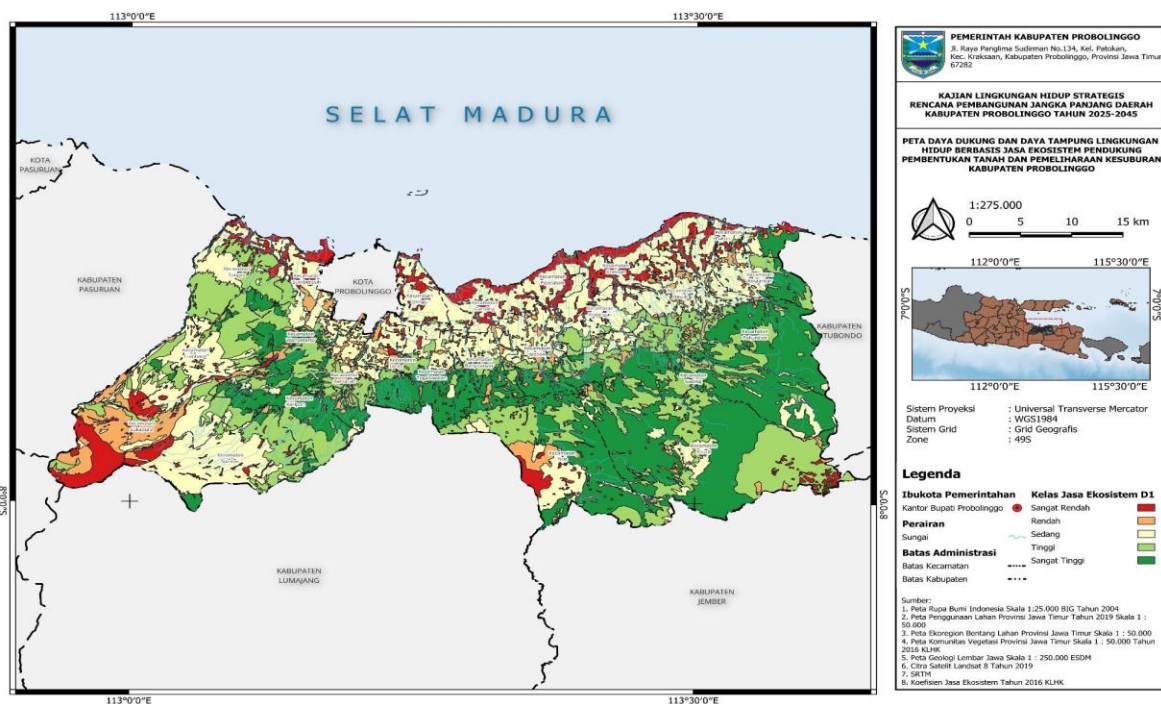
Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan S1 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	527,43	527,43	1510,49	1949,39	141,27	4516,95
Banyuwanyar	277,79	277,79	795,1	2735,23	129,94	4301,74
Besuk	216,13	216,13	1534,79	1363,71	3,62	3811,02
Dringu	0	0	2010,2	600,33	0	3391,81
Gading	650,33	650,33	2260,7	4367,05	7201,13	14696,16
Gending	0	0	2077,66	467,66	8,53	3827,33
Kota Anyar	23,85	23,85	361,31	2169,56	1033,79	4059,39
Kraksan	0	0	1854,96	273,29	39	3800,7
Krejengan	0	0	2650,56	351,45	152,65	3907,15
Krucill	406,62	406,62	365,45	7099,52	15792,26	24041,26
Kuripan	230,72	230,72	701,87	1881,81	4662,14	7626,46
Leces	97,1	97,1	760,05	2026,69	370,67	3931,95
Lumbang	133,09	133,09	2666,78	3559,43	2052,82	8731,82
Maron	306,45	306,45	884,73	2861,51	430,42	5113,77
Paiton	268,18	268,18	2731,36	453,43	592	5804,9
Pajarakan	71,05	71,05	1264,5	211,06	30,12	2305,89
Pakuniran	390,54	390,54	876,73	2295,57	6702,74	10568,15
Sukapura	2096,56	2096,56	5377,94	2409,35	843,01	11339,88
Sumber	17,18	17,18	5499,14	2285,41	2219,72	10900,47
Sumberasih	476,37	476,37	1070,61	680,45	309,4	3453,59
Bantaran	527,43	527,43	1510,49	1949,39	141,27	4516,95
Tegalsiwalan	195,49	195,49	856,57	2448,8	640,16	4419,21
Tiris	1075,69	1075,69	1150,65	4166,73	9611,66	16176,45
Tongas	54,24	54,24	2872,08	2457,71	1059,17	7483,62
Wonomerto	404,11	404,11	1954,29	1966,75	282,58	4845,19
Total (Ha)	13.588,62	15.541,41	50.240,10	43.311,54	48.719,42	169.616,65
Persentase	7,93%	9,07%	29,31%	25,27%	28,42%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Distribusi luasan jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan di Kabupaten Probolinggo didominasi dengan kelas layanan sedang dan dengan proporsi luasan sebesar 29,31% atau 50.240,10 Ha. Iklim dan organisme sebagai faktor aktif dalam Pelapukan (Tamanak, Dkk 2020) pada daerah yang beriklim tropis dan sub tropis, dekomposisi bahan organik berlangsung lebih cepat dan lebih mudah (Handayanto dkk. 2017). Berdasarkan

data curah hujan RTRW Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029 diketahui bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Probolinggo dominan memiliki curah hujan tahunan yang cukup tinggi yaitu antara 2000-3000mm, pada beberapa wilayah bahkan mencapai hingga >3000 mm pertahun. Hal ini menjadikan kondisi pelapukan batuan menjadi lebih cepat sehingga pembentukan lapisan tanah pun terjadi lebih cepat. Hal ini berarti kemampuan ekosistem dalam membentuk lapisan dan memelihara kesuburan tanah di Kabupaten Probolinggo mayoritas tergolong tinggi-sangat tinggi.

Gambar 2. 31
Peta Jasa Lingkungan Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan di Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

• Jasa Lingkungan Penduduk Siklus Hara (S2)

Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfir, geosfir dan hidrosfir. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfer yaitu proses fotosintesis. Proses dari serapan hara, akumulasi

hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi, umumnya ekosistem yang memberikan dukungan tinggi pada siklus hara adalah ekosistem dengan kondisi tanah subur dengan pengairan dan tutupan tajuk vegetasi sedang hingga tinggi yang menjadikan siklus hara dapat berlangsung dengan optimal. Semakin tinggi jasa ekosistem siklus hara, semakin tinggi kemampuan wilayah/daerah dalam memberikan dukungan bagi siklus hara dan sebaliknya.

Tabel 2. 38
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Probolinggo

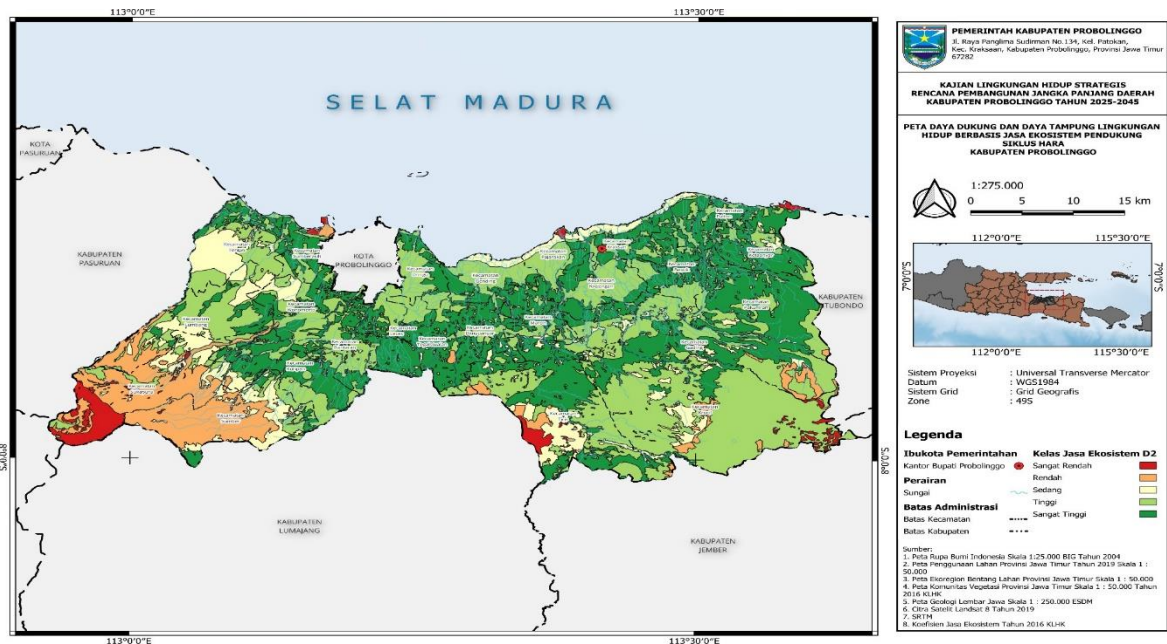
Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan S2 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	0	610,19	836,55	2119,95	950,26	4516,95
Banyuwangi	0	648,82	63,4	2040,92	1548,6	4301,74
Besuk	0	694,2	198,09	2812,36	106,37	3811,02
Dringu	0	24,17	669,06	2091,58	607	3391,81
Gading	37,62	1706,04	505,61	4128,72	8318,16	14696,16
Gending	0	70,19	609,23	2694,84	453,08	3827,33
Kota Anyar	7,59	437,65	135,24	1724,77	1754,15	4059,39
Kraksaan	0	163,55	897,31	2451,98	287,86	3800,7
Krejengan	0	148,76	501,65	2787,8	468,94	3907,15
Krucill	838,59	365,91	1655,14	8032,71	13148,91	24041,26
Kuripan	183,64	291,12	1221,16	803,54	5127,01	7626,46
Leces	0	559,11	190,56	1325,22	1857,06	3931,95
Lumbang	372,24	1380,22	3119,87	2457,96	1401,53	8731,82
Maron	0	904,27	22,52	2837,24	1349,75	5113,77
Paiton	179,77	572,3	1096,94	3057,19	898,71	5804,9
Pajarakan	71,05	78,69	364,82	1738,89	52,44	2305,89
Pakuniran	0	738,11	606,71	2287,39	6935,95	10568,15
Sukapura	3259,05	4798,25	1597,19	1680,87	4,52	11339,88
Sumber	896,2	5376,92	1902,09	1532,52	1192,74	10900,47
Sumberasih	314,66	479,59	582,68	1683,82	392,85	3453,59
Tegalsiwalan	0	435,86	129,76	1427,4	2426,18	4419,21
Tiris	1025,29	1226,41	2522,51	1148,41	10253,83	16176,45
Tongas	0	282,01	1189,55	3751,63	2260,42	7483,62
Wonomerto	23,08	484,65	1145,18	1380,45	1811,82	4845,19

Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan S2 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Total (Ha)	4.289,64	19.669,08	29.944,02	87.116,18	30.382,19	169.616,65
Persentase	2,50%	11,48%	17,47%	50,83%	17,73%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa layanan jasa ekosistem pendukung siklus hara di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh kelas layanan tinggi dengan luas sebesar 87.116,18 ha atau sekitar 50,83% dari total kawasan. Topografi mempengaruhi kesuburan tanah (Purba Dkk, 2021). Tanah di lereng yang lebih tinggi akan memiliki kesuburan yang lebih rendah dibandingkan tanah di lereng yang lebih rendah. Hal ini karena pencucian yang tinggi dan erosi yang terjadi (Handayanto dkk. 2017). Kabupaten Probolinggo didominasi dengan kelerengan 0-8% sehingga memiliki tingkat kesuburan tinggi.

Gambar 2. 32
Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara di Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

• Jasa Lingkungan Pendukung Bioversitas (S4)

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies,

antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap kelangsungan kehidupan.

Tabel 2. 39
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Probolinggo

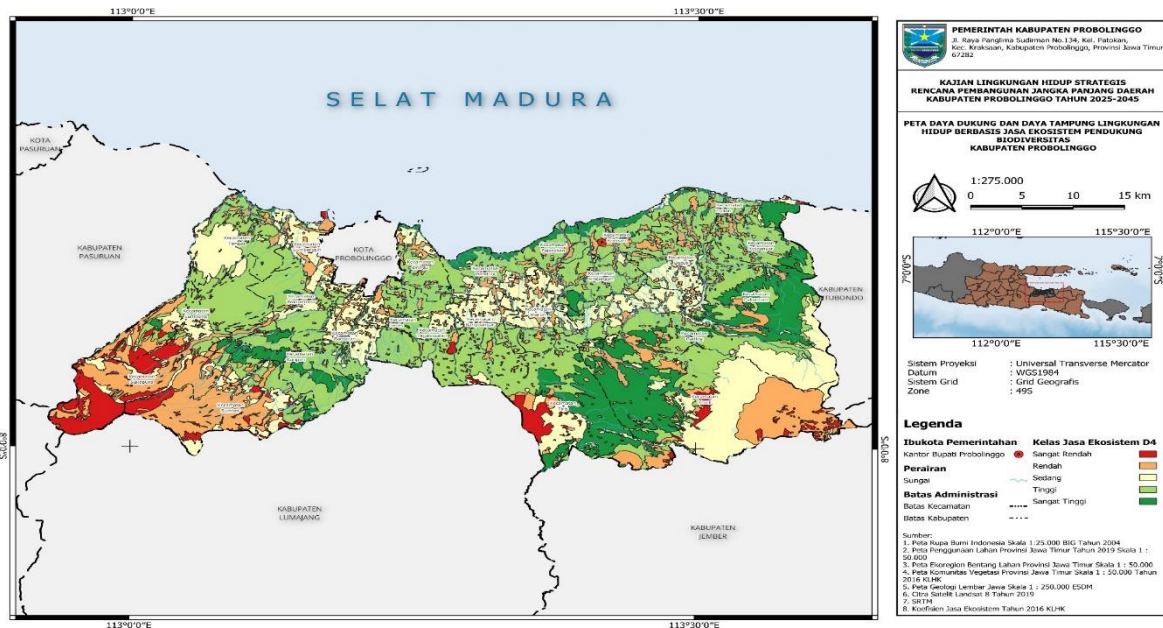
Kecamatan	Luas Peta Jasa Lingkungan S4 (Ha)					Total Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bantaran	0	626,3	1123,35	2307,18	460,12	4516,95
Banyuwani	39,51	655,95	303,34	3179,07	123,87	4301,74
Besuk	0	904,5	732,04	2085,29	89,2	3811,02
Dringu	0	637,41	25,94	2019,43	709,02	3391,81
Gading	1,57	1572,68	2629,43	5215,75	5276,73	14696,16
Gending	0	598,05	24,08	2123,37	1081,83	3827,33
Kota Anyar	0	531,63	22,69	1857,27	1647,81	4059,39
Kraksan	0	958,67	65,83	1928,27	847,93	3800,7
Krejengan	0	687,2	70,88	2787,8	361,28	3907,15
Krucill	1016,5	6858,17	820,47	7862,47	7483,66	24041,26
Kuripan	38,65	667,69	240,95	1995,22	4683,96	7626,46
Leces	0	658,48	189,42	2621,73	462,33	3931,95
Lumbang	984,98	1470,19	1009,26	3555,52	1711,87	8731,82
Maron	0	928,94	524,71	3221,53	438,59	5113,77
Paiton	88,97	1152,28	379,74	2869,02	1314,89	5804,9
Pajarakan	17,98	413,31	19,73	1463,01	391,86	2305,89
Pakuniran	0	1181,03	468,74	2599,68	6318,71	10568,15
Sukapura	6274,97	3143,08	1265,79	649,31	6,72	11339,88
Sumber	1546,86	5641,14	1384,62	1207,28	1120,57	10900,47
Sumberasih	240,93	1002,73	108,91	1675,39	425,64	3453,59
Tegalsiwalan	91,9	543,66	62,62	2926,95	794,09	4419,21
Tiris	1766,06	1531,05	2341,95	1889,26	8648,13	16176,45
Tongas	0	836,26	1557,4	2902,66	2187,29	7483,62
Wonomerto	23,08	442,42	375,41	3373,06	631,22	4845,19
Total (Ha)	8.552,38	36.322,39	38.609,56	65.355,73	22.561,04	169.616,65
Persentase	4,99%	21,19%	22,53%	38,13%	13,16%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai jasa ekosistem pendukung Biodiversitas di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh kelas tinggi seluas 65.355,73 Ha atau 38,13% dari total luas wilayah. Hal ini disebabkan karena dominasi Kawasan non terbangun masih sangat tinggi di kabupaten Probolinggo.

Kawasan non terbangun/vegetasi yang cukup tinggi dapat menjadi habitat yang baik untuk berkembangbiakan spesies flora dan fauna.

Gambar 2. 33
Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Probolinggo



Sumber: Hasil Analisis, 2023

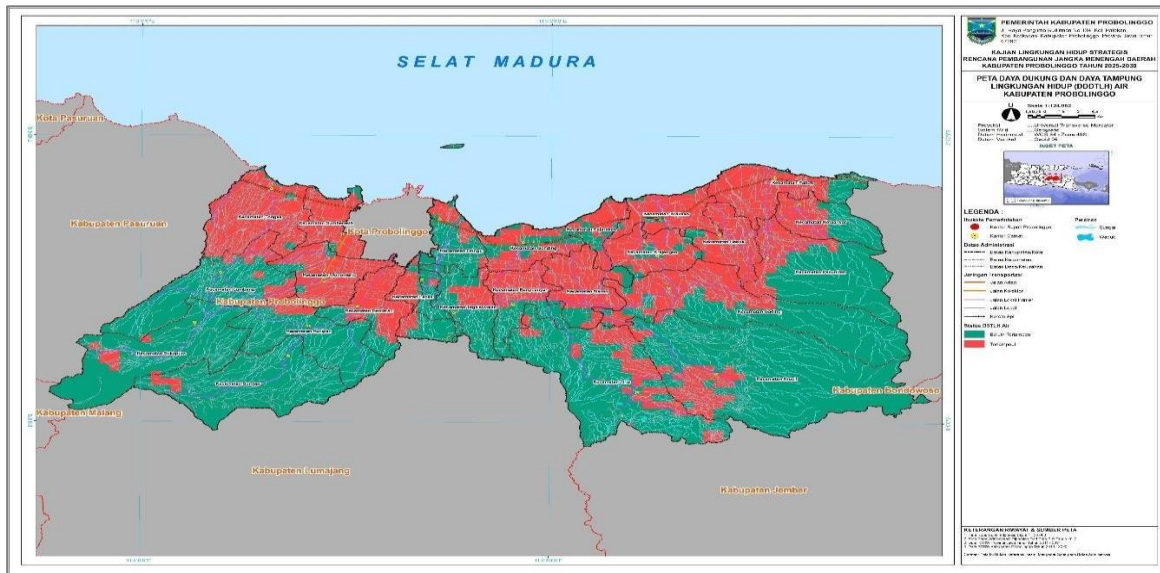
2. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Probolinggo

Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air (Ernamaiyanti dan Mega, 2021). Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, air berpengaruh terhadap daya tahan, daya pikir, mental serta aktivitas sehari-hari (Sari Indah, 2014). Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar produktifitas pertanian (Farida dkk, 2018). Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui.

Tingkat produktivitas air yang rendah karena lemahnya pengelolaan sumber daya air, ketidakmerataan distribusi serta akses terhadap air pada akhirnya akan berkontribusi kepada pemenuhan pangan serta tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani (Farida dkk, 2018). Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan

mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan. Berikut merupakan status daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Probolinggo.

Gambar 2. 34
Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Kabupaten Probolinggo



Sumber : SK Menteri LHK No. SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019

Secara umum Kabupaten Probolinggo memiliki status daya dukung daya tampung air yang terlampaui/defisit air, Meskipun demikian pada setiap kecamatan di beberapa tempat status air masuk kategori Belum terlampaui. Wilayah yang berstatus terlampaui merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data di bawah ini ketersediaan air di Kabupaten Probolinggo sejumlah 1.465.538.114,54 $\pm$ 3/tahun dan kebutuhannya mencapai 1.777.738.334,34 $\pm$ 3/tahun. Dengan demikian status Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan telah melampaui ketersediaan air bersih dengan deficit air sebesar - 312.200.220,80 $\pm$ 3/tahun. Data terkait tentang status daya dukung air di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40
Status Daya Dukung Air Kabupaten Probolinggo

Kecamatan	Status	Kebutuhan Air	Ketersediaan Air	Selisih	Luas (Ha)
Bantaran	Belum Terlampaui	8352782,359	14296687,6	5943905,245	1292,11
	Terlampaui	78821335,81	38171800,41	-40649535,39	3224,84
Banyuwanyar	Belum Terlampaui	17260337,36	21443768,06	4183430,704	1895,57
	Terlampaui	63196209,63	28834946,71	-34361262,92	2406,16
Besuk	Belum Terlampaui	1166831,76	1591452,322	424620,5617	208,36
	Terlampaui	92676602,12	30982914,47	-61693687,66	3602,66
Dringu	Belum Terlampaui	16753076,67	22408922,71	5655846,04	2454,17
	Terlampaui	16346075,74	9064194,667	-7281881,073	937,64
Gading	Belum Terlampaui	8600969,757	65863532,34	57262562,58	9060,96
	Terlampaui	119981957,2	41418689	-78563268,16	5635,2
Gending	Belum Terlampaui	8751696,287	13212953,02	4461256,729	1400,68
	Terlampaui	42553367,72	25149853,26	-17403514,46	2426,65
Kota Anyar	Belum Terlampaui	1972859,214	13754102,21	11781242,99	1910,7
	Terlampaui	53253991,82	18025018,96	-35228972,85	2148,7
Kraksan	Belum Terlampaui	2990888,536	5014311,242	2023422,706	328,27
	Terlampaui	78040005,14	32568056,47	-45471948,67	3472,43
Krejengan	Belum Terlampaui	3838493,451	5376218,699	1537725,247	682,34
	Terlampaui	54063471,89	24502446,25	-29561025,63	3224,82
Krucill	Belum Terlampaui	26133710,94	138720178,7	112586467,8	20808,83
	Terlampaui	27215057,64	22591700,66	-4623356,982	3232,44
Kuripan	Belum Terlampaui	31509350,04	62485941,45	30976591,42	6839,68
	Terlampaui	16160745,97	9731102,054	-6429643,914	786,78
Leces	Belum Terlampaui	20464053,76	22963650,15	2499596,39	2513,55
	Terlampaui	39497744,35	19133892,91	-20363851,44	1418,4
Lumbang	Belum Terlampaui	30974493,75	56297010,44	25322516,69	6985,6
	Terlampaui	43767382,35	21127681,5	-22639700,86	1746,22
Maron	Belum Terlampaui	5448376,45	8542497,954	3094121,504	877,3
	Terlampaui	90078210,54	39139839,84	-50938370,7	4236,47

Kecamatan	Status	Kebutuhan Air	Ketersediaan Air	Selisih	Luas (Ha)
Paiton	Belum Terlampaui	2470788,398	12180688,33	9709899,936	1080,79
	Terlampaui	92832707,05	39382787,27	-53449919,78	4724,11
Pajarakan	Belum Terlampaui	5871745,569	9010828,961	3139083,392	734,76
	Terlampaui	26317295,83	13796534,54	-12520761,29	1571,13
Pakuniran	Belum Terlampaui	5183309,8	50182857,49	44999547,69	7670,52
	Terlampaui	79469326,2	25359597,11	-54109729,09	2897,63
Sukapura	Belum Terlampaui	39526212,17	80830379,58	41304167,41	10721,35
	Terlampaui	4045190,589	3545194,479	-499996,11	618,53
Sumber	Belum Terlampaui	52923130,79	90614055,66	37690924,87	10520,22
	Terlampaui	3766588,647	2943587,608	-823001,0387	380,25
Sumberasih	Belum Terlampaui	1802405,403	5275414,985	3473009,582	323,19
	Terlampaui	76102345,79	35081053,4	-41021292,39	3130,4
Tegalsiwalan	Belum Terlampaui	30206834,45	33284428,1	3077593,654	3331,92
	Terlampaui	22460802,56	11686364,73	-10774437,82	1087,29
Tiris	Belum Terlampaui	55094726,72	100515558,5	45420831,83	12462,87
	Terlampaui	32410789,55	27198674,68	-5212114,871	3713,58
Tongas	Belum Terlampaui	5149215,47	8743584,698	3594369,229	320,35
	Terlampaui	161474798,4	58533065	-102941733,4	7163,27
Wonomerto	Belum Terlampaui	4126013,513	6041901,34	1915887,827	474
	Terlampaui	76634029,18	38918192,92	-37715836,26	4371,18
Total (Ha)		1777738334	1465538115	312200220,8	173054,88

Sumber : Hasil Analisis, 2023

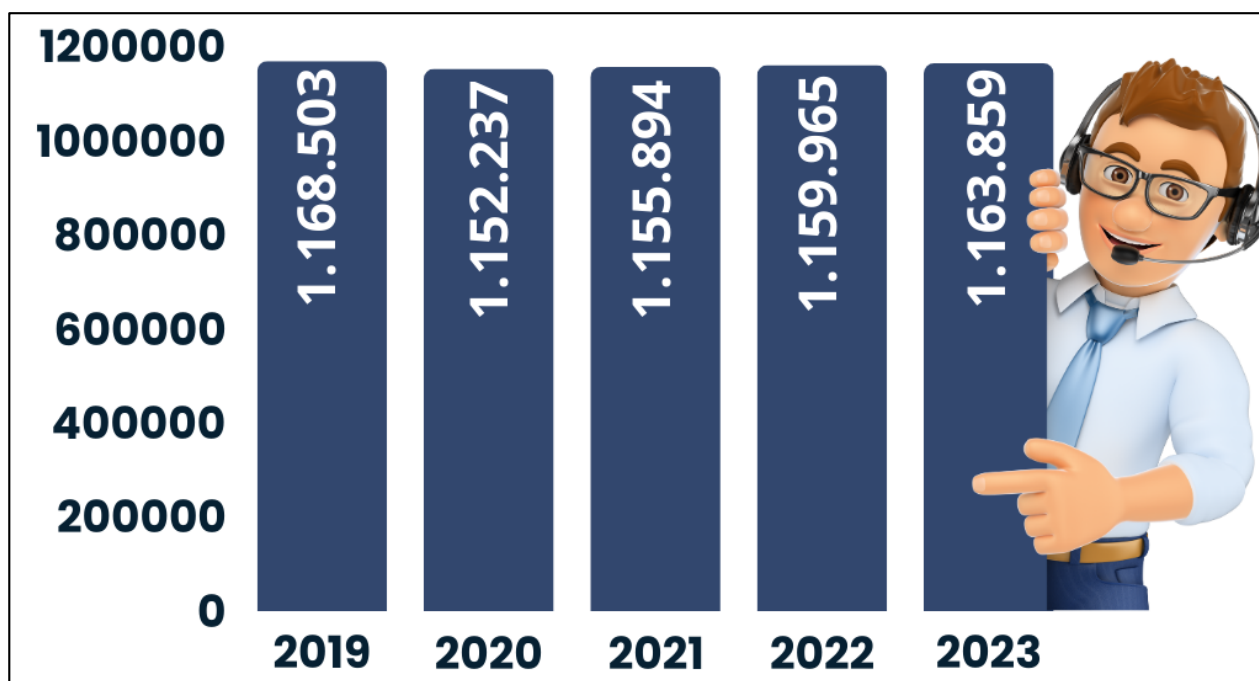
Berdasarkan tabel diatas, secara lebih rinci dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo memiliki status ketersediaan air yang belum terlampaui (Sebagian kecil) dan terampaui (sebagian Besar) artinya ketersediaan air sudah kurang mampu memenuhi kebutuhan akan air yang layak bagi penduduk. Maka dari itu, perlu adanya alternatif untuk mencegah terlampauinya ketersediaan air terhadap kebutuhan air, salah satu upaya adalah dengan memanfaatkan air permukaan (sungai/laut/danau) sebagai sumber air

baku untuk air bersih/air minum, mengingat Kabupaten Probolinggo memiliki potensi sungai, laut dan danau yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2018-2019 jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Namun di tahun berikutnya 2021-2022 Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan. Secara detail grafik jumlah penduduk tahun 2019-2023, sebagai berikut:

Gambar 2. 35
Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo dari Tahun 2019–2023



Sumber: Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2024

Untuk pertumbuhan per kecamatan di Kabupaten Probolinggo mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali dengan total laju pertumbuhan pada akhir 2021 adalah sebesar 0.22 dari tahun sebelumnya. Dan kembali mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk di akhir tahun 2022 sebesar 0.35. Dengan Kecamatan Tiris mempunyai jumlah penduduk yang paling besar

yaitu 69.314 jiwa. Kecamatan Kraksaan terbesar kedua dengan jumlah sebesar 67.972 jiwa dan Kecamatan Tongas dengan jumlah penduduk terbesar ketiga yaitu berjumlah 67.809 jiwa. Kemudian pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah penduduk dengan Kecamatan Tiris terbanyak sejumlah 69.726 Jiwa, kemudian Kecamatan Tongas sebanyak 68.581 Jiwa dan Kecamatan Kraksaan sebanyak 68.551. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel 2.41 sebagai berikut:

Tabel 2. 41
Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023

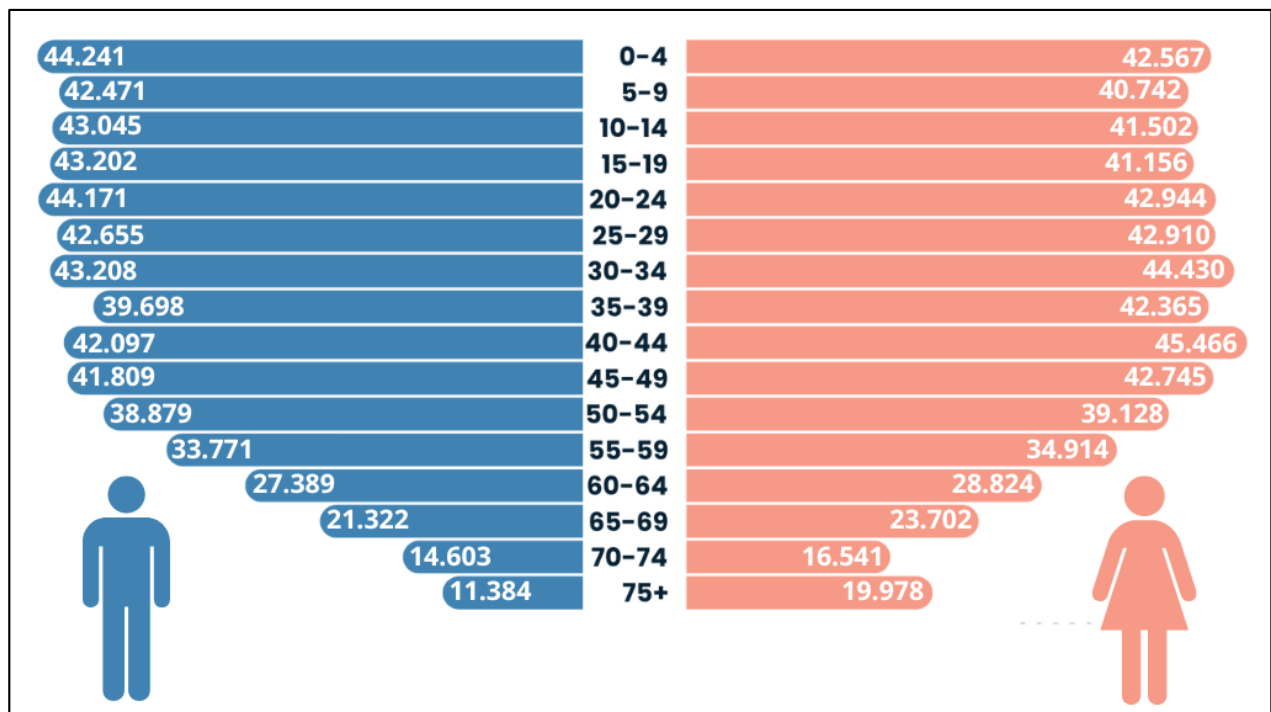
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio	Kepadatan Penduduk Km ²
1	Sukapura	9.780	9.784	19.564	100	191
2	Sumber	12.898	13.006	25.904	99	183
3	Kuripan	14.652	15.666	30.318	94	454
4	Bantaran	21.342	22.338	43.680	96	1.037
5	Leces	28.342	29.052	57.394	98	1.559
6	Tegalsiwalan	17.990	18.828	36.818	96	882
7	Banyuanyar	27.041	28.166	55.207	96	1.208
8	Tiris	34.670	35.056	69.726	99	421
9	Krucil	29.115	28.727	57.842	101	286
10	Gading	27.078	27.597	54.675	98	372
11	Pakuniran	21.592	22.799	44.391	95	390
12	Kotaanyar	18.108	18.685	36.793	97	864
13	Paiton	33.399	34.199	67.598	98	1.269
14	Besuk	24.595	25.864	50.459	95	1.440
15	Kraksaan	34.049	34.502	68.551	99	1.814
16	Krejengan	20.126	20.814	40.940	97	1.189
17	Pajarakan	16.561	17.278	33.839	96	1.568
18	Maron	32.402	33.698	66.100	96	1.286
19	Gending	21.029	21.390	42.419	98	1.159
20	Dringu	27.013	27.222	54.235	99	1.742
21	Wonomerto	20.214	21.132	41.346	96	905
22	Lumbang	15.938	16.450	32.388	97	349
23	Tongas	33.660	34.921	68.581	96	880
24	Sumberasih	31.351	32.740	65.091	99	2.152
Kabupaten Probolinggo		573.945	589.914	1.163.859	97	686

Sumber: BPS Kab. Probolinggo (Hasil Proyeksi Penduduk Interim), 2024

Berdasarkan tabel yang diatas mengenai Penduduk Kabupaten Probolinggo menurut jenis tahun 2023 didominasi oleh perempuan sebesar 589.914.

Sementara kecamatan dengan penduduk paling padat berada di Kecamatan Sumberasih dengan kepadatan 2.152 penduduk/km², dan yang terendah di Kecamatan Sumber dengan kepadatan penduduk sebesar 183 penduduk/km².

Gambar 2. 36
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023



Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Sementara (Interim) Tahun 2021-2023 Level Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Probolinggo didominasi usia 0-4 tahun yakni sebanyak 44.241 Jiwa. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Probolinggo didominasi usia 40-44 tahun yang berjumlah 45.446 Jiwa. Secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Probolinggo adalah 97 persen. Artinya dari 100 penduduk dengan jenis kelamin perempuan terdapat 97 penduduk berjenis kelamin laki-laki.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan. Probolinggo merupakan pemerintah kabupaten yang memiliki semangat kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat tersebut terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Berikut adalah capaian pada setiap fokus.

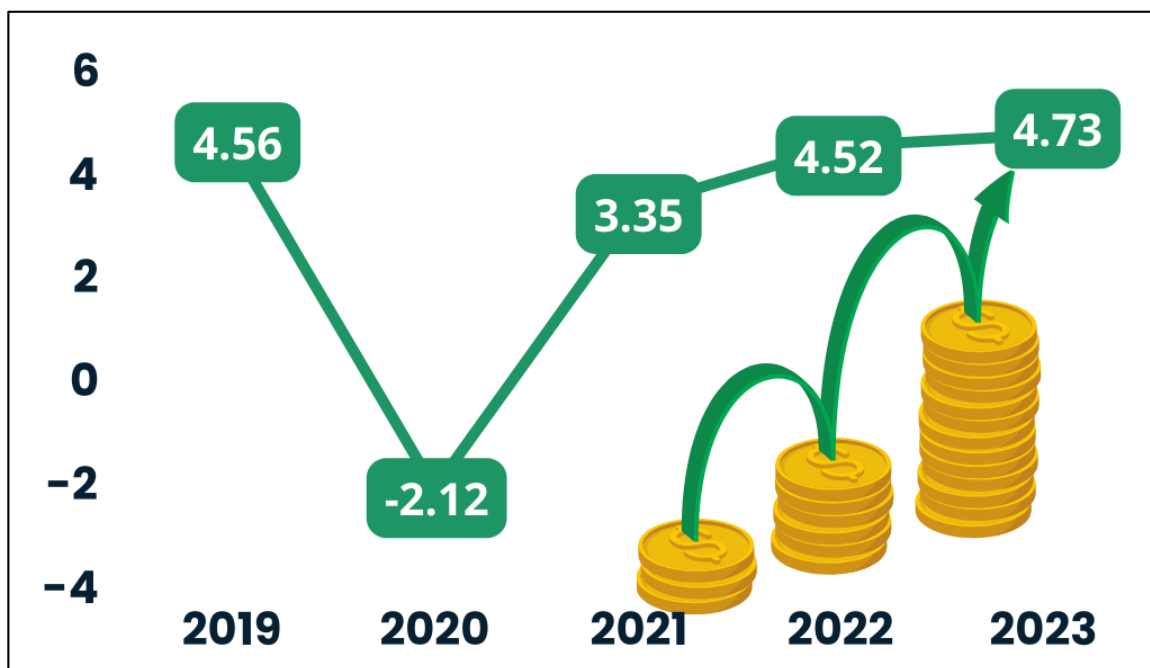
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan perubahan produk domestik bruto (PDB) riil, yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara setelah disesuaikan dengan inflasi.

Gambar 2. 37
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 kinerjanya stabil. Namun pada tahun 2020 terjadi koreksi yang sangat mendalam hingga pertumbuhan ekonominya negative, yaitu minus 2,12 persen. Hal disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas social ekonomi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Kembali mengalami kenaikan hingga di angka 3,35 persen. Dan kembali pulih trendnya di tahun 2022 mencapai angka 4,52 persen. Kemudian pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan hingga menjadi 4,73 persen.

B. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo selama periode 2019-2023 fluktuatif. Kenaikan terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 dan kembali turun pada tahun 2022. Penurunan yang terjadi menunjukkan capaian positif para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat terutama sosial dan ekonomi. Sementara pada tahun 2023 terdapat peningkatan kembali jika dibanding pada tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan dalam periode 2019-2023 ini

menunjukkan angka trend positif. Adapun Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2. 42
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo 2019-2023

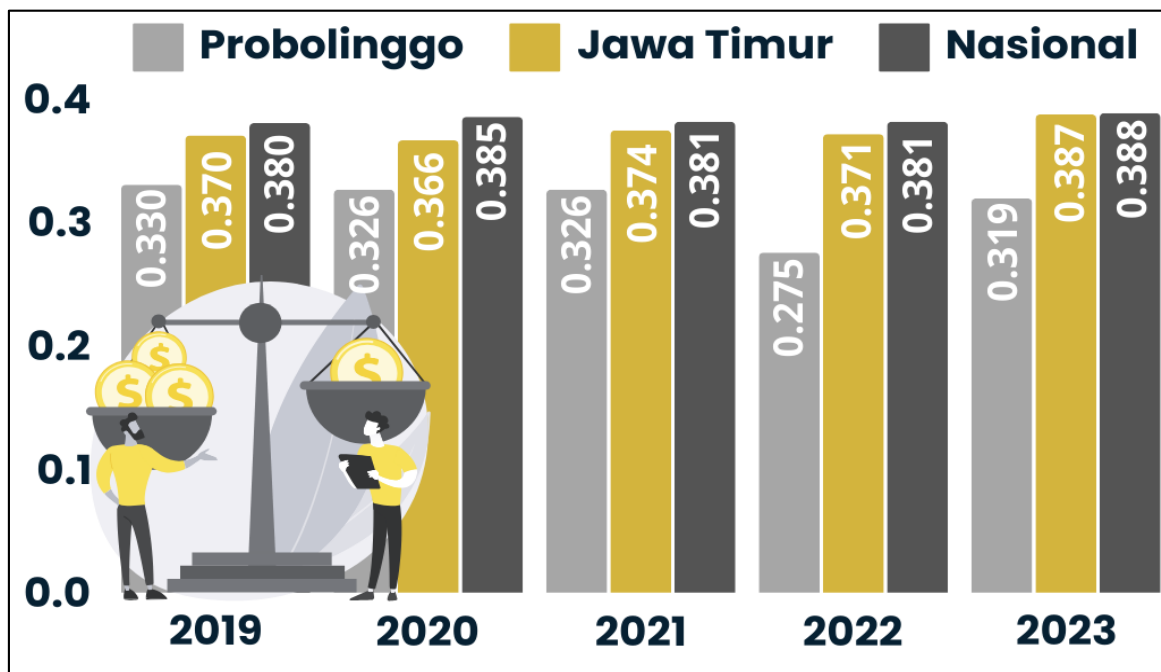
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	207.22	218.35	223.32	203.23	205.02
Persentase Penduduk Miskin (P0)	17,76	18,61	18,91	17,12	17,19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,20	3,24	3,26	2,54	2,87
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,85	0,78	0,81	0,59	0,70
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	417.991,00	441.532,00	451.395,00	475.713,00	514.274,00

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

C. Indeks Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut

Gambar 2. 38
Indeks Gini Kabupaten Probolinggo 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Secara umum, indeks gini Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 mencapai 0,330, dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2022 yakni menjadi 0,276. Namun pada tahun 2023 terdapat peningkatan sehingga menjadi 0,319. Indeks Gini Kabupaten Probolinggo dalam periode lima tahun terakhir yakni tahun 2019-2023 selalu berada dibawah Jawa Timur dan Nasional.

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dengan kata lain, kondisi sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah. Adapun besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 pada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 43
Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan Komponennya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	12,34	12,35	12.36	12.58	12.63
2.	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	5,77	6,11	6.12	6.13	6.29
3.	Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun)	67	67,2	67.36	67.78	68.12
4.	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah)	10.972,00	10.859,00	10.969,00	11.254,00	11.756,00
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	68,77	68.94	69.56	70.36
6.	Pertumbuhan IPM (Persen)	-	0.72	0.25	0,90	1.15

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Berdasarkan skala nasional, capaian IPM Kabupaten Probolinggo untuk Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 termasuk dalam kategori sedang, dimana kategori sedang berkisar antara 60 – 70 pada tahun 2020 sebesar 68,77, pada tahun 2021 sebesar 68,94, pada tahun 2022 69,56, dan pada tahun 2023 sebesar 70,36. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Peningkatan ini juga tidak lepas dari

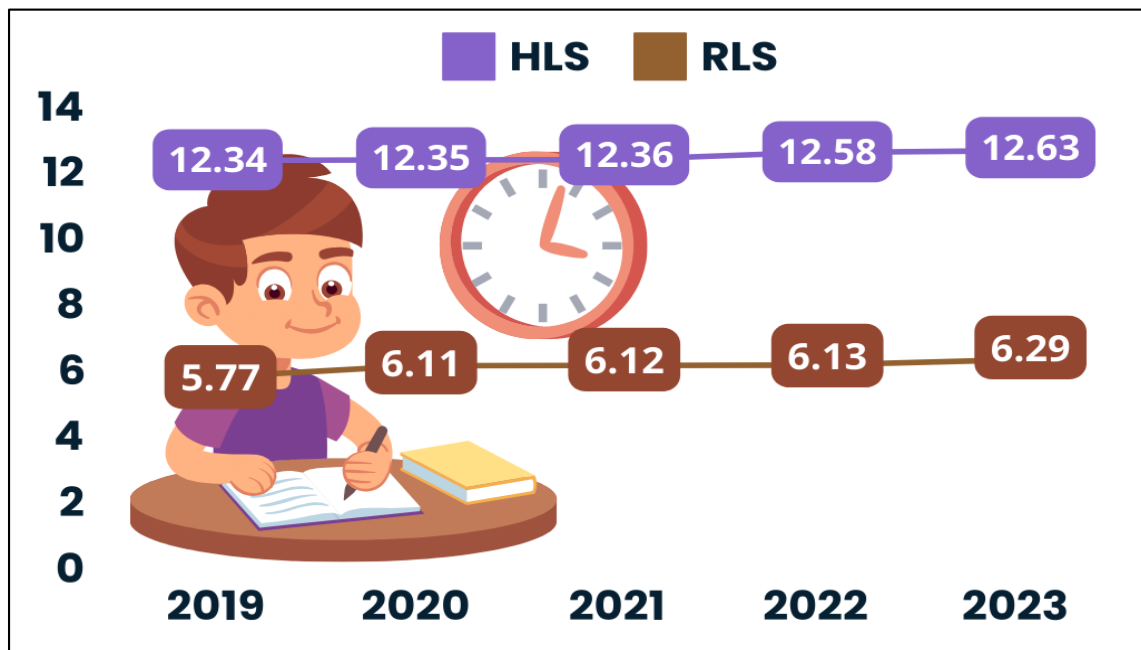
kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian capaian IPM di Kabupaten Probolinggo masih di bawah capaian IPM di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Pada IPM Aspek Ekonomi diukur melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan daya beli. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Pada Kabupaten Probolinggo di tahun 2019 sebesar Rp.10.972, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.10.859, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali Rp 10.969, kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp.11.254, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi Rp.11.756, angka ini disebabkan karena dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh signifikan pada perekonomian daerah.

Pada IPM aspek pendidikan, terdapat dua poin capaian pembangunan di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2019 hingga 2023. Diantaranya yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Untuk lebih rincinya, capaian pembangunan di aspek pendidikan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 39
Capaian Pembangunan Aspek Pendidikan Kabupaten Probolinggo



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak lahir. HLS digunakan sebagai salah satu variabel ukuran dalam aspek pendidikan untuk penghitungan IPM, yaitu untuk menghitung Indeks Pendidikan, yang sebelumnya menggunakan variabel Angka Melek Huruf (AMH). AMH sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu BPS mengganti ukuran AMH dengan ukuran HLS untuk penghitungan Indeks Pendidikan.

Berdasarkan data diatas perkembangan capaian indikator angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo yakni 12,34 tahun. Capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 12,35 tahun di tahun 2020 dan menjadi 12,36 di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2022 capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo meningkat jauh yakni 12,58. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 12,63 tahun.

Artinya penduduk usia sekolah jenjang SD s/d SMA/SMK/Sederajat di Kabupaten Probolinggo telah memiliki harapan lama sekolah hingga jenjang menengah atas.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator yang mempengaruhi nilai IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo menurut data diatas pada tahun 2019-2023 mengalami tren yang positif. Pada tahun 2019 capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 5,77 tahun. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 6,11 tahun. Dan pada tahun 2021 dan 2022 capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan pesat menjadi 6,12 tahun dan 6,13 tahun. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 6,29 tahun.

Pada aspek kesehatan Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa poin capaian pembangunan diantaranya angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH, Angka Usia Harapan Hidup, Prevalensi Gizi Buruk, Prevalensi Gizi Kurang, Indeks Kesehatan, dan Prevalensi Balita Stunting. Untuk lebih rincinya dijabarkan pada beberapa poin berikut.

Tabel 2. 44
Capaian Pembangunan Aspek Kesehatan Kabupaten Probolinggo

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH	990,2	991,89	989,6	987,4	987
2.	Angka Usia Harapan hidup	67,00	67,2	67,36	67,78	68,12
3.	Prevelansi Gizi Buruk	1,65	1,89	1,25	1,15	1,02
4.	Prevelansi Gizi Kurang	9,6	12,1	7,34	8,1	7,6
5.	Indeks Kesehatan	0,72	0,73	0,73	0,82	0,83
6.	Prevalensi Balita Stunting	16,37	16,1	14,98	14,68	12,77
7.	Indeks Keluarga Sehat	0,72	0,82	0,82	0,83	0,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Capaian angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Probolinggo sebesar 990,2 per 1.000 KH. Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 991,89 per 1.000 KH. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 989,6 per 1.000 KH. Pada tahun 2022 capaian angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 KH kembali turun menjadi 987,4 per 1.000 KH. Kondisi ini terus terjadi pada tahun 2023 menjadi 987 per 1.000 KH.

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu ukuran demografi yang memperlihatkan kondisi kesehatan masyarakat. Usia anak sebelum mencapai satu tahun sangat rentan dengan berbagai penyakit, sehingga resiko kematian menjadi semakin tinggi dari aspek ini, pengamatan harapan hidup dengan menggunakan alat ukur Angka Harapan Hidup menjadi cukup penting.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau *Life Expectancy* (LE) menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari beberapa hal seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain. Oleh karena itu AHH cukup representatif digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi pencapaian angka harapan hidup di suatu daerah secara tidak langsung dapat menggambarkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022 telah menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo sebesar 67,00 tahun, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 67,2 tahun. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan dasar yang meliputi penyediaan sarana prasarana, pelayanan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Probolinggo sudah meningkat.

Begitupun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 67,36 tahun. Kemudian terus pada tahun 2022 hingga mencapai 67,78 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 68,12 tahun.

3. Prevelansi Gizi Buruk

Prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2019 prevelansi gizi buruk di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,65%, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,89%. Adapun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,25%. Penurunan kembali terjadi secara konsisten pada tahun 2022 menjadi 1,15% dan tahun 2023 menjadi 1,02%. Capaian ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya menurunkan angka prelevansi gizi buruk.

4. Prevelansi Gizi Kurang

Prevelansi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2019 prevalensi gizi kurang di Kabupaten Probolinggo sebesar 9,6% kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 12,1%. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 7,34%. Sementara pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 8,1%. Namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 7,6%.

5. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan dihitung melalui Angka Harapan Hidup, angka harapan hidup (*life expectancy*) adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Indeks kesehatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,72. Sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,73. Sementara pada tahun 2022 mulai naik di angka 0,82. Pada tahun 2023 Indeks Kesehatan Kabupaten Probolinggo meningkat signifikan menjadi 0,83. Peningkatan ini merupakan wujud dari keseriusan Pemerintah Probolinggo dalam memperbaiki jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2023 kebijakan kesehatan difokuskan pada penanganan stunting, penurunan AKI/AKB serta penanganan

penyakit menular dan tidak menular dengan capaian indeks kesehatan sebesar 109,21% namun masih ditemukan beberapa hambatan diantaranya :

- a. Kurangnya Akses Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak Belum Optimal
- c. Peningkatan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- d. Masih rendahnya kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat

6. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi balita stunting menunjukkan persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Probolinggo sebesar 16,37, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 16,1. Kemudian pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 14,98. Penurunan ini terus terjadi pada tahun 2022 menjadi 14,68 dan pada tahun 2023 menjadi 12,77.

E. Indek Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dan ketidak berhasilan daerah yang mencakup pengukuran terhadap jalan berkeselamatan, luasan sawah teraliri, akses air minum layak, dan sanitasi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 45
Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	N/A	N/A	1.83	2,10	2,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tahun 2024

Pada table diatas dapat dilihat bahwa IPI merupakan hal baru yang datanya dapat dihitung pada tahun 2021 dengan angka 1.83. Dalam periode 2021 hingga 2023, Indeks Pembangunan Infrastruktur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan kemajuan dalam pengembangan infrastruktur daerah. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan capaian menjadi 2.10 yang menunjukkan peningkatan pula dalam hal penyediaan infrastruktur. Pada tahun 2023 angka indeks mencapai 2.15 yang menunjukkan peningkatan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya upaya – upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

F. Indek Good Governance

Indek good governance (IGG) pada Kabupaten Probolinggo dapat dipengaruhi oleh Sistem tata kelola yang diakui memberikan pengaruh positif adalah prinsip *Good Governance*, yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Pengawasan; 3) Daya Tanggap; 4) Profesionalisme; 5) Efisiensi dan Efektivitas; 6) Transparansi : Terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui tersedianya informasi dan menjamin mudahnya mendapat informasi; 7) Kesenjangan; 8) Wawasan ke depan; 9) Partisipasi; 10) Penegak Hukum.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pencapaian reformasi birokrasi diukur menggunakan indeks reformasi birokrasi. Capaian kinerja IRB pada Kabupaten Probolinggo di tahun

2019 sebesar 66,81. Pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 67. Sementara pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 70. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2023 secara signifikan menjadi 77.26. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 46
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

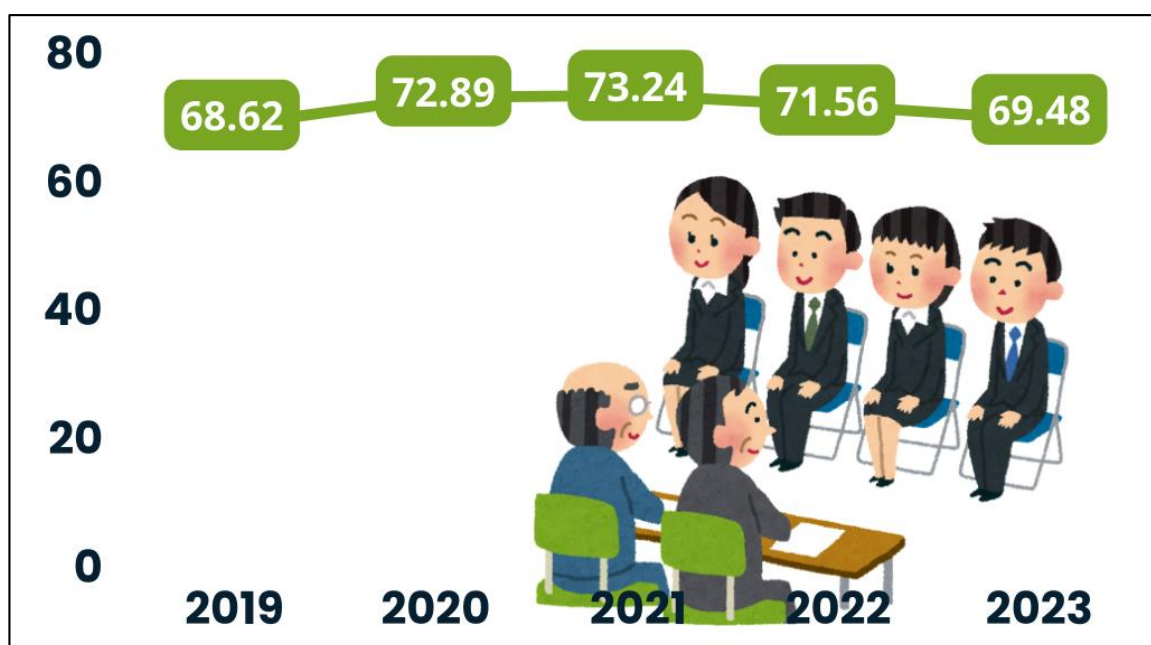
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	66.81	67	65	70	77.26

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

G. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan capaian indikator TPAK di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Probolinggo

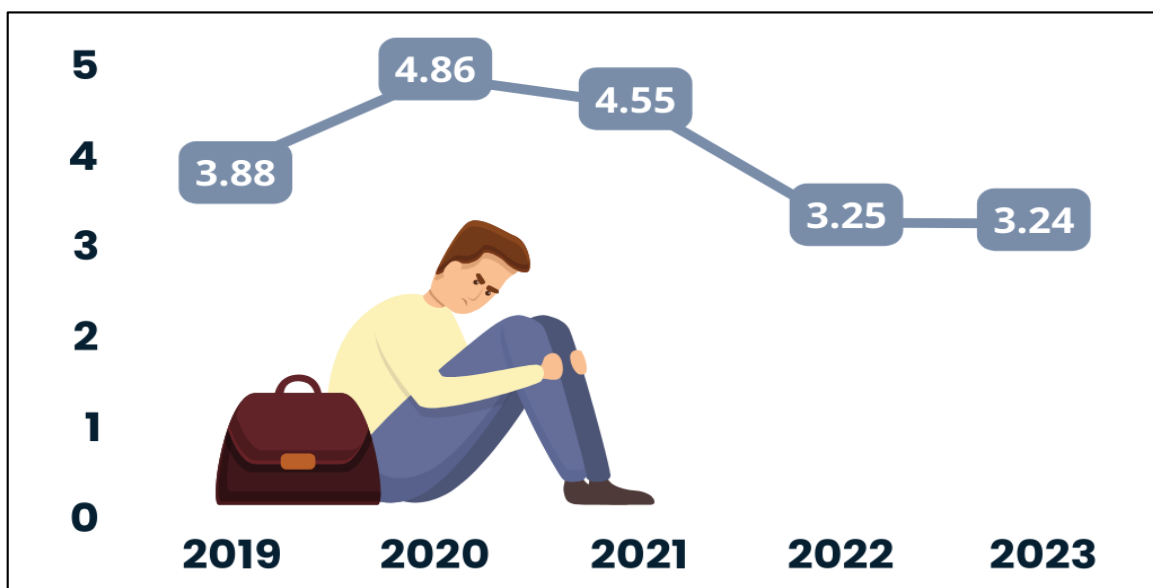


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2024

Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 68,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 68,62 persen bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 73,24%. Sayangnya tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 71,56%. Kemudian kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 69,48%.

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (*open unemployment*). Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Perkembangan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 41
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 fluktuatif namun cenderung menurun pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada terjadi peningkatan dan penurunan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo turun menjadi 3,88%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 4,86% dan ini merupakan persentase tingkat pengangguran tertinggi dalam periode 2019-2023. Hal ini disebabkan dampak dari pandemi covid-19, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Kemudian pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 4,55% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 3,25%. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali hingga mencapai 3,24% atau turun 0,01% jika dibanding tahun sebelumnya.

Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir periode 2019-2023, tahun 2023 adalah persentase tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa mobilitas pekerjaan di Kabupaten Probolinggo sudah

kembali bangkit pasca pandemi covid-19, dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan terus menyiapkan langkah-langkah guna menekan angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo.

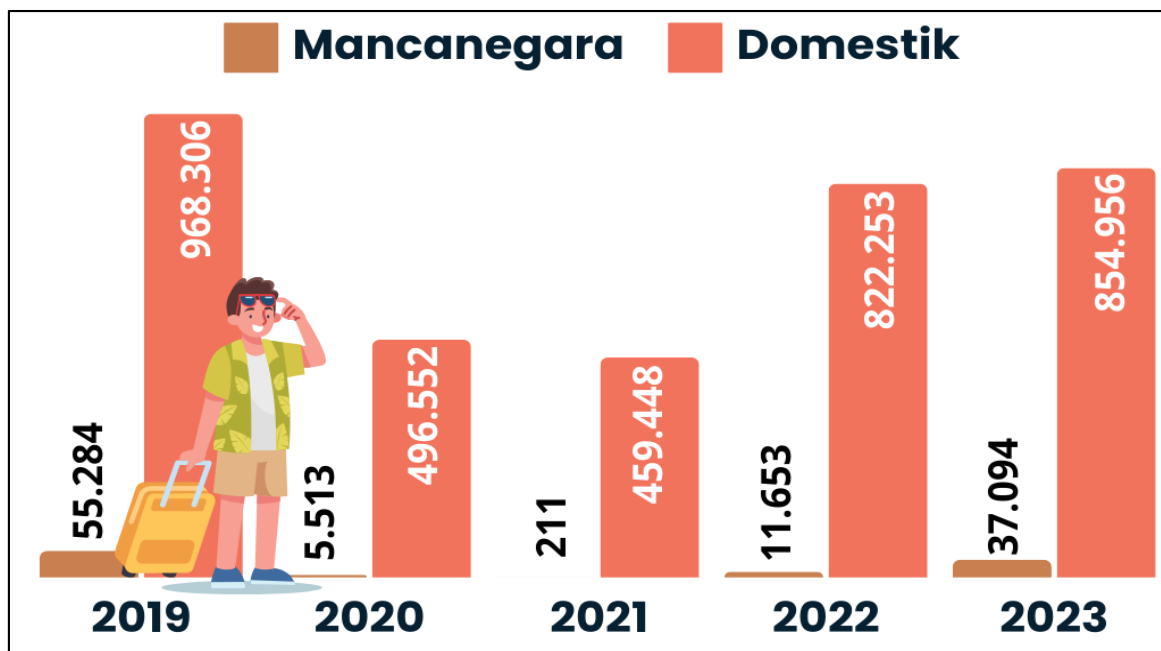
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Keberadaan beberapa jenis kesenian yang khas dari Kabupaten Probolinggo menunjukkan tingkat apresiasi budaya oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo juga cukup tinggi.

1. Pariwisata

Berdasar data dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, total kunjungan pariwisata di Kabupaten Probolinggo di sektor Domestik mencapai 968.306 pengunjung pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan pengunjung yang cukup signifikan. Data pengunjung tahun 2020 sebanyak 496.552 yang berarti turun sebanyak 471.754 pengunjung jika dibanding tahun 2019. Kemudian turun kembali menjadi 459.448 pengunjung pada tahun 2021 namun kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 822.253 pengunjung. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah pengunjung domestik sebanyak 32.703 pengunjung, sehingga wisatawan domestik pada tahun 2023 Kabupaten Probolinggo sebanyak 854.956 pengunjung. Wisatawan dari Mancanegara juga mengalami hal serupa, tercatat ada 55.284 pengunjung di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis akibat dari adanya covid-19. Jadi pada tahun 2020 untuk capaian indikator jumlah pengunjung domestik menjadi 496.552, sedangkan untuk pengunjung mancanegara menjadi 5.513, dan pada tahun 2021 semakin menurun baik pengunjung mancanegara maupun pengunjung domestik. Pada tahun 2022 baik pengunjung domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan yang signifikan ini juga terjadi pada tahun 2023 dimana peningkatan jumlah pengunjung mancanegara ini mencapai 37.094 pengunjung. Untuk lebih detail dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:

Gambar 2. 42
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

2. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang kepemudaan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo guna meningkatkan kualitas pemuda Kabupaten Probolinggo. Berikut data jumlah pemuda yang dibina dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 2. 47
Data Jumlah Pemuda dan Atlet Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pemuda yang dibina	Orang	799	553	581	675	452
2.	Jumlah atlet yang dibina	Orang	398	409	615	375	811

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Dalam periode lima tahun terakhir, terdapat dinamika yang cukup signifikan dalam program pembinaan pemuda dan atlet di daerah ini. Data menunjukkan

fluktuasi dalam jumlah pemuda dan atlet yang dibina dari tahun ke tahun. Selama periode ini, jumlah pemuda yang dibina menunjukkan angka yang fluktuatif. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, dampak ekonomi, dan faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi program pembinaan. Sedangkan untuk jumlah atlet yang dibina, terlihat tren yang lebih positif. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam memperluas dan meningkatkan program pembinaan atlet.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan pembinaan pemuda dan atlet di daerah ini. Fluktuasi yang terlihat mungkin mencerminkan respons terhadap tantangan dan kebutuhan yang berubah seiring waktu. Penurunan pada jumlah pemuda yang dibina diimbangi dengan peningkatan yang signifikan pada jumlah atlet yang dibina, menunjukkan adanya fokus yang kuat dalam mengembangkan potensi olahraga di daerah ini. Ke depannya, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka-angka ini dan menyusun strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja program pembinaan di masa yang akan datang.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Pada Kabupaten Probolinggo dalam fokus kesejahteraan sosial dan budaya juga dapat diketahui dari beberapa permasalahan yang terkait dengan tindak penyalahgunaan narkoba. Terkait hal tersebut, Kabupaten Probolinggo menjadikan indikator kinerja daerah untuk mengurangi kendala yang diakibatkan lingkungan sosial budaya.

Tabel 2. 48
Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023

Kepolisian Resort/ District Police Office	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Berdasarkan Kasus dan Tersangka / By popularity case and suspect			
1. Jumlah Kasus/ Number of Case	75	116	140
2. Jumlah Tersangka/ Number of Suspects	87	152	161
B. Berdasarkan Jenis Kelamin / By Sex			
1. Laki-laki / Male	84	145	145
2. Wanita / Female	3	7	7
C. Berdasarkan Profesi / Based Profession			

Kepolisian Resort/ District Police Office	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Swasta / Private	48	40	82
2. Petani / Farmers	17	30	15
3. Tuna Karya / unemployment	-	57	32
4. Mahasiswa / students	16	20	13
5. Ibu Rumah tangga/ Housewife	3	5	13
D. Berdasarkan Umur / By Age			
1. < 17.Tahun	42	-	-
2. 17.s/d 25.Tahun	16	57	33
3. 26.s/d 35.Tahun	18	60	71
4. 36.s/d 45.Tahun	11	22	41
5. > 45.Tahun	-	13	11

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Data menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan, dengan laki-laki menjadi pelaku dominan dalam hampir seluruh periode pengamatan. Jumlah pelaku laki-laki tetap tinggi dan stabil, sedangkan pelaku wanita tetap rendah meskipun ada sedikit peningkatan. Hal ini menegaskan bahwa pria merupakan kelompok yang paling banyak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Sektor swasta menjadi sumber utama pelaku, dengan jumlah pelaku dari sektor ini mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren kenaikan secara keseluruhan. Kelompok usia 26 hingga 35 tahun adalah yang paling banyak terlibat, dengan angka yang meningkat signifikan dari periode pertama ke periode ketiga. Ini menunjukkan bahwa kelompok usia ini mungkin merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Sedangkan kategori pengangguran menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan lonjakan besar pada periode kedua dan penurunan pada periode ketiga. Selain itu, terdapat indikasi bahwa penyalahgunaan narkoba juga mulai mempengaruhi lebih banyak ibu rumah tangga dan kelompok usia yang lebih tua dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok-kelompok ini. Hal ini dilakukan mengingat kasus penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu factor

terbesar penyebab kerusakan kesehatan fisik dan mental yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan social dan budaya suatu daerah.

4. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan $IKS > 0,8$ (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

Dalam penjabaran visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Probolinggo, program pemerintah daerah berupa Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dimana Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikatornya. Untuk menerjemahkan program tersebut. Berdasarkan data indeks kesehatan Kabupaten Probolinggo dari tahun 2019 hingga 2023, dapat dilakukan beberapa analisa sebagai berikut:

1. **Stabilitas Awal (2019):** Indeks kesehatan pada tahun 2019 menunjukkan stabilitas dengan nilai 0,72. Tidak ada peningkatan atau penurunan dalam periode ini, yang mungkin menunjukkan bahwa kondisi kesehatan secara umum stabil selama dua tahun tersebut.
2. **Peningkatan yang Signifikan (2020):** Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan dalam indeks kesehatan menjadi 0,82, naik 0,10 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti program kesehatan yang efektif, peningkatan akses ke layanan kesehatan, atau perubahan dalam indikator kesehatan yang digunakan.
3. **Stabilitas di Tingkat Baru (2020-2021):** Setelah peningkatan pada tahun 2020, indeks kesehatan tetap stabil pada 0,82 hingga tahun 2021. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan yang dicapai pada tahun 2020 berhasil dipertahankan selama setahun berikutnya.

4. **Peningkatan Kecil dan Stabilitas (2022-2023):** Pada tahun 2022, indeks kesehatan meningkat lagi sebesar 0,01 menjadi 0,83, dan angka ini bertahan hingga tahun 2023. Peningkatan kecil ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kesehatan di daerah tersebut, meskipun peningkatan tersebut tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2020.

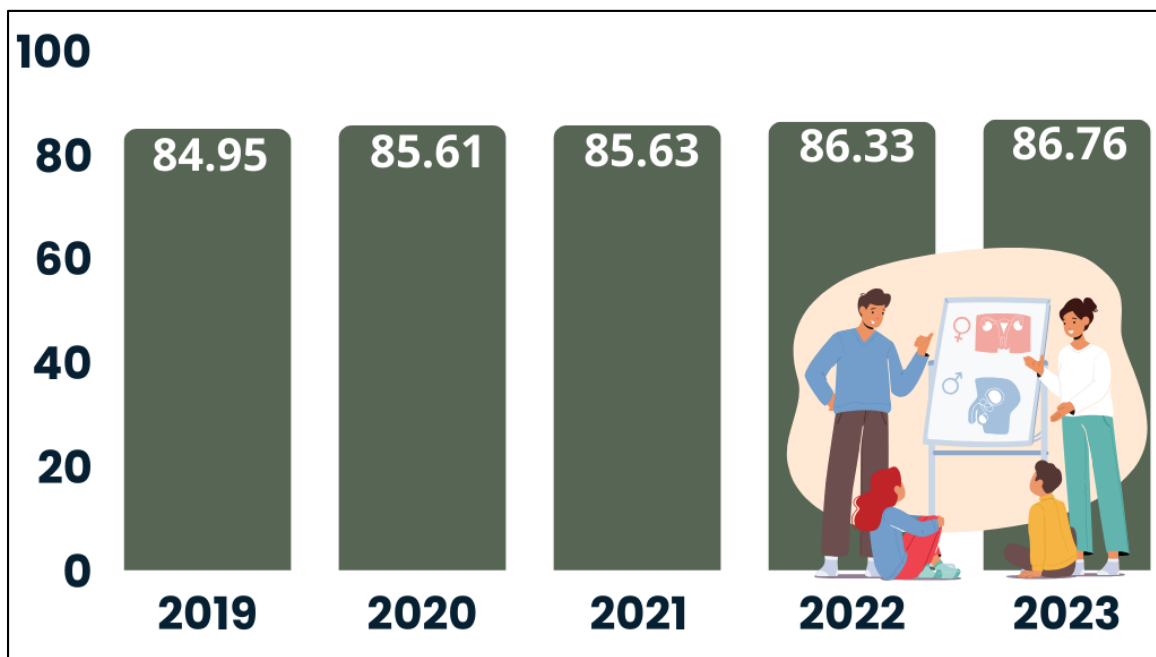
Secara keseluruhan, dari tahun 2019 hingga 2023, indeks kesehatan Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren yang positif dengan dua periode stabilitas dan dua periode peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam sistem kesehatan di Kabupaten Probolinggo yang berhasil dipertahankan selama beberapa tahun.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dengan kata lain, kondisi sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada kabupaten Probolinggo ada beberapa komponen pencapaian yaitu Angka Harapan Hidup Laki-laki, Angka Harapan Hidup Perempuan, Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Harapan Lama Sekolah Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, Pengeluaran Laki-laki (000 Rp/kapita), Pengeluaran Perempuan (000 Rp/kapita), Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki, Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut;

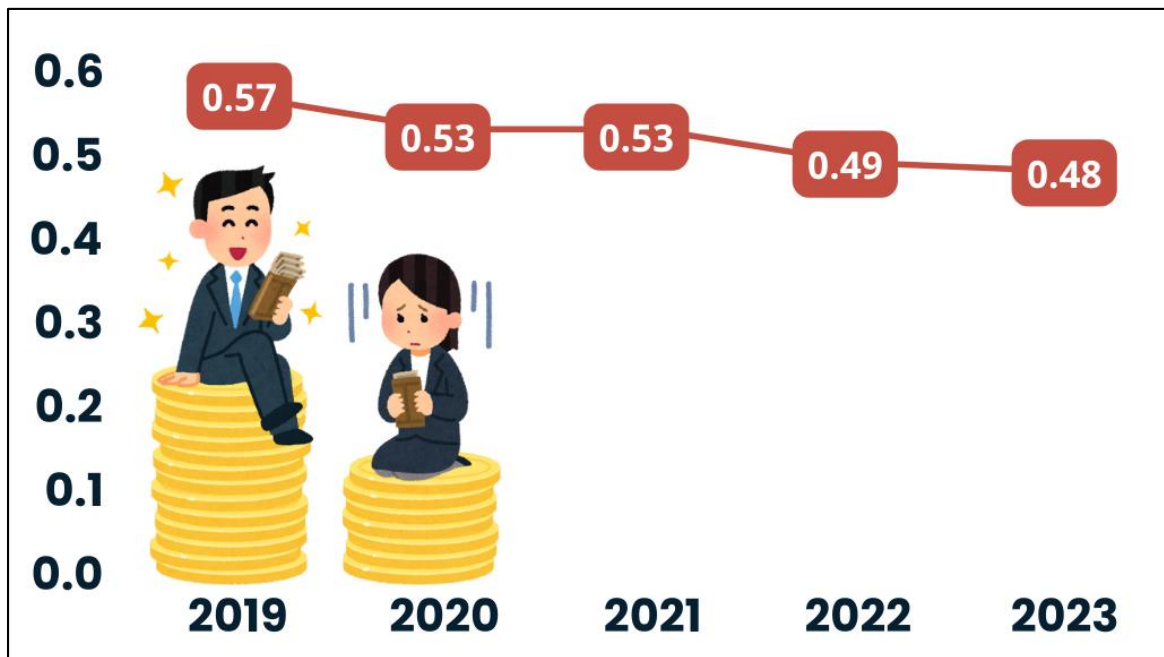
Gambar 2. 43
IPG Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada kabupaten Probolinggo pada periode tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai indeks pembangunan gender Kabupaten Probolinggo sebesar 84,95. Kemudian pada akhir periode tahun 2023 tercatat capaian indikator ini meningkat menjadi 86,76. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun hal ini menandakan Kabupaten Probolinggo secara konsisten terus melakukan perbaikan dalam pembangunan dan pemberdayaan gender.

Gambar 2. 44
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada kabupaten Probolinggo pada periode tahun 2019-2023 mengalami tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dengan terus menurunnya ketimpangan gender yang terjadi di Kabupaten Probolinggo meskipun pada periode tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi stagnan. Pada tahun 2019 nilai indeks ketimpangan gender Kabupaten Probolinggo sebesar 0,57. Kemudian pada akhir periode tahun 2023 tercatat capaian indikator ini meningkat menjadi 0,48.

6. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Untuk mengetahui Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Probolinggo, Anda bisa menghubungi Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan setempat atau melihat laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia. Laporan tahunan atau data terkait biasanya dipublikasikan oleh lembaga-lembaga ini dan dapat memberikan informasi detail tentang kondisi dan upaya perlindungan anak di wilayah tersebut.

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tersebut telah dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo. Hal ini dapat diketahui dari data penanganan anak korban kekerasan yang mencapai 100 persen sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, hal ini dikarenakan jumlah pengaduan dapat teratasi seluruhnya.

Tabel 2. 49
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun
	2022
Hak Sipil dan Kebebasan	48.11
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	68.41
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	73.73
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	27.83
Perlindungan Khusus	77.44
Indeks Perlindungan Anak	59,99

Sumber : DP3AP2KB, tahun 2024

Nilai IPA di Kabupaten Probolinggo yang di rilis hanya tahun 2022, sementara untuk tahun sebelum tahun 2022 Kabupaten Probolinggo belum ada data yang di publikasikan/dirilis, hal ini dikarenakan Kabupaten Probolinggo belum melakukan perhitungan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator PDRB, laju inflasi, pengeluaran konsumsi pangan per kapita, nilai tukar petani, dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Probolinggo atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 38.932,78 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 3.327,26 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 35.605,52 milyar rupiah. Kemudian peningkatan juga terjadi pada tahun 2023 mencapai 42.376,92 milyar. Kenaikan nilai PDRB ini adalah kenaikan tertinggi dalam periode 2019-2023 dan menunjukkan bahwa sudah mulai membaiknya perekonomian Kabupaten Probolinggo pasca dihantam pandemi Covid-19. Sejalan dengan harga berlaku, berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari 22.898,24 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 23.664,39 milyar rupiah pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 menjadi 24.734,19 milyar. Kemudian pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 25.904,92 milyar.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Probolinggo didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, di

antaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Probolinggo.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 masih dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 32,3 persen (angka ini mengalami penurunan sebesar dari pada tahun 2022 yang mencapai 32,87 persen). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 26,7 persen (meningkat dari 26,01 persen pada tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,00 persen. Berikutnya, lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,0 persen (meningkat dari 6,97 persen pada tahun 2022), serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,0 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 3,10 persen. Secara keseluruhan dalam periode 2019-2023 struktur perekonomian Kabupaten Probolinggo fluktuatif.

Tabel 2. 50
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019– 2023

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022**	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	32,73	33,64	33,08	32,87	32.3
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	2,16	2,05	1,99	1,92	2.0
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	24,74	24,83	25,75	26,01	26.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	0,92	0,92	0,90	0,88	0.9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,11	0,11	0,11	0,10	0.1
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	7,43	7,07	6,91	6,97	7.0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	13,09	12,40	12,77	13,00	13.00

H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,00	0,97	0,99	1,10	1.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,76	1,59	1,61	1,72	1.8
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2,69	2,91	2,89	2,77	2.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,02	2,03	1,98	1,96	2.0
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,36	2,44	2,35	2,25	2.2
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,37	0,36	0,35	0,34	0.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,39	3,51	3,29	3,10	3.0
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,74	2,86	2,72	2,52	2.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,61	0,68	0,69	0,67	0.6
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,86	1,60	1,61	1,79	1.7
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2024

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan adalah kategori yang konsisten mengalami peningkatan peranan selama tahun 2019-2023. Sebaliknya, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masingmasing kurang dari tiga persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Oleh karena harga yang digunakan adalah konstan, yang berarti bahwa faktor inflasi sudah diabaikan, maka kenaikan PDRB ADHK dipicu oleh bergeliatnya kembali produksi barang dan jasa di berbagai lapangan usaha pasca dihantam pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami kenaikan dari 22.898,24 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 23.664,39 milyar rupiah pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 menjadi 24.734,19 milyar. Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Probolinggo perlahan-lahan sudah menuju pulih kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.

Selama tahun 2023, ekonomi Kabupaten Probolinggo tumbuh positif sebesar 4,73 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha, semuanya mengalami pertumbuhan positif dan tidak ada kategori yang mengalami pertumbuhan negatif. Tiga kategori dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,64 persen; kemudian disusul oleh sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 8,49 persen; dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,31 persen.

Sementara sektor yang mengalami penurunan namun masih diangka positif adalah sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,92 persen turun 0,13 persen dari 1,05 persen pada tahun 2022; sektor Pengadaan Listrik; sektor Kontruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Trransportasi dan Pergudangan; sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; terakhir yang mengalami penurunan sangat signifikan ada di sektor Jasa Lainnya yakni sebesar 1,20 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 16,51 persen, maka terjadi penurunan sebesar 15,31 persen.

Apabila dilihat lebih rinci lagi, subkategori Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 6,65 persen. Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara bertahap mulai serius dalam menjaga kualitas Pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Kemudian sektor Jasa Keuangan dan Asuransi juga tumbuh cukup signifikan yakni sebesar 5,6 persen. Sub kategori lain yang

mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah Pertambangan dan Penggalian, yakni sebesar 5,43 persen. Kebijakan pemerintah terkait aktivitas pertambangan yang baik selama tahun 2023 turut berdampak pada meningkatnya subkategori ini.

Tabel 2. 51
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Probolinggo Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	1,09	0,02	1,03	2,11	3,33
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0,28	-7,51	-0,02	3,06	8,49
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,10	-1,14	6,44	5,33	5,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,18	0,72	1,85	5,96	4,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	4,02	3,24	0,99	0,44	3,01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,47	-6,11	2,07	7,25	6,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,25	-7,46	6,23	6,34	4,96
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	9,30	-4,90	8,34	15,05	11,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,31	-11,39	2,00	12,76	5,57
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,06	6,98	4,77	4,44	4,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,51	-0,33	0,31	1,84	7,44
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,12	1,78	0,85	3,78	4,71
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,28	-6,61	1,52	4,32	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,11	-2,21	-0,37	1,05	0,92
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,23	2,41	0,88	0,07	6,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,59	9,61	4,74	3,56	1,17
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,24	-15,52	3,01	16,51	1,20
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		4,56	-2,12	3,35	4,52	4,73

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah/PDRB yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Kendati dihantam pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, namun nilai PDRB per kapita Kabupaten Probolinggo ADHB selama tahun 2019-2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 29.094 ribu rupiah. Secara nominal angka ini terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 30.803 ribu rupiah. Dibandingkan tahun 2020, PDRB per kapita ADHB tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.523 ribu rupiah atau 5,20 persen. Kenaikan nilai PDRB per kapita ADHB masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selain itu, nilai PDRB per kapita yang disajikan juga tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar/masuk Kabupaten Probolinggo sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keadaan pendapatan riil masyarakat. Sementara itu, tren PDRB per kapita ADHK 2010 selama lima tahun terakhir (2019-2023) juga mengalami kenaikan, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHK 2010 sebesar 20.473 ribu rupiah, mengalami kenaikan 590 ribu rupiah atau 2,97 persen dibandingkan tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 hanya berdampak negatif selama setahun terhadap pendapatan rata-rata masyarakat.

Tabel 2. 52
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten
Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator/ <i>Indicator</i>	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB/GRDP (milliar rupiah/ <i>billion rupiah</i>)					
- ADHB/ <i>at Current Market Prices</i>	34.014	33.721	35.606	38.932	42.376
- ADHK/ <i>at 2010 Constant Market Prices</i>	23.395	22.898	23.664	24.734	25.904
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (ribu rupiah/ <i>thousand rupiah</i>)					
- ADHB/ <i>at Current Market Prices</i>	34.014	33.721	35.606	38.932	42.376
- ADHK/ <i>at 2010 Constant Market Prices</i>	23.395	22.898	23.664	24.734	25.904
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)/ <i>Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Market Prices (%)</i>	3,93	-0,64	2,97	2,97	4,38
Penduduk/ <i>Population</i>					
- Jumlah Penduduk (ribu orang)/ <i>Population (thousand people)</i>	1.169,1	1.151,7	1.155,9	1.159,9	1.163,8
- Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ <i>Population Growth (Percent)</i>	0,60	-1,49	0,37	0,35	0,34

Sumber:

Penduduk 2019 bersumber dari proyeksi SUPAS2015

Penduduk 2020-2021 bersumber dari proyeksi SP2020

Selanjutnya yang juga menjadi indikator bagi perekonomian daerah adalah inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sedangkan tingkat inflasi, menunjukkan persentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian satu wilayah. Secara umum pada Tahun 2021 Kabupaten Probolinggo mengalami inflasi (kumulatif inflasi) sebesar 1,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat mengalami penurunan. Sementara pada tahun 2022, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan. Lonjakan inflasi ini terjadi dikarenakan banyak faktor, seperti adanya ketidak

stabilan harga BBM yang berperan penting dalam mendukung distribusi perekonomian. Kenaikan BBM ini akhirnya berdampak pada kenaikan harga bahan pangan maupun non pangan. Kemudian pada tahun 2023 laju inflasi Kabupaten Probolinggo mulai menurun menjadi 2,86%. Perkembangan inflasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Tabel 2. 53
Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo	1.99	1.88	1.76	5.45	2.86

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Perkembangan indikator kinerja pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 mengalami kondisi fluktuatif. Dimana pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo sebesar 55,70% dan 2020 meningkat menjadi sebesar 55,84%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 56,29% dan menjadi 60,06% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 57,4%. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. 54
Hasil Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	%	55,70	55,84	56,29	60,06	57,4
2.	Nilai tukar petani	Nilai	-	100,38	101	105,08	107,85
3.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	%	44,30	44,16	43,71	39,94	42,6

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Selanjutnya, Perkembangan indikator kinerja nilai tukar petani (NTP) di Kabupaten Probolinggo Pada tahun 2019 tidak terdapat data terkait dengan NTP. Kemudian pada tahun 2020 NTP Kabupaten Probolinggo mencapai 100,38. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 101. Kemudian meningkat kembali pada tahun

2022 nilai tukar petani menjadi 105,08. Pada tahun 2023 Nilai Tukar Petani Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 107,85.

Selanjutnya, Perkembangan indikator kinerja pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2019-2023 sebagaimana data diatas mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Probolinggo mencapai 44,3% dan di tahun 2020 turun menjadi 44,16%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi 43,71%. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Probolinggo kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 39,94%. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 42,6%.

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Probolinggo didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Probolinggo. Peranan pembentukan terbesar PDRB dalam Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 masih dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 32,28 persen meskipun angka ini terus menurun dari 32,73 persen pada tahun 2019. Salah satu penyebab menurunnya peranan sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 mencapai 13.680,73 miliar rupiah atau sebesar 32,28 persen terhadap total PDRB. Sektor ini mencakup subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan subsektor Perikanan. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura Perkebunan Semusim, Semusim, Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya, Perkebunan Tahunan, Peternakan,

serta Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Meskipun secara nominal kontribusinya terus meningkat, namun secara persentase, kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan dari 32,73 persen pada tahun 2019 hingga menjadi 32,28 persen pada tahun 2023. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan serta keadaan cuaca yang semakin tidak menentu membuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Probolinggo perlahan-lahan semakin berkurang. Di tengah fenomena el nino yang melanda Kabupaten Probolinggo selama tahun 2023, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Probolinggo mampu tumbuh positif sebesar 3,33 persen. Musim kemarau yang berlangsung cukup lama mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi daun tembakau dan bawang merah yang merupakan komoditas strategis pertanian Kabupaten Probolinggo.

Kondisi sosial masyarakat ekonomi masyarakat yang sudah berjalan normal dan adanya momentum berbagai aktivitas menjelang Pemilu 2024 mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai lapangan usaha penopang perekonomian Kabupaten Probolinggo terbesar kedua dan ketiga turut terdampak imbasnya sehingga masing-masing mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,58 persen dan 4,96 persen.

Potensi sektor ekonomi di Kabupaten Probolinggo sangat menjanjikan, terutama dalam sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar serta Eceran. Dengan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 5,58 persen dan 4,96 persen, ada peluang besar untuk meningkatkan kontribusi kedua sektor ini terhadap perekonomian daerah. Investasi dalam teknologi dan pelatihan tenaga kerja bisa lebih mendorong efisiensi dan produktivitas. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung akan memperkuat rantai pasokan dan distribusi, membuka peluang usaha baru, dan menarik minat investor. Dengan strategi yang tepat, sektor-sektor ini bisa menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo, menciptakan lapangan kerja baru dan

memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Probolinggo menyimpan potensi pengembangan yang signifikan. Pertumbuhan positif yang dicatatkan sebesar 4,96 persen mencerminkan permintaan yang kuat dan peluang untuk ekspansi lebih lanjut. Dengan mengoptimalkan teknologi digital dan platform e-commerce, sektor ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan pusat perbelanjaan modern dan pasar lokal yang terintegrasi dapat menarik lebih banyak konsumen serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Investasi dalam pelatihan sumber daya manusia juga akan meningkatkan kualitas layanan dan manajemen, memperkuat daya saing lokal. Dengan strategi yang tepat, sektor ini tidak hanya dapat memperluas basis konsumen tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Probolinggo.

Selain itu sector Pariwisata juga merupakan sector potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sector unggulan penopang perekonomian Kabupaten Probolinggo. Dengan diterbitkannya Perpres 80 tentang Pengembangan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan potensi besar dalam sektor pariwisata. Perpres ini memberikan dasar hukum dan dorongan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di kawasan tersebut, yang merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Indonesia.

Berikut adalah beberapa aspek kunci dari potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perpres 80:

1. **Peningkatan Infrastruktur:** Perpres 80 memungkinkan perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang esensial seperti jalan, fasilitas parkir, dan sarana transportasi. Peningkatan aksesibilitas ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan mempermudah wisatawan untuk mencapai destinasi dan menjelajahi keindahan alam yang ada.
2. **Pengelolaan dan Konservasi:** Fokus pada konservasi dan pengelolaan kawasan yang lebih baik akan memastikan bahwa keindahan alam dan ekosistem di Taman Nasional tetap terjaga. Upaya ini mencakup pemeliharaan

lingkungan serta perlindungan flora dan fauna, yang sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata.

3. **Pengembangan Produk Wisata:** Perpres ini juga membuka peluang untuk pengembangan berbagai produk wisata, seperti paket tur, kegiatan outdoor, dan pengalaman budaya lokal. Ini termasuk kegiatan seperti trekking, fotografi, dan festival budaya yang akan menarik wisatawan dari berbagai kalangan.
4. **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Melalui program-program yang terintegrasi, komunitas lokal dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata. Ini mencakup pelatihan dalam pelayanan wisata, pembuatan kerajinan lokal, dan pengembangan homestay, yang tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
5. **Promosi dan Branding:** Dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Perpres, ada peluang untuk meningkatkan promosi dan branding destinasi wisata Probolinggo. Kampanye pemasaran yang strategis akan menarik perhatian lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk menjelajahi keunikan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
6. **Kolaborasi Multi-Pihak:** Perpres 80 membuka peluang untuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam pengembangan kawasan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa berbagai aspek pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara sinergis dan efektif.

Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Probolinggo berpotensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Fokus Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi menjadi salah satu indikator strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan.

Pada Kabupaten Probolinggo, tingkat SDM dalam kemandiriannya dapat dilihat pada tingkat ketergantungan, hal ini menjadi indikator daerah untuk mencapai target ketidak tergantungan SDM di wilayah Kabupaten Probolinggo terutama terkait dengan kemandirian ekonomi untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Probolinggo. Angka persentase tingkat ketergantungan SDM di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 55
Hasil Kinerja Fokus Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	Indeks	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	10,67	12,6	12,67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68.62	72.89	73.24	71.56	69.48
Angkatan Kerja Perempuan	Orang	240.139	276.845	282.752	277.430	234.738
Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	903.780	924.330	931.584	938.467	918.314
TPAK Perempuan	Persen	26.57	29.95	30.35	29.56	26.54

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Pada periode 2019 hingga 2021, terdapat peningkatan signifikan dalam angkatan kerja perempuan serta tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK), menunjukkan kemajuan dalam integrasi perempuan ke dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam berbagai upaya untuk memfasilitasi keterlibatan perempuan, baik melalui kebijakan yang mendukung atau melalui perubahan sosial yang memotivasi lebih banyak perempuan untuk bergabung dengan angkatan kerja.

Namun, setelah mencapai puncaknya pada 2021, terdapat penurunan yang signifikan dalam angkatan kerja perempuan dan TPAK. Penurunan ini mengindikasikan adanya masalah yang perlu ditangani lebih dalam. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, atau kondisi sosial

yang tidak mendukung mungkin berkontribusi pada penurunan ini, dan penting untuk melakukan evaluasi mendalam untuk memahami penyebabnya.

Secara keseluruhan, meskipun jumlah pekerjaan meningkat, penurunan dalam keterlibatan perempuan menyoroti perlunya strategi yang lebih efektif. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan harus lebih difokuskan pada pengidentifikasian dan pengurangan hambatan yang ada, serta penerapan kebijakan yang mendukung agar perempuan dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pasar tenaga kerja.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan yang fluktuatif, diantara indikator fasilitas wilayah / infrastruktur yaitu Indeks Jalan Berkeselamatan, Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan, Persentase kawasan permukiman layak, Persentase rumah tangga (RT) pengguna air bersih, dan panjang jalan mantap, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 56
Hasil Kinerja Fokus Wilayah/infrastruktur Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Jalan Berkeselamatan	Indeks	14	17	31	31	32
2	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan	%	59,42	59,94	62,29	62,62	
3	Persentase Kawasan permukiman layak	%	71,03	71,08	71,88	73,5	75,69
4	Rumah tangga pengguna air bersih	%	59,68	62,03	63,01	63,55	64,02
5	Panjang jalan menurut kondisi jalan						
	- Baik	Km		497,72	471,55	600,74	600,74
	- Sedang	Km		137,51	152,25	74,57	74,57
	- Rusak	Km		47,999	155,166	11,82	11,22
	- Rusak Berat	Km		102,59	6,85	91,82	91,82

Sumber: Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Selain infrastruktur diatas, Kabupaten Probolinggo juga mempunyai fasilitas seni dan budaya. Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Keberadaan beberapa jenis kesenian yang khas dari Kabupaten Probolinggo menunjukkan tingkat apresiasi budaya oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo juga cukup tinggi. Apabila dilihat pada capaian indikator jumlah grup kesenian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penambahan grup kesenian pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 jumlah grup kesenian di Kabupaten Probolinggo tidak mengalami perubahan sebanyak 15 grup. Pada tahun 2022 jumlah grup kesenian di Kabupaten Probolinggo mengalami penambahan sebanyak 2 grup menjadi 17 grup dan tidak bertambah sampai dengan tahun 2023.

Selain itu terdapat pula beberapa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Probolinggo. Pelestarian cagar budaya di daerah merupakan langkah krusial dalam mempertahankan identitas dan warisan sejarah yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Cagar budaya, yang meliputi situs-situs arkeologis, bangunan bersejarah, artefak, dan tradisi lokal, menyimpan nilai-nilai penting yang tidak hanya mencerminkan masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Berikut adalah data cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Probolinggo :

Tabel 2. 57
Fasilitas Cagar Budaya Kabupaten Probolinggo

No.	Jenis Cagar Budaya	Rincian	Lokasi	Keterangan
1.	Situs	Candi Jabung	Paiton	Candi peninggalan era Majapahit.
		Candi Lawang Kedaton	Andungbiru, Tiris	Candi peninggalan era Majapahit.
		Candi Kentrung	Ketompen, Pajarakan	Candi peninggalan era Majapahit.
		Patirtan Jabung	Paiton	Terletak di dekat Candi Jabung
		Situs Rengganis	Pandanlaras, Krucil	Reruntuhan keraton Dewi Rengganis
		Situs Batu Tulis	Wangkal, Gading	
2.	Masjid Kuno	Masjid Genggong	Pajarakan	
		Masjid Kalikajar	Paiton	
		Masjid Nurul Jadid	Paiton	

No.	Jenis Cagar Budaya	Rincian	Lokasi	Keterangan
		Masjid Agung Ar-Raudlah	Kraksaan	
		Masjid Darul Lughah	Kraksaan	
3.	Gereja Kuno	Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kraksaan	Kraksaan	Masih dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan.
		GKJW Paiton	Paiton	Masih dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan.
		Gereja Santo Paulus	Kraksaan	Masih dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan.
4.	Pura	Pura Luhur Poten	Sukapura	Terletak di kawasan Lautan Pasir dekat Gunung Bromo. Menjadi tempat penyelenggaraan ritual Yadnya Kasada.
5.	Bangunan Belanda	Gedung Pegadaian Kraksaan	Kraksaan	Masih beroperasi.
		Gedung Pegadaian Dringu	Dringu	Masih beroperasi.
		SDN Patokan 1	Kraksaan	Masih beroperasi.
		SMKN 1 Kraksaan	Kraksaan	Masih beroperasi.
		Kantor Kecamatan Kraksaan	Kraksaan	Masih beroperasi.
		Kantor Kecamatan Sukapura	Sukapura	Masih beroperasi.
		Kantor Kecamatan Krucil	Krucil	Masih beroperasi.
		Kantor Kecamatan Tongas	Tongas	Masih beroperasi.
		Polsek Paiton	Paiton	Masih beroperasi.
		Polsek Krucil	Krucil	Masih beroperasi.
		Pabrik Gula Wonolangan	Dringu	Dibangun sekitar abad ke-16. Hingga kini masih beroperasi.
		Pabrik Gula Pajarakan	Pajarakan	Dibangun sekitar abad ke-16. Hingga kini masih beroperasi.
		Pabrik Gula Gending	Gending	Dibangun sekitar abad ke-16. Hingga kini masih beroperasi.

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, 2024

Beberapa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa Candi Jabung di Kecamatan Paiton, Candi Kedaton dan reruntuhan Makam Dewi Rengganis di Kecamatan Krucil. Secara garis besar, cagar budaya di Kabupaten Probolinggo terdiri atas situs kuno, tempat ibadah, hingga bangunan peninggalan

zaman kolonial Belanda. Situs-situs di Kabupaten Probolinggo umumnya merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit seperti Candi Jabung, Patirtan Jabung, Candi Lawang Kedaton, hingga Candi Kentrung. Salah satu cagar budaya berupa tempat ibadah yang menonjol adalah Pura Poten Luhur. Pura tersebut terletak di tengah-tengah Lautan Pasir Gunung Bromo. Masyarakat Tengger biasanya mengelat upacara Yadnya Kasada di Pura Poten Luhur. Di samping itu, ada pula sejumlah bangunan peninggalan Belanda yang hingga kini masih dimanfaatkan sebagai sekolah, kantor pemerintahan, hingga pabrik gula. Dalam rangka melestarikan cagar budaya, penting untuk mengintegrasikan upaya ini ke dalam kebijakan pembangunan dan perencanaan daerah, memastikan bahwa pelestarian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Tetapi dalam pelaksanaan iklim berinvestasi terdapat kendala yang menjadikan iklim tersebut kurang baik.

Pada Kabupaten Probolinggo dalam fokus berinvestasi dapat diketahui dari beberapa permasalahan yang menjadikan iklim berinvestasi bagi investor luar tidak dapat melakukan investasi di Kabupaten Probolinggo, karena melihat angka kondisifitas kurang membaik. Terkait hal tersebut, Kabupaten Probolinggo menjadikan indikator kinerja daerah untuk mengurangi kendala yang mengakibatkan iklim berinvestasi kurang membaik.

Tabel 2. 58
Hasil Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi Pemerintah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun					
		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	71,5	76,67	77,06	78,02	78,12
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,79	3,19

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat harmonisasi dan toleransi antarumat beragama di suatu daerah. Melihat data dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat tren positif yang menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam aspek kerukunan umat beragama. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan progres yang positif dalam memperkuat hubungan antarumat beragama. Keberhasilan ini adalah hasil dari berbagai inisiatif dan program yang dijalankan untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda. Tetap menjaga dan meningkatkan indeks ini akan menjadi tantangan penting ke depan, agar kerukunan sosial terus terjaga dan diperkuat di masa mendatang. Sedangkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mulai dihitung pada tahun 2022 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengalami peningkatan dari 2,79 pada tahun 2022 menjadi 3,19 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam daya saing daerah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan infrastruktur, kebijakan ekonomi yang lebih baik, atau peningkatan kualitas layanan publik dan lingkungan bisnis.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang atau jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

A. Urusan Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 59
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD)	%	71,62	76,09	78,43	87,48	98.04
2.	APK SD/MI/Paket A	%	97,44	98,5	108,56	108,45	103.94
3.	APK SMP/MTs/Paket B	%	108,38	109,46	91,79	93,89	106.82
4.	APM SD/MI/Paket A	%	94,06	97,48	97,55	99,91	95.29
5.	APM SMP/MTs/ Paket B	%	76,37	89,69	70,39	70,83	77.48
6.	APS SD/MI	%	99,64	99,43	103,28	99,91	99,67
7.	APS SMP/MTs	%	93,77	94,17	98,43	98,07	94,19
8.	AL SD/MI	%	99,8	99,9	100	99.64	99.12
9.	AL SMP/MTs	%	99,9	100,1	100	98.93	98.41
10.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,38	100,5	100,2	100.3	100.12
11.	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	87,5	89,7	88,3	88.62	87.87
12.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	93.04	94,8	96,8	97.18	97.76

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
13.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	91.61	93,4	95,8	96.41	98.17
14.	Rasio siswa/kelas SD/MI	Rasio	21	22	24	20	21
15.	Rasio siswa/kelas SMP/MTs	Rasio	30	31	27	27	28
16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93.28	96,4	91,7	90.17	93.72
17.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12tahun	%	97,44	97,48	103,28	99,91	99.26
18.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	82,95	89,69	98,43	98,07	94.19
19.	Penurunan persentase Anak Tidak Sekolah (ATS)	%	2,37	2,63	2,67	3.33	10.75
20.	Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	5	6	7	80	85
21.	Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik	%	71,34	72,12	85	100	100
22.	Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan Pendidikan dasar	%	0	0	100	100	100
23.	Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan Pendidikan PAUD/PNF	%	0	0	100	100	100
24.	Persentase satuan Pendidikan pengembangan Bahasa dan sastra	%	0	0	12,89	37	56
25	Indeks Pendidikan	Indeks	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56
26	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	10,67	12,6	12,67

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Angka Partisipasi PAUD

PAUD merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan PAUD terbagi menjadi 2 jenjang yaitu PAUD Non Formal adalah TPA, KB, dan SPS, sedangkan PAUD Formal adalah TK.

Pencapaian indikator angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo cenderung positif, sebab mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 angka partisipasi PAUD di Kabupaten Probolinggo sebesar 71,62%. Pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,09% dan 78,43%. Angka ini juga meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 87,48% dan pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 98,04%. Peningkatan angka partisipasi PAUD di Kabupaten

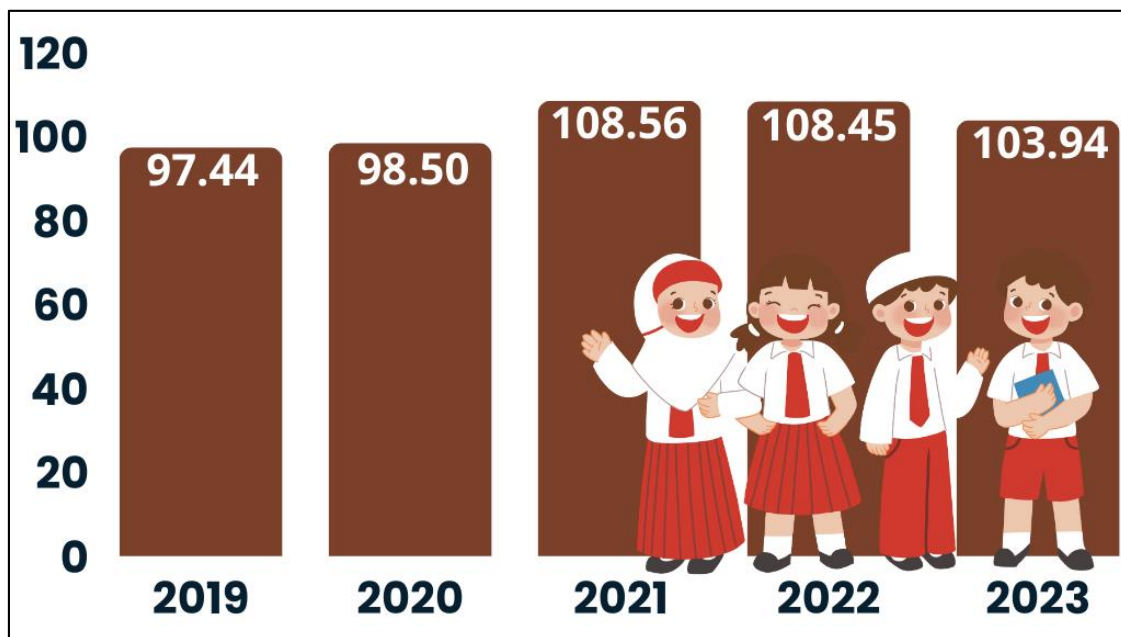
Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa kesadaran orang tua atau masyarakat atas pentingnya pendidikan anak usia dini untuk dilaksanakan, meskipun memang PAUD belum menjadi pendidikan wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo masih perlu melakukan upaya memperluas akses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Nilai APK dapat mencapai lebih dari 100% yang disebabkan karena perbandingan yang dilakukan adalah antara populasi murid yang bersekolah pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B ataupun SMA/MA/Paket C dibanding siswa berusia sesuai tingkat pendidikan yang ditempuh. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Nilai APK bisa lebih dari 100% juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya siswa dari luar daerah.

Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 97,44%. Capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 98,5%. Pada tahun 2021 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 108,56%. Capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,11% menjadi 108,45% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Kemudian penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 menjadi 103,94%.

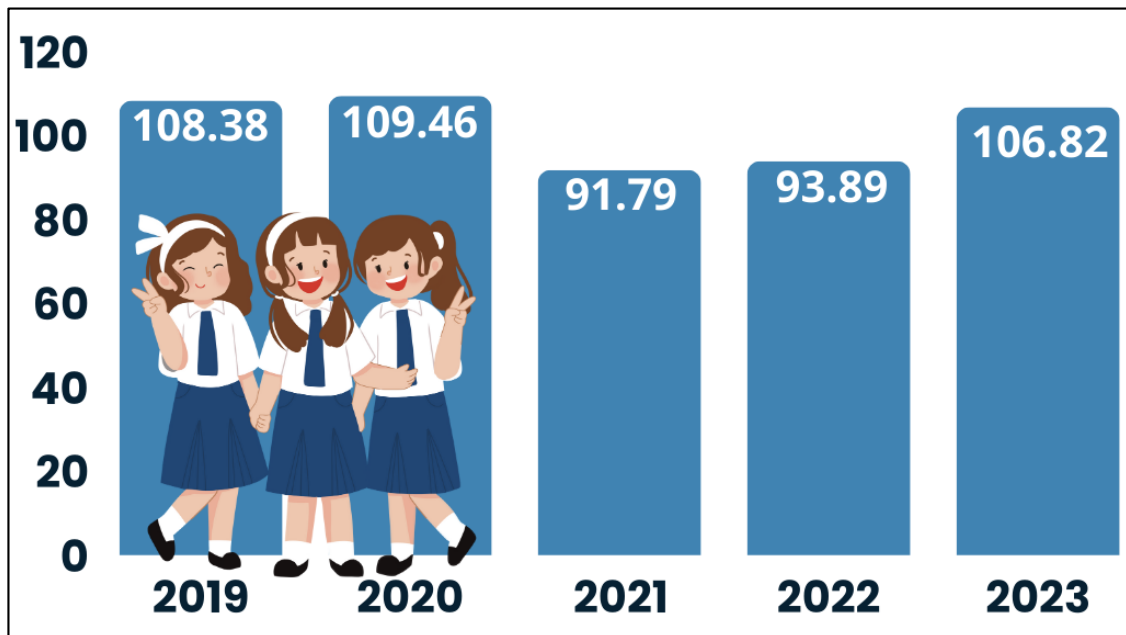
Gambar 2. 45
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif. Yang kemudian menurun pada Tahun 2021 menjadi 91,79% dan tahun 2022 menjadi 93,89%. Pada tahun 2018 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo adalah 105,9%. Pada tahun 2019 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo sebesar 108,38%. Capaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 109,46% dan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 Capaian APK SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan menjadi 91,79% dan menjadi tren penurunan tertinggi dalam periode 2018-2022. Sementara pada tahun 2022 kembali naik 2,1% menjadi 93,89%. Capaian APK SMP/MTs/Paket B yang melebihi 100% ini, karena banyak siswa yang dari luar Kabupaten Probolinggo yang menjadi peserta didik di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2023 capaian APK SMP/MTs/Paket B naik signifikan menjadi 106,82%.

Gambar 2. 46
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

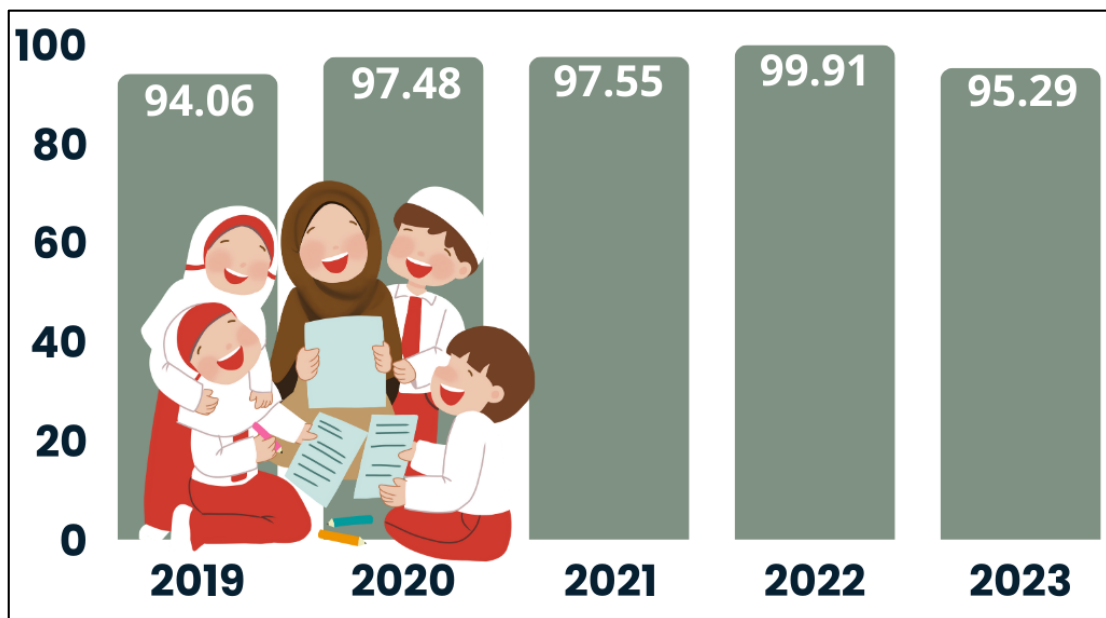
3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan berapa usianya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup usia anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang cenderung positif. Pada tahun 2019 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Probolinggo sebesar 94,06%. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Capaian APM SD/MI/Paket A pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan jika berturut turut menjadi 97,48% dan 97,55%. Sementara pada tahun 2022

mengalami peningkatan 2.36% jika dibanding dengan tahun 2021 menjadi 99.91%. Namun pada tahun 2023 APM SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo turun menjadi 95,29%.

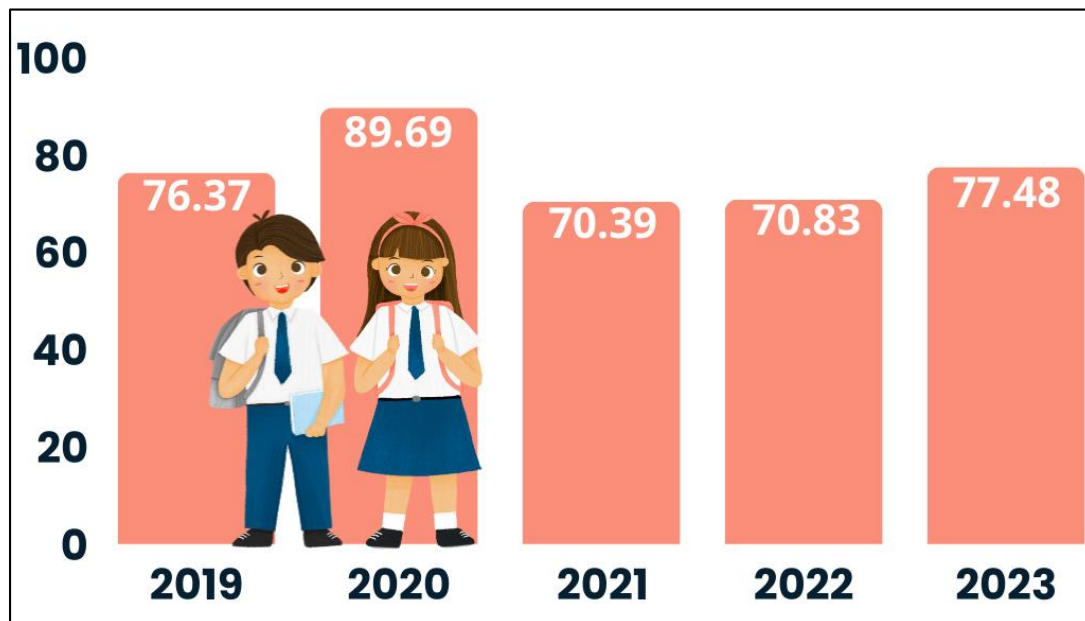
Gambar 2. 47
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Probolinggo sebesar 76,37% angka ini cenderung menurun 1,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian mengalami peningkatan signifikan pada 2020 menjadi 89,69%. Akan tetapi pada tahun 2021 APM SMP/MTs/Paket B menurun kembali menjadi 70,39%. Namun pada tahun 2022 trennya kembali mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 70,83% jika dibandingkan tahun 2021 APM SMP/MTs/Paket B ini naik sebesar 0,44%. Kemudian pada tahun 2023 capaian indikator ini meningkat signifikan menjadi 77,48%.

Gambar 2. 48
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

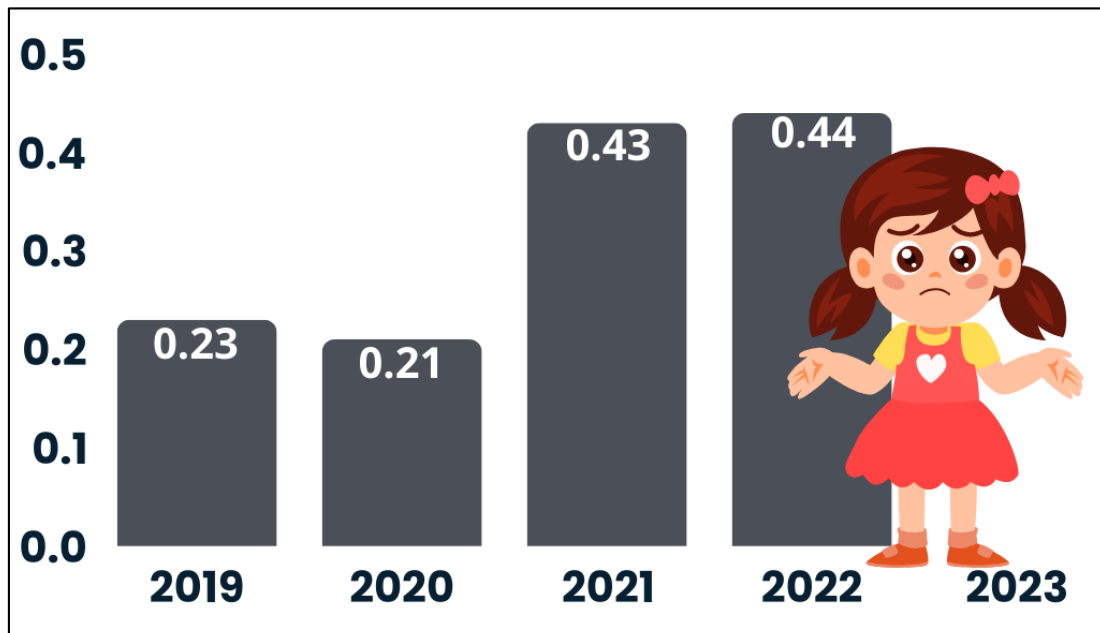


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

4. Angka Putus Sekolah

Capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 0,23 dan mengalami penurunan pada 2020 menjadi 0,21%. Adapun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 0,43% dan tahun 2022 menjadi 0,44%. Sayangnya pada tahun 2023 sampai dokumen ini dibuat data Angka Putus Sekolah SD/MI di Kabupaten Probolinggo masih tercatat 0,00%.

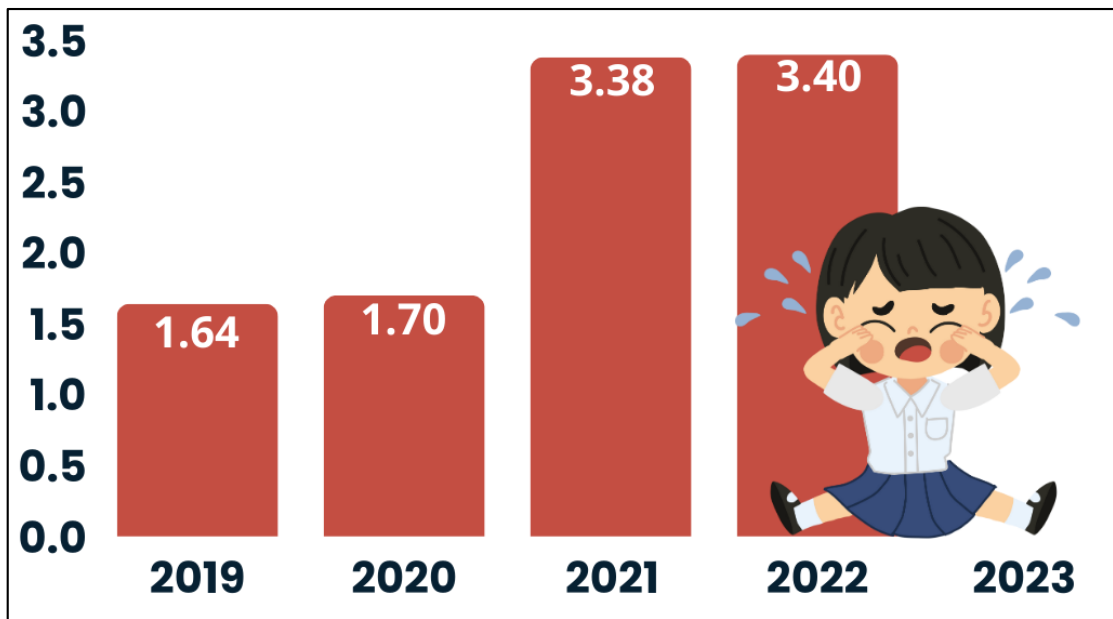
Gambar 2. 49
Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022 menunjukkan tren yang peningkatan positif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,64%. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,7%. Sementara pada tahun 2021 dan tahun 2022 peningkatan juga terjadi sehingga APS SMP/MTs Kabupaten Probolinggo menjadi 3,38% dan 3,4%. Sayangnya pada tahun 2023 sampai dokumen ini dibuat data Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo masih tercatat 0,00%.

Gambar 2. 50
Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

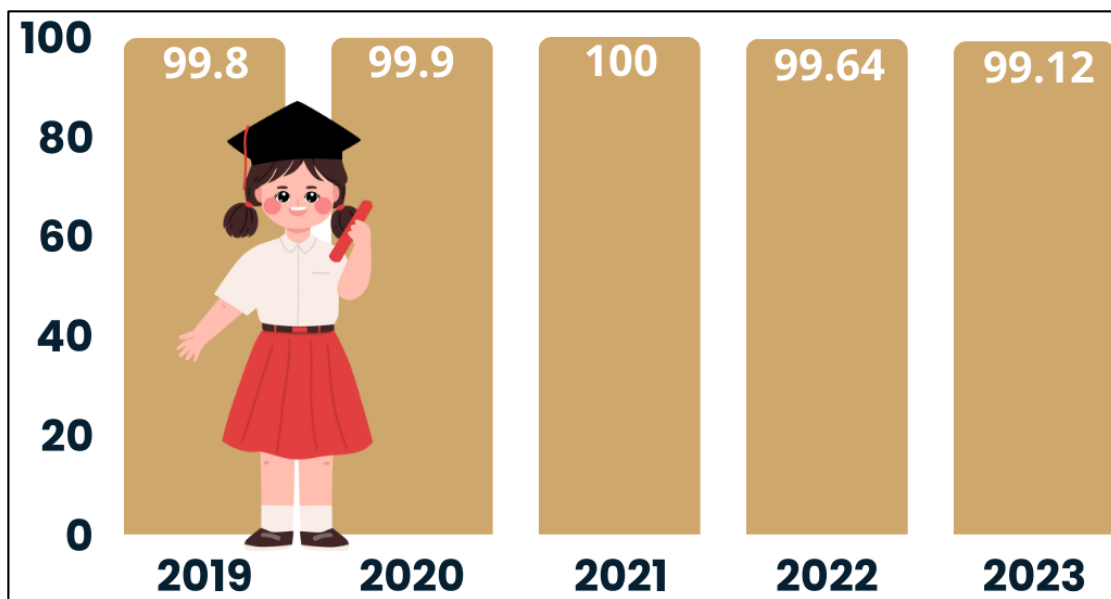


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

5. Angka Kelulusan

Capaian indikator kinerja angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Probolinggo sebesar 99,8%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 99,9%. Sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi 100%. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 secara berurutan menjadi 99,64% dan 99,12%.

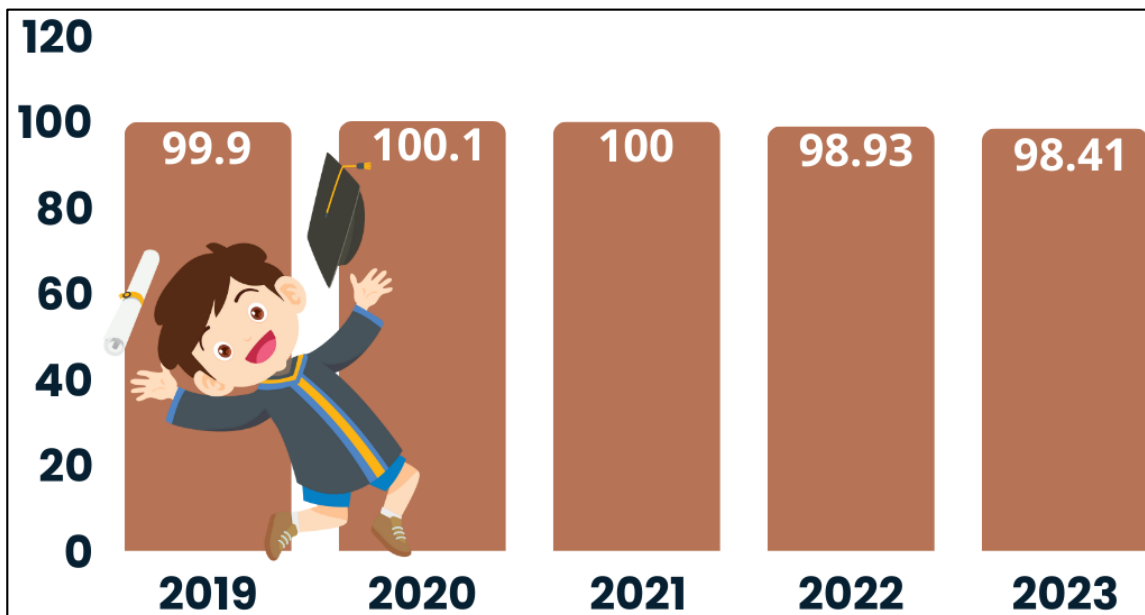
Gambar 2. 51
Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Capaian indikator kinerja angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 99,9%. Kemudian, mengalami peningkatan menjadi 100,01% di 2020. Sementara pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 100%. Sementara pada tahun 2022 penurunan kembali terjadi sehingga angka kelulusan SMP/MTs Kabupaten Probolinggo menjadi 98,93%. Sayangnya penurunan ini kembali berlanjut pada tahun 2023 menjadi 98,41%.

Gambar 2. 52
Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

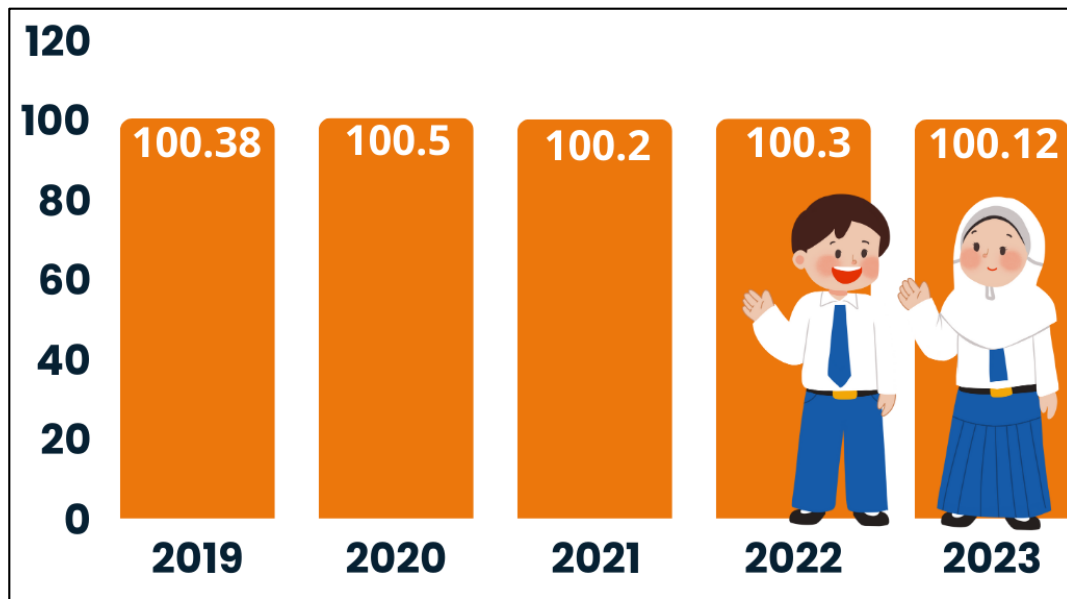


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

6. Angka Melanjutkan

Capaian indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 100,38%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 100,5%. Sementara pada tahun 2021 menurun menjadi 100,2%. Meskipun tidak signifikan, angka melanjutkan SD/MI ini terus meningkat menjadi 100,3% tahun 2022 dan 100,12% pada tahun 2023.

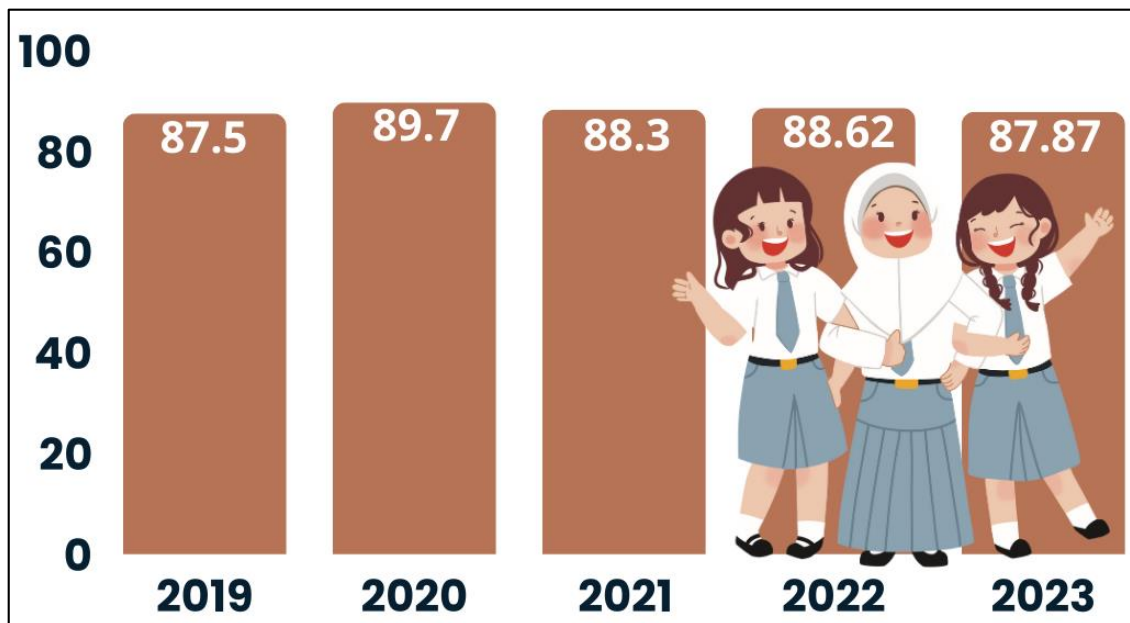
Gambar 2. 53
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Capaian indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Probolinggo sebesar 87,5%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi masing masing 89,7%. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 88,3%. Kenaikan ini kembali terjadi pada tahun 2022 menjadi 88,62%, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 87,87%.

Gambar 2. 54
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



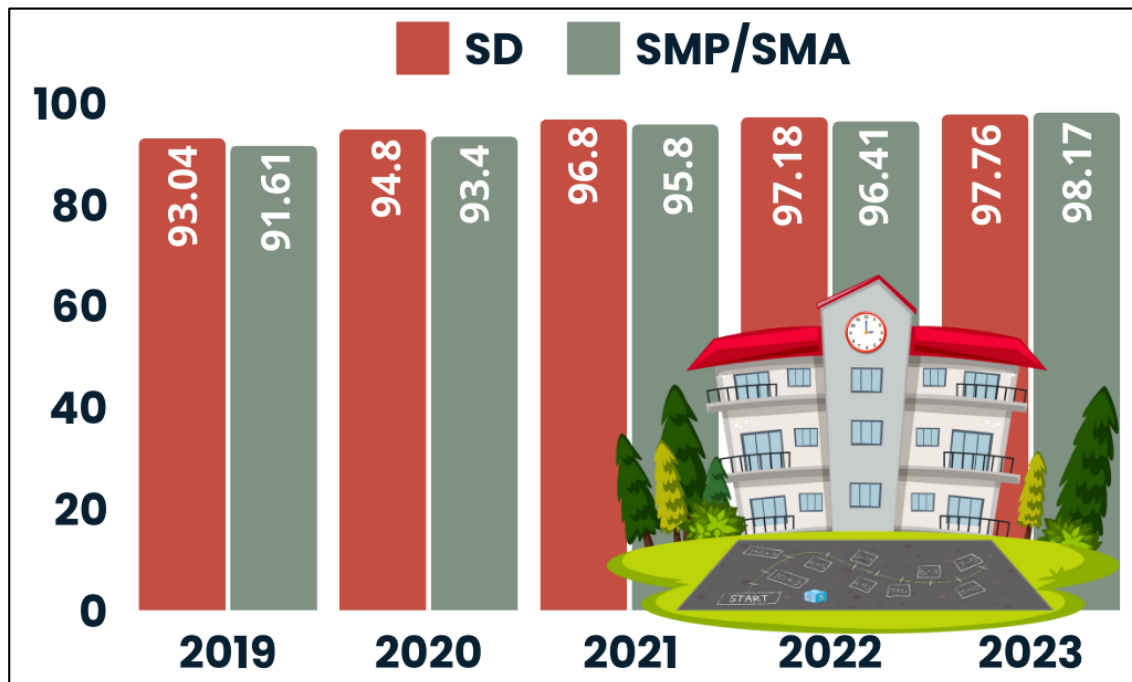
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

7. Fasilitas Pendidikan

Capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang membaik. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 93,4% Peningkatan juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya yakni pada tahun 2020 dan 2021 secara berurutan menjadi 94,8% dan 96,8%. Kemudian pada tahun 2022 fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik sebesar 97,18% dan menjadi 97,76% pada tahun 2023.

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan dengan kondisi bangunan baik pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami tren meningkat. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja fasilitas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 92,5% dan meningkat pada 2020 menjadi 93,4%. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 95,8%. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2022 menjadi 96,41% dan tahun 2023 menjadi 98,17%.

Gambar 2. 55
Fasilitas Pendidikan dengan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten
Probolinggo Tahun 2019-2023



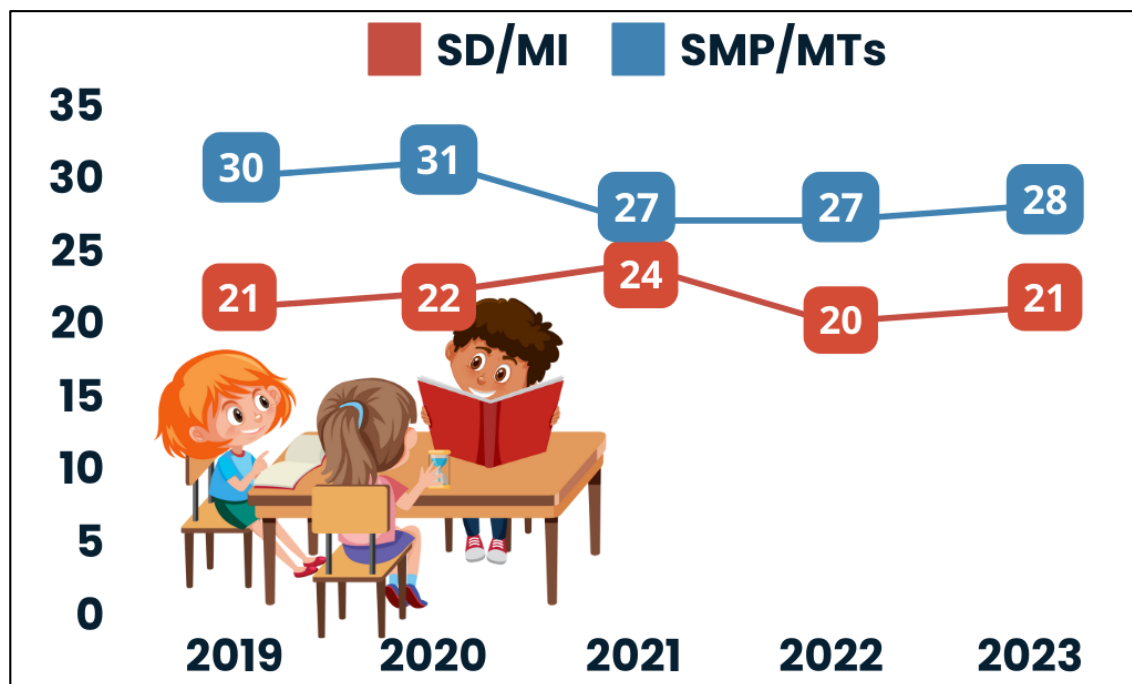
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

8. Rasio Siswa Terhadap Kelas

Capaian indikator kinerja rasio siswa terhadap kelas SD/MI di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019, rasio siswa terhadap kelas SD/MI di Kabupaten Probolinggo sebesar 21. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 22. Sementara pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 24. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 20 dan naik menjadi 21 pada tahun 2023.

Capaian indikator kinerja rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 rasio siswa terhadap kelas SMP/MTs di Kabupaten Probolinggo sebesar 30. Kemudian pada 2020 menjadi 31. Sayangnya pada tahun 2021 terjadi penurunan rasio hingga menjadi 27 dan bertahan sampai tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 28.

Gambar 2. 56
Rasio Siswa Terhadap Kelas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

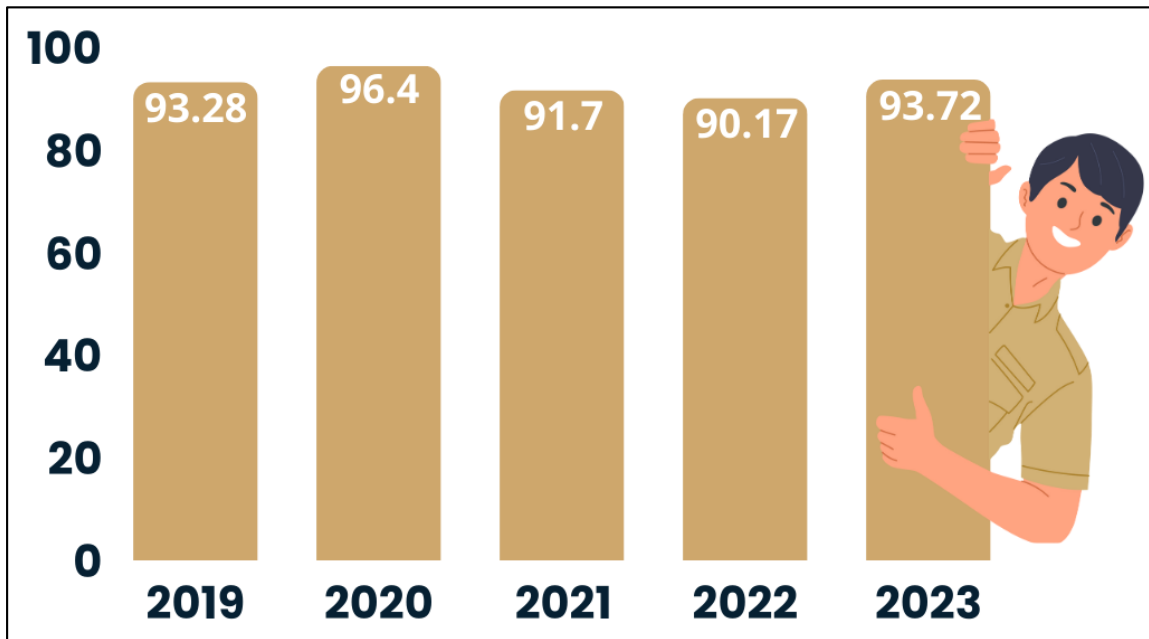


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

9. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo sebanyak 93,28%. Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebanyak 96,4%. Upaya yang masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yakni menuntaskan program penyesuaian kompetensi kualifikasi guru minimal S1 pada semua jenjang pendidikan. Sementara kondisi pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan masing-masing menjadi 91,7% dan 90,17%. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 93,72%.

Gambar 2. 57
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

10. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian indikator kinerja angka partisipasi sekolah terbagi dalam dua jenjang usia yaitu untuk APS 7-12 tahun dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 capaian kinerja APS 7-12 tahun meningkat 0,04% dari tahun sebelumnya yaitu 97,44% menjadi 97,48% hingga pada tahun 2023 mencapai 99,26%. Begitu juga dengan APS 13-15 tahun capaian kinerja dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari 82,95% pada tahun 2019 hingga mencapai 94,19% di tahun 2023.

11. Persentase Anak Tidak Sekolah

Capaian indikator kinerja persentase penurunan anak tidak sekolah semakin meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 jumlah penurunan anak tidak sekolah sebesar 2,37%. Pada tahun 2020 penurunan ATS meningkat menjadi 2,63% hingga mencapai 2,67% pada tahun 2021. Peningkatan ini terus terjadi pada tahun 2022 mencapai 3,33% dan pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 10,75%. Capaian ini tentu menjadi kabar baik dan diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya.

12. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

Capaian indikator kinerja persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan local terus meningkat. Peningkatan capaian ini dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 terdapat 5 satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan local. Setiap tahunnya terus bertambah 1 satuan sehingga pada tahun 2021 terdapat 7 satuan Pendidikan yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal. Sementara pada tahun 2022 peningkatan signifikan terjadi sehingga pada tahun tersebut terdapat 80 satuan pendidikan. Hingga pada tahun 2023 tercatat 85 satuan pendidikan yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal.

13. Pemenuhan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Capaian indikator kinerja pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik terus meningkat hal ini diharapkan dapat berdampak dalam peningkatan pelayanan urusan bidang pendidikan. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun 2019 mencapai 71,34% terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2023.

14. Perizinan yang Diterbitkan pada Satuan Pendidikan

Capaian indikator kinerja perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan dasar maupun Pendidikan PAUD/PNF pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang masih 0%.

15. Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan Bahasa dan Sastra

Capaian indikator kinerja satuan Pendidikan mengembangkan Bahasa dan sastra telah mencapai 12,89% dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih 0%.

16. Indeks Pendidikan dan Pembangunan Literasi Masyarakat

Indikator penting kinerja sasaran dalam penyelenggaraan Pendidikan lainnya yaitu indeks pendidikan dan indeks pembangunan literasi masyarakat

dalam upaya mencapai meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca. Indeks Pendidikan menunjukkan kecenderungan positif, yaitu mengalami peningkatan dari 0,54 pada tahun 2019 menjadi 0,56 pada tahun 2022. Sedangkan untuk indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 12,60 pada tahun 2022. Tahun 2023 Indeks pendidikan Kab Probolinggo ditetapkan target sebesar 0,56; terealisasi 0,56 atau capaian kinerjanya 100 % dan masuk kategori capaian **Baik**. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 sudah tercapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khususnya PAUD dan Pendidikan Non formal / Kesetaraan.
- b. Belum meratanya akses pendidikan yang bermutu terutama di daerah tertinggal dan disparitas mutu antar satuan pendidikan
- c. Kondisi ekonomi berdampak pada putusnya akses pendidikan anak dan akses ke jenjang yang lebih tinggi
- d. Kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal belum maksimal, dikarenakan belum terlaksananya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya lokal secara optimal, kurangnya pembinaan dan motivasi terhadap pelaku seni dan budaya, belum optimalnya fungsi kelembagaan kelompok seni budaya dalam mengakomodir kebutuhan kelompok-kelompok seni budaya yang ada dan belum terlaksananya pengembangan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional secara optimal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- a. 1). Mengoptimalkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS,BOP,BOPDA) pada Satuan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan
- 2). Mengoptimalkan Program Indonesia Pintar sebagai bantuan personil peserta didik dalam pemenuhan pelengkap dasar siswa miskin
- 3). Melibatkan komunitas lokal dalam mendukung program pendidikan dengan melibatkan organisasi fungsi pendidikan (PGRI,GOPTKI,IGTKI, HIMPAUDI,APSI, MKKS, K3S, MGMP, dan

Dewan pendidikan) dalam bentuk kegiatan koordinasi dan evaluasi di masing-masing wilayah.

- b. 1). Melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas pendidikan melalui kegiatan rehab dan pembangunan sarpras utilitas sekolah pada 90 satuan pendidikan
- 2). Mengembangkan kompetensi guru dengan bimtek Implementasi Kumer, Bimtek Perencanaan berbasis data (PBD) telah dilaksanakan 50 kegiatan
- c. 1). Meningkatkan program transportasi sekolah gratis atau subsidi transportasi bagi siswa prioritas keluarga miskin melalui bantuan transportasi OASe (Ojek anak sekolah) untuk 82 anak sekolah
- 2). Mengoptimalkan program pendidikan berbasis vokasi bagi keluarga miskin untuk 102 PKBM
- d. Mengoptimalkan pemajuan kebudayaan lokal guna peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indeks pendidikan antara lain :

- a. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, Desa dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan strategi yang holistik yaitu : 1. mandatori dana desa untuk meningkatkan HLS RLS (untuk pembiayaan anak tidak sekolah, Bantuan Operasional PAUD) 2. Kerjasama dengan BAZNAS dengan kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Warga Belajar Kesetaraan
- b. Alokasi Anggaran Peningkatan sarana prasarana dan kualitas dalam pembelajaran
- c. Program sertifikasi guru
- d. Kebijakan bantuan Transportasi sekolah gratis atau subsidi transportasi bagi siswa prioritas keluarga miskin
- e. Pendidikan berbasis vokasi bagi keluarga miskin

Beberapa inovasi antara lain Inovasi Bela Sang Raja dan Inovasi KESIT (Kepala Sekolah Inspiratif, Inovatif, berprestasi) untuk menggerakkan kepala

sekolah dan guru penggerak membangun inovasi di masing-masing satuan pendidikan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang pada tahun 2023 ditargetkan 14 terealisasi sebesar 12,67 dengan capaian 90,50% kategori capaian kinerja **Baik**.

Perhitungan IPLM berdasarkan pada penilaian enam literasi dasar yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi keuangan, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta literasi budaya dan kewarganegaraan

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Masih rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan literasi.
- b. Kurangnya pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dan stakeholder lainnya di bidang literasi.
- c. Rendahnya tata kelola arsip di PD dan desa dan kurangnya SDM arsiparis yang kompeten.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut:

- a.
 - 1) Meningkatkan layanan perpustakaan melalui menciptakan perpustakaan yang nyaman, buku-buku yang lebih beragam dan petugas layanan yang ramah.
 - 2) Mengaktifkan perpustakaan keliling dengan tujuan ke desa-desa dan sekolah dengan fasilitas bahan/buku bacaan dan wifi.
 - 3) Memfasilitasi masyarakat untuk menambah informasi dan pelatihan-pelatihan daring.
- b. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan stakeholder di bidang literasi, antara lain dengan kegiatan: Bedah buku, pameran dan penjualan buku murah dll.

Melakukan pendampingan perangkat daerah terkait tata kelola arsip dan penerapan SRIKANDI sebagai aplikasi penunjang transformasi arsip digital di seluruh PD

17. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan

Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 60
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021-2023

No	Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	87,48	88.65	99.02
2	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	101,69	97.12	104.85
3	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	7,02	10.7	99.6

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Pada tahun 2023 pencapaian SPM urusan pendidikan pada 3 indikator capaian semuanya meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentu hal ini merupakan hal yang luar biasa dan menjadi bukti nyata atas kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam urusan pendidikan.

B. Urusan Kesehatan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 61
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000/KH	9,8	8,11	10,38	12,6	13,05
2.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000/KH	92,92	99,33	201,78	123,13	137,65
3.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,08558	0,1	0,102	0,102	0,101
4.	Rasio Rumah sakit terhdap penduduk	per 10.000 penduduk	0,053	0,054	0,51	0,5	0,5
5.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	87,27	76,36	53,33	79,7	77,6
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP	%	6	0	1	7	1
8.	Cakupan penemuan tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	77,6	44,68	46,4	73,7	96,7
9.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	89,6	92,49	91	91,3	90,7
10.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,97	88,43	87,74	88,23	84,82
11.	Cakupan persalinan	%	99,97	99,52	99,32	98,24	96,54
12.	Cakupan pelayanan nifas	%	98,39	98,17	97,17	95,92	93,7
13.	Cakupan pelayanan anak balita	%	90,45	91,1	92,23	94,73	94,64
14.	Rumah Tangga sehat	%	17,74	19,97	19,43	36,45	34,38
15.	Stunting	%	16,37	16,1	14,98	14,68	12,77
16.	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	N/A	N/A	70,91	70,91	90
17.	Masyarakat tercover JKN	%	N/A	N/A	84,24	95,53	98,85
18.	Indeks Kesehatan		0,72	0,73	0,73	0,82	0,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo sebesar 9,8 per 1.000 KH. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 8,11 per 1.000 KH. Namun angka tersebut meningkat kembali

pada tahun 2021 (10,38 per 1000 KH). Sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,6 per 1.000 KH. Pada masa pandemi COVID-19, sebagian ibu enggan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya karena khawatir didiagnosa positif COVID-19. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2023 menjadi 13,05 per 1.000 KH. Hal ini mempengaruhi kondisi kesehatan janin. Peningkatan kematian bayi pada tahun 2021 sebagian disebabkan karena bayi lahir prematur serta BBLR. Jumlah bayi BBLR pada tahun 2021 (989 bayi) juga meningkat dibandingkan tahun 2020 (974 bayi). Angka kematian yang cukup tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal seperti peran keluarga masih mendominasi dalam pengambilan keputusan, termasuk lebih mengedepankan budaya/mitos, faktor ekonomi/kesejahteraan yang masih belum memadai dan masih ada bayi yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya menekan angka kematian bayi, diantaranya adalah Penguatan Program 1000HPK, adanya jaminan kesehatan untuk bayi baru lahir melalui Program Jampersal (sd 2 bulan), pemantauan rutin bayi di posyandu, intervensi perbaikan gizi pada bayi dengan masalah status gizi kurang, peningkatan pengetahuan keluarga tentang pola asuh bayi dan anak melalui program EMO DEMO.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja kematian ibu di Kabupaten Probolinggo sebesar 92,92 per 100.000 KH. Capaian pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yakni sebesar 99,33 per 100.000 KH. AKI di Kabupaten Probolinggo masih tinggi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dari AKI di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu - tingginya kasus ibu hamil resiko tinggi, keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga terkait rujukan, status gizi ibu hamil, masih banyak ibu hamil dengan KEK dan anemia, pemberlakuan protokol COVID-19 dalam penanganan persiapan persalinan menyebabkan sebagian ibu hamil enggan bersalin di fasyankes.

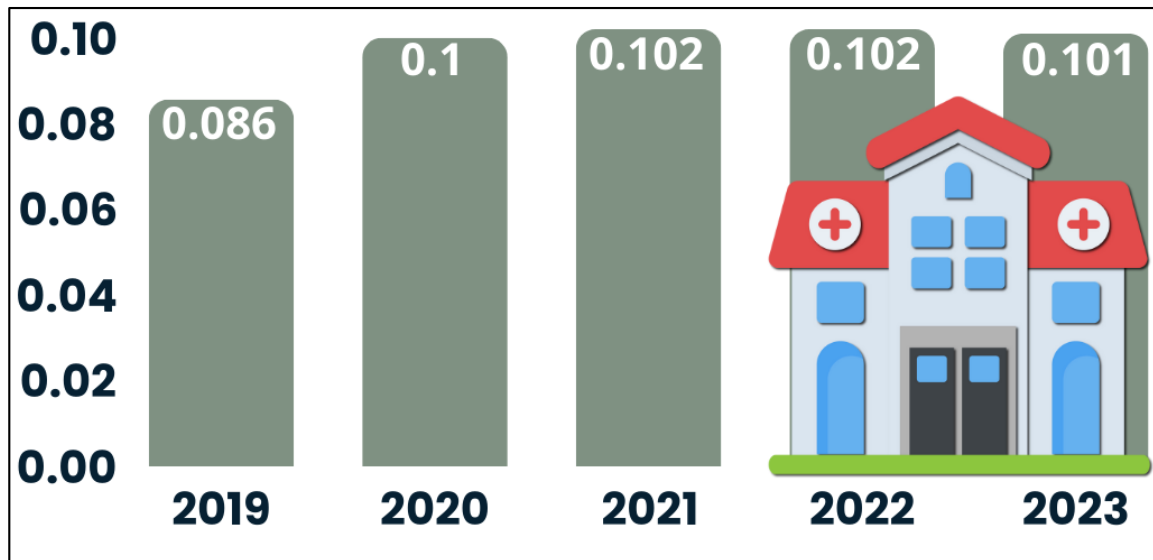
Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2021 mencapai 201,78 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 dimana ibu hamil sebagai salah satu yang termasuk dalam kelompok rentan. Dari 35 kasus kematian maternal, sebanyak 24 kasus diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan kasus kematian ibu yang murni dari penyebab masalah kebidanan sejumlah 11 orang. Penyebab utama kematian ibu dari faktor kebidanan adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Sementara pada tahun 2022, Angka Kematian Ibu turun menjadi 123,13 per 100.000 KH. Namun pada tahun berikutnya meningkat kembali menjadi 137,65 per 100.000 KH di tahun 2023.

Namun, sebagai upaya menekan AKI berikut beberapa strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain Pendampingan bumil resiko tinggi, penguatan Program 100HPK, Program Pembiayaan Kesehatan/Jaminan Kesehatan (JKN, Jampersal), Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu, Peningkatan Kompetensi SDM yang menangani pelayanan kesehatan Ibu.

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Capaian indikator kinerja rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,08558 per 1.000 penduduk. pada tahun 2020 kondisi rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk mengalami kenaikan yakni mencapai 0,1 per 1000 penduduk. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk stagnan sebesar 0,102 per 1.000 penduduk, namun kembali turun menjadi 0,101 per 1.000 penduduk pada tahun 2023.

Gambar 2. 58
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Meskipun rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap cenderung fluktuatif, namun secara keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 sudah mencukupi dengan rasio jumlah penduduk. Secara keseluruhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Probolinggo yang mengalami pengurangan pada tahun 2023 adalah Poskendes menjadi 155 unit dari 170 unit pada tahun 2022. Namun pada jumlah Posyandu dan Polindesa mengalami penambahan jumlah unit pada tahun 2023.

Tabel 2. 62
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

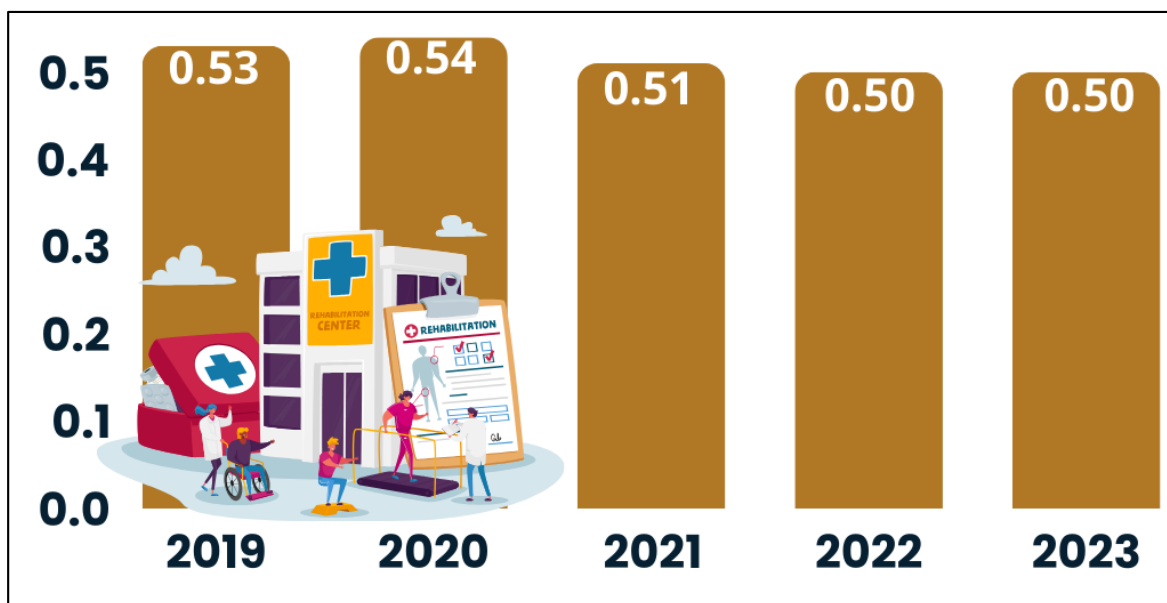
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit	Unit	6	6	6	6	6
2	Puskesmas	Unit	33	33	33	33	33
3	Posyandu	Unit	1323	1325	1329	1334	1342
4	Puskesmas Pembantu	Unit	87	87	86	86	86
5	Polindesa	Unit	40	40	45	45	56
6	Poskendes	Unit	163	170	170	170	155

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

4. Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk

Capaian indikator kinerja rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Probolinggo sebesar 0,0533 per 10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,054. Pada tahun 2021 rasio rumah sakit terhadap penduduk Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 0,51 per 10.000 penduduk. Sementara pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan dan stagnan sebesar 0,50 per 10.000 penduduk.

Gambar 2. 59
Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Meskipun rasio rumah sakit terhadap penduduk mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan jumlah rumah sakit di Kabupaten Probolinggo sudah mencukupi dengan rasio jumlah penduduk. Pada tahun 2019-2023 tidak ada Rumah Sakit baru.

Tabel 2. 63
Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	RSU Daerah/ Pemerintah	Buah	2	2	2	2	2
2.	Rumah Sakit Swasta/BUMN	Buah	3	3	3	3	3
3.	Rumah Sakit Ibu dan Anak	Buah	1	1	1	1	1

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

5. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Capaian indikator kinerja cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2019 cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Probolinggo sebesar 87,27%. Kemudian, terjadi penurunan yang signifikan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga capaiannya menjadi sebesar 76,36% pada tahun 2020 dan 53,33% pada tahun 2021. Kemudian peningkatan terjadi pada tahun 2022 menjadi 79,7%, namun kondisi ini turun pada tahun 2023 menjadi 77,6%.

Secara umum terdapat faktor penghambat yang menyebabkan realisasi Cakupan Desa UCI belum mencapai target diantaranya, terdapat missed opportunity atau kesempatan yang hilang pada bayi usia 0 – 11 bulan, bayi yang diimunisasi sering dalam kondisi sakit, adanya bayi BBLR dan informasi tentang pentingnya imunisasi bagi bayi belum disampaikan secara intensif kepada orang tua bayi. Meskipun demikian, Dinas Kesehatan memiliki upaya untuk meningkatkan cakupan desa UCI melalui komitmen petugas vaksinasi yang tinggi, telah menentukan target dalam masyarakat, kesadaran masyarakat yang mulai meningkat, logistik imunisasi yang memadai, standarisasi alat penyimpanan vaksin.

6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita AFP (*Acute Flaccid Paralysis*)

Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Bahkan pada tahun 2020, tidak ada kasus AFP yang ditemukan. Secara detail, pada tahun 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP di Kabupaten Probolinggo sebesar 6. Pada tahun 2020 tidak ditemukan kasus AFP. Kemudian

pada tahun 2021 mulai ada temuan penderita AFP sebanyak 1 temuan. Pada tahun 2022 kasus temuan penderita AFP ini meningkat menjadi 7 temuan, namun kembali turun pada tahun 2023 menjadi 1 temuan.

7. Cakupan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif

Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 sudah tertangani secara optimal. Pada tahun 2019 cakupan penanganan pasien baru TB BTA Positif di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 100%. Namun, pada tahun 2020 BTA sudah tidak digunakan dalam penentuan diagnosa, melainkan menggunakan TSR. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate) pada tahun 2019 sebesar 89,6%, kemudian meningkat menjadi 92,49% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 91%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 91,3%, sayangnya pada tahun 2023 kembali turun menjadi 90,7%.

8. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA

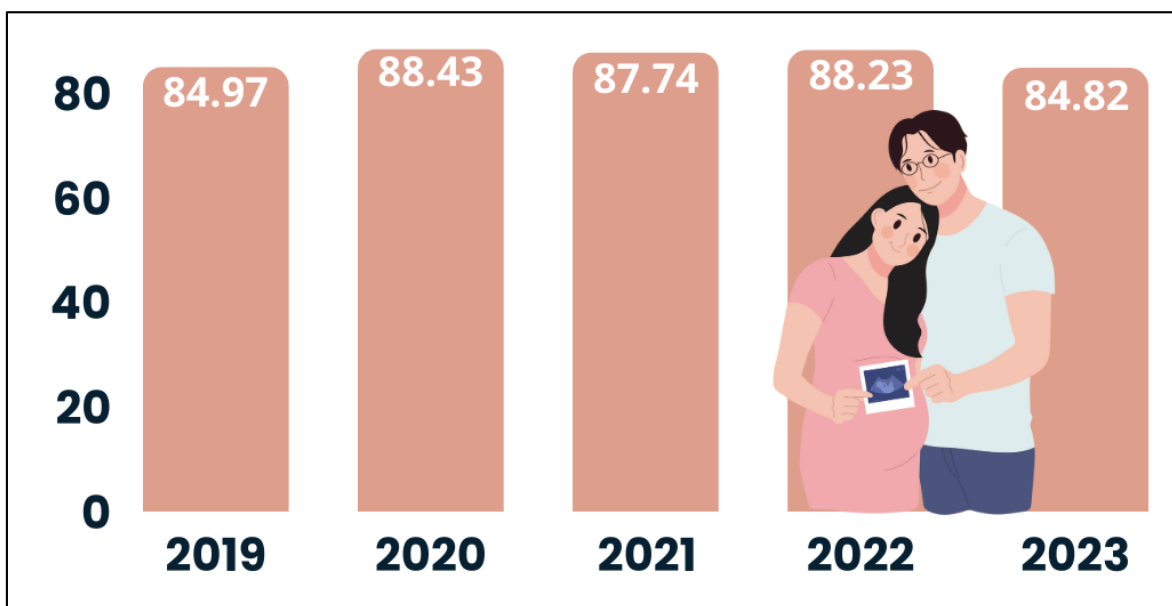
Capaian indikator kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Probolinggo tahun 2019 sebesar 74,35%. Namun, pada tahun 2020 BTA sudah tidak digunakan dalam penentuan diagnosa, melainkan menggunakan TCM. Cakupan penemuan tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 sebanyak 77,6% yang kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 44,68%. Kemudian cakupan ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 46,4%, dan menjadi 73,7% pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 cakupan penemuan turberkulosis meningkat hingga mencapai 96,7%.

9. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Capaian indikator kinerja cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Probolinggo sebesar 84,97%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 88,43% yang kemudian menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 87,74%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan menjadi 88,23%, namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 84,82%. Kondisi ini tidak selalu mencapai target disebabkan oleh

adanya mitos bahwa tidak baik memeriksakan di awal kehamilan sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan K4, bumil ditemukan pada triwulan kedua kehamilan, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas, ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota. Namun upaya peningkatan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui pemerataan bidan di tiap desa, pemberdayaan kader posyandu untuk sehingga dapat dilakukan deteksi dini ibu hamil di triwulan pertama kehamilan, mobil ANC terpadu.

Gambar 2. 60
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



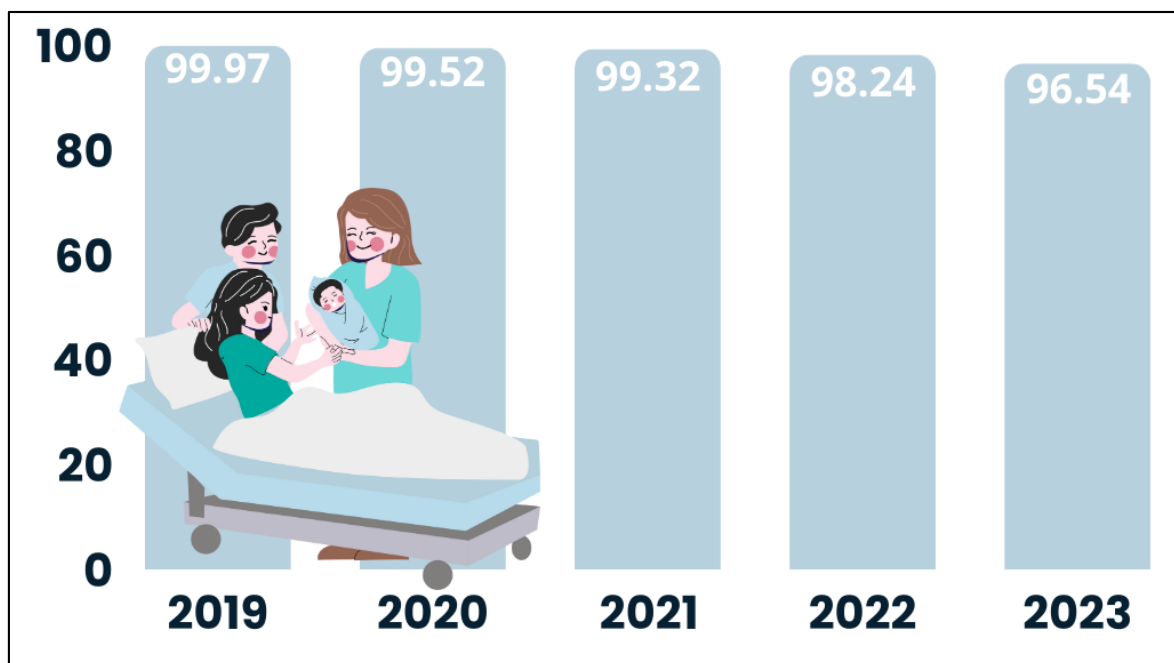
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

10. Cakupan Persalinan

Capaian indikator kinerja cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo sebesar 99,97%, cakupan persalinan belum memenuhi target SPM bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020 menjadi 99,52%. Kondisi penurunan ini terus terjadi pada tahun 2021 menjadi 99,32%, yang kemudian menjadi 98,24% pada tahun 2022. Terakhir pada tahun 2023 cakupan persalinan di Kabupaten Probolinggo turun menjadi 96,54%. Setelah diidentifikasi terdapat beberapa penyebab antara lain masih belum semua dukun bersedia untuk tidak menolong persalinan, pelayanan yang tidak

terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas, pandemi COVID-19 harus menerapkan protokol tertentu dalam penanganan persalinan menyebabkan sebagian ibu hamil enggan bersalin di fasyankes. Namun, terdapat upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan antara lain adanya pembiayaan persalinan melalui JKN maupun jampersal, kemitraan dengan dukun sehingga dukun tetap terlibat namun bukan sebagai penolong persalinan.

Gambar 2. 61
Cakupan Persalinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

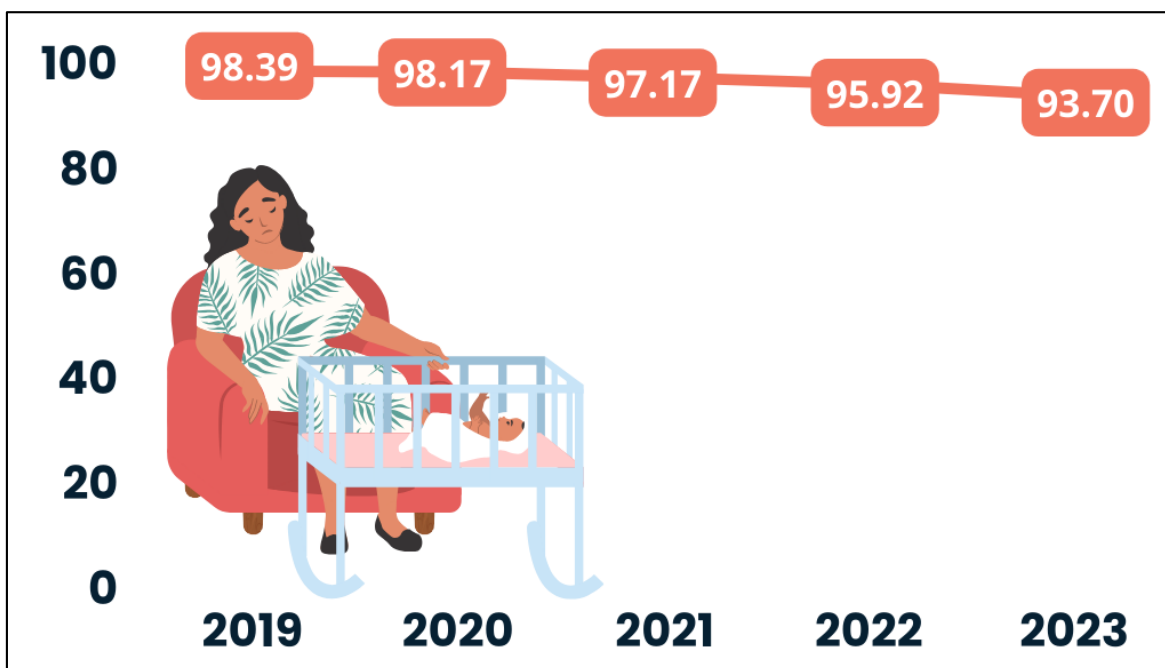


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

11. Cakupan Pelayanan Nifas

Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Probolinggo sebesar 98,39%. Capaian pada tahun 2020 masih belum memenuhi target SPM bahkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelum menjadi sebesar 98,17%. Pada tahun 2021 capaian cakupan pelayanan nifas kembali turun menjadi 97,17%, kemudian menjadi 95,92% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka penurunan pada tahun 2023 cukup signifikan yang menjadi 93,7%.

Gambar 2. 62
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

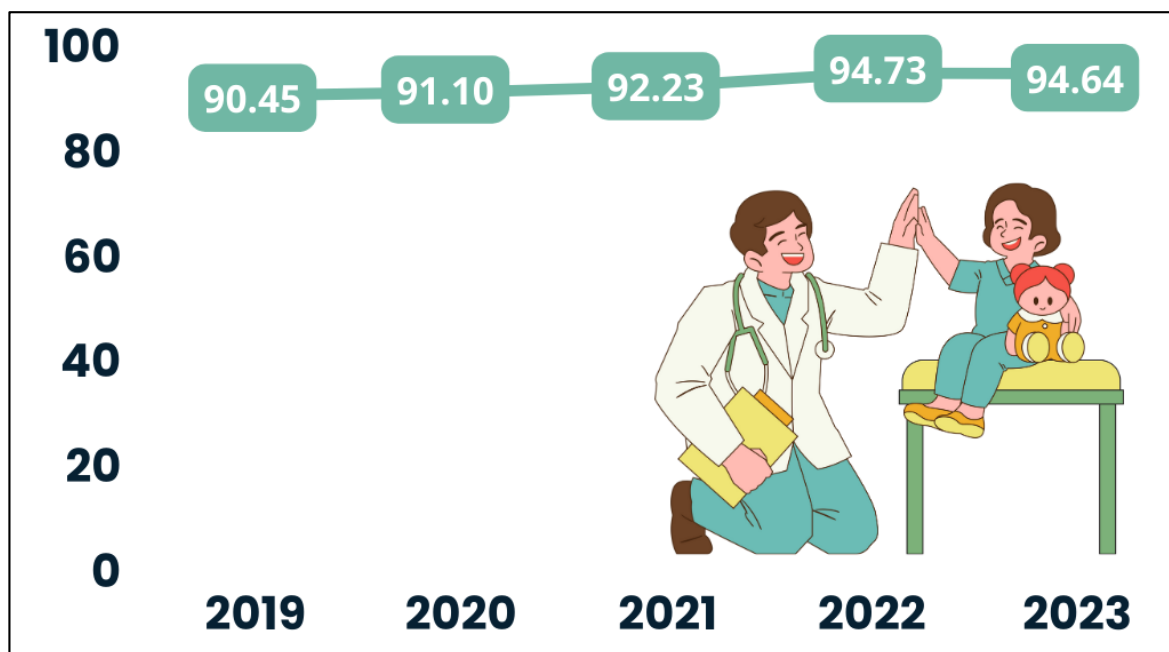


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

12. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2019 cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo sebesar 90,45%. Pada tahun 2020 peningkatan cakupan pelayanan anak balita menjadi 91,1%. Kondisi ini terus terjadi pada tahun 2021 menjadi 92,23% . Meskipun terus mengalami peningkatan namun capaian kinerja pada tahun 2021 masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 peningkatan yang terjadi cukup signifikan menjadi 94,73%. Akan tetapi pada tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Probolinggo turun menjadi 94,64%.

Gambar 2. 63
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

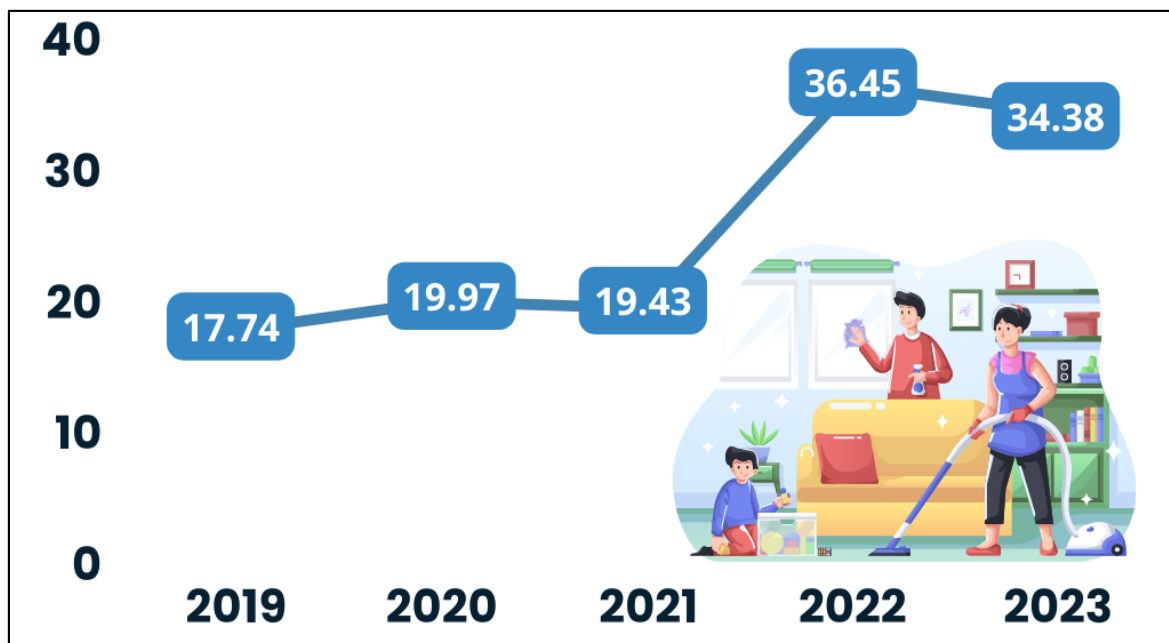


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

13. Rumah Tangga Sehat

Capaian indikator kinerja rumah tangga sehat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019 proporsi rumah tangga sehat di Kabupaten Probolinggo sebesar 17,74%. Capaian Rumah Tangga Sehat mengalami peningkatan pada tahun 2020 meskipun belum mencapai target yang ditentukan menjadi sebesar 19,97%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 19,43%. Meski begitu pada tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 36,45%. Namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 34,38%.

Gambar 2. 64
Rumah Tangga Sehat Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

14. Stunting

Capaian Prevalensi stunting semakin menurun di setiap tahunnya, bahkan selalu mencapai target maksimal yang ditetapkan. Pada tahun 2019, prevalensi stunting sebesar 16,37%, dan menurun pada tahun 2020 (16,1%). Pada tahun 2021 prevalensi stunting terus menurun menjadi 14,98%. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 14,68% dan turun menjadi 12,77 pada tahun 2023. Hal tersebut berarti upaya yang terwujud dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan, telah dapat memperlihatkan pencapaian yang signifikan. Kerja sama lintas program, lintas sektor, serta stakeholder terkait lainnya perlu terus dilakukan, karena penanganan stunting tidak dapat dilakukan dari segi kesehatan saja.

15. Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi

Persentase fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi di Kabupaten Probolinggo telah mencapai target, yaitu sebesar 70,91% pada tahun 2021. Faskes yang telah terakreditasi meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas, sedangkan klinik belum terakreditasi. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala kepada semua faskes untuk memastikan mutu layanan tetap

terjaga demi memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar serta menjamin kepuasan pasien. Sementara pada tahun 2023 terdapat peningkatan fasilitas kesehatan yang terakreditasi secara signifikan menjadi 90%.

16. Masyarakat yang Tercover JKN

Salah satu upaya dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan adalah dengan menjamin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tahun 2021, masyarakat Kabupaten Probolinggo yang telah terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 84,27% (974.695 jiwa) dari jumlah penduduk 1.156.570 jiwa. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 87%. Hal ini disebabkan karena alokasi pendanaan atas pembiayaan kepesertaan JKN belum mencukupi untuk memenuhi target yang ditetapkan. Sehingga diperlukan advokasi untuk penyediaan anggaran yang cukup besar atas pembiayaan kepesertaan JKN. Serta perlu verifikasi dan evaluasi secara berkala terkait data kepesertaan untuk memastikan peserta yang telah meninggal segera diputus kepesertaannya sehingga alokasi pembiayaan dapat dialihkan pada warga lain yang lebih membutuhkan. Sementara pada tahun 2023 peningkatan yang signifikan terjadi sehingga Masyarakat yang tercover JKN sebesar 98,85% dari total penduduk.

17. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dari 0,72 menjadi 0,73. Pada tahun 2020- 2021 indeks Kesehatan ini tidak mengalami perubahan, atau dengan kata lain stagnan sehingga kedepannya perlu upaya untuk meningkatkan capaian indikator indeks kesehatan kabupaten Probolinggo. Sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,82. Pada tahun 2023 Indeks Kesehatan Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 0,83. Peningkatan ini merupakan wujud dari keseriusan Pemerintah Probolinggo dalam memperbaiki jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Probolinggo.

18. Standar Pelayanan Minimal(SPM) Bidang Kesehatan

Pencapaian indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 64
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021-2023

No	Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Prosentase bu hamil yang mendapatkan layanan	%	87.74	88.23	84.82
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.32	98.24	96.54
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.62	92.79	94.22
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92.23	94.73	94.64
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	29,23	80,87	100
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	22,48	31,13	70
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85.98	73,44	91.39
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	14,34	22,46	37.09
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	51,68	82,08	100
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	84,33	100	100
11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	25,10	116,62	100
12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	47,67	83,20	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Tampak bahwa dari 12 indikator SPM bidang urusan Kesehatan terdapat 5 indikator yang telah mencapai target 100%, yaitu Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan, Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan, Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan, Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan

kesehatan, Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari setiap pelaksana program di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.65
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	Pekerjaan Umum						
1.	Persentase meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	66,584	69	60,1	77,18	79.56
2.	Panjang jalan dilalui roda 4	Km	785.819	785.819	785.819	778.34	785.819
3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5m)	%	56,375	56,375	43,375	43,375	43,375
4.	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan	%	61.53	62.06	62.29	62.62	63.18
5.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	89	90	44.02	47.32	47.81
6.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	61.79	62.03	63.01	63.55	64.02
7.	Persentase drainase yang ber kondisi baik pada lingkungan permukiman kumuh	%	40,65	51,41	51,48	51,48	60.9
8.	Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik	%	42	36,2	28	30	34.95
9.	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	75,64	75,63		177	177
10.	Persentase Meningkatnya Kinerja Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	%	N/A	N/A	44.02	47.32	47.81
11.	Persentase Meningkatnya Pengaman Air Baku	%	N/A	N/A	23	23	23
12.	Nilai Bobot Capaian SIPJAKI	%	N/A	30	32	34	36

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
13.	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang Terlegalisasi	%	N/A	N/A	20	20	20
14.	Nilai Sakip DPUPR	%	N/A	70,49	75.15	75.26	78.65
<i>B. Penataan Ruang</i>							
1	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	%	74,1	74,2	74,5	71	75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Pekerjaan Umum

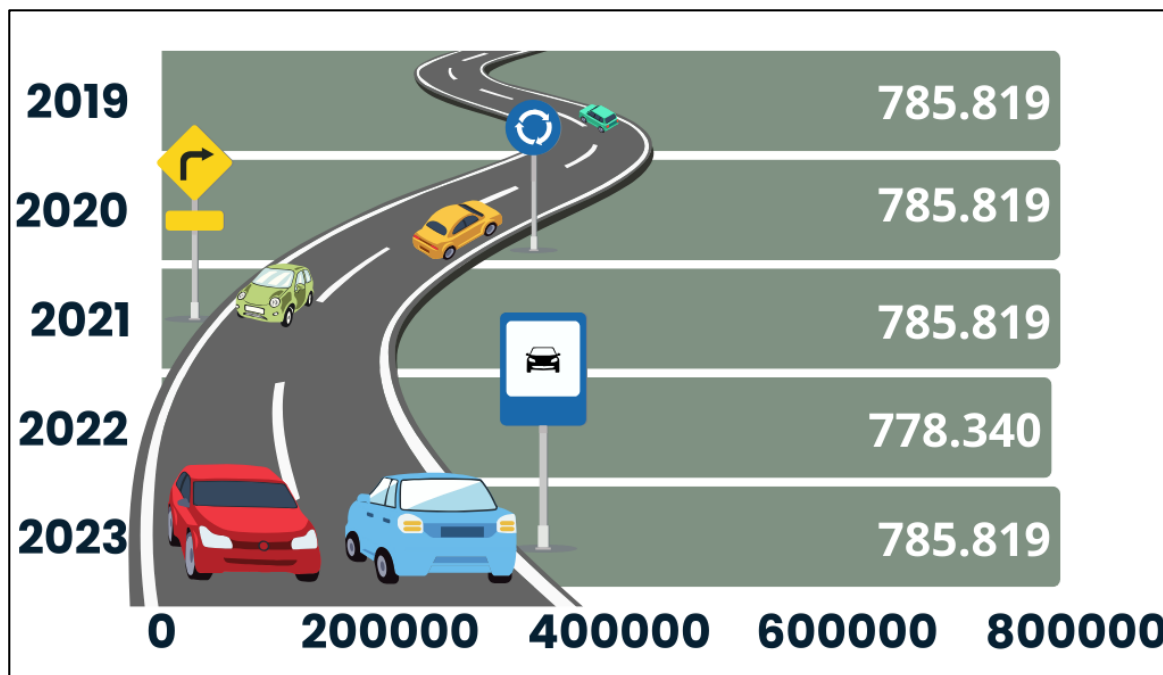
1. Persentase Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik

Capaian indikator kinerja persentase meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, persentase meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 66,584%. Pada tahun 2020, persentase meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat menjadi sebesar 69%. Pada tahun 2021 persentase meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 60,1%. Namun pada tahun 2022, persentase meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi sebesar 77,18%. Peningkatan juga kembali terjadi pada tahun 2023 menjadi 79,56%.

2. Panjang Jalan Dilalui Roda 4

Capaian indikator kinerja panjang jalan dilalui roda 4 di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2021 menunjukkan capaian yang stabil setiap tahunnya, yaitu 785.819 km. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian indikator kinerja menjadi 778.34 km. Namun kembali stabil pada tahun 2023 menjadi 785.819 km.

Gambar 2. 65
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo

3. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembangunan Air (Minimal 1,5 m)

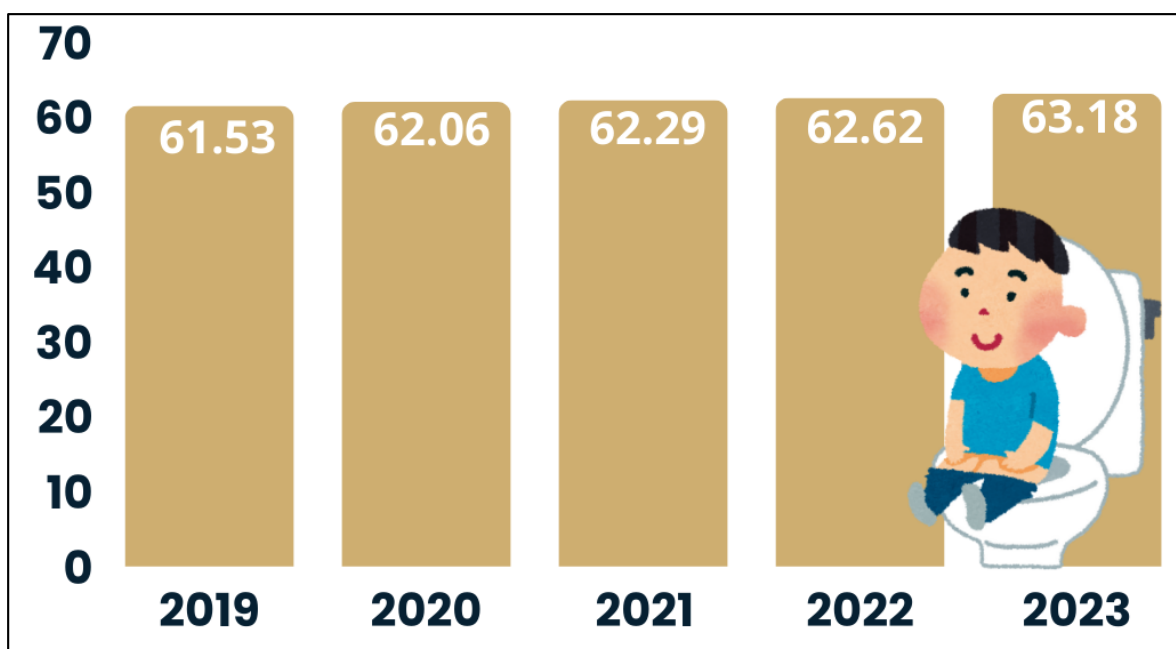
Capaian indikator kinerja persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 cenderung menunjukkan trend yang stabil. Sebab capaian indikator kinerja persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar mengalami kondisi yang stabil yakni 56,375%. Sayangnya data Capaian indikator kinerja persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya penurunan menjadi 43,375% dan tidak berubah sampai dengan tahun 2023.

4. Persentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan

Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 capaian indikator Persentase Rumah

Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan sebesar 61,53%, dan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 62,05%. Peningkatan terus terjadi secara beruntun menjadi 62,29% pada tahun 2021, 62,62% pada tahun 2022 dan 63,18% pada tahun 2023. Sanitasi merupakan cara mengolah limbah rumah tangga untuk mencegah manusia terkena penyakit, dengan adanya sanitasi diharapkan kesehatan manusia akan lebih terjaga karena terbebas dari kotoran dan bahan buangan yang berbahaya dan membawa penyakit. Berikut grafik pencapaian indikatornya :

Gambar 2. 66
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Probolinggo



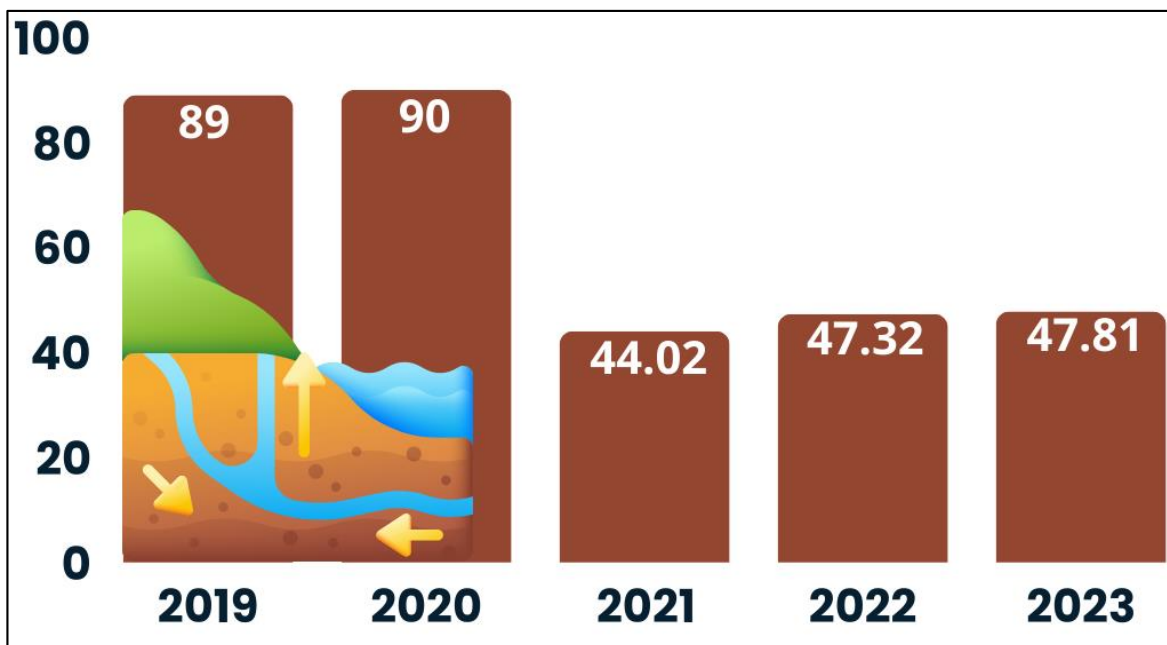
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Probolinggo, Tahun 2024

5. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Capaian indikator kinerja luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 89%. Dan pada tahun 2020, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan kembali menjadi 90%. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi pengurangan target indikator karena terdapat perubahan formulasi perhitungan, sehingga pada tahun 2021 tercatat luas irigasi

dalam kondisi baik menjadi 44,02%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 47,32% dan pada tahun 2023 menjadi 47,81%.

Gambar 2. 67
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

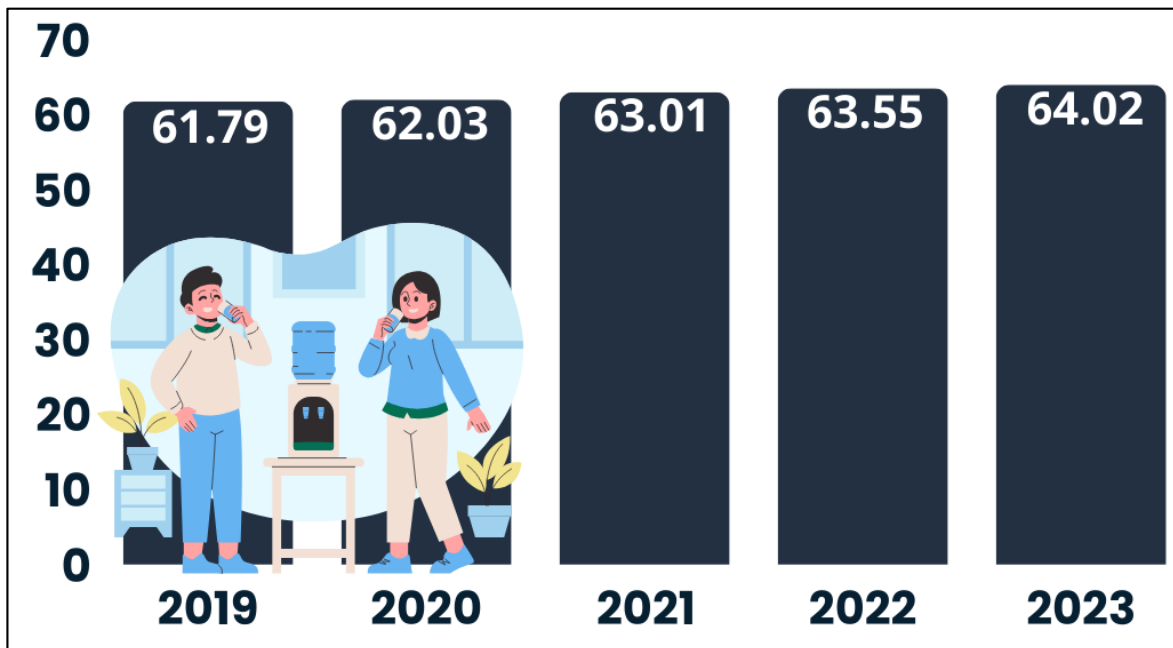


Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Probolinggo, Tahun 2024

6. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak

Capaian indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, Pada tahun 2019 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo sebesar 61,79%. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 62,03%. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2021 dan menjadi 63,01%. Sementara peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2023 secara beruntun menjadi 63,35% dan 64,02%.

Gambar 2. 68
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Probolinggo, Tahun 2024

7. Persentase Drainase yang Berkondisi Baik Pada Lingkungan Pemukiman Kumuh

Capaian indikator kinerja persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo sebesar 40,65%. Dan pada tahun 2020, persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan menjadi 51,41%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 51,48% dan stagnan pada tahun 2022. Peningkatan persentase drainase yang berkondisi baik pada lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Probolinggo yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 hingga mencapai 60,9%.

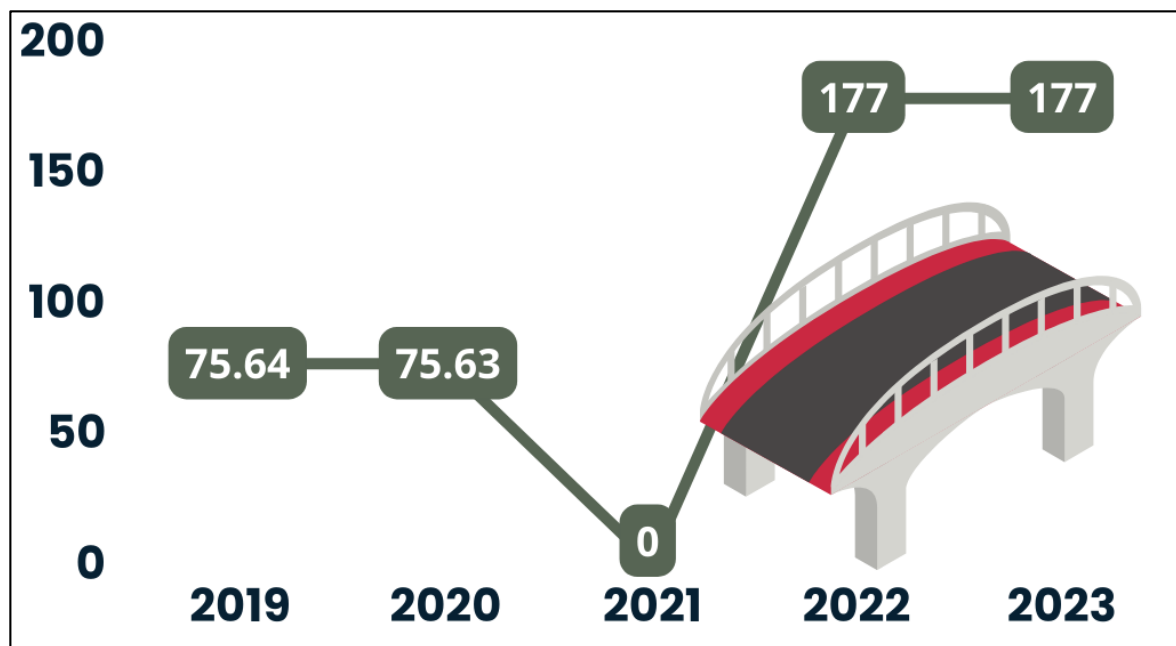
8. Peningkatan Rasio Prasarana Sumber Daya Air yang Baik

Capaian indikator kinerja peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2019, peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 42%. Pada tahun 2020, peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 36,2%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi 28%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya maka tahun 2022 terjadi peningkatan rasio prasarana sumber daya air yang baik di Kabupaten Probolinggo menjadi 30% dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 34,95%.

9. Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik

Capaian indikator kinerja proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami tren meningkat. Pada tahun 2019, proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sebesar 75,64%. Namun pada tahun 2020, proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 75,63%. Pada tahun 2021 tidak ada catatan kinerja proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Probolinggo sehingga capaiannya tidak tercatat. Namun pada tahun 2022 peningkatan yang signifikan terjadi dan menjadi 177%. Sementara pada tahun 2023 terhitung tetap.

Gambar 2. 69
Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

10. Persentase Meningkatnya Kinerja Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik

Prosentase Meningkatnya Kinerja Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik yaitu untuk menjaga kelestarian fungsi jaringan irigasi sehingga tercapai efisiensi air irigasi dan peningkatan pelayanan air irigasi, perincian kinerja sasaran Pembagian air kelahan pertanian yang lancar, adil dan merata. Capaian indikator kinerja saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 44,02%. Capaian ini terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 47,32% dan menjadi 47,81% pada tahun 2023.

11. Persentase Meningkatnya Pengamanan Air Baku

Prosentase Meningkatnya Pengaman Air Baku yaitu pemenuhan kebutuhan embung dan penampung air lainnya. Capaian indikator kinerja meningkatnya pengamanan air baku pada tahun 2021-2023 stagnan sebesar 23%.

12. Nilai Bobot Capaian SIPJAKI

Nilai Bobot Capaian SIPJAKI, yaitu Peningkatan Pelayanan Kebinamargaan serta meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa Konstruksi. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja ini sebesar 30%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat

menjadi 32%. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 34% dan 36%.

13. Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang Dilegalisasi

Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang Terlegalisasi terhadap pemanfaatan tata ruang bertujuan agar prosentase bangunan sesuai dengan rencana tata ruang. Pada tahun 2021-2023 capaian indikator kinerja ini stagnan 20%.

14. Nilai Sakip DPUPR

Nilai Sakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejak dilakukan perhitungan dari 2020-2023 selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 capaian nilai sakip DPUPR Kabupaten Probolinggo sebesar 70,49%, kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 78,65%.

Penataan Ruang

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Capaian indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Probolinggo pada tahun 22 menunjukkan capaian sebesar 71%. Namun indikator ini tidak dilakukan penghitungan kembali dan menjadi wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Probolinggo.

2. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan

Capaian indikator kinerja rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 545. Pada tahun 2016, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 541. Pada tahun 2017, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan sebesar 593. Pada tahun 2018, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar 511. Sayangnya indikator ini tidak lagi dihitung dan menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Probolinggo.

3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

Capaian indikator kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang Kabupaten Probolinggo dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dari 74,1 menjadi 74,5. Akan tetapi pada tahun 2022 menurun menjadi 71. Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang tahun 2023 ditargetkan 74,5 terealisasi 75 dengan capaian kinerja 100,67% kategori capaian **Sangat Baik**.

4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Pencapaian indikator standar pelayanan minimum urusan pekerjaan umum pada tahun 2022-2023 dapat di pada tabel 2.66 berikut:

Tabel 2. 66
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022-2023

No	Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100

Sumber: Dinas PU Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Capaian SPM urusan pekerjaan umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dan tahun 2023 meskipun begitu masih terdapat permasalahan yang harus segera ditangani oleh pihak terkait antara lain terkait peningkatan kesadaran masyarakat penerima bantuan akan kegunaan jamban sehat yang berdampak pada penolakan untuk melaksanakan program tanki septik komunal.

Capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam berjalannya tentu terdapat faktor pendorong seperti Bangunan SDA dan jaringan Irigasi yang berpotensi untuk dioptimalkan pemanfaatnya dalam pemenuhan kebutuhan air di Daerah. Sedangkan penghambatnya Keterbatasan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta banyaknya Sungai dan Bangunan Air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor serta terjadinya perubahan fungsi lahan.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 67
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1.	Persentase rumah layak huni	%	89,8	90,2	90,34	88,67	92,4
2.	Rumah tangga pengguna air bersih	%	59,68	62,03	63,01	63,55	64,02
3.	Rumah Tangga Bersanitasi	%	64,56	62,06	62,29	62,62	63,18
4.	Prosentase peningkatan bagunan pelayanan public berkualitas baik	%	42,11	50,33	62,11	10	7,37
5.	Persentase Kawasan pemukiman layak	%	71,03	71,08	71,89	73,41	75,69

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Persentase Rumah Layak Huni

Capaian indikator kinerja persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuatif yang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 89,8%. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi 90,2%. Kemudian pada tahun 2021 persentase rumah layak huni di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan hingga mencapai 90,34%. Sayangnya pada tahun 2022 persentase rumah layak huni mengalami penurunan menjadi 88,67%. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penigkatan yang cukup signifikan menjadi 92,4%. Dengan semakin meningkatnya capaian pada indikator ini tentu diharapkan akan berdampak juga pada kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial penduduk di Kabupaten Probolinggo. Namun data tersebut masih menggunakan baseline data jumlah rumah tahun 2017 sehingga capaian rumah layak huni sangat tinggi. Pada tahun 2025 akan dilakukan update data terkait jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni, sehingga akan berpengaruh terhadap capaian Rumah Layak Hunni untuk dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

2. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Capaian indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo sebesar 59,68%. Pada tahun 2020, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 62,03%. Pada tahun 2021, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi sebesar 63,01%. Pada tahun 2022 rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan sebesar 63,55%. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2023 menjadi 64,02%. Dengan meningkatnya capaian indikator ini tentu menjadi modal besar bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menjaga kesehatan penduduk di Kabupaten Probolinggo.

3. Rumah Tangga Bersanitasi

Capaian indikator kinerja rumah tangga bersanitasi tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif namun cenderung meningkat. Tahun 2019 capaiannya sebesar 64,56%. Sementara pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan tren capaian jika dibanding tahun sebelumnya, secara berurutan capainnya sebesar 62,02% tahun 2020, 62,29% pada tahun 2021 dan terakhir 62,62% di tahun 2022. Pada tahun 2023 sebesar 63,18%, meskipun capaian kinerja tidak sebesar tahun 2019, namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka tahun ini terjadi peningkatan yang cukup baik.

4. Prosentase Peningkatan Bangunan Pelayanan Public Berkualitas Baik

Capaian indikator kinerja peningkatan bangunan pelayanan public berkualitas baik dalam 3 tahun terakhir meningkat yang mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan layanan public secara fisik. Tahun 2019 persentase peningkatan bangunan pelayanan public berkualitas baik mencapai 42,11% yang kemudian meningkat menjadi di tahun 2020 hingga mencapai 50,33. Peningkatan indikator kinerja ini terus terjadi di tahun 2021 dengan penambahan sebesar 11,78% sehingga mencapai 62,11%. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 10% tahun 2022 dan 7,73% tahun 2023.

5. Kawasan Permukiman Layak Huni

Capaian indikator persentase Kawasan layak huni terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023, pada tahun 2019 capaian indikator persentase Kawasan permukiman layak huni hanya sebesar 71,03% meningkat menjadi 71,08% pada tahun 2020, meningkat Kembali menjadi 71,89% pada tahun 2021 hingga mencapai 73,41% di tahun 2022. Kemudian peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada tahun 2023 menjadi 75,69% atau meningkat sebesar 2,28%.

6. SPM Urusan Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 68
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2023

No	Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	0	0

Sumber: Dinas PERKIM Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Pencapaian SPM Perumahan rakyat tahun pada indikator persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni tahun 2021 – 2023 telah mencapai 100% meskipun demikian masih harus tetap berbenah dan terus berupaya menyelesaikan permasalahan baik internal maupun eksternal yang ada dalam upaya mencapai SPM tersebut. Sebagian lahan rumah masyarakat yang terkena bencana alam masih belum milik sendiri, dan belum dilakukannya identifikasi rumah akibat bencana alam dan rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah harus segera dilaksanakan guna meningkatkan capaian SPM perumahan rakyat kedepannya.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69
Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	85	90	93	100	100
2.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Kali	20	20	51	29	76
3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90	90	100	100	100
4.	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban	%	0,56	8,3	-2,12	-0,99	1,32
6.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	71,5	76,67	77,06	78,02	78,12
7.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30	0,55	0,60	0,57	0,59
8.	Indeks Ketentraman Masyarakat	Indeks	NA	NA	NA	2,93	2,72
9.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	156.70	141.16	139.18	149.07	160.55

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2021 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami stagnansi dengan capaian sebesar 85%, kemudian mengalami kenaikan pada 2020 hingga 2021 menjadi 93%. Sementara data pada tahun 2022 dan 2023 sampai dokumen ini dimuat belum tersedia.

2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 mengalami stagnansi sebanyak 20 kali dalam dua tahun berturut-turut hingga pada tahun 2021 pelayanan meningkat menjadi 51 kali. pada tahun 2022 dan 2023 29 kali dan 76 kali.

3. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Capaian indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 cenderung mengalami stagnansi. Sejak tahun 2021-2022 tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Probolinggo menjadi 100% selama dua tahun berturut turut.

4. Persentase Penegakan PERDA

Capaian indikator kinerja persentase penegakan PERDA di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022 persentase penegakan PERDA sebesar 100% selama empat tahun berturut-turut. Demikian pula pada tahun 2023, kinerja persentase penegakan perda mencapai 100 persen.

5. Persentase Penurunan Kasus ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum meningkat dari tahun 2019. Setahun kemudian yaitu pada tahun 2021 menunjukkan kondisi yang menurun hingga mencapai -2,12%. Kemudian mengalami peningkatan Kembali menjadi -0,99% meskipun hal ini masih jauh dari apa yang ditargetkan sebesar 1,04% pada tahun 2022 sehingga kedepannya perlu perbaikan mengingat pentingnya indikator pelayanan ini pada masyarakat. Sementara pada tahun 2023 penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum ditargetkan mencapai 1,05% dan capaian yang dihasilkan sebesar 1,32%.

6. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Capaian kerukunan umat beragama terus mengalami peningkatan, dari 71,5 pada tahun 2019 hingga mencapai 78,12 pada tahun 2023. Data ini menunjukkan semakin tingginya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Probolinggo. Target Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2023 sebesar 76,5 terealisasi 78,12 atau capaian kinerjanya sebesar 102,12% dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Probolinggo tahun 2023 antara lain :

- a. Pemkab telah memfasilitasi penutupan yang diduga petilasan Syekh Maulana Ishaq bertempat didesa Kalianan Kecamatan Krucil. Dari hasil Rapat Koordinasi FKUB berdasarkan fakta dan saksi menyatakan bahwa tempat tersebut tidak ada hubungan dengan Syekh Maulana Ishaq, dimana sebelumnya telah ditemukan pemanfaatan tempat tersebut oleh kelompok tertentu untuk menggelar kegiatan keagamaan. Selanjutnya, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak terkait telah menutup tempat petilasan tersebut.
- b. Beberapa kegiatan yang diadakan pemerintah kabupaten dengan melibatkan masyarakat dari berbagai penganut keagamaan antara lain Tasyakuran dan resepsi 1 Abad NU, Kirab Panji dan Jalan Sehat serta petik laut

7. Indeks Ketahanan Daerah

Indikator urusan kebencanaan mulai tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 mengalami perubahan dimana indikator sebelumnya IRB (indeks risiko bencana) diubah menjadi IKD (indeks ketahanan daerah) sejalan dengan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Capaian indeks ketahanan daerah di tahun 2022 sebesar 0,6. Capaian ini sudah melebihi target yang ingin dicapai di tahun 2022. Target capaian kinerja indeks ketahanan daerah Kabupaten Probolinggo di tahun 2022 sebesar 0,57. Sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,59.

8. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo

tahun 2023 telah mencapai 100% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Meskipun capaian yang diperoleh sangat bagus akan tetapi dalam upaya terus memberikan pelayanan terbaik dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana, pegawai satpol PP dan pemadam kebakaran yang berkualitas/bersertifikat.

Tabel 2. 70
Standar Pelayanan Minimum Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2021-2023

No	Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
A.	Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
3	Warga terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100
B.	Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
4	Warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	%	100	100	100

Sumber: Satpol PP, BPBD Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

F. Urusan Sosial

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 71
Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	24	24	24	24	24
3	Persentase Penurunan PPKS	%	3,92	4,39	5,94	8,95	8,87

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Capaian indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 1,9% dan pada tahun 2020-2023 mengalami stagnansi menjadi sebesar 1,9%.

2. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia

Capaian indikator kinerja Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 berjumlah tetap. Sejak tahun 2019 hingga 2023 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia sejumlah 24 orang.

3. Persentase Penurunan PPKS

Kementrian social mengganti PMKS (Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosil) dikarenakan secara psikologi, penyandang masalah akan menjadi beban bagi manusia itu sendiri. Capaian indicator ini pada tahun 2019 sebesar 3,92%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,39%, sedangkan pada tahun 2021 peningkatan penurunan

PMKS sebesar 5,94% dan meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 8,95%. Dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan social membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak, salah satu diantaranya pemerintah daerah khususnya Pemkab Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2023 capaian persentase penurunan PPKS Kabupaten Probolinggo turun menjadi 8,87%.

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Peningkatan pencapaian SPM urusan sosial akan terus ditingkatkan dengan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan, peningktan SDM pendamping social gun menunjang kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 72
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten
Probolinggo Tahun 2021-2023

No	Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	1.03	1.14	1.28
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	1.13	1.71	2
3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	0.53	0.54	0.55
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	4.2	5.35	5.35
5	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	0.18	0.21	0.24

Sumber: Dinsos Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Adapun urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

A. Urusan Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 73
Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,62	68,62	73,24	71,56	69,48
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,88	4,86	4,55	3,25	3,24
3.	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,23	95,14	95,45	96,74	96,76

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Capaian indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2021. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo sebesar 68,62%. Kemudian pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan menjadi sebesar 68,62%. Tahun 2021 capaian indikator TPAK mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 4,62% menjadi 73,24%. Namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 71,56%, demikian pula pada tahun 2023 turun menjadi 69,48%.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo sebesar 3,88%. Kemudian pada 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 4,86% yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,55%. Sementara capaian indikator pada tahun 2022 menunjukkan penurunan persentase pengangguran terbuka menjadi 3,25% dan kembali turun menjadi 3,24% pada tahun 2023. Angka ini adalah angka terkecil dalam periode 2019-2023 sehingga bisa disimpulkan Kabupaten Probolinggo di

tahun 2023 sudah mulai stabil kembali jika dibanding dengan masa pandemi covid-19.

3. Tingkat Kesempatan Kerja

Capaian tingkat kesempatan kerja mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020, akan tetapi di tahun 2021 hingga tahun 2022 meningkat kembali hingga mencapai 96,74%. Peningkatan ini kembali terjadi pada tahun 2023 menjadi 96,76%.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 74
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64,9	68,69	68,75	68,36	69,25
3.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,57	0,53	0,53	0,49	0,48

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Capaian indikator kinerja penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang masuk, telah ditindaklanjuti semuanya tanpa terkecuali.

2. Indeks Pemberdayaan Gender

Capaian indikator kinerja Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukan tren positif, karena setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 64,9 poin kemudian meningkat menjadi 68,69 poin pada tahun 2020 dan menjadi 68,75

poin pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 68,36 poin dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 69,25 poin.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Capaian indikator kinerja Indeks ketimpangan gender Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren positif, karena setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 0,57 poin kemudian turun menjadi 0,53 poin pada tahun 2020 meskipun kemudian nilai ini stagnan pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 penurunan terjadi menjadi 0,49 poin dan tahun 2023 kembali turun menjadi 0,48 poin.

C. Urusan Pangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 75
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Pangan							
1.	Ketersediaan pangan utama	Ton	167.292	142.98	132.478	145.179	139.26
2.	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	Kkal	2,080	2,190	2,067	2,060	2,027
3.	Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	Gram	58.86	62.6	59.5	58.54	57.4
4.	Pola pangan harapan	%	74,5	75	78,8	79,8	81
5.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	10,98	9,74	11,96	13,68	10,43

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Ketersediaan Pangan Utama

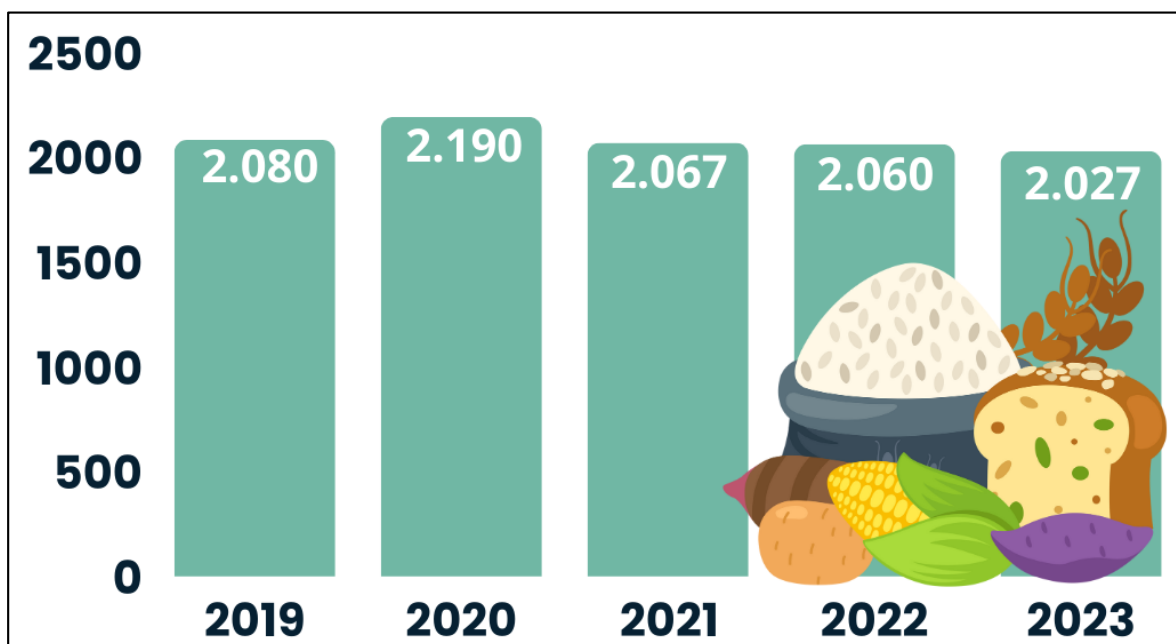
Capaian indikator kinerja ketersediaan pangan utama di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi fluktuatif, dimana ketersediaan pangan utama sebesar 167.292 ton pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 142.98 ton. Penurunan Kembali pada tahun 2021 menjadi 132.478 ton. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang disebabkan adanya paceklik, namun kebutuhan ketersediaan pangan masyarakat masih bisa dipenuhi dengan logistik yang tersedia. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan ketersediaan pangan

utama menjadi 145.179 ton. Meski demikian pada tahun 2023 kembali turun menjadi 139.26 ton.

2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Pada tahun 2019 capaian ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 96,8%. Ketersediaan energi dan protein per kapita terus mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 96,8% yang disebabkan karena ketersediaan energi dan protein bisa diproduksi sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Namun sejak tahun 2021 indikator ini dipecah menjadi 2 indikator, yakni indikator ketersediaan energi. Pada tahun 2019 indikator ketersediaan energi Kabupaten Probolinggo sebesar 2.080 Kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 2.190 Kkal/kapita/hari. Kondisi ini kemudian menurun pada 3 tahun berikutnya dan menjadi 2.067 Kkal/kapita/hari pada tahun 2021, 2.060 Kkal/kapita/hari tahun 2022 dan pada tahun 2023 turun menjadi 2.027 Kkal/kapita/hari.

Gambar 2. 70
Ketersediaan Energi Per kapita di Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019–2023

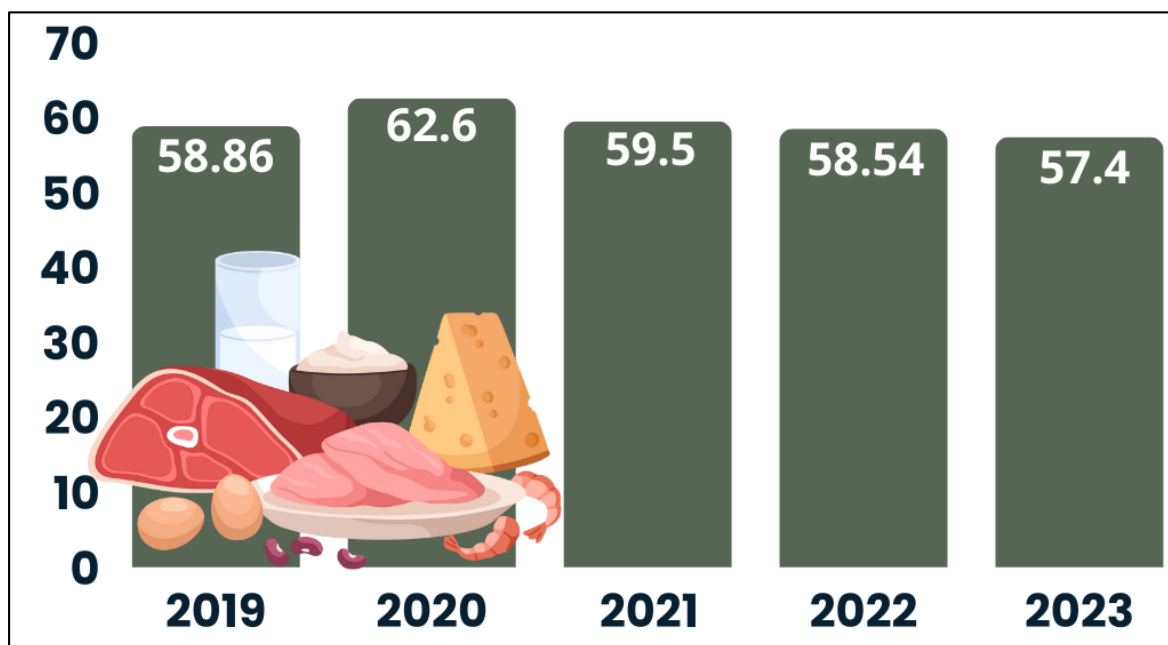


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Sementara indikator yang berikutnya adalah Ketersediaan protein. Pada tahun 2019-2023 ketersediaan protein Kabupaten Probolinggo mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 ketersediaan protein di Kabupaten Probolinggo tercatat

sebesar 58,86 gr/kapita/hari. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 62,6 gr/kapita/hari. Sama halnya dengan indikator ketersediaan energi, pada 3 tahun berikutnya indikator ketersediaan protein mengalami penurunan menjadi 59,5 gr/kapita/hari pada tahun 2021, kemudian 58,54 gr/kapita/hari pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 penurunannya menjadi 57,4 gr/kapita/hari.

Gambar 2. 71
Ketersediaan Protein Per kapita di Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019–2023

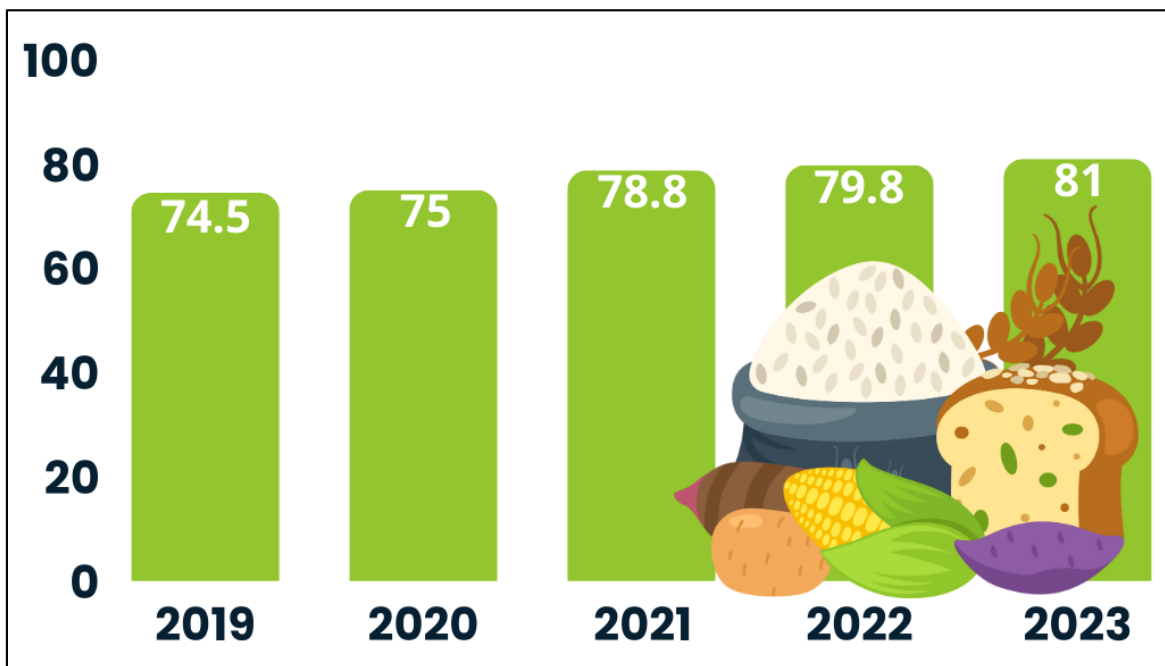


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

3. Pola Pangan Harapan

Capaian indikator pola pangan harapan pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, capaian indikator pola pangan harapan sebesar 74,5%. Yang kemudian terus meningkat menjadi 75% pada tahun 2020, 78,8% pada tahun 2021 dan 79,80% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 PPH meningkat menjadi 81% .

Gambar 2. 72
Pola Pangan Harapan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

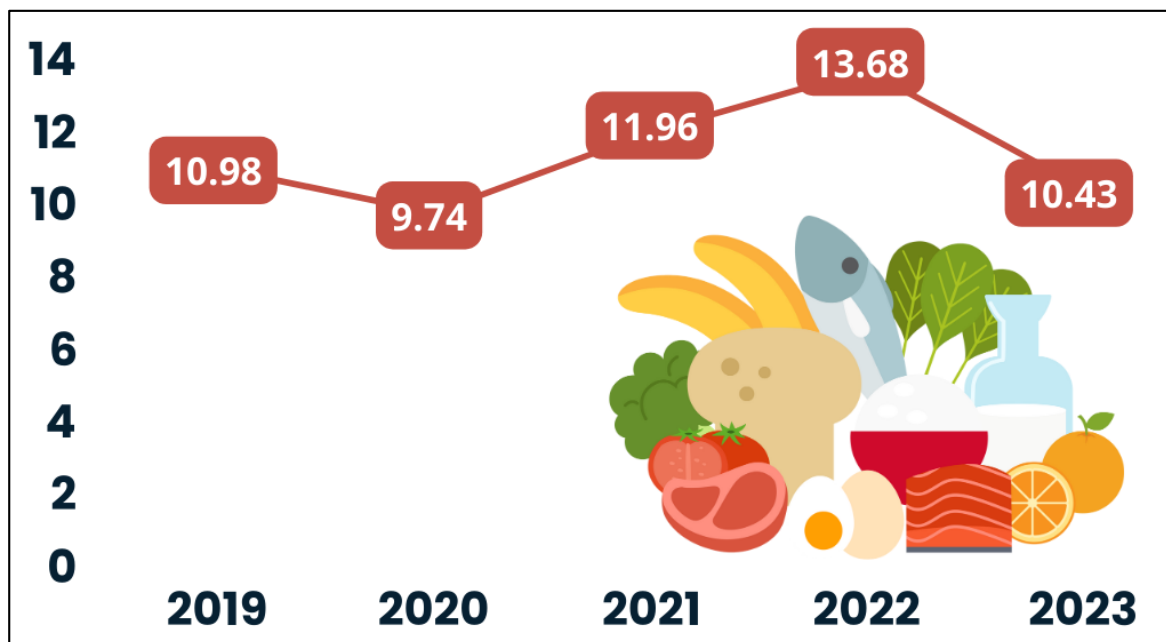


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

4. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Capaian indikator prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, capaian indikator prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan sebesar 10,98%. Yang kemudian turun menjadi 9,74% pada tahun 2020. Kemudian meningkat menjadi 11,96% pada tahun 2021 dan 13,68% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 10,43%.

Gambar 2. 73
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019–2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo memahami bahwa ketahanan pangan adalah kunci dalam menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dengan memperhatikan tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan ketersediaan sumber daya, kami berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo selama 20 tahun ke depan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Kabupaten Probolinggo akan fokus pada beberapa strategi utama:

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian:

Teknologi pertanian terbaru akan diadopsi, pelatihan yang komprehensif akan disediakan bagi petani, serta infrastruktur pertanian akan ditingkatkan untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

2. Diversifikasi Pangan:

Pemerintah akan mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal, guna mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan memperkuat ketahanan pangan melalui sumber daya lokal yang lebih beragam.

3. Peningkatan Infrastruktur Penunjang:

Fokus akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, dan fasilitas penyimpanan yang mendukung distribusi pangan yang efisien dan merata di seluruh Kabupaten Probolinggo.

4. Penguatan Sistem Logistik Pangan:

Komitmen untuk membangun sistem logistik pangan yang lebih tangguh akan terus ditegaskan, guna memastikan ketersediaan pangan di setiap wilayah, terutama dalam situasi darurat atau bencana.

5. Pelibatan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani:

Masyarakat dan petani akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan, dengan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Saat ini, meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo belum menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terperinci, kami akan segera memulai proses penyusunan tersebut. RAD ini nantinya akan dirumuskan melalui konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa rencana tersebut dapat menjawab tantangan dan kebutuhan daerah, serta diimplementasikan secara efektif dalam jangka panjang.

D. Urusan Pertanahan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 76
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun	
			2022	2023
Pertanahan				
1	Persentase Penyelesaian izin lokasi	%	72,26	-
2	Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat	%	26,39	27,04
3	Persentase Jumlah Penggunaan Tanah Pemda/sertifikasi PSU Perumahan	%	76,49	71,498

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2024

Pada indikator Persentase Penyelesaian izin lokasi tahun 2023 tidak dilakukan perhitungan dikarenakan tidak adanya program penyelesaian izin lokasi pada tahun 2023. Sementara Persentase Jumlah Penggunaan Tanah Pemda/sertifikasi PSU Perumahan pada tahun 2023 sebesar 71,498% angka ini relative lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 76,49%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo menyadari pentingnya mempertahankan lahan pertanian dalam Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya strategis untuk menjamin ketersediaan produksi pangan di masa depan dan menjaga fungsi wilayah sebagai resapan air. Seiring dengan pertumbuhan populasi perkotaan dan meningkatnya urbanisasi, terjadi tekanan yang signifikan terhadap lahan pertanian yang berpotensi dikonversi menjadi kawasan non-pertanian.

Konversi lahan pertanian ini dapat mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, mempertahankan LP2B menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa Kabupaten Probolinggo tetap memiliki lahan yang produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya di masa depan. Selain itu, lahan pertanian juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan air melalui fungsinya sebagai wilayah resapan air, yang esensial untuk mencegah banjir dan menjaga keseimbangan siklus hidrologi.

Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen untuk melindungi LP2B dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini akan dilakukan melalui pengawasan yang ketat, kebijakan tata ruang yang bijak, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa lahan pertanian yang ada dapat terus berfungsi optimal untuk produksi pangan dan menjaga lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Probolinggo dapat mengantisipasi tantangan masa depan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

E. Urusan Lingkungan Hidup

Perkembangan indikator kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 77
Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)>Pindah ke aspek Geografis	61,31	63.4	64,17	60,38	64,14
Indeks Kualitas Air	49,2	50	50,77	38,89	47.78
Indeks Kualitas Udara	84,9	80.18	80,71	82.82	83.64
Indeks Kualitas Lahan	54.827	55.38	56,58	55,79	56.15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup suatu daerah yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Air (IKA) mengukur kondisi dan kebersihan sumber daya air. Selama periode 2019 hingga 2023, IKA menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 yang menandakan perlunya perhatian terhadap pencemaran dan pengelolaan sumber daya air. Indeks Kualitas Udara (IKU) menilai tingkat pencemaran udara dan kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat. IKU menunjukkan kualitas udara yang relatif baik secara konsisten, meskipun terdapat fluktuasi minor, menunjukkan upaya yang efektif dalam pengendalian polusi udara. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mencerminkan kondisi tutupan lahan dan perubahan penggunaannya. IKTL menunjukkan tren peningkatan yang stabil, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dan pelestarian lahan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Probolinggo sebesar 61,31. Dan pada tahun 2020-2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan kembali dari tahun 2019 menjadi 63,4 dan 64,17 secara berurutan. Sayangnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 60,38. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 64,14.

Capaian kinerja lingkungan hidup dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA), dan indeks tutupan lahan (IKTL). Pada tahun 2019, rumus perhitungan IKLH adalah: $(0,3 \times \text{IKU}) + (0,3 \times \text{IKA}) + (0,4 \times \text{IKTL})$. Namun, mulai tahun 2020 hingga 2023, rumus ini mengalami perubahan menjadi: $\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$. Perubahan rumus ini berdampak pada evaluasi capaian kinerja, yang mungkin tidak sepenuhnya sebanding dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, penurunan IKLH ini juga disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan aktivitas industri, konversi lahan, urbanisasi yang tidak terkendali, serta tantangan dalam pengelolaan sampah dan pencemaran. Kondisi ini menekankan perlunya perhatian lebih terhadap upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Probolinggo, seperti pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Untuk membalikkan tren penurunan ini, Pemerintah Daerah perlu memperkuat kebijakan dan program lingkungan yang berkelanjutan, termasuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah, serta memperluas area hijau dan ruang terbuka. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kembali IKLH di tahun-tahun mendatang, sehingga lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo tetap terjaga dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong:

1. **Kebijakan dan Program Lingkungan:** Kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas udara, air, dan tutupan lahan berperan penting dalam pencapaian target lingkungan. Kebijakan yang konsisten dan terarah dapat memperbaiki parameter-parameter lingkungan secara signifikan.
2. **Kesadaran Masyarakat:** Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlunya perlindungan lingkungan hidup mendorong partisipasi aktif dalam program-program lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan konservasi.

3. **Teknologi dan Inovasi:** Adopsi teknologi terbaru dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan, seperti sistem informasi geografis (GIS) dan metode analisis data yang canggih, membantu meningkatkan akurasi dan efektivitas program lingkungan.

Faktor Penghambat:

1. **Perubahan Rumus Perhitungan:** Perubahan dalam rumus perhitungan IKLH dapat menyulitkan perbandingan capaian antar tahun. Ini menyebabkan pergeseran dalam penilaian kinerja dan mungkin mengakibatkan capaian yang tampak tidak memenuhi target meskipun ada kemajuan.
2. **Penurunan Kualitas Indikator:** Penurunan kualitas indikator, seperti kualitas udara, air, dan tutupan lahan, dapat menghambat pencapaian target. Masalah ini memerlukan perhatian khusus dan upaya perbaikan yang terintegrasi.
3. **Perubahan Indikator:** Modifikasi dalam indikator yang digunakan untuk perhitungan IKLH dapat mempengaruhi hasil evaluasi. Penyesuaian indikator ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengganggu evaluasi kinerja secara keseluruhan.

2. Indeks Kualitas Air

Capaian indikator indeks kualitas air di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, indeks kualitas air mencapai 49,2 poin. Kemudian naik kembali pada tahun 2020 menjadi 50 poin, Pada tahun 2021 indeks kualitas air mengalami kenaikan kembali menjadi 50,77 poin. Namun pada tahun 2022 indeks kualitas air kembali mengalami penurunan menjadi 38,89 poin. Peningkatan terjadi pada tahun 2023 menjadi 47,78 poin.

3. Indeks Kualitas Udara

Capaian indikator indeks kualitas udara di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 capaian indeks kualitas udara sebesar 84.90 poin, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 80.18 yang kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 80,71 poin dan pada tahun 2022 menjadi 82,82 poin. Sementara pada tahun 2023 menjadi 83,64 poin.

IKU tahun 2020 bersumber dari 2 (dua) sumber data, yaitu IKU yang bersumber dari pengukuran udara ambien metode Passive Sampler yang didanai oleh APBD dan APBN (KLHK). Namun demikian, pengambilan contoh uji keduanya tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan waktu yang berbeda. Nilai IKU Kabupatane Probolinggo Tahun 2021 diambil dari nilai IKU gabungan yaitu 80,71, karena lokasi pemantauan udara ambien yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Probolinggo di tahun 2021 berbeda dengan pemantauan yang dilakukan oleh KLHK. Tujuan perubahan lokasi tersebut untuk menambah variasi data pemantauan.

4. Indeks Kualitas Lahan

Capaian indikator indeks kualitas lahan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, indeks kualitas lahan mengalami penurunan di angka yang sama yaitu 54.827 poin. Dan pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan kembali dibandingkan tahun 2019 sebesar 55.38 poin pada tahun 2020 dan 56.58 poin untuk tahun 2021. Sementara data tahun 2022 untuk capaian indikator indeks kualitas lahan menurun menjadi 55,79 poin. Kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 56,15 poin.

Selain 4 indikator diatas, permasalahan yang juga terjadi di Kabupaten Probolinggo adalah pengelolaan sampah

Tabel 2.78
Tren Pengelolaan Sampah di Kabupaten Probolinggo

Persampahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan	170.133,51 ton/tahun	167.335,13 ton/tahun	168.171,85 ton/tahun	168.760,52 ton/tahun	169.354,89 ton/tahun
Pengurangan	5.285,27 ton/tahun (3,11%)	6.443,66 ton/tahun (3,85%)	9.729,73 ton/tahun (5,79%)	12.190,78 ton/tahun (7,22%)	31.095,73 ton/tahun (18,36%)
Penanganan	15.753,40 ton/tahun (9,26%)	21.410,92 ton/tahun (12,80%)	22.270,11 ton/tahun (13,24%)	22.527,80 ton/tahun (13,35%)	43.873,00 ton/tahun (25,91%)
Sampah terkelola	21.038,67 ton/tahun (12,37%)	27.854,58 ton/tahun (16,65%)	31.999,84 ton/tahun (19,03%)	34.718,58 ton/tahun (20,57%)	74.968,73 ton/tahun (44,27%)
Sampah tidak terkelola	149.094,84 ton/tahun (87,63%)	139.480,55 (83,35%)	136.172,01 ton/tahun (80,97%)	134.041,94 ton/tahun (79,43%)	94.386,16 ton/tahun (55,73%)

Sumber: DLH Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam upaya pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan maupun penanganan sampah. Data yang dihimpun dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif, baik dalam pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan maupun dalam peningkatan volume sampah yang berhasil dikelola.

Pada tahun 2019, Kabupaten Probolinggo menghasilkan timbulan sampah sebesar 170.133,51 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 12,37% atau sekitar 21.038,67 ton yang berhasil dikelola, sementara 87,63% sisanya masih belum terkelola dengan baik. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah pada saat itu masih menghadapi tantangan besar.

Namun, seiring berjalannya waktu, upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Probolinggo mulai menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2020, total sampah yang dihasilkan mengalami sedikit penurunan menjadi 167.335,13 ton per tahun. Selain itu, proporsi sampah yang berhasil dikelola meningkat menjadi 16,65% atau sekitar 27.854,58 ton per tahun. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan dalam upaya pengurangan sampah yang mencapai 3,85%, serta peningkatan dalam penanganan sampah.

Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2021, di mana volume sampah terkelola meningkat menjadi 19,03% dari total timbulan sampah, atau sekitar 31.999,84 ton per tahun. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pengurangan sampah yang mencapai 5,79% dan penanganan sampah yang meningkat menjadi 13,24%.

Pada tahun 2022, meskipun total timbulan sampah sedikit meningkat menjadi 168.760,52 ton per tahun, jumlah sampah yang berhasil dikelola juga meningkat menjadi 20,57% atau 34.718,58 ton per tahun. Upaya pengurangan sampah yang mencapai 7,22% serta penanganan sampah yang terus membaik menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

Tahun 2023 menandai pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Probolinggo. Dari total timbulan sampah sebesar 169.354,89 ton per tahun, sekitar 44,27% atau 74.968,73 ton berhasil dikelola. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh upaya pengurangan sampah yang mencapai 18,36% dan penanganan sampah yang mencapai 25,91%.

Secara keseluruhan, tren lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Probolinggo. Dengan proporsi sampah yang tidak terkelola menurun dari 87,63% pada tahun 2019 menjadi 55,73% pada tahun 2023, terlihat jelas bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang diterapkan mulai membuahkan hasil. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas program-program pengelolaan sampah yang ada, tetapi juga menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik.

Namun, meskipun telah terjadi peningkatan yang signifikan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih optimal di masa mendatang. Perlu terus dilakukan peningkatan pada kapasitas pengelolaan sampah serta edukasi dan partisipasi masyarakat agar target pengelolaan sampah yang lebih tinggi dapat tercapai.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 79
Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.	Cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP – el	%	98,39	99,77	99,96	99,06	99,26
2.	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak	%	80,28	90,26	87,51	89,90	92,49
3.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	84	84,33	86,51	100	100
4.	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	38,55	63,26	95,17	97	100
5.	Cakupan Kartu Indentitas Anak (KIA)	%	-	19,84	29,66	29,42	34,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Cakupan Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E - KTP

Capaian indikator kinerja cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki E - KTP di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 98,39%. Kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 99,77%. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2021 menjadi 99,96%, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 99,06%. Pada tahun 2023 cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki E - KTP di Kabupaten Probolinggo kembali meningkat menjadi 99,26%

2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak

Capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 terbilang fluktuatif. Pada tahun 2019 Capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak di Kabupaten Probolinggo sebesar 80,28%. Capaian ini meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 90,26%. Namun pada tahun 2021 turun menjadi 87,51%. Kemudian pada tahun 2022 dan tahun 2023 meningkat masing-masing menjadi 89,90% dan 92,49%.

3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Capaian indikator kinerja cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 terus meningkat. Pada tahun 2019 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo sebesar 84%. Kondisi ini terus meningkat hingga pada tahun 2022 dan tahun 2023 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Probolinggo telah mencapai 100%.

4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Capaian indikator kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang meningkat. Pada tahun 2019 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo sebesar 38,55%. Namun, pada tahun 2020 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kabupaten Probolinggo meningkat Kembali dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 menjadi 63,26%. Jumlah penertiban akta kematian pada tahun 2021 sebanyak 452 lembar atau 95,17%

jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 136 lembar. Sehingga persentase capaian pada tahun 2021 meningkat daripada tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 97% dan peningkatan ini menjadi 100% pada tahun 2023.

5. Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu identitas anak merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Perhitungan capaian kartu identitas anak di Probolinggo dilakukan pada tahun 2020 dan mencapai sebesar 19,84%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kartu identitas anak sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat. Pada tahun 2023 tercatat bahwa jumlah penerbitan kartu identitas anak menjadi 34,92% jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 80
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa benar	%	100	100	100	100	100
3.	Indeks Desa Membangun		0,68	0,7	0,7128	0,74	0,76
4.	Persentase Lembaga Ekonomi (BUM Desa) yang memiliki badan hukum	%	NA	NA	6	50	96
5.	Kerjasama Desa antar desa/kecamatan	Desa	NA	NA	NA	35	131
6.	Kerjasama Desa dengan Pihak Ke-3	Desa	NA	NA	NA	16	24
7.	Persentase desa Maju	%	26,46	36,92	41,54	53,54	59,08
8.	Persentase desa Mandiri	%	1,54	2,15	4,92	7,08	13,54

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD)

Capaian indikator persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo sebesar 96,6%. Pada tahun 2019, persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LKD dan LAD) di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar 96,59%. Capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi sebesar 77,17%. Sedangkan untuk tahun 2021 indikator ini tersebut sudah tidak digunakan kembali dan diganti menjadi Kerjasama Desa antar desa/kecamatan dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 131 kerjasama.

2. Persentase Lembaga Ekonomi dan Kerjasama Desa aktif

Capaian indikator Persentase lembaga ekonomi dan Kerjasama Desa aktif di Kabupaten Probolinggo sejak pada tahun 2019-2022 selalu menyentuh 100%.

3. Persentase Desa Maju dan Mandiri

Capaian indikator persentase desa maju dan mandiri di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2021 fluktuatif. Tahun 2021 terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2020 menjadi 71%. Peningkatan prosentase desa maju mandiri yang dicapai pada tahun 2021 merupakan hasil dari pelatihan atau pembinaan teknik yang telah dilakukan di tahun 2020 melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan pada program pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan. Pada tahun 2022 indikator ini dilakukan pemisahan perhitungannya. Pada tahun 2022 persentase desa maju Kabupaten Probolinggo sebesar 53,54% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 59,08%. Sementara capaian persentase desa mandiri Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 sebanyak 7,08%, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 13,54% pada tahun 2023.

4. Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akuntabel

Capaian indikator Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akuntabel di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mencapai 100%.

Akuntabilitas tersebut diukur berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati pada setiap akhir tahun dengan tepat waktu yakni tidak melebihi 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

5. Indeks Desa Membangun

Capaian Indeks Desa Membangun menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 indeks desa membangun sebesar 0,63, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,68. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,71, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,7128. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,74. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian menjadi 0,76.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 81
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	TFR /total fertility rate	jumlah	1,96	1,97	2,1	2,02	2,02
2.	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern)	%	74,9	76,71	76,71	88,24	166,027
3.	Unmet Need KB		5,88	7,1	7,1	7,2	7,283
4.	Persentase Laju Pertumbuhan penduduk	%	0,55	0,5	-1,62	0,35	0,35

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate adalah Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator digunakan untuk membandingkan

keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian indikator kinerja total fertility rate di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 1,96. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,1. Peningkatan ini kembali terjadi pada tahun 2022 menjadi 2,02 dan bertahan stagnan pada tahun 2023.

2. CPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern)

Angka pemakaian kontrasepsi modern yang lazim disebut Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi modern pada suatu waktu tertentu. Capaian indikator kinerja mCPR di Kabupaten Probolinggo mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2019 pemakaian kontrasepsi modern sebesar 74,9%. Kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 76,71%, angka ini stagnan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pemakaian mCPR yang cukup signifikan menjadi 88,24%, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 166,027%. Meningkatnya penggunaan mCPR disebabkan tingginya kesadaran pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan tercukupinya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).

3. Unmet Need KB

Unmet Need KB adalah wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Capaian indikator kinerja Unmet Need KB di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 cenderung

meningkat meskipun pada tahun 2020-2021 persentasenya stagnan. Pada tahun 2019 Unmet Need KB sebesar 5,88%. Capaian Unmet Need KB mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai sebesar 7,1% pada tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan secara umum masyarakat kurang memahami informasi dan kekhawatiran terhadap efek samping selain itu KB Pria/ Vasektomi yang masih rendah serta tingginya Peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*). Sementara peningkatan pada tahun 2022 menjadi 7,2%, yang kemudian pada tahun 2023 menjadi 72,283%

4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Persentase laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 0,55% menjadi 0,5% pada tahun 2020. Tahun 2021 mencapai -1,62%, meningkat menjadi 0,35% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo stagnan sebesar 0,35%.

I. Urusan Perhubungan

Perkembangan indikator kinerja pada Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Tabel 2. 82
Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas	Jumlah	39	39	39	39	39
Jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu trafic light	buah	2	2	2	2	2
Jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan	buah	3	3	3	3	3
Jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi	orang	84	84	84	84	84
Jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor	buah	30	30	30	30	30

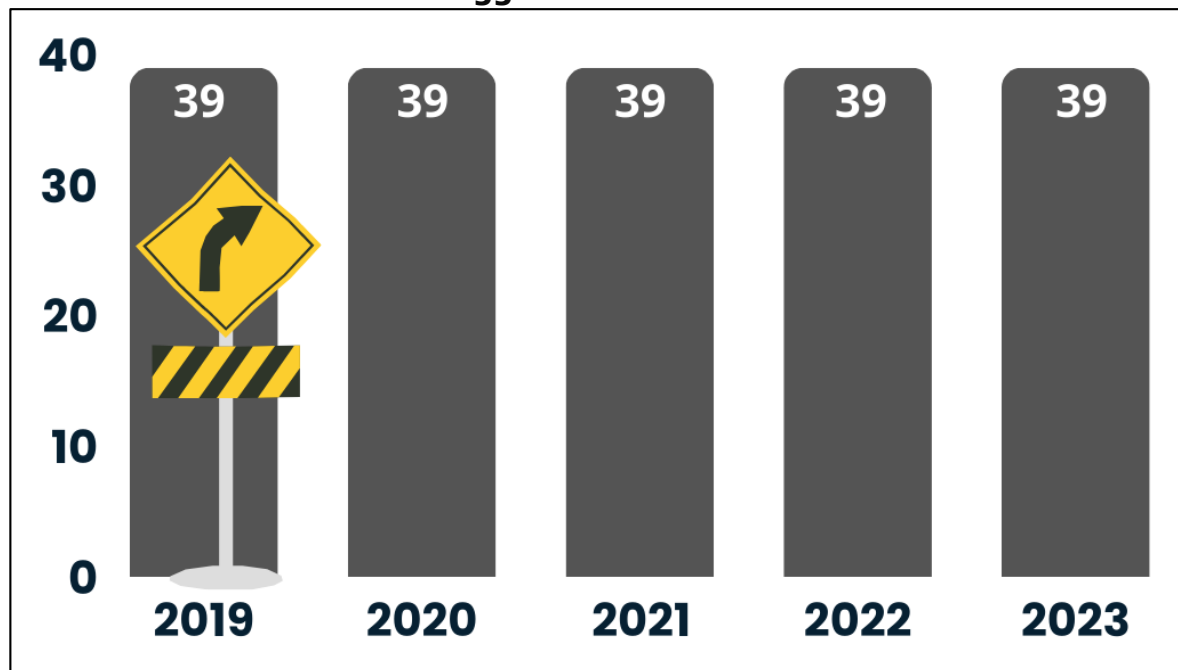
Jumlah area lahan parkir ditepi jalan umum yang dikelola	buah	56	56	56	56	41
Indeks Jalan Berkeselamatan	%	14	17	31	31	32
Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	N/A	N/A	88,94	81,63	91,34
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Jalan	%	N/A	N/A	-1.22	-21.06	27.72
Persentase Sarana Prasarana Perlengkapan Transportasi Terpasang	%	N/A	N/A	33.36	33.97	34.69

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2024

1. Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu Lalu Lintas

Capaian indikator jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 terhitung tetap. Pada tahun 2019-2023 jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas di Kabupaten Probolinggo sebanyak 39 ruas jalan.

Gambar 2. 74
Jumlah Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



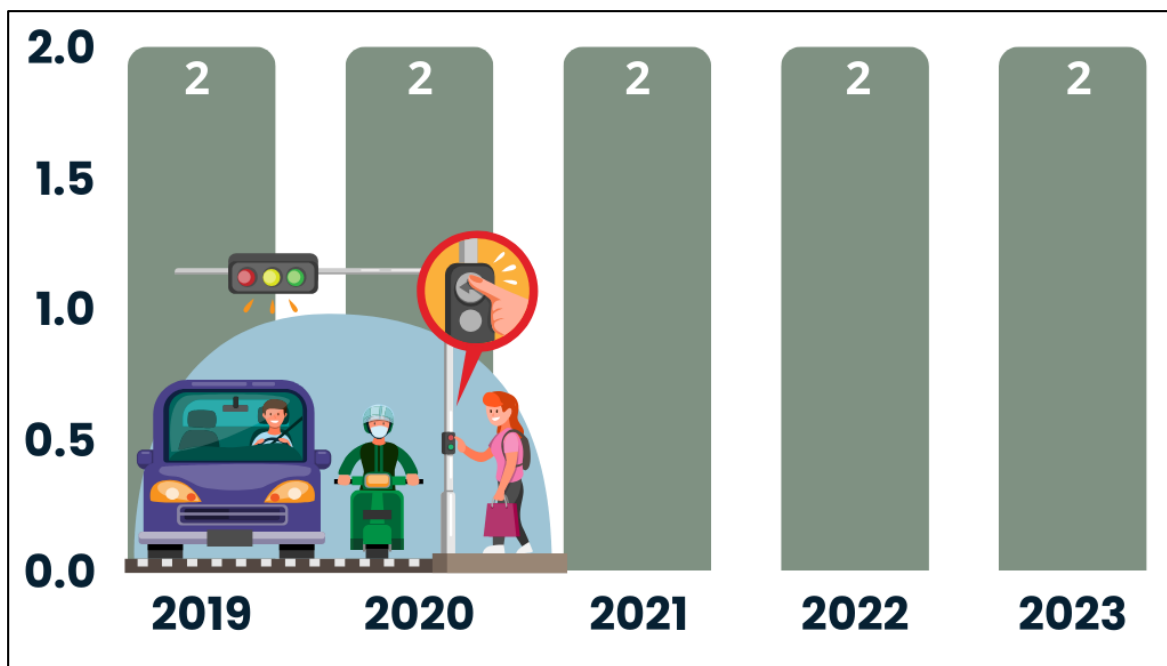
Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2024

2. Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang Lampu Traffic Light

Capaian indikator jumlah persimpangan jalan yang dipasang lampu traffic light di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan stagnan. Jumlah

persimpangan jalan yang dipasang lampu traffic light di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 2 buah untuk masing-masing tahunnya.

Gambar 2. 75
Jumlah Persimpangan Jalan yang Dipasang Lampu Traffic Light
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

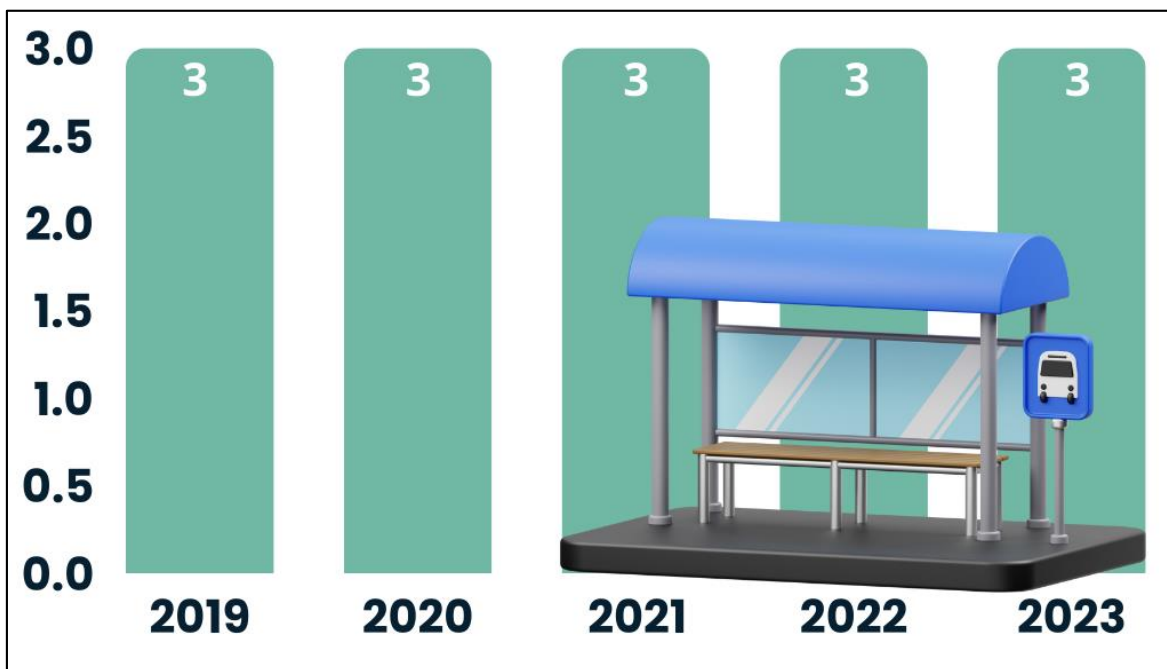


Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2024

3. Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Penumpang Barang dan Kepelabuhan

Capaian indikator jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023, jumlah halte fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang barang dan kepelabuhan di Kabupaten Probolinggo mengalami stagnan sebesar 3 buah di setiap tahunnya.

Gambar 2. 76
Jumlah Halte Fasilitas Utama dan Penunjang Utama dan Penunjang Terminal Penumpang Barang dan Kepelabuhan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2024

4. Jumlah SDM Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi

Capaian indikator jumlah SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023, jumlah tersebut stagnan sebanyak 84 orang.

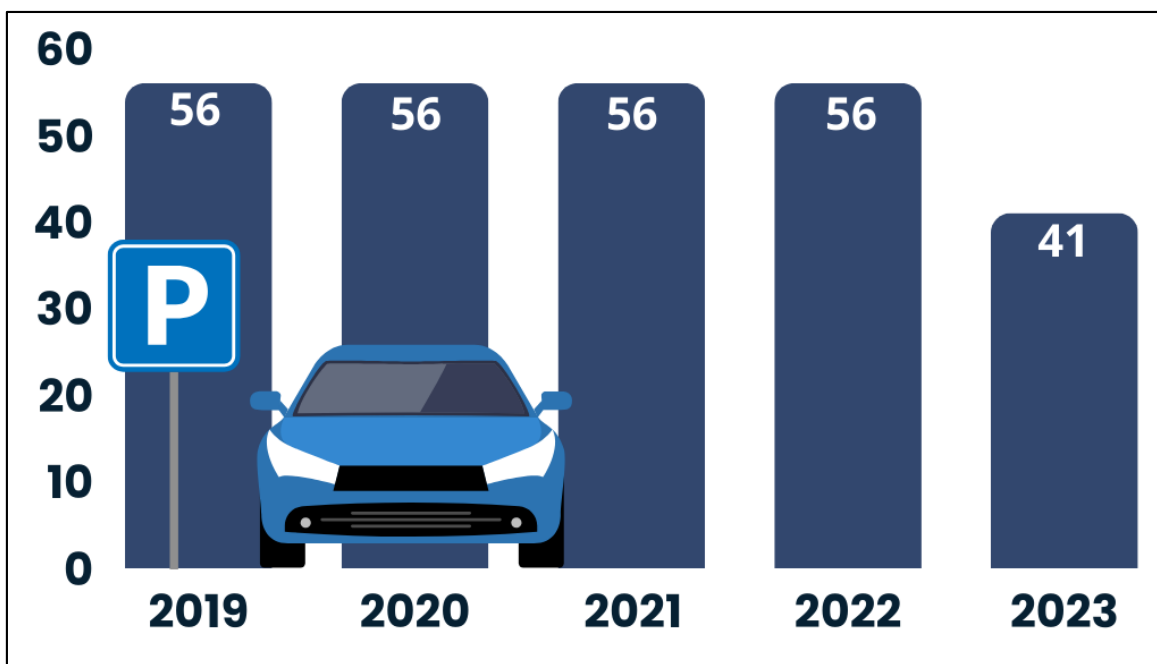
5. Jumlah Sarana dan Prasarana Uji KIR Kendaraan Bermotor

Capaian indikator jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023, jumlah sarana dan prasarana uji KIR kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo sebanyak 30 buah.

6. Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola

Capaian indikator jumlah area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022, jumlah area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo stagnan sebanyak 56 buah. Namun pada tahun 2023 terjadi pengurangan jumlah area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola di Kabupaten Probolinggo sehingga menjadi 41 buah.

Gambar 2. 77
Jumlah Area Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum yang Dikelola Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2024

7. Indeks Jalan Berkeselamatan

Capaian indikator indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo mencapai 14%. Dan angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 17% di tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 dan 2022 indeks jalan berkeselamatan stagnan sebesar 31%. Kemudian pada tahun 2023 menjadi 32%.

8. Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standart Keselamatan

Peningkatan penyelenggaraan manajemen keselamatan transportasi sangat penting dilakukan salah satu caranya yaitu dengan mengetahui persentase jumlah angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan, yaitu kendaraan atau angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah kendaraan yang memenuhi standar keselamatan yaitu dengan kendaraan yang sudah di uji kir dibagi jumlah kendaraan/transportasi /angkutan umum yang ada. Pada tahun 2021 menunjukkan capaian angka sebesar 88,94%. Namun pada tahun 2022 turun

menjadi 81,63%. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 91,34%. Peningkatan ini diharapkan mampu menjaga keselamatan penumpang baik pada transportasi umum maupun pribadi.

9. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Peningkatan capaian ketertiban dan keselamatan jalan dapat pula dilakukan dengan cara menghitung persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, ini diperoleh dengan menghitung jumlah pelanggaran dibagi jumlah kendaraan yang dioperasi. Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar -1,22%. Karena masih dalam pandemic COVID-19, Pemerintah menghimbau masyarakat agar mengurangi mobilitas bila tidak ada kepentingan yang mendesak, maka dengan berkurangnya mobilitas masyarakat berpengaruh pula pada berkurangnya kendaraan beroperasi, sehingga berkurang pula pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Penurunan ini juga terjadi pada tahun 2022 menjadi -21,06%. Sayangnya pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 27,72%.

10. Persentase Sarana Prasarana Perlengkapan Transportasi yang Terpasang

Capaian Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya sarana prasana perlengkapan transportasi yang terpasang ini menggambarkan jumlah rambu-rambu yang terpasang dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 33,36%. Sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 33,97% dan menjadi 34,69% pada tahun 2023. Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi kinerja anggaran Dinas Perhubungan untuk mengakomodasi kebutuhan rambu-rambu baik dari pengadaan unit baru maupun pemeliharaan / rehabilitasi unit yang rusak. Pada indikator ini juga diperlukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dimana meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah melalui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang standar berkeselamatan juga memerlukan titik ruas jalan yang berkeselamatan.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 83
Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	10	10	6	6	4
2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	1	1	1	1	1
3	Web site milik pemerintah daerah	Buah	1	1	1	1	1
4	Pameran/expo	Kali	1	1	1	1	1
5	Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan desiminasi informasi	%	100	100	97,53	95	94,54
6	Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa	%	65	97.91	116,33	85	97,41
7	Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi Publik	%	87	97.59	97,53	95	94,54

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Capaian indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023, jumlah surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Probolinggo terus menurun. Berkembangnya media sosial yang pesat menjadi salah satu penyebab berkurangnya surat kabar baik surat kabar nasional maupun surat kabar lokal.

2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Terdapat 1 sarana radio local yang digunakan di untuk penyebarluaskan informasi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu melalui Radio BROMO FM yang berperan sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten ke Masyarakat.

3. Web Site Milik Pemerintah Daerah

Capaian indikator kinerja web site milik Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 1 buah.

4. Pameran/Expo

Capaian indikator kinerja pameran/expo di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 s/d tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 1 kali.

5. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Desiminasi Informasi

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah pelaksanaan desiminasi informasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 telah tercapai 100%. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 97,53%. Penurunan ini terus terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing menjadi 95% dan 94,54%.

6. Persentase Pemanfaatan Website OPD, Kecamatan dan Desa

Capaian indikator kinerja persentase pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa untuk tahun 2019-2021 terus meningkat, dengan tahun 2018 capaian kinerja persentase pemanfaatan website OPD, Kecamatan, dan Desa Kabupaten Probolinggo sebesar 60% hingga saat ini mencapai 116,33%. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 85%. Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 97,41%.

7. Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Komunikasi Publik

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Diseminasi Informasi Publik tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan tiap tahun hanya saja pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,06%. Sementara penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 95%. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 94,54%.

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 2. 84
Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

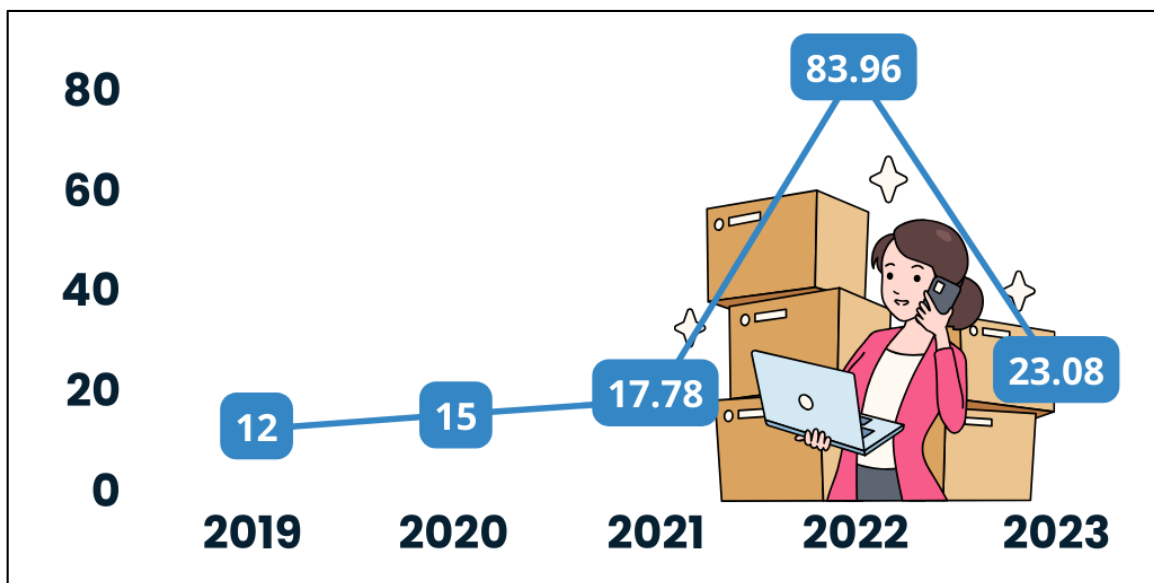
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	12	15	17,78	83,96	23,08
Usaha mikro yang dibina dalam rangka pertumbuhan usaha	unit	0	453	759	789	1425
Jumlah Koperasi	Unit	787	793	808	814	817
Persentase Koperasi aktif	%	83,48	83,73	84,03	58,35	24,48
Jumlah Koperasi aktif	Unit	787	793	679	475	200
Jumlah Koperasi Sehat	Unit	2	4	5	55	72
Indeks Pembangunan Ekonomi	Indeks	NA	NA	5,1	5,17	5,44
Indeks daya beli	Indeks	0,73	0,73	0,73	0,74	0,751

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2024

1. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Capaian indikator jumlah persentase pertumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun persentasenya masih cenderung rendah. Pada tahun 2019, jumlah persentase pertumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Probolinggo mencapai 12 persen. Kemudian pada tahun 2020, kembali mengalami peningkatan menjadi 15 persen. Rendahnya persentase pertumbuhan wirausaha baru disebabkan karena berbagai hal seperti kelemahan dalam memperoleh dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan, keterbatasan memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, serta kelemahan pada bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada tahun 2021 peningkatan kembali terjadi hingga menjadi 17,78%. Kemudian pada tahun 2022 persentase pertumbuhan wirausaha baru mencapai 83,96% angka ini menjadi peningkatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya pada tahun 2023 turun menjadi 23,08%.

Gambar 2. 78
Jumlah Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2024

2. Jumlah Koperasi

Jumlah Koperasi di Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 787 unit koperasi di Kabupaten Probolinggo. Pada akhir periode 2023 sebanyak 817 koperasi berada di Kabupaten Probolinggo.

3. Persentase Koperasi Aktif

Capaian indikator persentase usaha koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo sebesar 83,48%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 83,73%. Pada tahun 2021 persentase koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi 84,03%. Sayangnya pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 58,35%. Penurunan ini kembali terjadi pada tahun 2023 dimana persentase koperasi aktif Kabupaten Probolinggo menjadi 24,48%.

4. Jumlah Koperasi Aktif

Capaian indikator jumlah usaha koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo sebesar 657 unit. Kemudian pada tahun

2020 mengalami kenaikan menjadi 664 unit. Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 679 unit. Sayangnya pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 475 unit. Kemudian kembali turun menjadi 200 unit pada tahun 2023.

5. Jumlah Koperasi Sehat

Jika jumlah koperasi aktif Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, jumlah koperasi sehat justru mengalami peningkatan. Jumlah koperasi sehat meningkat dari 2 pada tahun 2019 menjadi 72 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi, dengan lebih banyak koperasi yang memenuhi standar kesehatan dan keberlanjutan.

6. Indeks Daya Beli

Daya Beli Masyarakat dipengaruhi tingkat konsumsi, harga, pendapatan, dan tingkat inflasi. Masyarakat dengan penghasilan rendah akan cenderung mengkonsumsi produk dengan harga yang relative murah dan jumlah yang lebih sedikit serta sebaliknya. Progres inflasi Kabupaten Probolinggo mengikuti data inflasi Kota Probolinggo, dimana tahun 2020 inflasi sebesar 1,88, tahun 2021 sebesar 1,76 , tahun 2022 meningkat menjadi 5,45 dan turun drastis di tahun 2023 sebesar 2,86 penurunannya dipengaruhi ketersediaan bahan makanan dan meningkatnya daya beli masyarakat.

“Meningkatnya Daya Beli Masyarakat” diukur dengan Indeks Daya Beli, ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 0,74 dan terealisasi sebesar 0,75; capaian kinerjanya 100% atau kategori capaian **Baik**

7. Indeks Pembangunan Ekonomi

Indikator indeks pembangunan ekonomi di tahun 2021 sebesar 5,10. Sedangkan di tahun sebelumnya tidak ditemukan data terkait indikator ini. Pencapaian indikator di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,43. Sementara pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 6,53.

Dari tahun 2019 hingga 2023, wilayah tersebut menunjukkan pertumbuhan stabil dalam jumlah koperasi, yang meningkat dari 787 menjadi 817. Pertumbuhan ini mencerminkan usaha untuk memperluas jaringan koperasi,

namun jumlah koperasi aktif mengalami penurunan drastis dari 657 pada tahun 2019 menjadi hanya 200 pada tahun 2023. Penurunan tajam ini menunjukkan tantangan besar dalam menjaga operasional koperasi, yang mungkin disebabkan oleh masalah internal seperti manajemen yang kurang efektif atau tantangan eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi.

Di sisi lain, terdapat perkembangan yang sangat positif dalam hal kualitas koperasi. Jumlah koperasi yang sehat meningkat secara signifikan dari hanya 2 pada tahun 2019 menjadi 72 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi aktif menurun, ada kemajuan besar dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan koperasi yang ada. Peningkatan jumlah koperasi sehat mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperbaiki kinerja dan manajemen koperasi, serta memastikan bahwa lebih banyak koperasi dapat beroperasi dengan sehat dan efektif.

L. Urusan Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 85
Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	28	27	41	42	87
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	8.246	3.726	0,43	1.141	4.186
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,92	85,78	86,98	84,61	90,52
4.	Persentase realisasi investasi	%	70	93,15	10,75	21,76	266,72

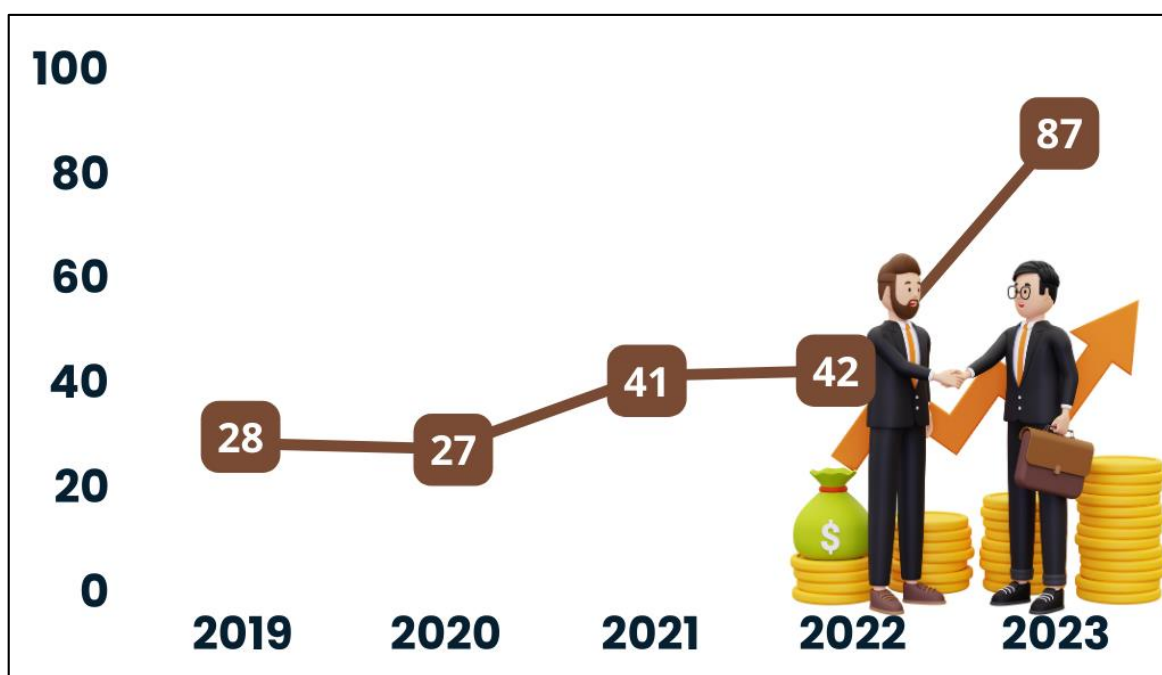
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Capaian indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo sebanyak 28 investor dan pada tahun

2020 mengalami penurunan menjadi 27 investor. Faktor penghambat yang menyebabkan menurunnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yaitu adanya pandemic Covid-19 serta revisi regulasi tata ruang yang belum update. Sementara pada tahun 2021 peningkatan mulai terjadi menjadi 41 investor dan kembali bertambah menjadi 42 investor pada tahun 2022. Membaiknya perekonomian pasca covid-19 membuat daya tarik berinvestasi di Kabupaten Probolinggo membaik dan pada tahun 2023 terdapat 87 investor di Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan data terkait capaian jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Probolinggo.

Gambar 2. 79
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud. Capaian indikator kinerja jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019, nilai investasi PMA sebesar 8.246 Triliun. Kemudian pada tahun 2020, jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA kembali mengalami penurunan menjadi 3.726 Triliun. Sementara pada

tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0.43 Triliun. Penurunan yang beruntun ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19. Sementara pada tahun 2022 kembali meingkat menjadi 1.141 Triliun. Kemudian pada tahun 2023 dengan bertambahnya jumlah investor maka bertambah pula jumlah nilai yang diinvestasikan di Kabupaten Probolinggo, sehingga pada tahun 2023 jumlah investasi Kabupaten Probolinggo mencapai 4.186 Triliun. Untuk lebih rinci terkait perkembangan nilai PMA/PMDN Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 80
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023 (Triliun)

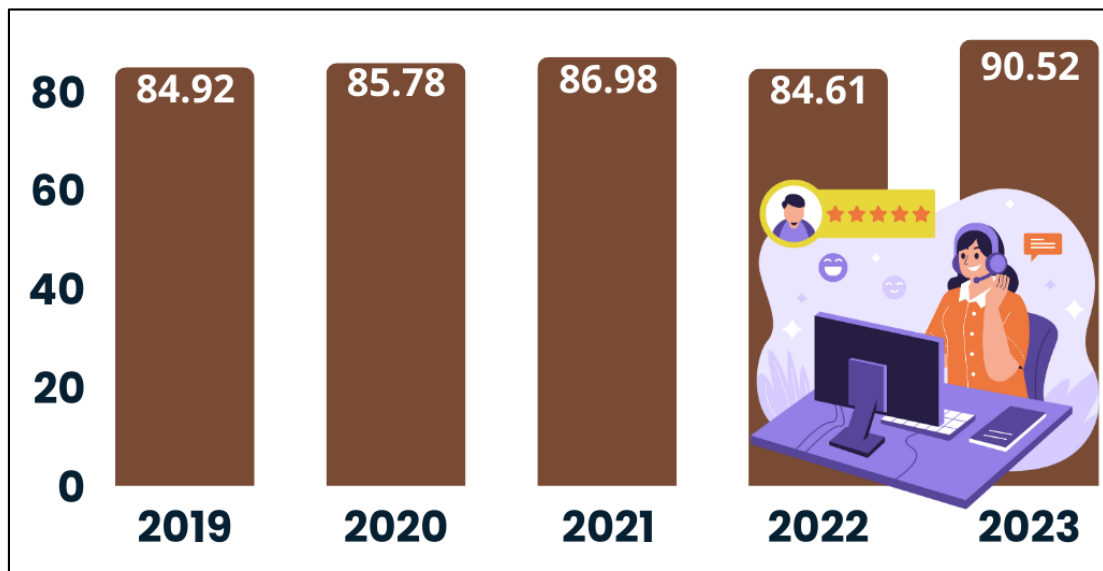


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indikator indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dari 84,92 hingga mencapai 86,98. Pada tahun 2022 mengalami penurun menjadi 84,61. Meskipun demikian capaian di tahun 2022 sudah melebihi target yang ingin dicapai. Kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 90,52 poin. Untuk lebih rinci terkait perkembangan indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 81
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

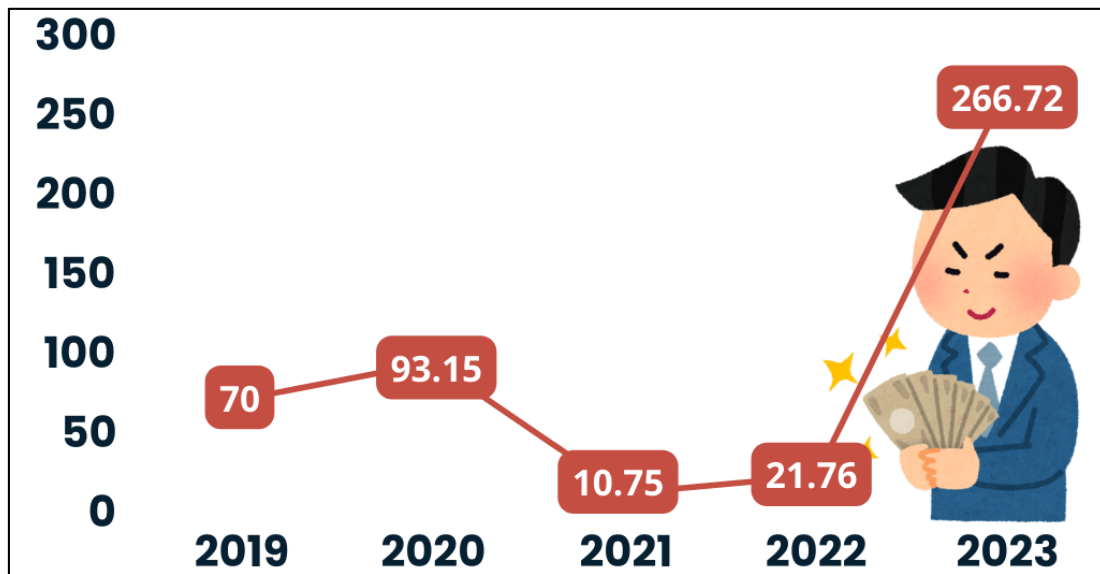


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo

4. Presentase Realisasi Investasi

Capaian indikator kinerja presentase realisasi investasi mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 93,15 dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 70%, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10,75% dan kemudian meningkat Kembali menjadi 21,76% di ahun 2022. Meskipun kondisi 2022 masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 89,87%. Kemudian pada taahun 2023 terjadi lonjakan yang signifikan, sehingga realisasi investasi Kabupaten Probolinggo mencapai 266,72%. Lebih rinci terkait perkembangan indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 82
Presentase Realisasi Investasi Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 86
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Kepemudaan dan Olahraga							
1.	Jumlah pemuda yang dibina	Orang	799	553	581	675	452
2.	Jumlah atlet yang dibina	Orang	398	409	615	375	811
3.	Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi	%	-	-	-	30.43	3.57
4.	Persentase atlet yang berprestasi	%	-	-	-	21.72	26.51

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2024

1. Jumlah Pemuda yang Dibina

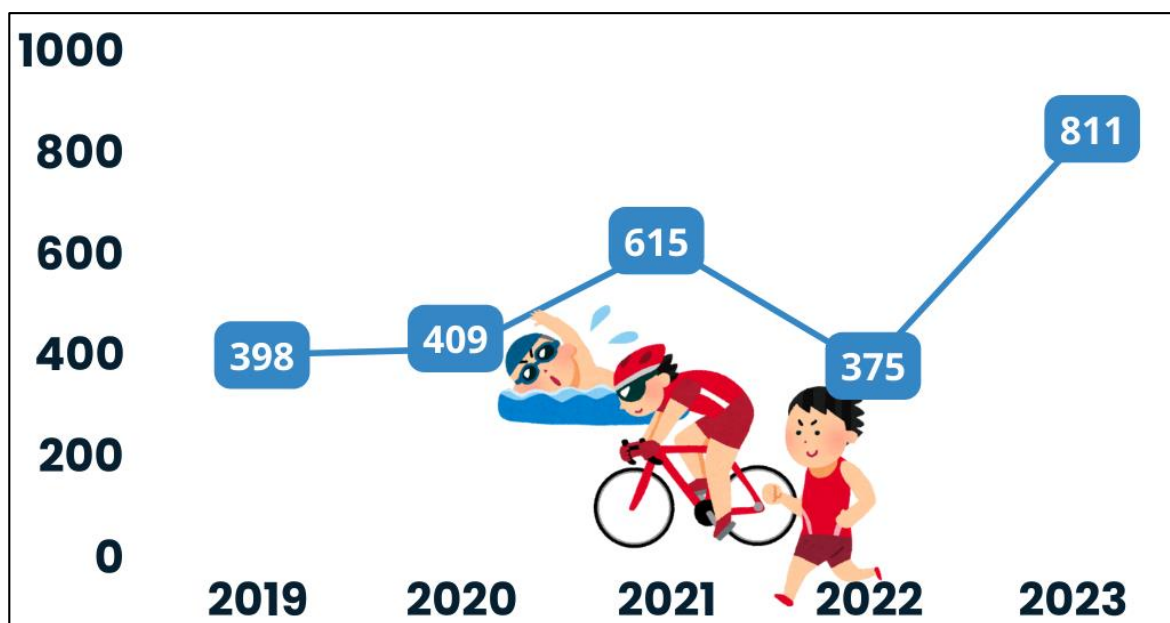
Capaian indikator persentase pemuda yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebanyak 799 orang. Pada tahun 2020, capaian indikator pemuda yang dibina menurun menjadi 553 orang. Sedangkan

pada tahun 2021 jumlah pemuda yang dibina mengalami peningkatan menjadi 581 orang. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2022 menjadi 675 orang. Sayangnya pada tahun 2023 kembali turun menjadi 452 orang.

2. Jumlah Atlet yang Dibina

Jumlah atlet yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebanyak 398 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 409 orang. Kemudian pada tahun 2021 atlet di Kabupaten Probolinggo bertambah menjadi 615 orang, namun pada tahun 2022 berkurang menjadi 375 atlet. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah atlet yang dibina hingga menyentuh 811 orang atlet.

Gambar 2. 83
Persentase Atlet Berprestasi yang Dibina Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab.Probolinggo, Tahun 2024

3. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Berprestasi

Capaian indikator persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi Kabupaten Probolinggo mulai dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 mencapai 30,43 persen. Kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 3,57 persen.

4. Persentase Atlet yang Berprestasi

Capaian indikator persentase atlet yang berprestasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 sebesar 21,72 persen. Kemudian pada tahun 2023

meningkat menjadi 26,51 persen. Sedangkan sebelum tahun 2022 belum dilakukan perhitungan.

N. Urusan Kebudayaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 87
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

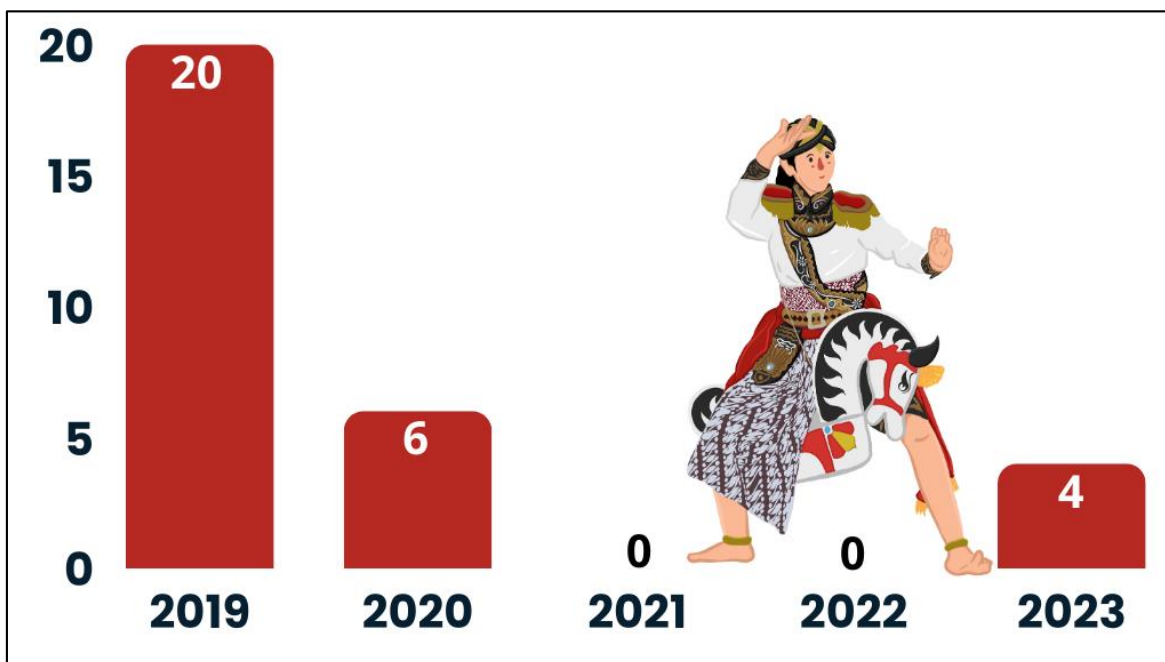
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	20	6	0	0	4
2.	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina	Kelompok	15	0	0	7	7

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Probolinggo Tahun 2024

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pembangunan, pengembangan, pelestarian serta pengelolaan kekayaan dan keragaman nilai budaya yang ada di masyarakat. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 20 kali, sedangkan pada tahun 2020 hanya diselenggarakan sebanyak 6 kali dikarenakan pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak pada tahun 2021 dan tahun 2022 dimana tidak ada gelaran festival seni dan budaya yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Namun pada tahun 2023 penyelenggaraan festival seni dan budaya kembali digelar sebanyak 4 kali.

Gambar 2. 84
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

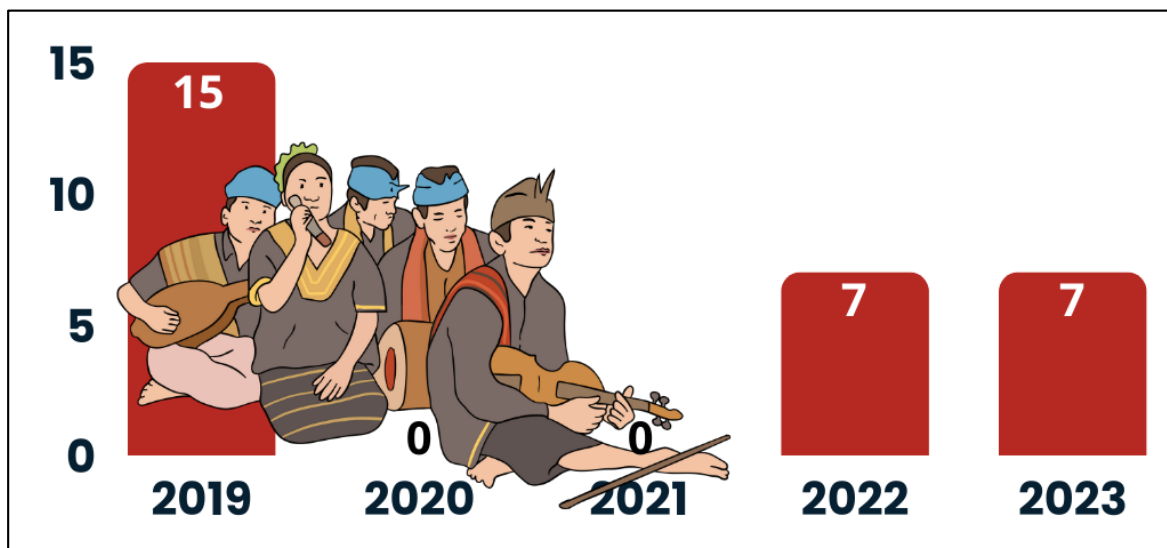


Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Probolinggo, Tahun 2024

2. Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina

Capaian indikator kinerja jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi menurun. Pada tahun 2019 jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo berjumlah 15 kelompok. Namun pada 2020-2021 tidak ada kelompok seni yang dibina dikarenakan pandemi Covid-19. Meskipun jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina mengalami peningkatan namun dukungan yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal terhadap kelompok seni dan budaya yang ada, baik berupa pembinaan, wadah untuk mengapresiasi seni dan budaya daerah, serta sarana prasarana seni budaya. Kemudian pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7 kelompok seni dan budaya yang dibina di Kabupaten Probolinggo, sementara kondisi tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Gambar 2. 85
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Probolinggo Tahun 2024

O. Urusan Perpustakaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 88
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	Orang	40.617	6.216	5.067	8.223	5.833
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	56.845	58.417	1.380	746	3.121
3.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	2	2	2	2
4.	Jumlah Perpustakaan (sekolah/Ponpes/Desa)	Buah	25	45	285	285	315

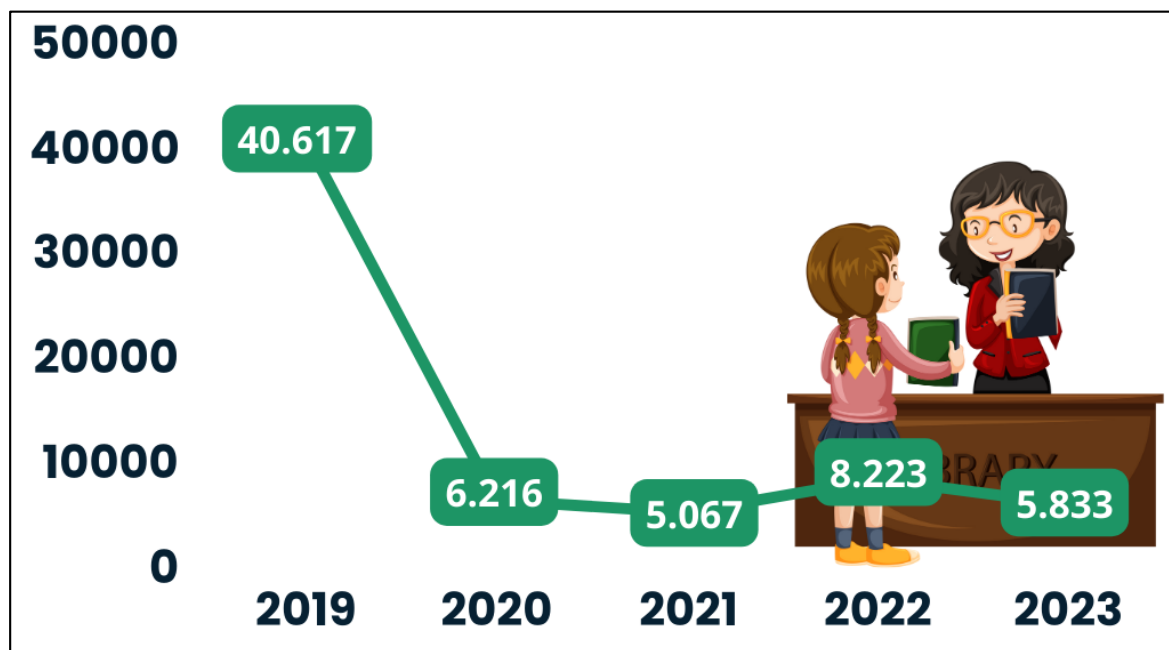
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah

Capaian indikator kinerja jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo sebanyak 40.617 orang. Pada tahun 2020 menurun

secara signifikan menjadi 6.216 orang. Kondisi penurunan ini terjadi kembali pada tahun 2021 menjadi 5.067 orang. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 8.223 orang. Namun kembali turun pada tahun 2023 menjadi 5.833 orang.

Gambar 2. 86
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

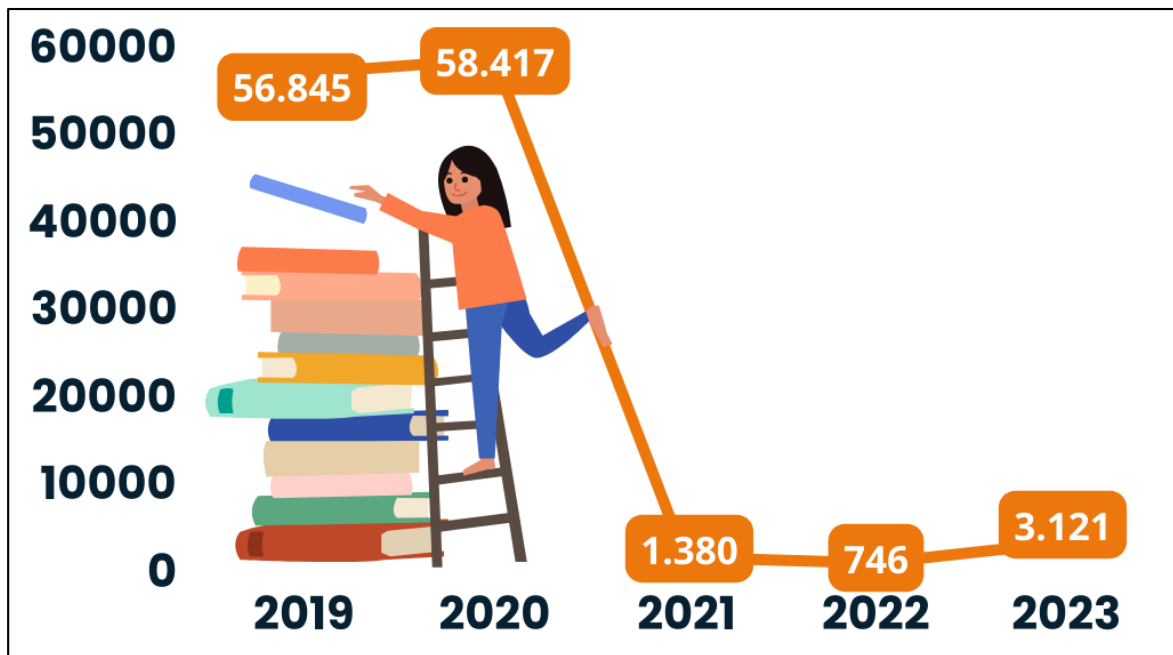


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Capaian indikator kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2019, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Probolinggo sebanyak 56.845 buku. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 58.417 buku. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 dimana jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 1.380 buku dan kembali turun menjadi 746 buku pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 3.121 buku.

Gambar 2. 87
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

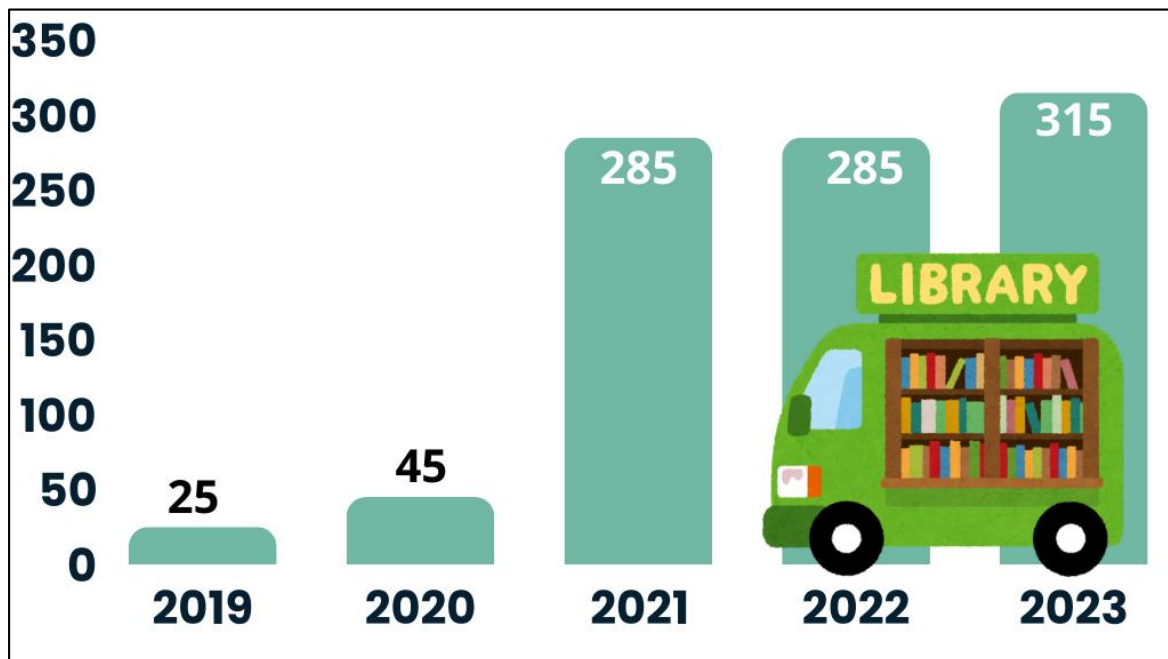
3. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang Memiliki Sertifikat

Adapun jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 stagnan sebanyak 2 orang.

4. Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa)

Capaian indikator kinerja jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) di Kabupaten Probolinggo sebanyak 25 perpustakaan. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 45 perpustakaan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 285 perpustakaan, jumlah ini stagnan pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 jumlah perpustakaan (sekolah/ponpes/desa) kembali bertambah menjadi 315 perpustakaan. Dengan bertambahnya jumlah perpustakaan ini tentu diharapkan mampu menambah daya literasi dan minat baca pada berbagai elemen masyarakat.

Gambar 2. 88
Jumlah Perpustakaan (Sekolah/Ponpes/Desa) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

P. Urusan Kearsipan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 89
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	36%	36%	25%	27%	4,90%
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	420	0	70	71	11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

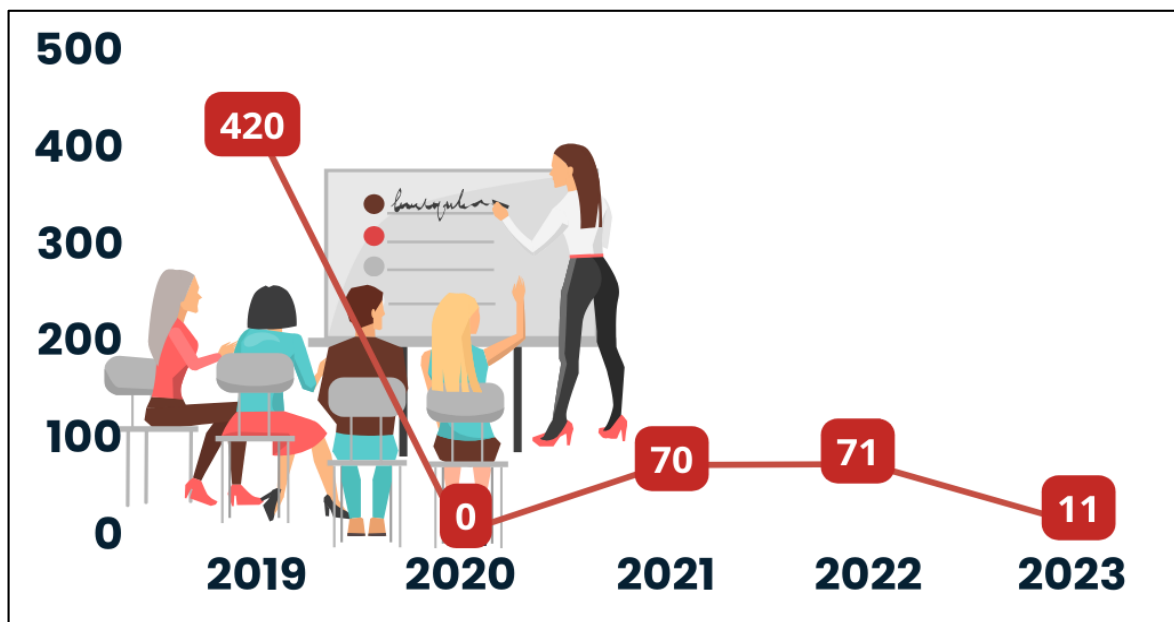
Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Probolinggo sebesar 36%. Pada tahun 2020 capaian ini

stagnan sebesar 36% sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 25%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 27%, namun pada tahun 2023 turun signifikan menjadi 4,90%.

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Capaian indikator kinerja peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2019, peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 420 orang. Kemudian pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan peningkatan SDM pengelola dikarenakan adanya *refocussing* anggaran. Sementara pada tahun 2021 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo sebanyak 70 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 71 orang mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, namun pada tahun 2023 hanya 11 orang yang mengikuti peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Probolinggo.

Gambar 2. 89
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

2.4.3 Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, yaitu bidang urusan:

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kelautan dan perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 90
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Kelautan dan Perikanan							
1.	Jumlah produksi budidaya perikanan	ton	11.859	12.165	12.826,82	13.791,70	14.812,26
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	26.399	27.000	28.407,49	29.583,84	31.948,80
3.	Produktivitas usaha garam rakyat	ton/ ha	91	41	33,46	33,68	69,71
4.	Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita	Rp. Juta/bulan	5,9	5,6	3,6	2,8	3,9

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, 2024

1. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan

Capaian indikator kinerja jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 menunjukkan trend yang positif. Artinya dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami kenaikan jumlah produksi dari 11.859 ton hingga mencapai 14.812,26 ton di tahun 2023.

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dibalik peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, di Kabupaten Probolinggo masih terdapat praktik penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian SDI terutama nelayan dari luar wilayah Kabupaten Probolinggo. Peningkatan ini dapat dilihat

dari jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebanyak 26.399 ton menjadi 31.948,80 ton pada tahun 2023.

3. Produktivitas Usaha Garam Rakyat

Capaian produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 capaian produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo ialah sebesar 91 ton. Namun, pada tahun 2020, produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 41 ton. Penurunan produktivitas usaha garam di Kabupaten Probolinggo disebabkan karena menurunnya luasan areal produktif garam karena beralih fungsi. Sementara pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan menjadi 33,46 ton/Ha. Peningkatan kembali mulai terjadi tahun 2022 dimana produktivitas usaha garam rakyat sebanyak 33,68 ton/Ha dan menjadi 69,71 ton/Ha pada tahun 2023.

4. Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Perkapita

Pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 fluktuasi dan cenderung menurun di tiap tahunnya. Pada tahun 2019 pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita di Kabupaten Probolinggo menjadi sebesar Rp. 5.9 juta per bulan. Namun, pada tahun 2020, pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi Rp. 5.6 juta per bulan. Sayangnya data pada tahun 2021 kembali menunjukkan penurunan menjadi 3.6 juta per bulan. Pada tahun 2022 penurunan kembali terjadi pada pendapatan pelaku usaha perikanan perkapita menjadi 2.8 juta per bulan. Kemudian pada tahun 2023 mulai menunjukkan adanya peningkatan pendapatan menjadi 3.9 juta per bulan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo memahami bahwa sektor perikanan merupakan salah satu potensi unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi perikanan ini selama 20 tahun ke depan.

Rencana jangka panjang ini mencakup berbagai upaya strategis yang berfokus pada pengembangan infrastruktur perikanan, seperti pembangunan pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pengolahan hasil perikanan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas hasil tangkapan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan juga menjadi perhatian utama, dengan program pelatihan dan pemberdayaan nelayan serta pelaku usaha perikanan yang bertujuan untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah juga berencana mendorong diversifikasi produk perikanan melalui pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah, sehingga dapat memperluas pasar baik di dalam maupun luar daerah. Dalam hal keberlanjutan, upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan akan terus ditingkatkan melalui penerapan praktik-praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berbasis ekosistem.

Selain itu, penguatan sistem distribusi dan pemasaran hasil perikanan akan menjadi prioritas untuk memastikan akses pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Probolinggo.

Meskipun hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo belum menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terperinci untuk sektor perikanan, proses penyusunan rencana tersebut akan segera dimulai. Penyusunan RAD ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan agar strategi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo optimis bahwa sektor perikanan dapat berkembang secara signifikan, memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

B. Urusan Pariwisata

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 91
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

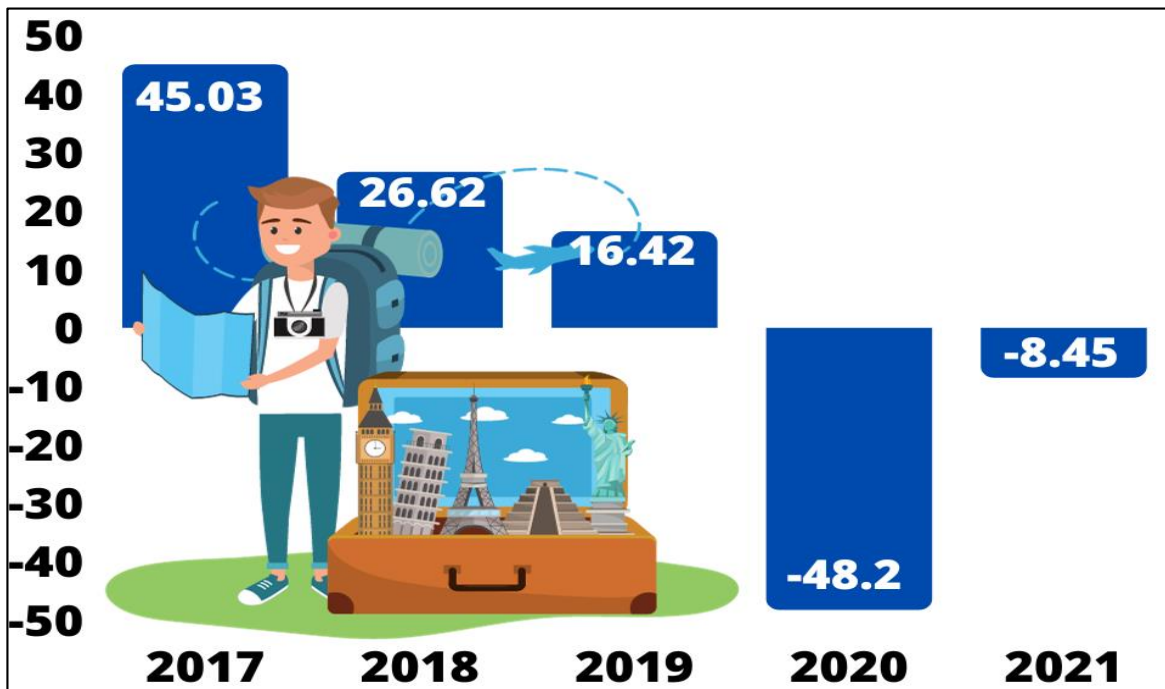
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Data Objek Tujuan Wisata	Objek	50	50	45	38	38
2.	Pengeluaran wisatawan	Milyar/Tahun	NA	NA	NA	31.67	102.87

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

1. Persentase Kunjungan Wisata

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2021 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo sebesar 45,03%. Tahun 2018 persentase kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi sebesar 26,62% dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 16,42%. Penurunan juga kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi -48,2% yang disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penutupan area wisata. Tahun 2021 persentase kunjungan wisata sudah mulai membaik daripada tahun 2020 meskipun capaiannya masih -8,45%. Berikut gambar 2.90 dibawah ini menunjukkan grafik dari persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 hingga 2021. Indikator ini sejak tahun 2022 tidak lagi terpakai sehingga perhitungan tidak lagi dilakukan pada tahun 2022 dan seterusnya.

Gambar 2. 90
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Probolinggo
Tahun 2017-2021

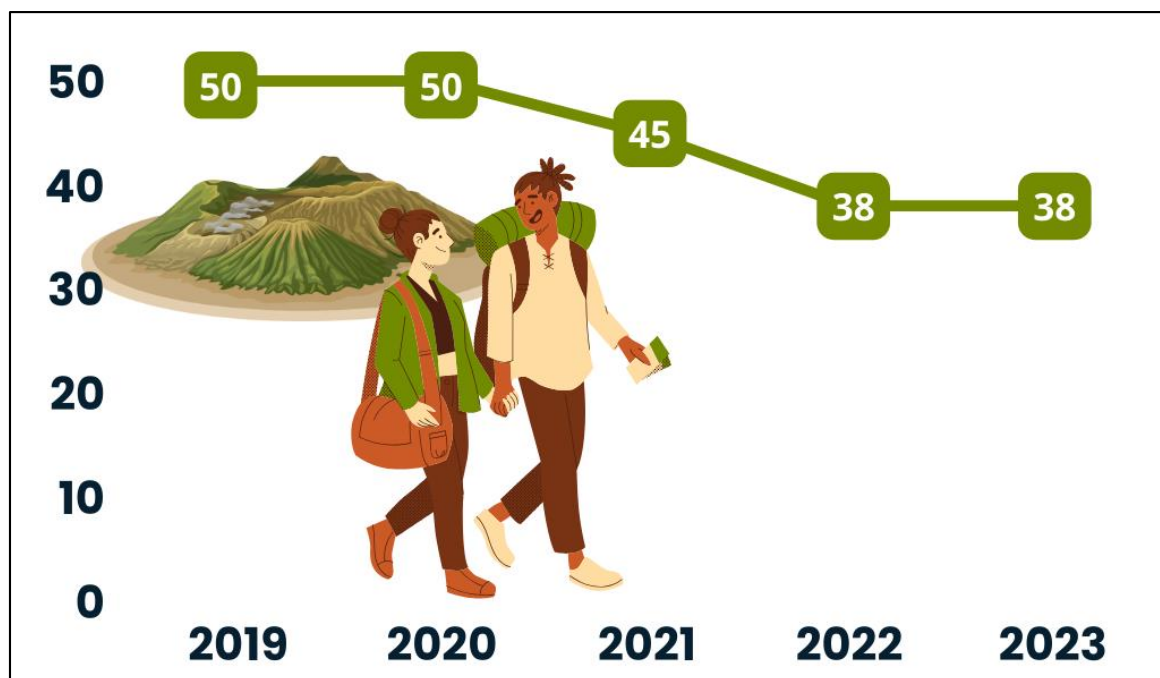


Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

2. Data Objek Tujuan Wisata

Capaian indikator kinerja data objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo ada sebanyak 50 objek. Yang kemudian pada tahun 2021 objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo terdapat penurunan 5 objek wisata sehingga menjadi 45 objek. Penurunan juga terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023, terdapat 38 objek tujuan wisata di Kabupaten Probolinggo.

Gambar 2. 91
Data Objek Wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo

C. Urusan Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian dan ketahanan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 92
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Kabupaten Pebbingso Tahun 2019-2023							
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian							
1.	Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB)	%	32.7	33.6	33.1	32.9	32.3
2.	Padi (GKG)	Ton	292.338	259.572	272.199	258.783	296.162
3.	Jagung	Ton	153.762	187.113	210.349	226.652	261.617
4.	Ubi Kayu	Ton	33.322	22.838	26.490	27.233	30.217
5.	Kedele	Ton	883,9	25.056	100	6.286	114,33
6.	Alpokot	Ton	1,594	3,827	1.276	20.234	27.700

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
7.	Bawang Merah	Ton	66.852	84,54	54.115	52.658	72.860
8.	Bawang Daun	Ton	14.606,10	25.259,80	10.320	35.978	42.279
9.	Kentang	Ton	26,221	60,573	52.740	49.736	38.060
10.	Kubis	Ton	26,995	39,251	58.005	40.232	38.375
11.	Mangga	Ton	102.402	177.784	241.709	841.900	261.756
12.	Pepaya	Ton	1.521,30	2.90	5.439	9.573	3.424
13.	Pisang	Ton	67.973,10	56.892,90	5.439	503.281	87.510
14.	Semangka	Ton	402,2	655,7	472	1,362	139.7
15.	Cabe rawit	Ton	17.626	36.569	30.852	46.339	16,447
16.	Cabe merah	Ton	2.525	5.135	7.591	12.088	7.793
17.	Tebu	Ton	106.350	93.388	96.828	161.19	176.287
18.	Tembakau	Ton	16.215	5.449	11.906	11.250	16.981
19.	Cengkeh	Ton	438,4	434,4	416	12.82	179.27
20.	Kapuk Randu	Ton	579,3	738,5	1.257	722	173.3
21.	Kelapa	Ton	1.475,50	1.984,30	1.701	660,1	1.596,30
22.	Kopi	Ton	3.074	4.024	6.420	7.382,10	4.389,70
23.	Ketersediaan dan Cadangan	Ton	101.038	101.668	177.833	145.179	139.26
24.	Jumlah populasi ternak						
	1. Sapi Potong	ekor	275.764	312.983	319.382	238.893	237.456
	2. Sapi Perah	ekor	6.790	6.249	8.024	7.384	6.315
	3. Kambing	ekor	43.560	59.858	51.499	47.783	48.432
	4. Domba	ekor	64.917	69.894	73.535	66.988	68.900
	5. Ayam Ras	ekor	6.297.481	4.966.554	13.156.328	4.758.546	4.358.844
	6. Ayam Buras	ekor	644.789	633.929	629.689	678.937	667.513
	7. Itik/Bebek	ekor	115.022	96.767	95.395	99.803	112.411
25.	Jumlah Produksi Peternakan						
	1. Telur	Kg	2.690.460	2.265.189	2.145.606	2.118.863	2.159.307
	2. Susu	Kg	8.856.799	10.901.118	12.413.330	12.998.117	11,127,773
	3. Daging	Kg	4.147.457	3.126.163	3878076	2.770.081	3.653.371

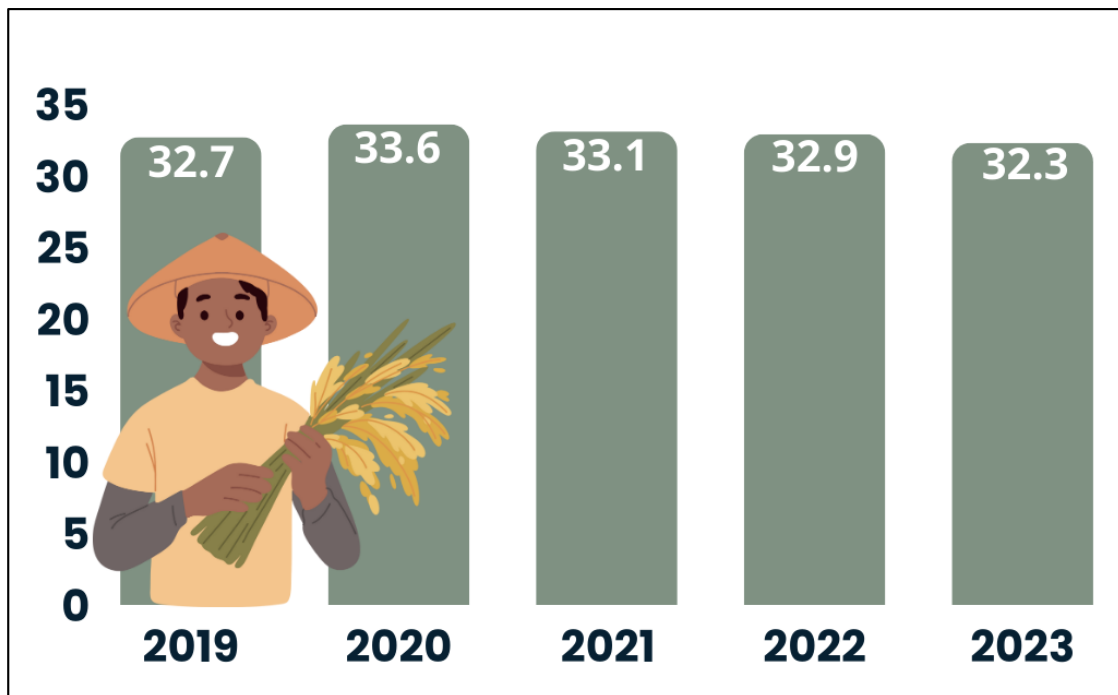
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPS Kabupaten Probolinggo

1. Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB)

Dalam pembentukan PDRB kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 peranan terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; yaitu mencapai 33,3 persen. Kemudian disusul oleh subsektor Industri Pengolahan sebesar 26,71 persen. Adapun subsektor lainnya berada dibawah 10 persen.

Capaian indikator kinerja kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 32,7%. Sedangkan pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 33,6%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 33,1%. Penurunan kontribusi sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Probolinggo terjadi karena pergerakan harga komoditi pertanian yang masih naik atau turun dengan cepat, sehingga tingkat produksi juga tergantung kondisi tersebut. Sementara itu untuk data capaian indikator kinerja kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 terus menurun menjadi 32,9% dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 32,3%.

Gambar 2. 92
Kontribusi subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

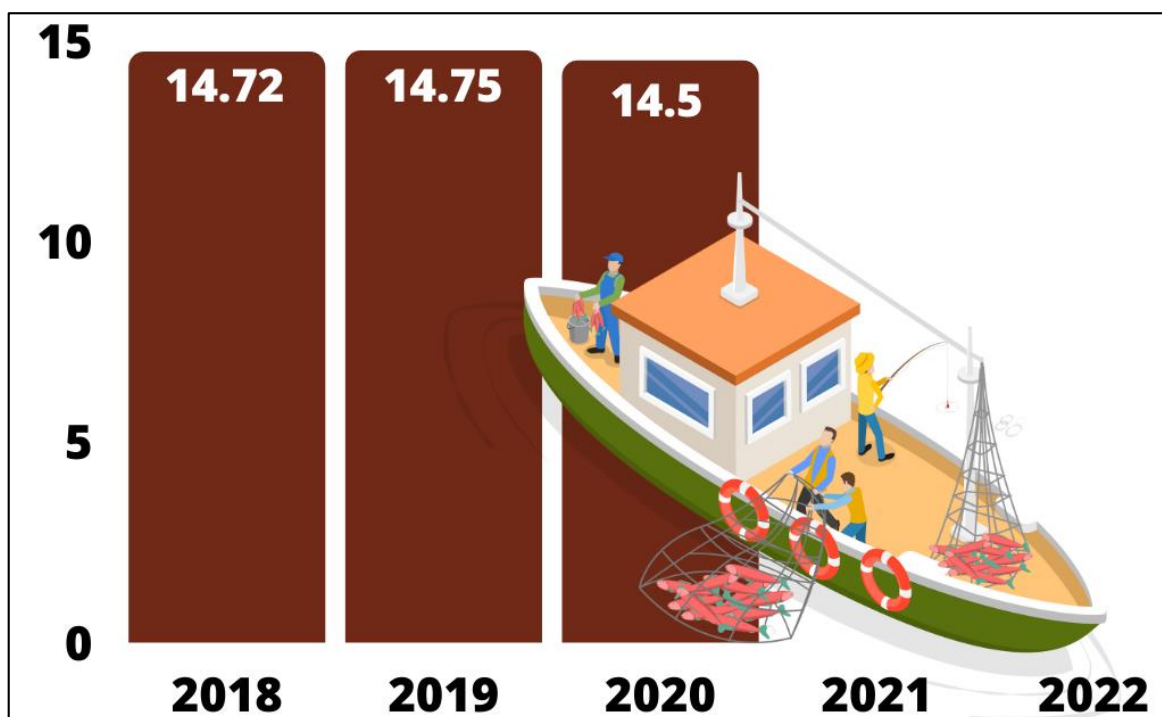
2. Kontribusi Subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; yaitu mencapai 33,72 persen. Kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 429,21 milyar rupiah atau 3,86 persen dan subkategori Perikanan lebih tinggi, yaitu 1.642,30 milyar rupiah atau 14,75 persen. Capaian indikator kinerja kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2021 menunjukkan trend positif. Hal ini terjadi karena Kawasan pesisir Kabupaten Probolinggo merupakan Kawasan dengan potensi pengembangan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Selain itu, jumlah produksi dan permintaan ikan tinggi dan cenderung meningkat pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 sebesar 14,72% dan terus meningkat di tahun 2019 yaitu menjadi 14,75%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 14,5% untuk

kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo. Sayangnya data pada tahun 2021 dan tahun 2022 belum ada update kembali karena subkategori ini sudah terwakili dengan subkategori sebelumnya.

Gambar 2. 93
Kontribusi subkategori Perikanan terhadap nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, Tahun 2023

3. Produksi Padi

Capaian indikator produksi padi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, produksi padi sebesar 292.338 ton. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 259.572 ton, yang kemudian meningkat Kembali pada tahun 2021 sebesar 272.199 ton. Pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi padi di Kabupaten Probolinggo menjadi 258.783 ton. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 296.162 ton.

4. Produksi Jagung

Capaian indikator produksi jagung di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 capaian produksi jagung sebesar 153.762 ton. Kemudian, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 produksi

jagung Kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 210.349 Ton. Sementara untuk tahun 2022 kenaikan produksi jagung mencapai 226.652 ton dan naik menjadi 261.617 ton pada tahun 2023.

5. Produksi Ubi Kayu

Capaian indikator produksi ubi kayu di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dan trennya cenderung negative. Pada tahun 2019, produksi ubi kayu sebesar 33.322 ton. pada tahun 2020 produksi ubi kayu mengalami penurunan kembali yakni mencapai 22.838 ton, yang kemudian meningkat produksinya menjadi 26.490 ton pada tahun 2021. Data pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kembali menjadi 27.233 ton dan kembali meroket pada tahun 2023 menjadi 30.217 ton.

6. Produksi Kedele

Capaian indikator produksi kedele di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, produksi kedele di Kabupaten Probolinggo sebesar 883,9 ton. Namun pada tahun 2020-2021, produksi kedele di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang signifikan menjadi 100 ton. Sementara untuk tahun 2022 melonjak menjadi 6.286 ton. Sayangnya pada tahun 2023 turun menjadi 114,33 ton.

7. Alpukat

Capaian indikator produksi alpokat pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 produksi alpokat sebesar 1.593,9 Ton. Namun pada tahun 2020 produksi alpokat mengalami peningkatan menjadi 3.029 Ton. Pnurun kembali produksinya menjadi 1.276 ton pada tahun 2021. Adapun tahun 2022 naik menjadi 20.234 ton dan kembali naik menjadi 27.700 ton pada tahun 2023.

8. Produksi Bawang Merah

Capaian indikator produksi bawang merah pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 produksi bawang merah sebesar 66.852 ton. Pada tahun 2020 kenaikan produksi bawang merah terus terjadi hingga mencapai 84.540 ton. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama, pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 54.115 ton.

Sementara untuk tahun 2022 penurunan kembali terjadi menjadi 52.658 ton. Kemudian pada tahun 2023 menjadi 72.860 ton.

9. Produksi Bawang Daun

Capaian indikator produksi bawang daun pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, produksi bawang daun 14.606,1 ton. Pada tahun 2020, Kembali mengalami kenaikan menjadi 25.259,8 ton. Pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi 10.320 ton. Data produksi bawang daun tahun 2022 melonjak menjadi 35.978 ton dan kembali naik menjadi 42.279 ton pada tahun 2023.

10. Produksi Kentang

Capaian indikator produksi kentang pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi dan cenderung positif. Pada tahun 2019, produksi kentang sebesar 26.221 ton. Pada tahun 2020 produksi kentang mengalami peningkatan menjadi 60.573 ton. Tahun 2021 produksi kentang menurun menjadi 52.740 ton. Adapun data terbaru tahun 2022 menunjukkan penurunan menjadi 49.736 ton dan kembali turun menjadi 38.060 pada tahun 2023.

11. Produksi Kubis

Capaian indikator produksi kubis pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, produksi kubis sebesar 26.994,5 ton. Pada tahun 2020 produksi kentang terus mengalami peningkatan menjadi 39.251 ton. Peningkatan terjadi Kembali pada tahun 2021 menjadi 58.005 ton. Sementara tahun 2022 turun menjadi 40.232 ton dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 38.375 ton.

12. Produksi Mangga

Capaian indikator produksi mangga pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami peningkatan pada empat tahun pertamanya. Pada tahun 2019, produksi mangga sebesar 102.401,6 ton. Pada tahun 2020 produksi manga kembali mengalami peningkatan menjadi 177.783,9 ton. Begitu juga pada tahun 2021 meningkat menjadi 241.709 ton. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan produksi menjadi 841.900 ton. Namun pada tahun 2023 turun menjadi 261.756 ton.

13. Produksi Pepaya

Capaian indikator produksi pepaya pada tahun 2019-2022 di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, produksi pepaya di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.521,3 ton. Pada tahun 2020 produksi pepaya terus meningkat menjadi 2.906 ton. Tahun 2021 meningkat menjadi 5.439 ton. Pada tahun 2022 produksi pepaya mencapai 9.573 ton. Namun pada tahun 2023 turun menjadi 3.424 ton.

14. Produksi Pisang

Capaian indikator produksi pisang pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi pisang di Kabupaten Probolinggo sebesar 67.973,1 ton. Pada tahun 2020 produksi pisang mengalami penurunan menjadi 56.892,9 ton. Tahun 2021 produksi pisang turun drastis menjadi 5.493 ton. Namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 503.281 ton. Sayangnya pada tahun 2023 kembali turun menjadi 87.510 ton.

15. Produksi Semangka

Capaian indikator produksi semangka pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dengan trend cenderung menurun. Pada tahun 2019, produksi semangka di Kabupaten Probolinggo sebesar 402,2 ton. Pada tahun 2020 produksi semangka mengalami kenaikan menjadi 566,7 ton. Adapun pada tahun 2021 produksi semangka mengalami penurunan menjadi 472 ton. Sementara pada tahun 2022 produksi semangka meroket mencapai 1.362 ton. Namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 139,7 ton

16. Produksi Cabe Rawit

Capaian produksi cabe rawit pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif dan cenderung kenaikan. Pada tahun 2019, produksi cabe rawit di Kabupaten Probolinggo sebesar 17.626 ton. Pada tahun 2020 produksi cabe rawit terus meningkat menjadi 36.569 ton. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 30.852 ton. Sementara pada tahun 2022 kembali membaik menjadi 46.339 ton, namun pada tahun 2023 turun menjadi 16.447 ton.

17. Produksi Cabe merah

Capaian produksi cabe merah pada tahun 2019-2022 di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi cabe merah sebesar 2.525 ton dan 2020 produksi cabe merah Kembali meningkat menjadi 5.135 ton. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 7.591 ton. Adapun untuk tahun 2022 peningkatan mencapai 12.088 ton. Sayangnya pada tahun 2023 turun menjadi 7.793 ton.

18. Produksi Tebu

Capaian produksi tebu pada tahun 2019-2020 di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan. Pada tahun 2019, produksi tebu adalah sebesar 106.350 ton. Pada tahun 2020 produksi tebu di Kabupaten Probolinggo semakin menurun menjadi 93.388,01 ton. Namun pada tahun 2021 terdapat peningkatan menjadi 96.828 ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun data tahun 2022 meningkat cukup signifikan mencapai 161.190 ton dan menjadi 176.287 pada tahun 2023.

19. Produksi Tembakau

Capaian produksi tebu pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi tembakau sebesar 16.215 ton. Namun pada tahun 2020, produksi tembakau di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 5.448,95 ton. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 11.906 ton. Sementara data tahun 2022 menurun menjadi 11.250 ton dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 16.981 ton.

20. Produksi Cengkeh

Capaian indikator produksi cengkeh pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi cengkeh sebesar 438,4 ton. Pada tahun 2020, produksi cengkeh di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 434,4 ton. Pada tahun 2021 produksi cengkeh mengalami penurunan kembali menjadi 416 ton. Sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 12,82 ton, namun pada tahun 2023 kembali naik menjadi 179,27 ton.

21. Produksi Kapuk Randu

Capaian indikator produksi kapuk randu pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi kapuk randu sebesar 579,3 ton. Pada tahun 2020, produksi kapuk randu di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan menjadi 738,5 ton. Dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1.257 ton. Adapun data tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan menjadi 722 ton, dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 173,3 ton.

22. Produksi Kopi

Capaian indikator produksi kopi pada tahun 2019-2022 di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi kopi sebesar 3.074,41 ton. Begitupun dengan tahun 2020, produksi kopi kembali mengalami peningkatan menjadi 4.024,4 ton. Pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 6.420 ton. Adapun pada tahun 2022 menjadi 7.382,1 ton. Namun pada tahun 2023 penurunan produksi kopi turun menjadi 4.389,7 ton.

23. Produksi Kelapa

Capaian indikator produksi kelapa pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo cenderung fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi kelapa sebesar 1.457,5 ton. Begitupun dengan tahun 2020, produksi kelapa terus mengalami peningkatan menjadi 1.984,3 ton. Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,701 ton. Adapun tahun 2022 penurunan terjadi menjadi 660,1 ton. Kemudian pada tahun 2023 melonjak naik menjadi 1.596,3 ton.

24. Ketersediaan dan Cadangan

Pada tahun 2019, ketersediaan dan cadangan pangan Kabupaten Probolinggo sebesar 101.038 ton. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 101.668 ton. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 177.833 ton. Sayangnya data capaian indikator ketersediaan dan cadangan pangan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 145.179 ton dan kembali turun menjadi 139.260 ton pada tahun 2023.

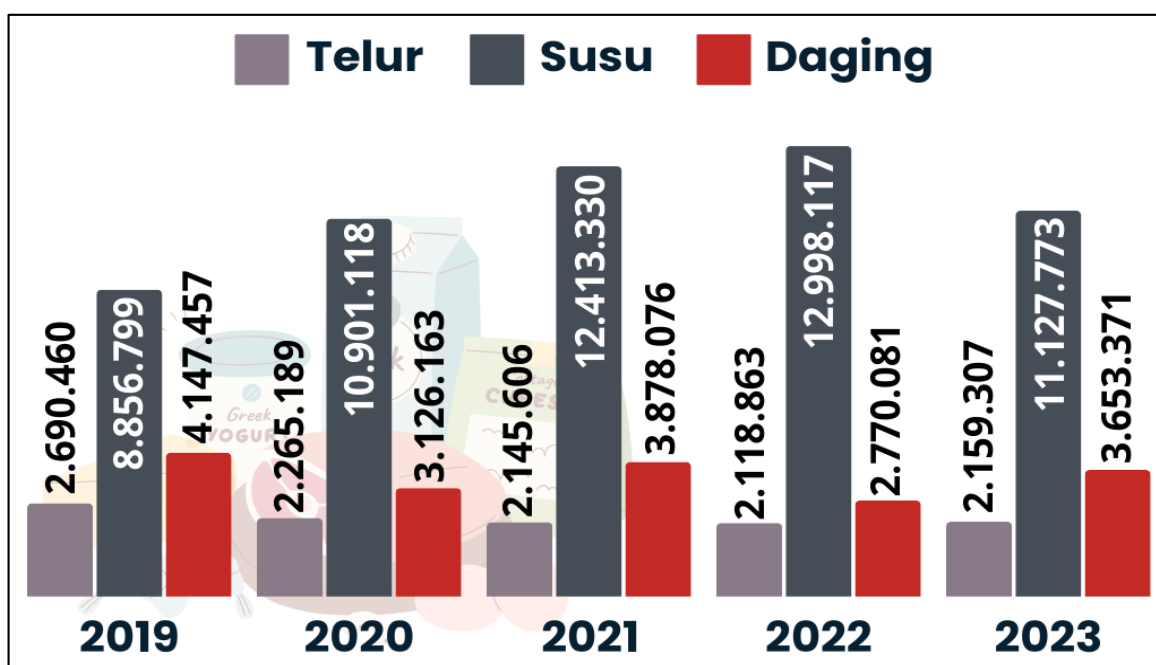
25. Jumlah Populasi Ternak

Capaian indikator jumlah populasi ternak di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 terdiri dari sapi potong sebesar 237.456 ekor. Sementara untuk sapi perah 6.315 ekor. Adapun untuk Kambing sebanyak 48.432 ekor. Sedangkan Domba dan Ayam ras masing-masing sebanyak 68.900 dan 4.358.844 ekor. Sementara data Ayam buras sebanyak 667.513 ekor dan Itik/Bebek sebanyak 112.411 ekor.

26. Jumlah Produksi Ternak

Capaian indikator jumlah produksi telur di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 terdiri dari produksi Telur, Susu, dan Daging.

Gambar 2. 94
Jumlah Produksi Telur, Susu, daging Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah produksi telur di Kabupaten Probolinggo sebesar 2.159.307 Kg, jumlah ini lebih banyak 40.444 Kg jika dibanding dengan tahun 2022. Sementara jumlah produksi susu pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sehingga menjadi 11.127.773 Kg. Pada produksi daging Kabupaten Probolinggo tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 3.653.371 Kg.

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pertanian sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 20 tahun ke depan, Kabupaten Probolinggo akan fokus pada pengembangan sektor pertanian yang lebih modern, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Rencana jangka panjang ini mencakup peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi terbaru dan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan. Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan akses terhadap teknologi, benih unggul, dan sarana produksi yang dapat meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Selain itu, pelatihan dan pemberdayaan petani akan terus ditingkatkan agar mereka dapat mengelola usaha tani dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, diversifikasi produk pertanian akan menjadi salah satu fokus utama dalam rencana ini. Pemerintah Daerah akan mendorong pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan potensi pasar yang luas. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo.

Pembangunan infrastruktur penunjang pertanian, seperti irigasi, jalan tani, dan pasar hasil pertanian, juga akan menjadi prioritas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, distribusi hasil pertanian dapat berjalan lebih lancar, sehingga petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas.

Penguatan sistem pemasaran hasil pertanian juga akan menjadi perhatian penting. Pemerintah Daerah berencana untuk memperkuat jaringan distribusi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, guna memastikan bahwa hasil pertanian Kabupaten Probolinggo dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, melalui berbagai langkah strategis ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yakin bahwa sektor pertanian akan terus berkembang menjadi sektor yang lebih maju dan berkelanjutan, memberikan

kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

D. Urusan Perdagangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 93
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

tNo	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Perdagangan							
1.	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	%	27,93	12,58	12,93	13,15	13,18

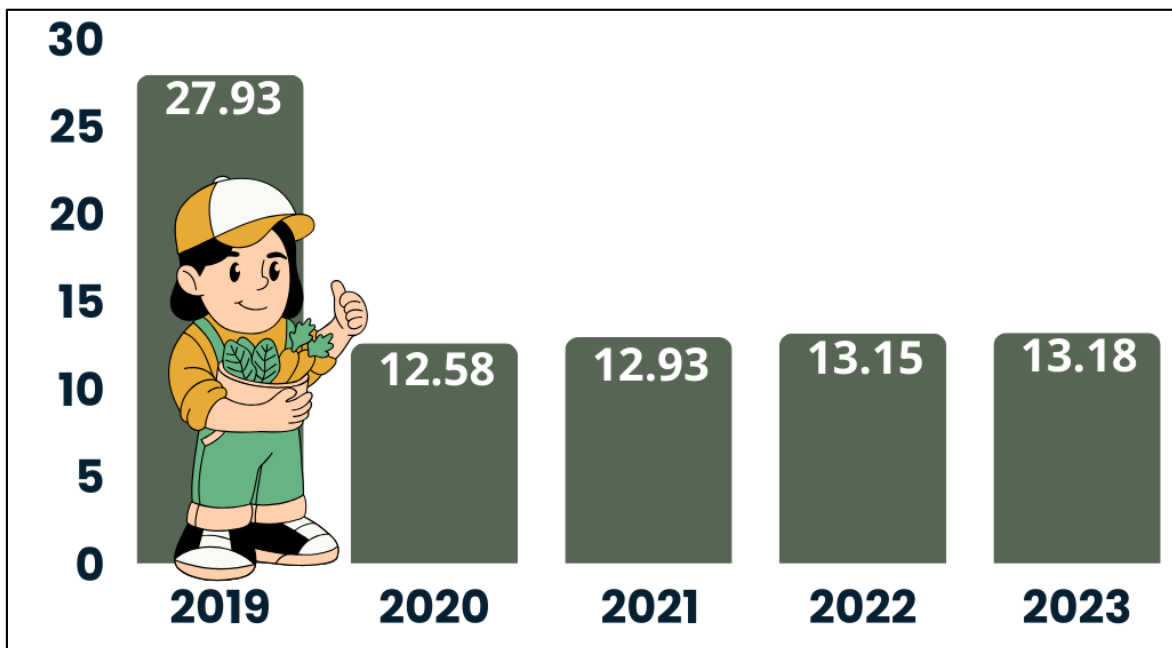
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa hasil kinerja bidang perdagangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo masih perlu peningkatan karena persentase capaian kinerjanya yang masih cenderung rendah walaupun trend nya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rendahnya persentase hasil kinerja bidang urusan perdagangan disebabkan karena adanya bencana non alam, pandemi covid-19. Peningkatan persentase hasil kinerja dapat diwujudkan dengan peningkatan teknoogi digitalisasi terutama pada proses pemasarannya.

1. Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Capaian indikator kinerja kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo terus sebesar 27,93%. Namun pada tahun 2020, kontribusi sub sector perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 12,58%. Pada tahun 2021 naik 0,35% sehingga menjadi 12,93%. Kemudian peningkatan juga terjadi pada tahun 2022 menjadi 13,15% dan pada tahun 2023 kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB naik menjadi 13,18%.

Gambar 2. 95
Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

E. Urusan Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 94
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Perindustrian							
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	53	53	53	70	118
2.	Kontribusi Sub sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB	%	25,17	25,42	26,18	26,38	26,6
3.	Pertumbuhan Industri.	%	8.1	-1,14	0,55	9,34	8,84

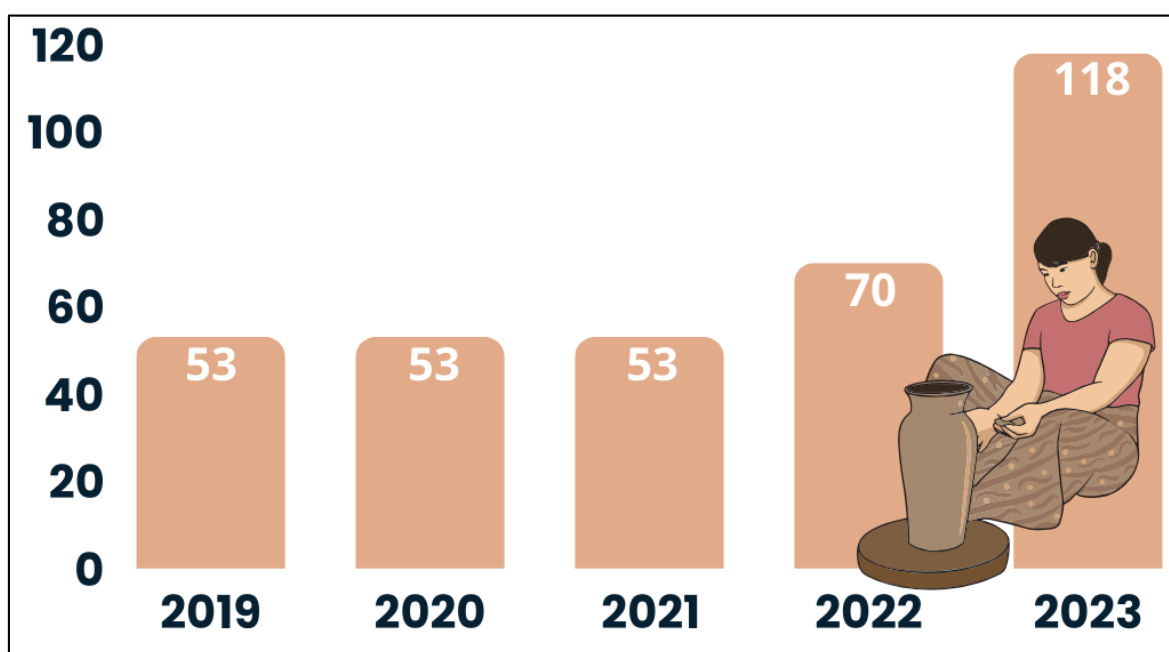
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Capaian indikator kinerja cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 sampai 2021, cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Probolinggo sebanyak 53 kelompok. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 70 kelompok. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 sebanyak 118 kelompok, sehingga pada tahun 2023 tercatat ada 118 kelompok pengrajin yang dibina.

Gambar 2. 96
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

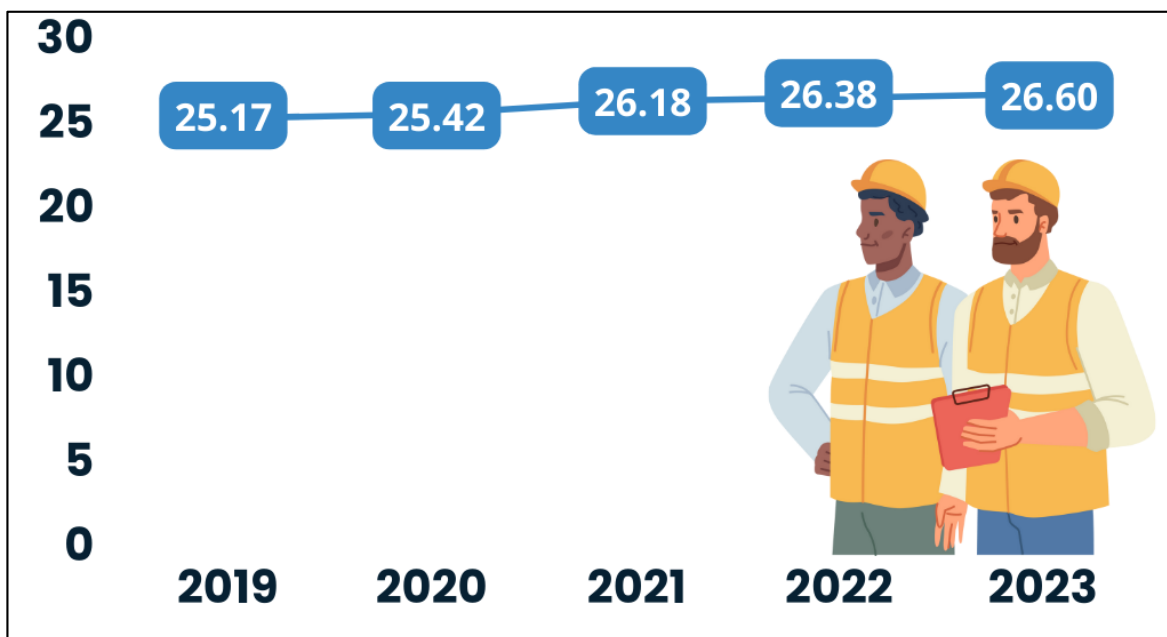


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

2. Kontribusi Sub Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB

Capaian indikator kinerja kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami kondisi meningkat. Pada tahun 2019, kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB di Kabupaten Probolinggo sebesar 25,17%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,42%. Kemudian pada tahun 2021 kenaikan menjadi 26,18% atau naik sebesar 0,76%. Kondisi tahun 2022 kenaikan sebesar 0,20% dibanding tahun sebelumnya menjadikan kontribusi sub sektor non migas terhadap PDRB Kab. Probolinggo menjadi 26,38% dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 26,60%.

Gambar 2. 97
Capaian Kontribusi Sub Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

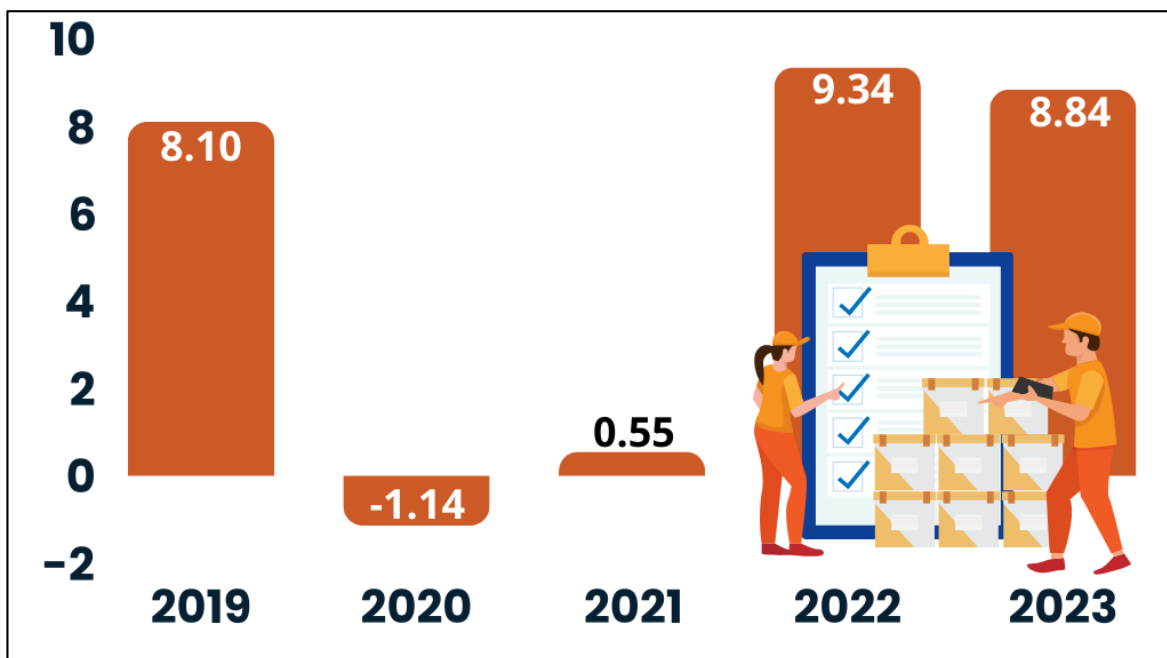


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

3. Pertumbuhan Industri

Capaian indikator kinerja pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan menjadi 8,10%. Pada tahun 2020, pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan hingga mencapai -1,14%. Penurunan signifikan pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo terjadi disebabkan adanya bencana non alam pandemi Covid-19 di tahun 2020 sehingga mengakibatkan kegiatan industri berkurang dan berdampak terhadap penurunan produksi. Selain itu, penerapan kegiatan tenaga kerja dan pembatasan jam kerja juga mempengaruhi rendahnya persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2021 pertumbuhan industri di Kabupaten Probolinggo mulai membaik, hal ini bisa dilihat dengan capaian kinerja pertumbuhan industri yang meningkat menjadi 0,55%. Kemudian pada tahun 2022 dengan selesainya pandemi covid-19 maka pertumbuhan industri Kabupaten Probolinggo meningkat pesat menjadi 9,34%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 8,84%

Gambar 2. 98
Pertumbuhan Industri Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

2.4.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

Fokus penunjan urusan terdiri dari urusan perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; pengawasan dan sekretariat dewan

A. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2. 95
Hasil Kinerja Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
dengan PERDA/PERKADA						
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Konsisten/Tidak	Konsistensi	Konsistensi	Konsistensi	Konsisten	Konsisten
Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Konsisten/Tidak	Konsistensi	Konsistensi	Konsistensi	Konsisten	Konsisten
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: BAPPEDA, Tahun 2024

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Pada tahun 2019-2023 Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Pada tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 07 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Pada tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, yakni:

- a) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 35 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.
- b) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2020.
- c) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.
- d) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022.
- e) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Pada tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah memiliki dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Pada tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penjabaran secara konsisten pada Program RPJMD ke dalam RKPD.

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Pada tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penjabaran secara konsisten pada Program RKPD ke dalam APBD.

7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Pada tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan rencana pembangunan sesuai dengan RTRW.

B. Urusan Keuangan

Perkembangan indikator kinerja urusan keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2. 96
Hasil Kinerja Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tersusunnya APBD dan P-APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan Daerah sesuai Alur dan Sisdur PKD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Tercapainya Opini WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Prosentase Realisasi penyerapan APBD	80%	82,32%	82,86%	83,72%	92,20%
Ketepatan waktu penyusunan LKD	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai A
Prosentase PAD terhadap APBD	9%	9,23%	10,30%	11,37%	13,15%
Penatausahaan administrasi perbendaharaan daerah sesuai alur dan sisdur PKD	75%	76%	77%	79%	80%
Proporsi Aset tetap tanah yang bersertifikat terhadap aset tanah yang tercatat	45%	60%	65%	75%	80%
Persentase SKPD dengan penyusunan LK SKPD yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	80%	85%	93%	94%	95%
Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Pengelolaan Aset dan BMD	60%	63%	65%	75%	80%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	9,23%	10,30%	11,37%	13,15%
Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	80%	83%	85%	87,50%	78,20%
Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	9%	9,23%	10,30%	11,37%	13,15%
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	45%	60%	65%	75%	80%

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Tahun 2024

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 telah berhasil mendapatkan opini WTP.

2. Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu

Pada tahun 2019 s/d tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berhasil melakukan penetapan APBD secara tepat waktu.

3. Realisasi penyerapan APBD

Capaian indikator kinerja realisasi penyerapan APBD Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 terus meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 realisasi penyerapan APBD sebesar 80% yang kemudian pada tahun 2023 serapan APBD Kabupaten Probolinggo menjadi 92,20%. Tingginya serapan APBD menunjukkan banyaknya program ataupun kegiatan yang direncanakan mampu terealisasi sehingga diharapkan pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo terus membaik.

4. Ketepatan waktu penyusunan LKD

Pada rentan waktu tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo selalu tepat waktu dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah, sehingga capaian pada periode tersebut selalu 100%.

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 4 tahun pertama mendapatkan nilai "BB", namun pada tahun 2023 naik menjadi "A".

6. Prosentase PAD terhadap APBD

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 menyumbang sebesar 9% terhadap APBD Kabupaten Probolinggo, prosentase ini terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 PAD Kabupaten Probolinggo menyumbang sebesar 13,15% terhadap APBD Kabupaten Probolinggo.

7. Penatausahaan administrasi perbendaharaan daerah sesuai alur dan sisdur PKD

Capaian penatausahaan administrasi perbendaharaan daerah sesuai alur dan sisdur PKD pada tahun 2019-2023 selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 capaian penatausahaan administrasi perbendaharaan daerah sesuai alur dan sisdur PKD sebesar 75%. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 76%. Peningkatan terjadi kembali pada tahun 2021 menjadi 77%. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 peningkatan capaian penatausahaan administrasi perbendaharaan daerah sesuai alur dan sisdur PKD masing-masing menjadi 79% dan 80%.

8. Proporsi Aset tetap tanah yang bersertifikat terhadap aset tanah yang tercatat

Capaian indikator proporsi Aset tetap tanah yang bersertifikat terhadap aset tanah yang tercatat atau disebut Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Probolinggo terus mengalami peningkatan pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019 proporsi Aset tetap tanah yang bersertifikat terhadap aset tanah yang tercatat sebesar 45%, yang kemudian mencapai 80% pada tahun 2023.

9. Persentase SKPD dengan penyusunan LK SKPD yang sesuai SAP dan Tepat Waktu

Pada tahun 2019 capaian indikator persentase SKPD dengan penyusunan LK SKPD yang sesuai SAP dan Tepat Waktu Kabupaten Probolinggo sebesar 80%. Capaian ini terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 85%, kemudian pada tahun 2021 menjadi 93%. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2022 menjadi 94% dan pada tahun 2023 menjadi 95%.

10. Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Pengelolaan Aset dan BMD

Capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang Tertib Pengelolaan Aset dan BMD Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2019 persentase Perangkat Daerah yang Tertib Pengelolaan Aset dan BMD Kabupaten Probolinggo sebesar 60%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 63%. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 65%. Peningkatan ini pada tahun 2022 menjadi 70% dan pada tahun 2023 menjadi 80%.

11. Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah

Capaian indikator cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah periode 2019-2023 mengalami kondisi fluktuatif namun cenderung meningkat di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2019 capaian ini sebesar 80%, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 83%. Peningkatan ini terjadi lagi pada tahun 2021 menjadi 85%, dan menjadi 87,50% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian indikator cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah menjadi 78,20%.

C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Perkembangan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2. 97
Hasil Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,6	0,6	0,7	6,12	3,11
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	24	36	36	36	36
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	165	173	184	164	181
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	4715	4756	4848	4928	4691

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Capaian indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2022 mengalami tren fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 0,6 sedangkan tahun 2020 mencapai 0,7%. Pada tahun 2021 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Probolinggo meningkat tajam menjadi 6,12%, meskipun demikian pada tahun 2022 kembali turun menjadi 3,11%.

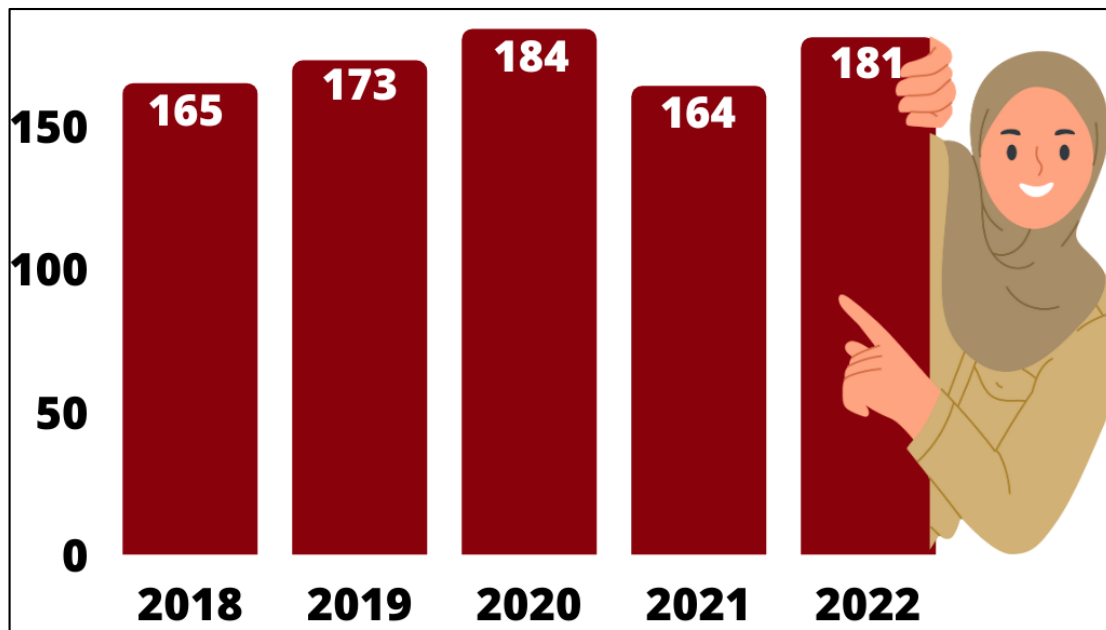
2. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Capaian indikator jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 24 orang. Pada 2019 hingga 2020 berjumlah tetap yaitu 36 orang. Sementara pada tahun 2021 dan tahun 2022 belum tersedia.

3. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Capaian indikator jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada 2018 sebanyak 165 orang. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 173 orang, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 184 orang. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan hingga menjadi 164 orang. Akan tetapi terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 menjadi 181 orang.

Gambar 2. 99
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten



Probolinggo Tahun 2018-2022

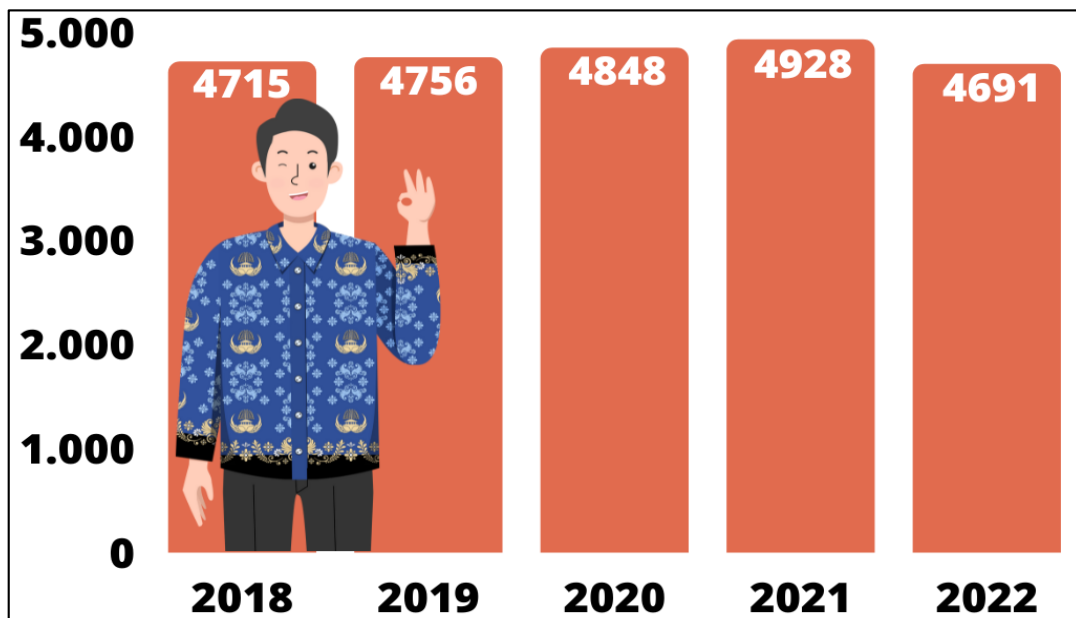
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

4. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Capaian indikator jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi

setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pemangku jabatan fungsional sebanyak 4715 orang. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 4756 orang dan pada tahun 2020 menjadi 4848 orang. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 4928 orang. Sayangnya pada tahun 2022 data menunjukkan terjadi penurunan menjadi 4691 orang. Untuk lebih detailnya data digrafikkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 100
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

D. **Urusan Pengawasan dan Sekretariat Daerah**

Perkembangan indikator kinerja pada Urusan pengawasan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 98
Hasil Kinerja Urusan Inspektorat dan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah temuan BPK	Kasus	24	37	57	32	87
Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten	Kasus	35	43	32	67	71
Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	100	100	100	100	94.81

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
inspektorat						
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	Nilai	71,5	72,41	68,01	68,68	67,43
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66,75	67	65	70	63,05
Persentase penurunan temuan BPK berulang	%	36,6	13,7	7,95	18,75	6,89
Persentase pengaduan masyarakat yang tuntas ditindaklanjuti	%	55,26	88,37	85,71	83,58	81,69
Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	100	100	94,54	68,68	67,43
Peningkatan Level APIP	Level	2+	2+	2+	2+	2+
Indeks SPBE	nilai	2,85	N/A	2,59	2,42	3,33
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	74	50,46	63,82	63,58	77,17
Indeks Pengelolaan Keuangan daerah	Indeks	N/A	N/A	N/A	proses	70,114
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	18,3	24,17	44,7	50,36	49,48

Sumber: Inspektorat, Tahun 2023

1. Jumlah Temuan BPK

Capaian indikator jumlah temuan BPK di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah temuan BPK mencapai 24 temuan. Pada tahun 2020, jumlah temuan BPK kembali mengalami peningkatan menjadi 37 temuan. Selanjutnya pada tahun 2021 tercatat sebanyak 57 temuan di Kabupaten Probolinggo. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 32 temuan, terakhir pada tahun 2023 sebanyak 87 temuan. Jumlah ini menjadi temuan terbanyak dalam periode 2019-2023.

2. Jumlah Temuan Inspektorat Kabupaten

Capaian indikator jumlah temuan Inspektorat kabupaten di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 terbilang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah temuan Inspektorat kabupaten 35 temuan. Sedangkan pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 43 kasus. Penurunan terjadi pada tahun 2021 menjadi 32 temuan. Pada tahun 2022 jumlah temuan inspektorat kabupaten meningkat menjadi 67 temuan dan menjadi 71 temuan pada tahun 2023.

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Capaian indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2022 mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2023, persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat menurun menjadi 94,81 persen.

4. Opini BPK

Capaian indikator opini BPK di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 memperoleh WTP sebagaimana yang disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 99
Capaian Indikator opini BPK Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Tahun 2024

5. Nilai SAKIP

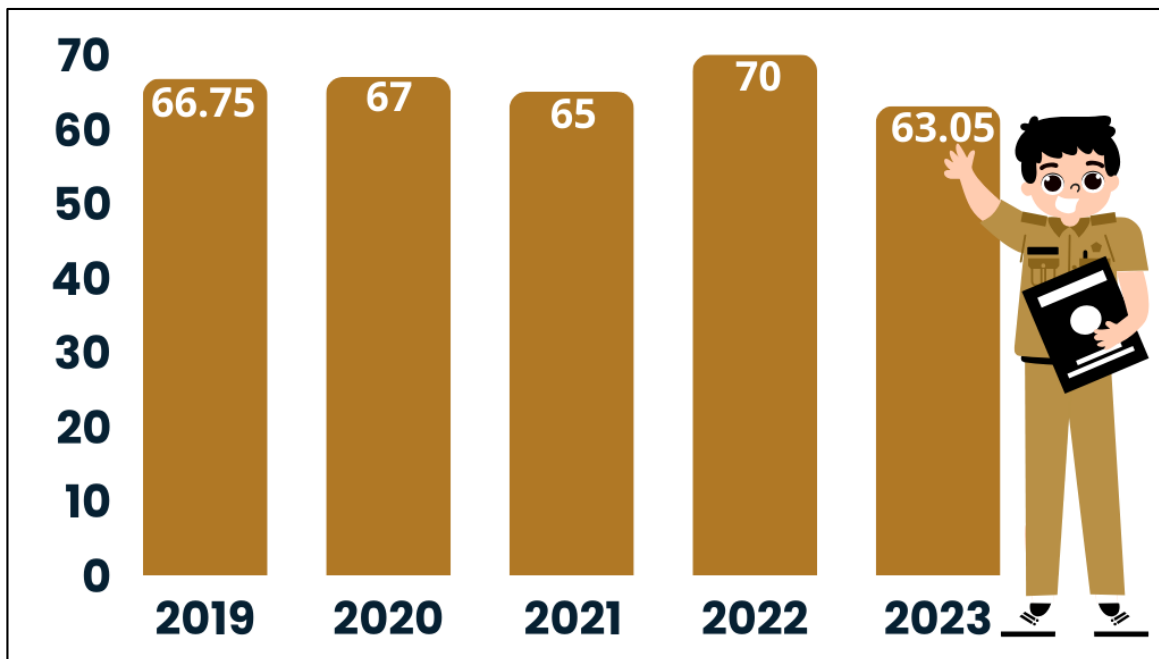
Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Probolinggo, nilai SAKIP th 2023 (67,43) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (68,68). Apabila dibandingkan target tahun 2023 yaitu 83, maka capaian kerjanya sebesar 81,24% dengan kategori Baik.

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pencapaian reformasi birokrasi diukur menggunakan indeks reformasi birokrasi. Capaian kinerja IRB pada Kabupaten Probolinggo di tahun 2019 mencapai 66,75. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 67 poin. Akan tetapi pada tahun 2021 kembali turun menjadi 65 poin.

Namun kembali terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 70 poin. Sementara itu pada tahun 2023 turun menjadi 63,05 poin.

Gambar 2. 101
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2023



Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2024

7. Persentase Penurunan Temuan BPK

Indikator persentase penurunan temuan BPK di Kabupaten Probolinggo terus menurun dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 persentase penurunan temuan BPK adalah sebesar 36,6% hingga pada tahun 2021, persentase penurunan temuan BPK di Kabupaten Probolinggo turun menjadi 7,95%. Capaian tersebut dipengaruhi karena kurangnya pemahaman OPD dalam menindaklanjuti temuan yang sudah ada. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 18,75%. Namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 6,89%.

8. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tuntas Ditindaklanjuti

Capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang tuntas ditindaklanjuti di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019-2023 mengalami tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2019 capaiannya sebesar 55,26%, jika dibandingkan tahun sebelumnya maka angka ini cukup turun drastis. Penurunan tersebut dikarenakan kurangnya tenaga auditor dalam rangka menindaklanjuti kasus-kasus

yang masuk ke Inspektorat. Pada tahun 2020, persentase pengaduan masyarakat yang tuntas ditindaklanjuti kembali mengalami peningkatan menjadi 88,37%. Sayangnya pada tahun-tahun berikutnya kembali terjadi penurunan hingga pada tahun 2023 capaian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 81,69%

9. Persentase Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Capaian indikator persentase evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mengalami penurunan di tahun 2021. Meskipun demikian pada tahun 2019 dan 2020 persentase evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sempat mencapai sebesar 100% pada 2 tahun sebelumnya. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan karena belum selarasnya cascading antara RPJMD, Renstra, Renja sampai dengan indikator kinerja individu.

10. Peningkatan Level APIP

Capaian indikator peningkatan level APIP di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 adalah pada level 1 dan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah pada level 2+.

11. Indeks SPBE

Capaian indikator indeks SPBE mengalami kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2019 mencapai 2,89 menjadi 2,59 pada tahun 2021 dan Kembali menurun menjadi 2,42 di tahun 2022. Tahun 2023, target Indeks SPBE Kab Probolinggo ditetapkan sebesar 3,5, terealisasi 3,33 atau capaian kinerjanya sebesar 94,29% dengan kategori Baik (B). Apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023, tahun ini mengalami kenaikan signifikan diakibatkan penambahan nilai pada aplikasi yang mendukung pelaksanaan RB tematik dan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung kebijakan SPBE.

12. Indeks Profesionalitas ASN

Capaian indikator profesionalitas ASN dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 mencapai 74 yang kemudian menurun menjadi 50,46 pada tahun 2020. Kemudian meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 63,82 dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 63,58. Tahun 2023 hasil perhitungan Indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN oleh BKN

sebesar 77,17(nilai sementara rilis 12 Oktober 2023) dari target 63 dengan capaian realisasi 122,49% kategori **Sangat Baik**.

13. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator IPKD pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70-80, hasil penilaian dari Kementerian Keuangan realisasi IPKD Kabupaten Probolinggo sebesar 70,144 dengan capaian 100% kategori Baik (B). Capaian IPKD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2019 : 26.42, 2020 : 31.64, 2021 : 35.84 ,2022 : 50.60, 2023 : 70,114. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kab Probolinggo terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya dengan mengoptimalkan peran Tim TAPD melalui koordinasi pemenuhan implementasi IPKD yang lebih maksimal. Dimensi perhitungan indeks pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran.
- b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- d. Penyerapan anggaran.
- e. Kondisi keuangan daerah.
- f. Opini BPK atas LKPD.

14. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat penting untuk mengukur dan memahami dinamika inovasi di berbagai wilayah. Dengan menggunakan indeks ini, daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam hal inovasi dan merancang strategi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi mereka.

Kabupaten Probolinggo indeks inovasi daerah dalam periode 2019-2023 fluktuatif namun cenderung meningkat. Capaian pada tahun 2019 sebesar 18,3 poin. Angka ini meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi 50,36. Meskipun demikian pada tahun 2023 kembali turun menjadi 49,48 poin.

E. Urusan Penunjang Pemerintahan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 100
Hasil Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021

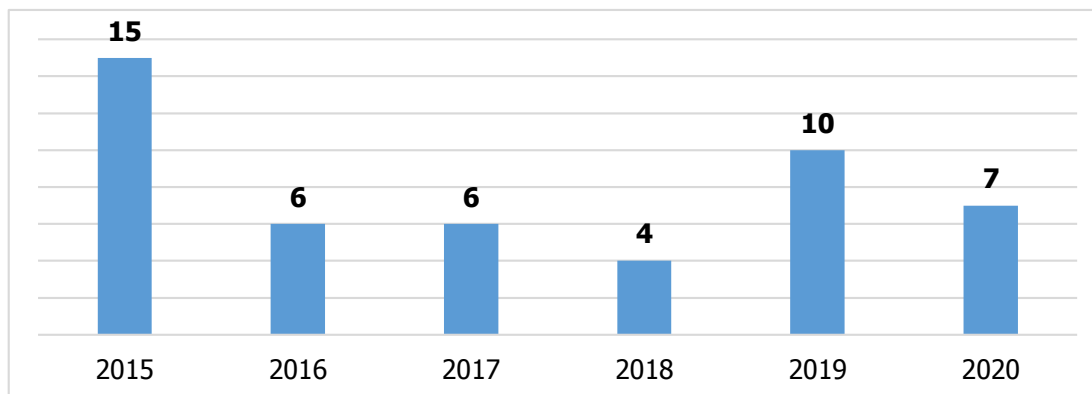
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)	%	N/A	0,15	0,17	1	7,7
2.	Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	%	N/A	84	85	100	115

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, Tahun 2021

1. Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun

Capaian indikator kinerja jumlah peraturan daerah yang disusun di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015 s/d tahun 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah peraturan daerah yang disusun di Kabupaten Probolinggo sebanyak 15 buah. Pada tahun 2016 jumlah peraturan daerah yang disusun di Kabupaten Probolinggo menurun menjadi 6 buah. Pada tahun 2017 peraturan daerah yang disusun tetap 6 buah. Pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 4 buah. Pada tahun 2019, jumlah peraturan daerah yang disusun mengalami peningkatan menjadi 10 buah. Pada tahun 2020, jumlah peraturan daerah yang disusun kembali mengalami penurunan menjadi 7 buah.

Gambar 2. 102
Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2020



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo, Tahun 2020

2. Persentase Penurunan Angka Konflik SARA

Capaian indikator kinerja persentase penurunan angka konflik SARA di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase penurunan angka konflik SARA sebesar 0,15%. Pada tahun 2019, meningkat menjadi 0,17%. Pada tahun 2020, penurunan angka konflik SARA terus mengalami peningkatan menjadi 1% hingga 7,7% pada tahun 2021. Peningkatan penurunan angka konflik SARA di Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari bantuan dan peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam menyelesaikan konflik serta peningkatan sosialisasi eksistensi Bakesbangpol melalui terobosan-terobosan strategis dengan melibatkan partisipasi infra dan supra struktur politik.

3. Persentase Keberhasilan Mediasi Pencegahan Terjadinya Konflik Gangguan Keamanan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan mencapai 84% hingga mencapai 115% pada tahun 2021.

2.5 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025

Evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 dilakukan terhadap: (a) hubungan atau keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD; (b) capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah selama periode 2005 hingga 2022; (c) capaian kinerja sasaran pokok per tahapan pembangunan (lima tahunan) atau capaian kinerja per periode RPJMD; dan (d) faktor penghambat dan pendorong ketercapaian kinerja pembangunan. Evaluasi terhadap hubungan atau keselarasan antara visi, misi, tujuan sasaran RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Tidak tersedia *cascading* visi (pokok visi) ke dalam misi, kemudian ke tujuan, sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Probolinggo. Yang tersedia adalah cascading arah kebijakan untuk setiap sasaran, baik secara umum maupun per periode/tahapan lima tahunan. Cascading juga akan mempermudah pemerintah daerah untuk memastikan sebuah pokok visi dapat dicapai melalui misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang mana. Implikasi dari ketiadaan cascading ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakannya belum sepenuhnya terkelompokkan dengan baik, terdapat pengulangan dan tumpang tindih. Selain itu, terdapat hanya satu tujuan untuk lima penyelenggaraan misi pembangunan jangka panjang.
2. Terdapat arah kebijakan yang harus dilakukan namun bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti pembangunan urusan agama, pertahanan, keamanan (oleh institusi kepolisian), dan yustisi. Hal ini akan mempersulit implementasi arah kebijakan tersebut dalam proses pembangunan.

Tabel 2. 101
Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun berjalan (2022)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)***	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	59.75	66.96	12.07%	IPM Kabupaten Probolinggo Mengalami pertumbuhan sebesar 12,07 poin. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di bidang Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Probolinggo sudah berada pada jalur yang sudah baik. Namun demikian, capaian pembangunan manusia tersebut perlu diprioritaskan karena masih dibawah tngkat IPM provinsi Jawa Timur sebesar 72,75
2	Angka Kemiskinan	Persen	32.89	17.12	-47.95%	Selama periode RPJPD, Kabupaten Probolinggo berhasil menurunkan angka kemiskinan mencapai 47,95 persen. Hingga tahun 2022, kemiskinan ekstrim Kabupaten Probolinggo berada pada angka 3,18 persen atau setara dengan 37.740 jiwa. Dengan demikian maka kemiskinan masih menjadi perhatian utama di Kabupaten Probolinggo, mengingat pada tahun 2024 target nasional adalah 0 persen kemiskinan ekstrim.
3	Angka Pengangguran	Persen	10.1	3.25	-67.82%	Angka pengangguran di Probolinggo terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 67,82 persen. Kondisi pengangguran pada awal periode RPJPD sebesar 10,1 persen dan berhasil diturunkan menjadi 3,25 persen pada tahun 2022.
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.73	4.52	-4.44%	Secara kumulatif selama periode RPJPD, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 4,44 persen. Penurunan ini disebabkan belum pulihnya aktivitas ekonomi secara penuh akibat Pandemi Covid-19.
5	Pendapatan Perkapita	Rp./tahun	12,319,039**	12,571,000	2.05%	Pendapatan per kapita masyarakat Probolinggo juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 252.000. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Probolinggo terus mengalami perbaikan.

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun berjalan (2022)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)***	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
6	Indeks Gini	Indeks	0.250*	0.275	10.00%	Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini menunjukkan peningkatan dari 0,25 menjadi 0,275, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan. Peningkatan ketimpangan pendapatan ini terjadi sebagai konsekuensi perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada sektor perdagangan dan jasa. Namun demikian, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang ke depan.
7	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rp.	7.44	33.56	351.13%	Kesejahteraan setiap penduduk yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB Perkapita mengalami peningkatan cukup besar. Namun demikian dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB perkapita ini perlu diimbangi dengan pemerataan.
8	Indeks Ketenteraman Masyarakat	Indeks	N.A	Sedang proses	---	---
9	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	81.49*	85.39**	4.79%	Sejalan dengan IPM, IPG juga mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk perempuan terus mengalami perbaikan.
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N.A	62.82**	---	---
11	Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (IKLI + IKLH)	Indeks	N.A	64.98	---	---

* kondisi tahun 2010

** Kondisi tahun 2021

N.A not available (tidak tersedia)

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah selama periode 2005 hingga 2022 menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Secara umum, capaian atau realiasi indikator kinerja pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2022 memperlihatkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2005 atau 2010 pada beberapa indikator.
2. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator yang sama di Provinsi Jawa Timur yang bisa diidentikkan dengan rata-rata kinerja kabupaten/kota se Jawa Timur, maka Kabupaten Probolinggo masih memiliki permasalahan sendiri yang harus diselesaikan di masa mendatang. Interpretasi perubahan indikator kinerja makro adalah: (a) pasca pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi mulai pulih, namun tetap saja berada di bawah pertumbuhan ekonomi di tahun 2005 maupun Provinsi Jawa Timur; (b) Meskipun ada kecenderungan penurunan, namun angka Kemiskinan Kab Probolinggo tetap relatif tinggi di atas angka kemiskinan Jawa Timur; (c) Ketimpangan antar kelompok masyarakat berkategori sedang di tahun s.d. 2021 dan rendah di tahun 2022; lebih rendah (baik) dari Provinsi Jatim maupun Nasional. Harus tetap dijaga/diturunkan karena indikator ini merupakan indikator penting pembangunan makro nasional dan daerah; (d) IPM masih berkategori sedang, berada di bawah nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional yang berkategori tinggi; (e) Tingkat Pengangguran Terbuka yang cenderung meningkat/lebih tinggi dari tahun 2016, meskipun secara rata-rata lebih rendah (baik) daripada rata-rata provinsi maupun nasional serta ada penurunan dari tahun 2020-2022; (f) Pada Kinerja tata kelola pemerintahan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) = 65,72 (Tahun 2020), 62,82, (2021)). Berpredikat B atau terkategori Baik. Perlu terus ditingkatkan menuju predikat A atau AA

Evaluasi terhadap terhadap capaian kinerja sasaran pokok per tahapan pembangunan (lima tahunan) atau capaian kinerja per periode RPJMD menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Ketersediaan dan validitas data realisasi atau capaian kinerja pada akhir periode RPJMD sangat terbatas, khususnya pada tiga periode RPJMD pertama. Banyak faktor yang menyebabkan data tidak tersedia, diantaranya: (i) nomenklatur indikator yang berbeda antara yang tertulis dalam cascading sasaran dengan yang diuraikan dalam kertas kerja matriks kinerja RPJMD; (ii)

dokumen memang tidak mencantumkan nilai target; (iii) nomenklatur indikator kinerja yang berbeda antara rencana dan realiasi sehingga tidak bisa diperbandingkan, dst. Walaupun demikian, semakin lama persentase ketersediaan data semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa awareness terkait penyediaan data yang lengkap dan berkualitas sebagai dasar perencanaan semakin membaik, meskipun di masa mendatang harus ditingkatkan.

- b. Terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian kinerja hingga ratusan atau bahkan ribuan persen. Kemungkinan pertama, memang capaian kinerjanya luar biasa. Kemungkinan kedua, terjadi perbedaan definisi/formula atau sumber data, sehingga data sangat berbeda jauh. Data seperti ini seharusnya tidak bisa diperbandingkan. Kemungkinan ketiga, perencanaan *under estimate* dalam menentukan target kinerja.
- c. Terdapat nomenklatur indikator yang membingungkan. Terdapat pula indikator tujuan yang sama dengan indikator sasaran, khususnya pada RPJMD Periode 2013-2018
- d. Tidak tersedia dokumen RPJMD periode 2003-2008 sehingga periode I RPJPD belum bisa dievaluasi.
- e. Pada periode II RPJPD (RPJMD Tahun 2008-2013) seluruh indikator yang dapat dievaluasi capaiannya hanyalah indikator kinerja tujuan atau indikator kinerja utama pembangunan daerah. Terdapat 7 dari 118 (6%) indikator yang tersedia datanya. Tingkat capaian ke-7 indikator yang tersedia datanya sebesar 683%. Angka ini sangat tinggi karena ada capaian indikator, yaitu nilai penanaman modal asing yang mencapai 4 ribu persen. Jika angka yang *outlier* ini dikeluarkan, maka rata-rata capaian sebesar 121%. Kategori rata-rata capaian adalah Sangat Tinggi karena lebih dari 90%. Jika diperhatikan, dari 7 indikator yang tersedia, hanya 1 indikator yang capaiannya berada di bawah 100%, namun masih tergolong tinggi, yaitu persentase rasio jalan berkondisi baik. Selebihnya berkategori Sangat Baik, bahkan capaiannya di atas 100%.
- f. Pada periode III RPJPD (RPJMD Tahun 2013-2018) jumlah indikator yang dapat dievaluasi capaiannya sebanyak 9 dari 25 atau 36%. Tingkat capaian

kesembilan indikator rata-rata sebesar 82%. Dari 9 indikator yang terhitung capaiannya, 2 indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, memiliki capaian kinerja rendah (kurang dari 50%). Sebuah indikator, yaitu pertumbuhan PDRB per kapita memiliki capaian kinerja tinggi, sementara lainnya (7 indikator) memiliki capaian yang Sangat Tinggi.

- g. Pada Periode IV RPJPD (RPJMD Tahun 2018-2023) jumlah indikator yang dapat dievaluasi sudah cukup banyak (relatif lengkap), yaitu 26 dari 34 indikator atau 76%. Tingkat capaian kinerja ke 26 indikator rata-rata sebesar 135% dan berkategori Sangat Tinggi. Terdapat satu indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi (outlier), yaitu pada pertumbuhan ekonomi dengan capaian hingga >1000%. Jika angka outlier ini dihilangkan, maka rata-rata capaian tetap relatif tinggi, yaitu sebesar 108% dan tetap berkategori Sangat Tinggi. Dari 26 indikator, terdapat satu indikator dengan capaian rendah (24%), yaitu persentase realisasi nilai investasi; 1 indikator dengan capaian sedang, yaitu capaian indeks SPBE; 1 indikator dengan capaian Tinggi, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan selebihnya berkategori Sangat Tinggi (lebih dari 90% tingkat capaian kinerjanya).
- h. Walaupun demikian, capaian kinerja (perbandingan antara realisasi dengan target) yang cenderung sangat tinggi, bahkan jauh di atas 100% belum sepenuhnya menunjukkan kinerja pembangunan yang baik. Terdapat kemungkinan *under estimate* saat proses memproyeksikan target kinerja. Pun demikian saat capaian kinerja banyak indikator yang terkategori rendah karena kemungkinan *over estimate* saat menentukan target. Karenanya, di masa mendatang, proyeksi angka target indikator harus dilakukan secara lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan kecenderungan data historis serta berbagai faktor lain yang mempengaruhi.
- i. Capaian kinerja yang sangat baik juga tidak sepenuhnya berarti bahwa pembangunan pada urusan yang memiliki indikator tersebut sudah baik-baik saja/tidak ada masalah. Perbandingan realisasi nilai indikator Kabupaten Probolinggo dengan kabupaten/wilayah lain sekitar, Provinsi Jawa Timur, atau bahkan nilai standar nasional, perlu dilakukan untuk melihat posisi relatif

kinerja kabupaten dalam urusan pemerintahan tersebut. Realisasi indikator kinerja makro daerah Kabupaten Probolinggo cenderung berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur pada pembangunan hampir seluruh bidang. Karenanya, saat penyusunan RPJPD periode mendatang, hal ini harus dipertimbangkan saat menentukan prioritas arah kebijakan.

Sementara itu, identifikasi faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sasaran pokok pembangunan jangka Panjang di Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Faktor penghambat didominasi oleh permasalahan daerah yang berarti berasal dari kondisi internal yang bersifat negative (mengganggu upaya pencapaian tujuan pembangunan di masa mendatang) dari pemerintahan daerah maupun kondisi wilayah di berbagai aspek. Pun demikian dengan faktor pendorong umumnya adalah kondisi baik (positif) internal pemerintahan daerah dan kondisi wilayah yang diharapkan terjadi.
2. Keterbatasan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah masih menjadi faktor penghambat yang seringkali muncul.
3. Struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo yang masih bertumpu pada sektor pertanian yang cenderung rentan mengalami goncangan membuat pertumbuhan ekonomi daerah seringkali berfluktuatif.
4. Kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang masih terbatas juga menjadi faktor penghambat sekaligus pendorong jika hal ini dapat teratasi.
5. Permasalahan lingkungan alam dan sumberdaya alam juga muncul dan dapat mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang
6. Kemiskina dan ketidak-merataan pembangunan masih menjadi isu yang muncul.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pentahelix, sudah menjadi tuntutan. Demikian pula program pembangunan yang multi sektor sesuai kebutuhan pembangunan sudah menjadi keharusan. Pendekatan implementasi program pembangunan yang THIS (tematik,

holistic, integratif, dan spasial) diharapkan mampu menghasilkan program yang komprehensif sesuai kebutuhan.

8. Beberapa indikator bukan menjadi kewenangan kabupaten sehingga terkendala dalam menentukan target kinerja maupun mengendalikan capaian kinerjanya.
9. Kondisi tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor penghambat sekaligus pendorong saat permasalahan teratasi dari berbagai capaian misi dan sasaran RPJPD Tahun 2005-2025. Komitmen dan upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem tata kelola sesuai kebutuhan good dan clean governance yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi keharusan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, maka berikut ini adalah rekomendasi untuk tindak lanjutnya:

1. Rekomendasi untuk proses penyusunan RPJPD periode selanjutnya
 - a. Perlu perumusan cascading visi (pokok visi) ke dalam misi, kemudian ke tujuan, sasaran dan arah kebijakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memastikan sebuah pokok visi dapat dicapai melalui misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang mana. Hal ini juga akan mempermudah perencanaan untuk menerjemahkan program, kegiatan indikator kinerja pembangunan hingga penetapan perangkat daerah penanggung jawab saat menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan/atau pendek.
 - b. Sebisa mungkin menetapkan indikator kinerja terukur, khususnya pada sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang secara umum maupun per periode lima tahunan. Indikator disertai target capaiannya.
 - c. Indikator yang ditetapkan harus disertai definisi atau formula serta sumberdata yang digunakan untuk penhitungannya. Indikator kinerja serta targetnya harus memenuhi kriteria indikator yang baik, yaitu SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Continuesly improve)

- d. Perbedaan yang jelas antara indikator yang berhirarki. Indikator tujuan tidak boleh sama dengan indikator sasaran.
2. Rekomendasi untuk implementasi RPJPD periode selanjutnya
 - a. Sebagai sebuah proses teknokratik dan ilmiah, proses penyusunan dokumen rencana pembangunan membutuhkan data dan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan. Ketersediaan data yang lengkap dan valid dapat mempermudah evaluasi dan jika dilakukan dengan analisis yang akan memberikan informasi yang valid pula sebagai dasar pembuatan kebijakan, dalam hal ini rencana pembangunan, yang dapat dipertanggung jawabkan di masa mendatang. Karenanya, pembiasaan penyediaan data yang valid harus diupayakan seoptimal mungkin sejak dini. Pada proses penyusunan dokumen rencana dibutuhkan data realisasi indikator kinerja sebagai kinerja tahun awal rencana sekaligus sebagai acuan dalam menentukan target selama tahun/periode dokumen rencana. Karenanya, penetapan indikator yang SMART-C harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan kemudahan penyediaan datanya di masa mendatang. Semakin konsisten indikator kinerja yang dipergunakan selama periode perencanaan, maka akan semakin baik.
 - b. Saat rencana telah terimplementasi, maka pengendalian dan evaluasi (dalev), salah satunya melalui pengukuran capaian indikator kinerja saat dalev, harus dilakukan dengan rutin, continue, dan konsisten dalam menggunakan sumberdata dan formula penghitungannya. Dengan demikian akan terbangun database capaian indikator kinerja selama periode implementasi rencana pembangunan yang siap dievaluasi kapan pun.
3. Rekomendasi untuk substansi dalam RPJPD periode selanjutnya
 - a. Faktor penghambat yang telah teridentifikasi dalam evaluasi ini menjadi permasalahan atau isu prioritas (strategis) yang harus diselesaikan pada RPJPD periode selanjutnya. Pun demikian dengan faktor pendorong, harus menjadi strategi atau arah kebijakan yang harus direncanakan dan tertuang dalam dokumen RPJPD periode selanjutnya.

- b. Beberapa isu prioritas/strategis untuk RPJPD periode selanjutnya antara lain:
- (i) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari berbagai aspek/urusan atau dengan kata lain pembangunan manusia
 - (ii) Percepatan pembangunan sektor lain (industri dan jasa), khususnya yang berbasis pertanian, untuk memperkuat fundamental ekonomi Kabupaten Probolinggo di masa mendatang.
 - (iii) Percepatan pembangunan sarana prasarana wilayah hendaknya dilakukan secepatnya di masa mendatang. Bagaimana pun, ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai secara langsung atau tidak langsung akan memberikan multiplier effect bagi pengembangan ekonomi wilayah.
 - (iv) Urgensi implementasi pembangunan berwawasan lingkungan sehingga keberlanjutan pembangunan akan terjamin
 - (v) Keberpihakan pada wilayah atau kelompok termajinalkan
 - (vi) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pentahelix, sudah menjadi tuntutan. Demikian pula program pembangunan yang multi sektor sesuai kebutuhan pembangunan sudah menjadi keharusan. Pendekatan implementasi program pembangunan yang THIS (tematik, holistic, integratif, dan spasial) diharapkan mampu menghasilkan program yang komprehensif sesuai kebutuhan.
 - (vii) Perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui komitmen dan upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem tata kelola sesuai kebutuhan good dan clean governance yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- c. Perlu kehati-hatian untuk memasukkan dampak penyelenggaraan urusan yang bukan kewenangan kabupaten sebagai sasaran pembangunan jangka panjang baik secara umum maupun per periode/tahapan lima tahunan, misalnya terkait urusan keagamaan, keamanan, yustisi, maupun hubungan luar negeri. Bagaimana pun, saat penyelenggaraan urusan bukan menjadi kewenangan kabupaten, maka pemerintah daerah akan

kesulitan merencanakan dan mengimplementasikan upaya untuk mencapai sasaran tersebut.

- d. Memanfaatkan hasil identifikasi faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam format formulir 6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ sebagai isu strategis dan/atau strategi serta arah kebijakan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan yang terkait.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Pembangunan wilayah pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang ada di wilayah tersebut. Hal ini sesuai konsep *people centered development* atau pembangunan yang berpusat pada rakyat, di mana proses perencanaan pembangunan harus diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Karenanya, pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, proyeksi kondisi demografi selama periode perencanaan akan sangat penting. Bagaimana pun manusia atau penduduklah yang akan dilayani dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Berdasarkan pendekatan *people centered development* ini pula, pembangunan mengutamakan partisipasi rakyat/masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai objek atau sasaran pembangunan, namun juga harus terlibat sebagai pelaku (subjek) pembangunan yang turut serta dalam menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, pembangunan harus: (1) memberi kesetaraan atau keadilan antar golongan masyarakat dan gender; (2) mampu mendorong masyarakat mandiri dan sejahtera secara ekonomi maupun sosial; (3) memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat secara optimal dan berkelanjutan; serta (4) mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Karenanya, memahami proyeksi demografi selama periode perencanaan akan membantu memberikan pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui

pembangunan sehingga kesetaraan gender atau kelompok masyarakat serta partisipasi masyarakat tercipta dengan optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 menyebutkan beberapa permasalahan dunia yang sekaligus menjadi isu eksternal strategis untuk pencapaian visi Indonesia Emas Tahun 2045. Permasalahan dunia yang dimaksud adalah demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, dan perubahan geoekonomi. Pencapaian *sustainable development goals* di tahun 2030 menjadi keharusan demi menjaga keberlanjutan generasi mendatang. Ini mendorong perlunya inovasi pembangunan jangka panjang, tidak hanya menggunakan optimalisasi sumberdaya internal, tetapi juga eksternal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri 4.0 telah membawa pada konsekuensi *Society 5.0*, dimana perkembangan yang ada telah mengubah tatanan dunia secara destruktif.

Pada konteks penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo, proyeksi jumlah penduduk kabupaten selama periode perencanaan pun harus dilakukan. Proyeksi yang dilakukan adalah terhadap jumlah penduduk, baik laki-laki, perempuan, maupun total, serta berdasarkan golongan umur hingga tahun 2045. Berdasarkan informasi ini akan diketahui komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang memunculkan isu kebutuhan layanan pembangunan yang menjamin kesetaraan gender. Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur akan memperlihatkan kecenderungan piramida penduduk kabupaten yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan layanan sebagai implikasi dominasinya kelompok penduduk produktif, usia sekolah, usia balita, atau pun penduduk usia lanjut, serta rasio ketergantungan penduduk.

Tabel 2. 102
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

Jumlah Penduduk 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
	Tahun				
	2025	2030	2035	2040*	2045*
1.176,94	1.193,27	1.228,58	1.255,56	1,290.52	1,321.66

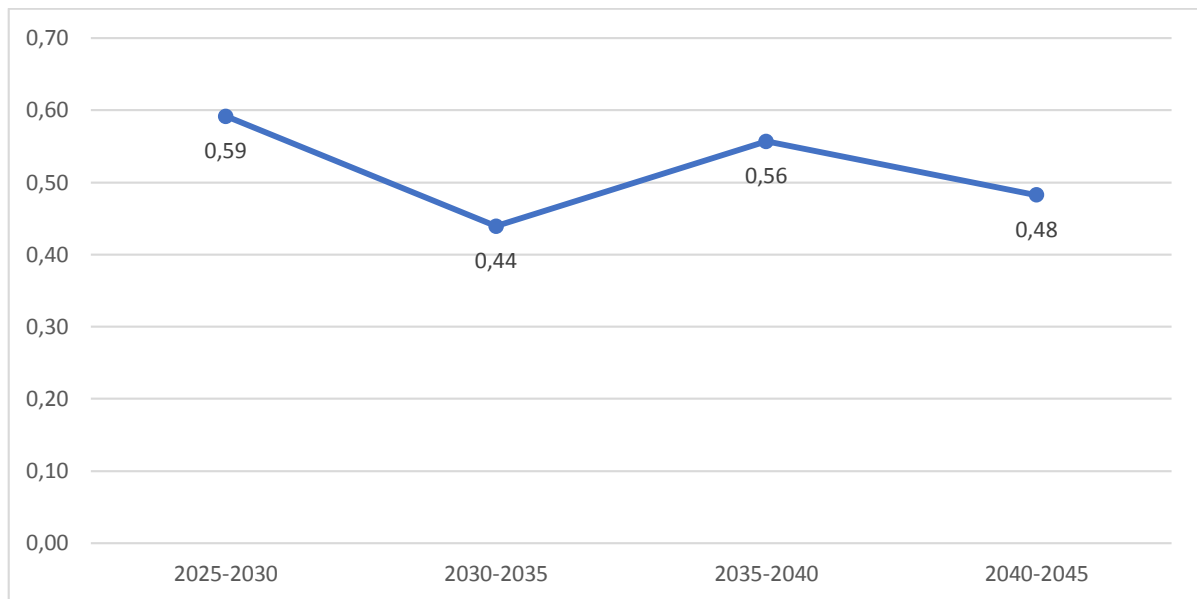
Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023

Keterangan : * Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur telah melakukan proyeksi penduduk di kabupaten/kota provinsi hingga tahun 2035. Untuk kepentingan proyeksi hingga tahun 2045, tim penyusun melanjutkan proyeksi melalui metode "*trend*" (pendekatan regresi linier) berdasarkan data historis dan proyeksi hingga tahun 2035.

Tabel 2.102 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo diperkirakan akan terus meningkat. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo sebanyak 1.159.965 jiwa dan di akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar 1.176.940 ribu jiwa, naik 16.975 jiwa atau 1,44% dari tahun sebelumnya. Pun demikian jumlah penduduk di lima titik tahun selama periode perencanaan terus meningkat, walaupun persentase pertumbuhannya diproyeksikan cenderung menurun, setidaknya dari tahun 2023 yang sebesar 1,44% maupun proyeksi tahun 2025-2030.

Gambar 2. 103
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045



Pertumbuhan penduduk diproyeksikan menurun (mengalami perlambatan) hingga tahun 2035. Metode proyeksi trend yang mempertimbangkan fluktuasi data historis menghasilkan perkiraan jumlah penduduk dengan pertumbuhan yang berfluktuasi pula. Perkiraan ini dapat dimaklumi karena komposisi penduduk di tahun 2035 yang didominasi oleh penduduk produktif, membuat peluang pertambahan penduduk pun meningkat. Walaupun demikian, pertumbuhan penduduk per tahun di periode tahun 2040-2045 tidak lebih tinggi dari periode 2025-2030 (Gambar 2.103).

Tabel 2. 103
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten
Probolinggo Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	580,87	588,82	605,34	617,14	633,50	647,66
Perempuan	596,07	604,45	623,24	638,42	657,02	674,00
Rasio	97,45	97,41	97,13	96,67	96,42	96,09

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023;
* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan kecenderungan jumlah perempuan semakin mendominasi. Rasio jenis kelamin yang cenderung menurun memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perempuan semakin tinggi, melebihi jumlah laki-laki. Hal ini berimplikasi bahwa dalam periode perencanaan, isu pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting dalam rangka penciptaan kesetaraan gender dalam pembangunan. Isu pelayanan kesehatan yang baik selama usia produktif perempuan hingga penciptaan keluarga sehat dan sejahtera juga muncul seiring dominasi perempuan di masa mendatang (Tabel 2.103).

Tabel 2. 104
Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum
Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	22,11	21,79	20,91	19,86	18,97	18,00
15-64 Tahun	68,92	68,58	67,57	66,54	65,56	64,54
> 65 Tahun	8,97	9,63	11,52	13,60	15,48	17,46
Angka Ketergantungan	2,22	2,03	2,00	1,96	1,90	1,82

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023;

* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memperlihatkan komposisi penduduk sebagaimana terlihat di Tabel 2.104 Proporsi penduduk usia 0-14 tahun diperkirakan terus menurun. Layaknya kecenderungan di negara maju, masyarakat di masa mendatang cenderung mempertahankan jumlah anak yang sedikit dalam keluarganya karena berbagai alasan. Sementara itu, perbaikan berbagai layanan kesehatan membuat usia harapan hidup semakin tinggi sehingga proporsi penduduk berusia lanjut terus meningkat. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan layanan jaminan sosial, khususnya bagi penduduk berusia lanjut.

Tabel 2.104 juga memperlihatkan bahwa perkembangan penduduk berusia produktif juga semakin tinggi, meskipun proporsinya cenderung menurun. Dengan proyeksi yang demikian, maka rasio atau angka ketergantungan penduduk non

produktif (usia 0-14 tahun serta >64 tahun) terhadap yang produktif (usia 15-64 tahun) semakin mengecil. Hal ini berimplikasi pada kondisi yang lebih baik jika penduduk usia produktif benar-benar produktif secara ekonomi. Karenanya, isu penyediaan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten atau berkualitas serta penyediaan kesempatan kerja di masa mendatang menjadi sangat penting agar dominasi penduduk produktif (bonus demografi) tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik.

Tabel 2. 105
Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal Kabupaten
Probolinggo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	1.176,94	1.193,27	1.228,58	1.255,56	1.288,09	1.316,92
Proyeksi Kebutuhan Rumah (ribu unit)*	333	338	348	356	365	373

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023;

* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Informasi proyeksi penduduk selanjutnya digunakan untuk memperkirakan berbagai kebutuhan sarana-prasarana yang secara langsung diperlukan oleh penduduk yang semakin meningkat. Diasumsikan bahwa rata-rata jumlah anggota rumahtangga di Kabupaten Probolinggo tetap sebesar sebesar 3.53 (data sensus penduduk tahun 2010) dan setiap rumah tangga membutuhkan rumah atau tempat tinggal sendiri, maka dapat diperkirakan jumlah rumahtangga sekaligus kebutuhan tempat tinggal selama periode perencanaan (Tabel 2.105). Implikasi dari informasi ini adalah kebutuhan layanan perumahan dan permukiman, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas perumahan yang menjamin lingkungan sehat bagi masyarakat.

Tabel 2. 106
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	1.176,94	1.193,27	1.228,58	1.255,56	1.288,09	1.316,92
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (juta liter)	25,774.99	26,132.61	26,905.90	27,496.76	28,318.98	29,024.97

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023;

* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Proyeksi penduduk pun dimanfaatkan untuk memperkirakan kebutuhan sarana-prasarana air minum maupun air bersih-nya di masa mendatang. Dengan asumsi kebutuhan air minum adalah sebesar 60 liter/orang/hari, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 tahun 2018, maka kebutuhan air minum tergambar pada Tabel 2.106. Implikasi dari hal ini adalah pada kebutuhan peningkatan daya dukung lingkungan, khususnya dalam penyediaan sumber air bersih, termasuk di dalamnya menjaga kualitas air, akan menjadi isu penting pada pembangunan di masa mendatang.

Tabel 2. 107
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	1.176,94	1.193,27	1.228,58	1.255,56	1.288,09	1.316,92
Jumlah Rumah (ribu unit)*	333	338	348	356	365	373
Proyeksi Kebutuhan Listrik*	585,492	593,616	611,182	624,603	643,280	659,317

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023;

* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Sarana prasarana penting lain yang dibutuhkan seiring dengan penduduk yang terus bertambah adalah listrik. Menurut Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, konsumsi listrik di Indonesia tahun 2022 sebesar 1.173 kWh/kapita, naik 4% dari tahun sebelumnya dan menjadi rekor tertinggi. Statistik PLN juga menyebutkan bahwa penggunaan listrik untuk rumah tangga adalah 42,41% di tahun 2022. Dengan demikian, konsumsi listrik per kapita untuk rumah tangga sekitar 497,46 kwh per kapita. Dengan asumsi konsumsi listrik per kapita tetap sebesar 497,46 kwh/kapita, maka Tabel 2.107 memperlihatkan kebutuhan tersebut. Implikasi dari informasi ini adalah kebutuhan layanan terhadap penyediaan sumberdaya energi yang juga semakin meningkat. Seiring dengan semakin terbatasnya sumber energi dari fosil serta upaya pemeliharaan lingkungan dari polusi akibat pemanfaatan energi dari fosil tersebut, maka isu lain terkait penyediaan listrik ini adalah kebutuhan akan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Tabel 2. 108
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten
Probolinggo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	1.176,94	1.193,27	1.228,58	1.255,56	1.288,09	1.316,92
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)*	354,405	359,322	369,957	378,081	389,385	399,093

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023;

* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Semakin banyak jumlah penduduk, maka aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan menghasilkan sampah yang semakin banyak pula. Sampah ini harus dikelola secara serius agar aktifitas manusia tidak menyebabkan degradasi lingkungan dan berimplikasi pada terancamnya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan asumsi timbulan sampah adalah 2,75 liter/orang/hari (sebagaimana disebutkan dalam SNI 19-3983-1995), maka Tabel 2.108 memperlihatkan bahwa volume timbulan sampah akan terus meningkat. Implikasinya adalah kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang baik, tidak hanya mengolah sampah yang timbul, namun juga mengurangi timbulan sampah.

Tabel 2. 109
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Probolinggo

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		Tahun				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	1.176,94	1.193,27	1.228,58	1.255,56	1.288,09	1.316,92
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
1. Rumah Sakit*	6	6	6	6	7	7
2. Fasilitas Kesehatan Lainnya *	334	341	351	359	368	376

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2023;

* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Pelayanan sosial penting lain yang harus disediakan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk adalah layanan kesehatan. Saat ini, Kabupaten Probolinggo memiliki 6 rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah, milik swasta, maupun rumah sakit ibu dan anak. Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk tahun proyeksi 2023 adalah sebesar 0.0510. Jika diasumsi rasio rumah sakit per 10.000 penduduk tetap seperti kondisi tahun 2023, maka kebutuhan jumlah rumah sakit dapat dilihat di Tabel 2.109. Tambahan rumah sakit dapat dilakukan pemerintah atau pun swasta. Walau pun demikian, peningkatan layanan rumah sakit tidak hanya dilihat dari jumlah rumah sakit semata, namun juga kuantitas dan kualitas layanan di rumah sakit yang ada. Jika pun tidak ada penambahan rumah sakit karena keterbatasan ruang, misalnya, maka peningkatan kuantitas dan kualitas dari rumah sakit yang ada bisa dijadikan alternative.

Pun demikian dengan penyediaan fasilitas kesehatan lain, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, dan poskendes. Jumlah fasilitas kesehatan di tahun 2023 sebanyak 334 unit. Dengan angka ini berarti rasio jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan lainnya adalah 1:3.524 (1 unit fasilitas kesehatan melayani 3.524 orang). Jika diasumsikan bahwa di masa mendatang setidaknya rasio fasilitas kesehatan dan penduduk sebesar 1:3.500, maka kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya dapat dilihat di Tabel 2.109. Untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo, maka penyediaan fasilitas kesehatan sekecil apa pun adalah keharusan, khususnya di daerah yang belum tersedia fasilitas ini,

Tabel 2. 110
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	1.176,94	1.193,27	1.228,58	1.255,56	1.288,09	1.316,92
Proyeksi Fasilitas Pendidikan*						
1. SMP / sederajat	436	442	455	465	477	488
2. SD / sederajat	1039	1053	1085	1108	1137	1163
3. TK/KB	911	924	951	972	997	1019

Sumber: BPS Jawa Timur, 2023;

* Proyeksi Bappeda Kabupaten Probolinggo, 2023.

Layanan penting lainnya dalam upaya pembangunan manusia adalah di bidang pendidikan. Hingga saat ini, kewenangan penyediaan layanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota adalah pada pendidikan tingkat menengah, dasar, bahkan pra sekolah (Taman Kanak-Kanak atau TK serta Kelompok Bermain atau KB). Berdasarkan data BPS Kabupaten Probolinggo, jumlah TK, SD, maupun SMP negeri maupun swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama tahun 2022 terlihat di kolom 2 Tabel 3.9. Dari data tersebut dapat dihitung rasio jumlah penduduk terhadap setiap jumlah fasilitas pendidikan ini. Dengan asumsi rasio tersebut tetap, maka Tabel 2.110 memperlihatkan proyeksi kebutuhan jumlah sekolah setiap jenjangnya.

Seperti fasilitas layanan kesehatan, penyediaan fasilitas pendidikan pun dapat disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Jika sumberdaya pemerintah terbatas, maka dapat dibuka kesempatan kepada stakeholders pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, misalnya dengan membuka sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah mengatur dalam pemberian izin penyelenggaraan serta turut menjamin mutu/kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak non pemerintah tersebut.

Selain itu, mutu layanan pendidikan seringkali diukur melalui rasio jumlah murid terhadap ruang kelas atau jumlah murid dengan jumlah guru. Peningkatan layanan pendidikan juga dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah ruang kelas dan/atau rombongan belajar, jika mendirikan sekolah baru dianggap lebih sulit. Walaupun demikian, penyediaan sekolah di wilayah-wilayah pelosok yang masih belum memiliki fasilitas jenjang pendidikan tertentu, misalnya jenjang SMP/ sederajat, masih menjadi keharusan untuk meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas pendidikan tersebut.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Salah satu tujuan pembangunan nasional maupun daerah adalah menciptakan pembangunan yang merata dan/atau adil, baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah. Karenanya, salah satu indikator penting kinerja pembangunan adalah tingkat kesenjangan antar kelompok masyarakat (diukur dengan Rasio Gini) maupun kesenjangan antar wilayah (yang dapat diukur melalui indeks Williamson). Keadilan dalam konteks pembangunan wilayah berarti pembangunan dan hasil-hasilnya harus terjadi dan dirasakan merata di seluruh pelosok daerah. Untuk itu, kebijakan pembangunan kewilayahan menjadi penting untuk memastikan pembangunan dapat merata di seluruh pelosok daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 juga harus memastikan adanya pemerataan atau keadilan pembangunan antar sub wilayah di seluruh kabupaten. Karenanya, berbagai rencana pengembangan wilayah harus dipertimbangkan dan diacu dalam perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan dalam RPJPD.

Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa dokumen rencana pembangunan jangka panjang maupun masterplan terkait pengembangan kewilayahan yang harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan masing-masing di masa mendatang. Pertama, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044 yang saat ini sedang menunggu proses penetapan. Kedua, dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2037. Ketiga, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2052. Keempat, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 – 2034. Dalam dokumen-dokumen tersebut telah diungkapkan tujuan dari kebijakan pembangunan masing-masing serta arah kebijakan dan strategi pengembangan selama periode rencana. Dokumen-dokumen tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan kewilayahan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) di setiap tahap pembangunan jangka panjang dalam rangka percepatan pembangunan wilayah.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044 menguraikan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki 3 (tiga)

Pusat Kegiatan. Pertama, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, ekonomi dan sosial. PKL yang dimaksud adalah: (1) Perkotaan Kraksaan dengan fungsi Pusat Pemerintahan dan pelayanan umum, Pendidikan, Perdagangan dan jasa, Perikanan, olahraga dan permukiman; (2) Perkotaan Leces dengan fungsi perdagangan dan jasa, pertanian, permukiman dan pariwisata; (3) Perkotaan Tongas dengan fungsi industry, perdagangan dan jasa, perikanan dan peternakan; dan (4) Perkotaan Dringu dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum, industry, perdagangan dan jasa, permukiman dan perikanan. Kedua, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat permukiman maupun pengembangan potensi kawasan tersebut. PPK melayani kegiatan skala kecamatan dan berlokasi di ibukota kecamatan. Terdapat 20 PPK yang berlokasi di 20 Ibu Kota Kecamatan (IKK) yang ada di Kabuapten Probolinggo, yaitu IKK Kecamatan Sumber, Tiris, Krucil, Sukapura, Kuripan, Bantaran, Tegalsiwalan, Gading, Bayuanyar, Maron, Lumbang, Wonomerto, Pakuniran, Krejengan, Besuk, Pajarakan, Sumberasih, Kotaanyar, dan Paiton. Ketiga, Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Probolinggo tersebar di seluruh desa. PPL memiliki sistem pelayanan berskala lokal yang meliputi beberapa sarana pendukung kegiatan masyarakat setempat (perdagangan dan jasa, pendidikan dasar dan menengah, serta kesehatan).

Gambar 2. 104.
Peta Pusat Pemukiman di Kabupaten Probolinggo



Sumber: RTRW Kabupaten Probolinggo 2024-2044

Untuk mendukung realisasi fungsi struktur tata ruang tersebut, dokumen RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 juga telah menetapkan rencana penataan sistem prasarana wilayah dengan dua pola yaitu: pertama peningkatan prasarana wilayah untuk melayani kebutuhan perkembangan saat ini dan kedua sistem prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Probolinggo dan meningkatkan keterkaitan antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah belakang di masa mendatang. Sistem prasarana perkotaan ini meliputi Sistem Jaringan Transportasi, Energi, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana lainnya.

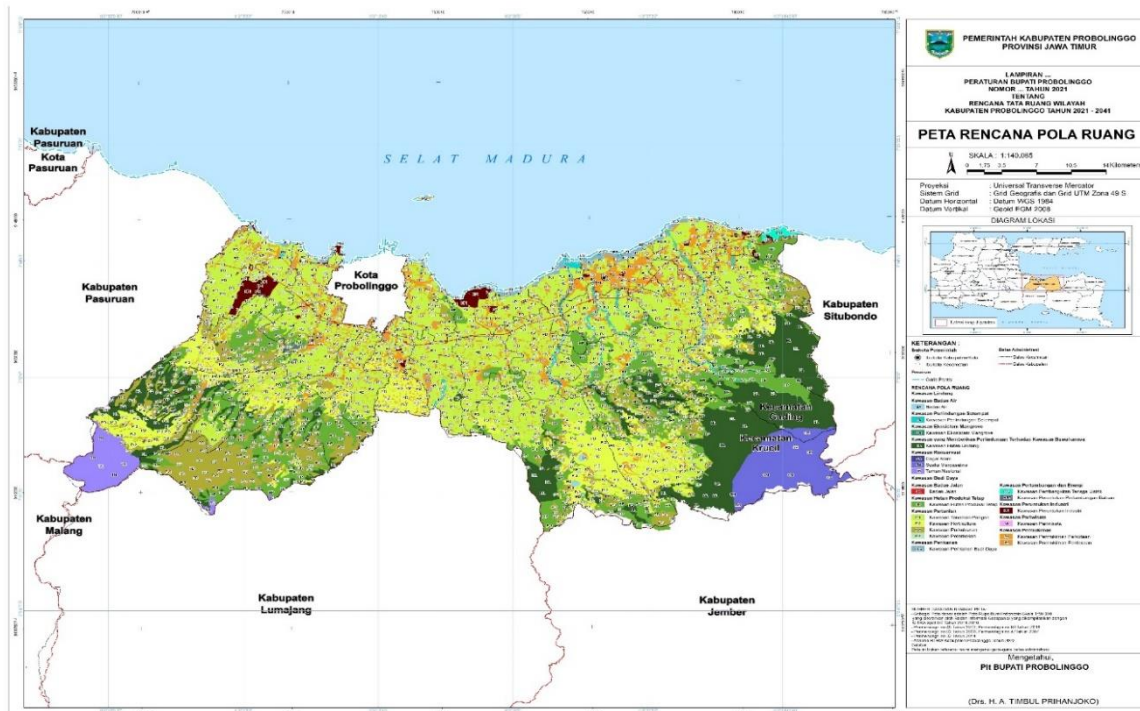
RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044 juga telah menetapkan Rencana pola ruang wilayah kabupaten, yaitu rencana distribusi peruntukan ruang wilayah untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Untuk fungsi lindung, telah ditetapkan Kawasan Lindung untuk Badan Air, Cagar Alam, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan setempat, Suaka Margasatwa, dan Taman Nasional yang menyebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Untuk fungsi budidaya, telah ditetapkan zonasi untuk Badan Jalan, kawasan hortikultura, hutan produksi tetap, pariwisata, pembangkit tenaga listrik, perikanan budidaya, perkebunan dan perkebunan rakyat,

permukiman perdesaan dan perkotaan, pertahanan dan keamanan, industri, pertambangan batuan, peternakan dan tanaman pangan. Penentuan kawasan budidaya ini juga menyebar di berbagai kecamatan sesuai potensinya. Gambar 4.2 memperlihatkan sebaran rencana kawasan lindung maupun budidaya di Kabupaten Probolinggo.

RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2043 juga megarahkan bahwa terdapat kawasan-kawasan strategis yang harus dikembangkan hingga tahun 2043, baik kawasan strategis karena kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya, pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, maupun karena fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis di Kabupaten Probolinggo dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah Kawasan Agropolitan dan Industri. Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo merupakan bagian kawasan strategis ekonomi propinsi (KSP) Jawa Timur, yaitu kawasan Sistem Agropolitan Bromo - Tengger - Semeru (BTS), meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Kawasan agropolitan di Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 2 yaitu wilayah pengembangan barat dan timur. Wilayah pengembangan barat yaitu Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas. Wilayah pengembangan bagian timur yaitu Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading. Ke-7 kecamatan ini merupakan wilayah sentra produksi pangan di Kabupaten Probolinggo.

Gambar 2. 105
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Probolinggo



Sumber: RTRW Kabupaten Probolinggo 2024-2044

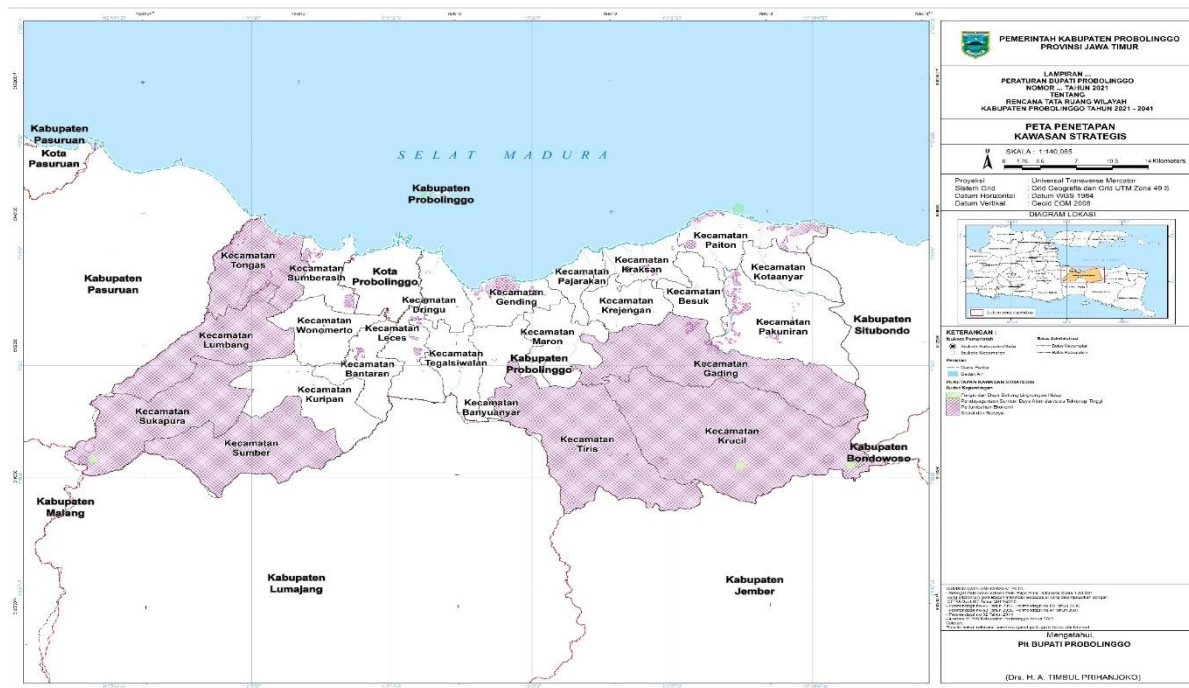
Terdapat Kawasan Industri di Kabupaten Probolinggo yang menjadi bagian KSP Jawa Timur, yaitu pusat industri pengolahan pupuk dan pengolahan hasil ikan di daerah Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas di Wilayah Pengembangan Barat, dan Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading di wilayah pengembangan timur. Sementara itu, kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo berupa kawasan industri estate, sentra industri kecil dan kawasan yang dikembangkan sebagai zona industri berkembang. Kawasan industri estate diarahkan di Kecamatan Tongas, Kecamatan Leces, Kecamatan Paiton, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Gading dan Kecamatan Pajarakan. Kawasan zona industri berkembang terdapat di Kecamatan Tongas dan Leces. Dokumen RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044 pun telah mengarahkan berbagai rencana pengembangan sarana prasarana untuk mendukung kawasan industri ini.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdapat di masyarakat Tengger yang hidup di lereng Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura

dan sekitarnya. Kawasan ini juga menjadi bagian pengembangan kawasan Bromo – Tengger – Semeru beserta permukiman adat Suku Tengger, Kawasan Strategis Propinsi (KSP) Jawa Timur berdasarkan aspek sosial budaya. Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada pengembangan mutu sumberdaya manusia dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dengan penguasaan ilmu dan teknologi, khususnya melalui pelayanan pendidikan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan social dan budaya terdapat juga terdapat di kawasan sekitar candi, yaitu Candi Jabung, Candi Kedaton dan reruntuhan makam Dewi Rengganis. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.

Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi di Kabupaten Probolinggo yang juga merupakan kawasan strategis propinsi (KSP) adalah PLTU Paiton yang terletak di Kecamatan Paiton dan Kawasan pengembangan potensial panas bumi di Dataran Tinggi Hyang. Pembangunan kedua kawasan ini pada pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi, tidak hanya di Jawa Timur, namun juga Jawa dan Bali di masa mendatang. Rencana pengembangan mencakup pengembangan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya. Direncanakan juga pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi energi mikrohidro di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu; Energi angin di wilayah kepulauan dan pesisir; Energi surya di wilayah perdesaan dan terpencil; Energi panas bumi di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu; serta Energi gelombang di wilayah pesisir.

Gambar 2. 106
Kawasan Strategis di Kabupaten Probolinggo



Sumber: RTRW Kabupaten Probolinggo 2024-2044

Sementara itu, rencana pengembangan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Probolinggo ini meliputi:

- Pengembangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Pekalen Sampean, Rondoningo, Pandanlaras, Kali Kertosono, Pancarglagas dan Kresek
- Pemeliharaan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang,
- Pemeliharaan kawasan konservasi Cagar Alam Sungai Kolbu dengan potensi berupa sumber air yang tidak pernah kering meskipun di musim kemarau
- Konservasi sumber daya air di Kecamatan Wonomerto, Kuripan, Bantaran, Leces dan Konservasi sumber daya alam di Kecamatan Sukapura, Lumbang, Tiris dan Krucil.
- Pelestarian kawasan resapan air hujan di lautan pasir TN-BTS untuk penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- Pelestarian terumbu karang di Pantai Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih dan gugusan karang Kranji Paiton yang merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut.

- g. Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Puncak Argopuro juga merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kabupaten Probolinggo memiliki dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2037. Dalam dokumen tersebut telah diuraikan rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2037, hingga perangkat daerah pelaksananya.

Terdapat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2052. yang memperlihatkan arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, arahan kegiatan yang direncanakan, target pelaksanaannya, hingga perangkat daerah penanggung jawab kegiatan tersebut dalam setiap tahap selama periode perencanaan. Tersedia pula dokumen Masterplan Drainase Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – 2037. Tabel 2. 112 memperlihatkan rencana kegiatan dalam rangka pembangunan drainase di Kabupaten Probolinggo di setiap tahap selama periode perencanaan.

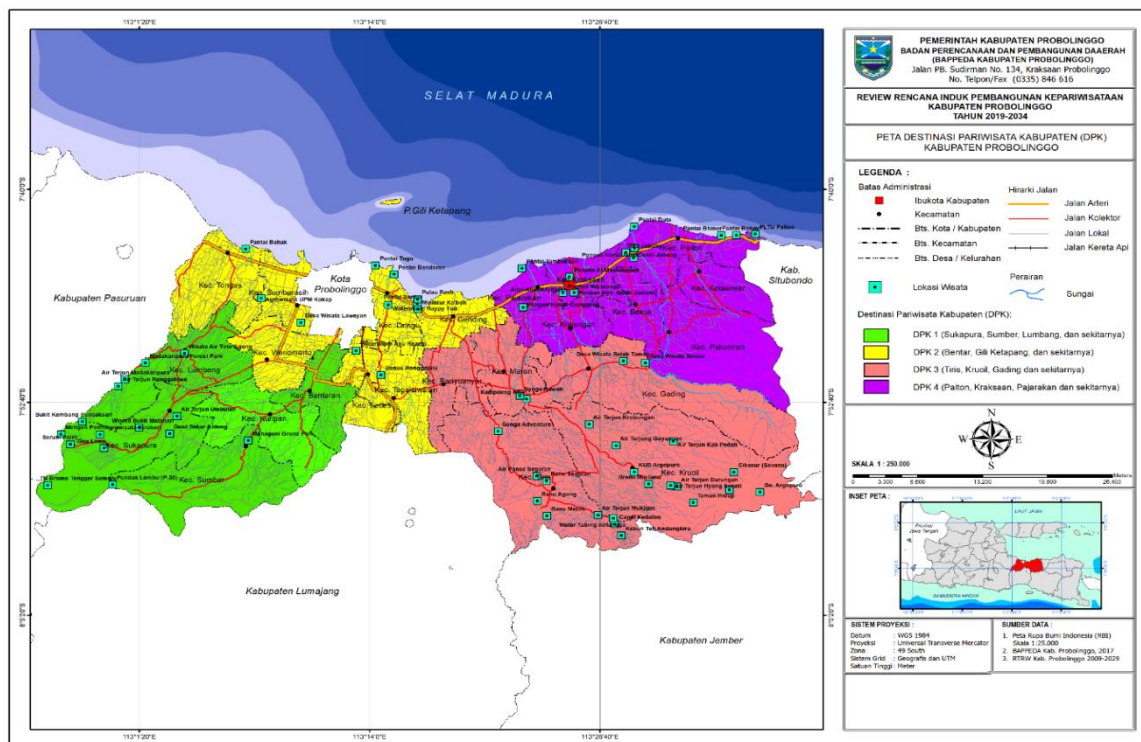
Kabupaten Probolinggo memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019 – 2034. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan klasifikasi wilayah Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Probolinggo, yaitu:

- a. DPK 1 Kecamatan Sukapura, Sumber Lumbang, Kuripan, dan Bantaran dengan Nama Sukapura, Sumber, Lumbang dan sekitarnya.
- b. DPK 2 kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Leces, Tegalsiwalan, dan Wonomerto dengan Nama Bentar, Giliketapang, dan Sekitarnya.
- c. DPK 3 Kecamatan Maron, Banyuanyar, Gading, Tiris, dan Krucil dengan Nama Tiris, Krucil, Gading dan Sekitarnya.
- d. DPK 4 Kecamatan Pajarakan, Kraksaan, Paiton, Besuk, Krejengan, Kotaanyar, Pakuniran dengan Nama Paiton, Kraksaan, Pajarakan dan sekitarnya.

Dokumen tersebut juga telah menguraikan indikasi program pembangunan yang harus dilakukan dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Probolinggo yang secara garis besar difokuskan pada empat hal, yaitu indikasi

program pembangunan DESTINASI PARIWISATA, PEMASARAN PARIWISATA, INDUSTRI PARIWISATA, dan KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN. Zonasi ke-empat DPK Probolinggo dapat dilihat pada Gambar 2.107. Dokumen ini pun secara detail telah menuangkan berbagai indikasi program dalam pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan yang dapat dilihat pada Bab XI dokumen tersebut.

Gambar 2. 107
Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Probolinggo



Sumber: RTRW Kabupaten Probolinggo 2024-2044

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

Tabel 2. 111
Tahapan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
1	Sistem Pusat Permukiman												
1.1	Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	- Perkotaan Kraksaan - Perkotaan Leces - Perkotaan Tongas - Perkotaan Dringu	APBD Provinsi dan CSR	Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat									
1.2	Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)	- IKK Kecamatan Sumber - IKK Kecamatan Tiris - IKK Kecamatan Krucil - IKK Kecamatan Sukapura - IKK Kecamatan Kuripan - IKK Kecamatan Bantaran - IKK Kecamatan Tegalsiwalan - IKK Kecamatan Gading - IKK Kecamatan Banyuanyar - IKK Kecamatan Maron - IKK Kecamatan Lumbang - IKK Kecamatan Wonomerto - IKK Kecamatan Pakuniran - IKK Kecamatan Krejengan - IKK Kecamatan Besuk - IKK Kecamatan Pajarakan - IKK Kecamatan Sumberasih - IKK Kecamatan Kotaanvar	APBD Kabupaten dan CSR	Dinas PUPR Kabupaten									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		▪ IKK Kecamatan Paiton										
1.3	Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Seluruh PPL di Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
1.4	Penyusunan RDTR	▪ Seluruh kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN dan Dinas PUPR Kabupaten								
2	Sistem Jaringan Transportasi											
2.1	Sistem Jaringan Jalan											
2.1.1	Jalan Umum											
1)	Pengembangan dan pemeliharaan jalan arteri primer	▪ Ruas batas Kota Pasuruan – batas Kabupaten Probolinggo ▪ Ruas BTS Kota Probolinggo-Paiton (BTS Kab Situbondo/Bhinor) ▪ Ruas Paiton (Bts. Kab.Probolinggo/binor)-buduan	APBN	Balai Besar Jalan Nasional, Kementerian PU								
2)	Jalan kolektor primer											
	• Pengembangan dan pemeliharaan jalan kolektor primer 1 (JKP-1)	▪ Ruas Lawean – Sukapura (Jl. Raya Sukapura (JKP-1)); ▪ Pelebaran Ruas BTS Kota Probolinggo - BTS Kab Lumajang (Jl. Raya Leces); ▪ Ruas BTS Kab Pasuruan – Pilang (BTS Kota Probolinggo); ▪ Ruas Tongas - Lumbang - Sukapura (JKP-2 / JKP-3); ▪ Ruas Jln. Bromo (Probolinggo) (JKP-1);	APBN	Balai Besar Jalan Nasional, Kementerian PUPR								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
		- Ruas Jln. Hamka (Probolinggo) (JKP-1); - Ruas Jln. Ir. Sutami (Probolinggo) (JKP-1);											
	Pengembangan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)	- Ruas Sukapura-lembahkuning - Ruas Sukapura-ngadisari - Ruas Sumber-Ledokombo - Ruas Kuripan-Sumber - Ruas Wonoasih-Bantaran - Ruas Bantaran-Kuripan - Ruas Patalan-Patokan - Ruas Leces-Bantaran - Ruas Paras-Klenang Kidul - Ruas Klenang Kidul Pesawahan - Ruas Pesawahan-Tiris - Ruas Condong-Segaran - Ruas Tiris-Tlogosari - Ruas Pesawahan - Bukor - Ruas Ranuagung - Andungbiru - Ruas Andungsari - Batas Jember - Ruas Tlogoargo - Andungsari - Ruas Condong – Manggisari - Ruas Manggisari - Tiris - Ruas Manggisari - Krucil - Ruas Krucil - Tambelang - Ruas Condong - Wangkal - Ruas Wangkal - Prasi	APBD Provinsi	Dinas PU Provinsi Jawa Timur									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		▪ Ruas Prasi - Pasarsenin ▪ Ruas Glagah - Pakuniran ▪ Ruas Pakuniran - Pasarsenin ▪ Ruas Gondosuli - Pakuniran ▪ Ruas Glagah - Talkandang ▪ Ruas Triwungan - Gondosuli ▪ Ruas Sumberrejo - Kotaanyar ▪ Ruas Kotaanyar - Sukorejo ▪ Ruas Paiton - Glagah ▪ Ruas Paiton Timur - Kotaanyar ▪ Ruas Paiton - Sumbercenteng ▪ Ruas Jabung - Besuk ▪ Ruas Besuk - Pasarsenin ▪ Ruas Besuk - Glagah ▪ Ruas Sukomulyo - Krejengan ▪ Ruas Semampir - Karangren ▪ Ruas Karangren - Wangkal ▪ Ruas Sidomukti - Karangren ▪ Ruas Kandangjati - Kandang sapi ▪ Ruas Klaseman - Maron ▪ Ruas Maron - Pekalen ▪ Ruas Klenang Kidul - Pekalen										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		- Ruas Pekalen - Condong - Ruas Pajarakon - Condong - Ruas Pekalen - Pesawahan - Ruas Pajurangan - Banyuanyar - Ruas Sumberagung - Sumbertosuko - Ruas Sepuhgembol - Purut - Ruas Tongas - Lumbang - Ruas Lumbang - Lumbang Kuning										
3)	Pembangunan, Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	- Ruas Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Krakasaan - Ruas jalan lingkar selatan di Kecamatan Kraksaan - Ruas Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Dringu										
4)	Jalan Lokal											
	Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Jalan Lokal Primer	1) Ruas Ngadisari - Cemoro Lawang 2) Ruas Jetak - Wonotono 3) Ruas Ngadisari - Laut Pasir 4) Ruas Puncaksari - Sukapura 5) Ruas Sukapura - Sumber 6) Ruas Sukapura - Ledokombo 7) Ruas Jatisari - Sumber	APBD Kabupaten,	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		8) Ruas Tempuran - Cempoko										
		9) Ruas Wonokerso - B30										
		10) Ruas Gepung - Kuripan										
		11) Ruas Karanganyar - Jatisari - Wonoasri										
		12) Ruas Kedungrejo - Gunung Tugel										
		13) Ruas Bantaran - Gunung Tugel										
		14) Ruas Jorongan - Sumberbulu										
		15) Ruas Jorongan - Kerpangan										
		16) Ruas Kerpangan - Leces										
		17) Ruas Clarak - Sumberbulu										
		18) Ruas Liprak Kidul - Rejing										
		19) Ruas Tulupari - Pedagangan										
		20) Ruas Ranuagung - Ranu										
		21) Ruas Segaran - Air Panas										
		22) Ruas Krucil - Tambelang										
		23) Ruas Kertosuko - Krucil										
		24) Ruas Krobungan - Krucil										
		25) Ruas Krucil - Pandanlaras										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		26) Ruas Krobungan - Pandanlaras 27) Ruas Kertosuko - Tiris 28) Ruas Tengah - Dua Tambelang 29) Ruas Bremsi - Kalianan 30) Ruas Bremsi - Air Terjun 31) Ruas Kalianan - Plaosan 32) Ruas Guyangan - Duran 33) Ruas Duran - Air Terjun 34) Ruas Wangkal - Krobungan 35) Ruas Prasi - Pandanlaras 36) Ruas Sentul - Betek Taman 37) Ruas Betek Taman - Batur 38) Ruas Bima - Bucor Wetan 39) Ruas Bucor Kulon - Sambirampak Kidul 40) Ruas Sukorejo - Blimbing 41) Ruas Sambirampak Lor - Sidorejo 42) Ruas Kedungrejoso - Talkandang 43) Ruas Kedungrejoso - Pandean 44) Ruas Sukorejo - Tambakukir										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		45) Ruas Jabung Wetan - Kalikajar Kulon										
		46) Ruas Randumerak - Karanganyar										
		47) Ruas Jabung Sisir - Candi										
		48) Ruas Sumberanyar - Lapangan Tembak										
		49) Ruas Karanganyar - Pandean										
		50) Ruas Besuk - Kedungcaluk										
		51) Ruas Jambangan - Kecik										
		52) Ruas Matekan - Rangkang										
		53) Ruas Sentong - Pondok										
		54) Ruas Asembakor - Alassumur Kulon										
		55) Ruas Sumberlele - Kebonagung										
		56) Ruas Kebonagung - Alassumur Kulon										
		57) Ruas Sidomukti - Bulu										
		58) Ruas Patemon - Jatiurip										
		59) Ruas Temenggungan - Selogudig Wetan										
		60) Ruas Karanggeger - Karangbong										
		61) Ruas Klaseman - Karangbong										
		62) Ruas Sukomulyo - Penambangan										
		63) Ruas Sukomulyo -										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Rondokuning										
		64) Ruas Tanjung - Pajarakan Kulon										
		65) Ruas Klenang Lor - Maron										
		66) Ruas Klenang Lor - Klenang Kidul										
		67) Ruas Brani Wetan - Wonorejo										
		68) Ruas Maron - Brani Kulon										
		69) Ruas Wonorejo - Pendil										
		70) Ruas Sebaung - Pendil										
		71) Ruas Sebaung - Sumberkerang										
		72) Ruas Gending - Sebaung										
		73) Ruas Sebaung - Klenang Lor										
		74) Ruas Brumbungan Lor - Brumbungan Kidul										
		75) Ruas Klaseman - Karangpranti										
		76) Ruas Bulang - Pegalangan Kidul										
		77) Ruas Randupitu - Sebaung										
		78) Ruas Jatiadi - Ketompen										
		79) Ruas Ngepoh - Sumberkerang										
		80) Ruas Ngepoh - Batas Kota										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		81) Ruas Sumberbulu - Sumberkledung										
		82) Ruas Malasan Wetan - Gunung Bekel										
		83) Ruas Oleran - Gunung Bekel										
		84) Ruas Blado Kulon - Tegalmojo										
		85) Ruas Tegalsiwalan - Sumberkedawung										
		86) Ruas Banjarsari - Mentor										
		87) Ruas Lemah Kembar - Muneng										
		88) Ruas Muneng - Tunggak Cerme										
		89) Ruas Pesisir - Sumurmati										
		90) Ruas Banjarsari - Sumendi										
		91) Ruas Jangur - Laweyan										
		92) Ruas Menyono - Wringin Anom										
		93) Ruas Pohsangit Tengah - Tunggak Cerme										
		94) Ruas Sepuhgembol - Pohsangit Tengah										
		95) Ruas Kropak - Pohsangit Tengah										
		96) Ruas Pohsangit Leres - Pohsangit Tengah										
		97) Ruas Muneng - Sumurmati										
		98) Ruas Tunggak Cerme										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		- Wonorejo 99) Ruas Jrebeng - Wonorejo 100) Ruas Tambakrejo - Lumbang 101) Ruas Ambulu - Purut 102) Ruas Dungun - Wringianom 103) Ruas Tongas Kulon - Tongas Wetan 104) Ruas Wringianom - Ambulu 105) Ruas Tongas Wetan - Lumbang Ketangi 106) Ruas Tongas Wetan - Klampok 107) Ruas Krajan - Tambak Rejo - Bulak 108) Ruas Curah Dringu - Pantai Bahak 109) Ruas Lambang Kuning - Sapih 110) Ruas Boto - Lumbang 111) Ruas Branggah - Kunci 112) Ruas Sapih - Puncaksari 113) Ruas Lambang Kuning - Wonogoro 114) Ruas Lumbang - Madakaripura										
	Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Jalan Lokal Sekunder	1) Jl. Keliling Sukapura 2) Jl. Pasar Sukapura 3) Jl. ngadas 4) Ruas Ngadisari - Seruni Point	APBD Kabupaten	Dinas PUPR								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		5) Jl. Wonotoro 6) Jl. Cecep 7) Jl. Wonokerto 8) Jl. Pelita 9) Jl. Kyai Sari 10) Ruas Sumberkedawung - Ronggojalu 11) Jl. Sumberkedawung 12) Jl. Imam Bonjol 13) Jl. Pahlawan 14) Jl. Pasar 15) Jl. Pati Unus 16) Jl. Diponegoro 17) Jl. Jalan Dr. Wahidin 18) Jl. Lece 19) Jl. Perumahan 20) Jl. Tigasan Wetan 21) Jl. Pattimura 22) Jl. Letjen Haryono 23) Jl. Letjen Suparman 24) Jl. Sultan Agung 25) Jl. Teuku Umar 26) Jl. Hasanuddin 27) Jl. Letjen Suprpto 28) Jl. Bulu 29) Jl. Ra Kartini 30) Jl. Wr Supratman 31) Jl. Achmad Yani 32) Jl. Diponegoro 33) Jl. Di. Panjaitan 34) Jl. Imam Bonjol 35) Jl. Mayjen Sutoyo 36) Jl. Alun-Alun Barat 37) Jl. Alun-Alun Timur 38) Jl. Alun-Alun Utara										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		39) Jl.Rengganis 40) Jl.Ir. Juanda 41) Jl.Yos Sudarso 42) Jl.Sidopekso 43) Jl.Trunojoyo 44) Jl.Brigjen Katamso 45) Jl. Kampung Melayu 46) Jl. Dr. Wahidin 47) Jl. Dr. Sutomo 48) Jl. Dr. Moch.Saleh 49) Jl. Suroyo 50) Jl. Argopuro 51) Jl. Rangkang 52) Ruas Randuputih – Dringu 53) Jl.Yos Sudarso 54) Jl. Wonosari 55) Jl. Pramuka I 56) Jl. Pramuka li 57) Jl. Mawar Melati 58) Ruas Kedungdalem – Dringu 59) Jl. Randuputih 60) Jl. Pegadaian 61) Jl. Kalisalam 62) Jl. R.Suroyo 63) Jl. Kalirejo 64) Jl.Tegalrejo – Tamansari 65) Jl. Kedungdalem – Tegalrejo 66) Jl. Kedungbajul 67) Jl. Gentengan 68) Jl. Tegalrejo - Mranggon Lawang 69) Jl. Pasar										

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4)	Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Jalan Lingkungan	Seluruh jalan lingkungan di Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, APBD Desa , CSR	Dinas PUPR Kabupaten, Desa, Swasta, Masyarakat								
5)	Pengembangan dan peningkatan jalan khusus	Seluruh jalan khusus di Kabupaten Probolinggo	Pemerintah Provinsi, CSR	Pemerintah Provinsi/Masyarakat dan Swasta								
8)	Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan	Seluruh jaringan jalan di Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
10)	Pengembangan dan pemeliharaan jalan penghubung ke Kawasan Industri	Kawasan Industri Gending, Kawasan Industri Paiton, Kawasan industri Tongas, Kawasan Industri Kraksaan	APBD Kabupaten, CSR	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
2.1.2	Pembangunan Jalan Tol	- Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi - Jalan Tol Probolinggo-Lumajang	APBN, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, BUMN, Swasta								
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Tol	- Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo - Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi - Jalan Tol Probolinggo-Lumajang	APBN, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, BUMN, Swasta								
2.1.3	Pengembangan Terminal Penumpang											
1)	Peningkatan terimal tipe C ke terminal penumpang tipe B	Terminal Sumberlele	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
2)	Pengoptimal terminal penumpang tipe C	- Terminal angkot jorongan di Desa Jorongan Kecamatan Leces, - Terminal Sukapura di Desa Watulumpang Kecamatan Sukapura	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten								
3)	Pengoptimalan trayek angkutan umum perkotaan dan	Seluruh wilayah di Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	perdesaan			PUPR Kabupaten								
4)	Pengembangan moda angkutan umum	Seluruh wilayah di Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten								
2.1.4	Pengembangan Tempat Parkir Khusus											
	Pengembangan tempat parkir khusus berupa untuk mengakomodir terminal barang	Tempat parkir khusus di Kecamatan Tongas, Kecamatan Dringu, Kecamatan Paiton.	APBN, APBD /Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan dan Swasta								
2.1.5	Pengembangan Jembatan											
	Pengembangan, Optimalisasi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan	a. Kecamatan Bantaran; b. Kecamatan Banyuanyar; c. Kecamatan Besuk; d. Kecamatan Dringu; e. Kecamatan Gading; f. Kecamatan Gending; g. Kecamatan Kotaanyar; h. Kecamatan Kraksan; i. Kecamatan Krejengan; j. Kecamatan Krucil; k. Kecamatan Kuripan; l. Kecamatan Leces; m. Kecamatan Lumbang; n. Kecamatan Maron; o. Kecamatan Pajarakan; p. Kecamatan Pakuniran; q. Kecamatan Sukapura; r. Kecamatan Sumber; s. Kecamatan Sumberasih; t. Kecamatan Tegalsiwalan; u. Kecamatan Tiris; v. Kecamatan Tongas; dan w. Kecamatan Wonomerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten,								
2.1.6	Sistem Jaringan Kereta Api											

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1)	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum: - Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota yaitu ruas jalan Surabaya (Gubeng) - Sidoarjo - Bangil - Pasuruan - Probolinggo - Jember - Banyuwangi - pengembangan konservasi rel mati jalur Jati – Probolinggo – Paiton dan Jalur kereta api menuju Pelabuhan Probolinggo (Kota) - Percepatan Pengembangan jaringan jalur kereta api ganda : Surabaya (Gubeng) - Sidoarjo - Bangil - Pasuruan - Probolinggo - Jember – Banyuwangi - pengembangan konservasi rel mati Banjarsari - Probolinggo	APBN, PT KAI, KPBU	Kementerian Perhubungan, Swasta, BUMN, PT KAI								
2)	Pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Kereta Api	- Pengembangan Stasiun penumpang Bayeman, - Pengembangan Stasiun penumpang Leces, - Pengembangan Stasiun penumpang Malasan;	APBN, PT KAI, KPBU	Kementerian Perhubungan, Swasta, BUMN, PT KAI								
3)	Pengembangan dan Optimalisasi Stasiun Penumpang	Kabupaten Probolinggo	APBN, PT KAI, KPBU	Kementerian Perhubungan, Swasta, BUMN, PT KAI								
4)	reaktivasi rel Jalur Kereta Api Antarkota	jalur Jati – Probolinggo – Paiton dan Jalur kereta api	APBN, PT KAI, KPBU	Kementerian Perhubungan, Swasta,								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		menuju Pelabuhan Probolinggo (Kota)		BUMN, PT KAI								
2.1.7	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan											
1)	Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau penyeberangan	Pelabuhan Penyebrangan Gili Ketapang Kelas II	APBN, APBD Provinsi, KPBU	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan								
2)	Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut ▪ Pelabuhan Pengumpan lokal Kalibuntu di Kecamatan Kraksaan ▪ Pelabuhan Pengumpan lokal Giliketapang ▪ Pelabuhan pengumpan lokal paiton ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Randu Putih Kecamatan Dringu, ▪ Pelabuhan perikanan pantai paiton, ▪ Pelabuhan Perikanan Nusantara Paiton di Kecamatan Paiton ▪ Terminal Khusus Paiton ▪ Terminal Khusus Pelabuhan PLTU Paiton	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPBU	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta								
2.1.8	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan berupa pelabuhan kelas 2	Pelabuhan Penyebrangan gili Ketapang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan								
2.1.9	Penataan di sekitar kawasan pelabuhan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten								
3	Sistem Jaringan Energi											
3.1	Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi											

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - Konsumen	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Leces, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Tongas, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton	Kementerian ESDM, BUMN	PLN dan Swasta								
3.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan											
3.2.1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung											
1)	Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Kabupaten Probolinggo	APBN, KPBU, PLN	PLN dan Swasta								
2)	Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik tenaga UAP (PLTU)	PLTU Paiton Di Kecamatan Paiton	APBN, KPBU	PLN dan Swasta								
3)	Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berada di Pegunungan iyang Probolinggo di Kecamatan Krucil dan Kecamatan Tiris	APBN, KPBU	PLN dan Swasta								
4)	Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Pulau gili ketapang Kecamatan Sumberasih	APBN, KPBU	PLN dan Swasta								
5)	Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading	APBN, KPBU	PLN dan Swasta								
6)	Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit listrik lainnya berupa PLTBm (PG Gending (PTPN XI))	PLTBm (PG Gending (PTPN XI)) di Kecamatan Gending.	APBN, KPBU	PLN dan Swasta								
	Pengembangan dan	PLTBm PG Wonolangan	APBN, KPBU	PLN dan Swasta								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Pemeliharaan PLTBm PG Wonolangan (PTPN XI)											
	Pengembangan dan Pemeliharaan PLTBm PG Padjarakan (PTPN XI)	PLTBm PG PG Padjarakan	APBN, KPBU	PLN dan Swasta								
3.3	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung											
3.3.1	Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem											
1)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Paiton-Grati	Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Leces, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Dringu, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Pajarakan Kecamatan Krejengan Kecamatan Besuk Kecamatan Pakuniran Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
2)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Paiton-Kediri	Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Leces, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Pajarakan Kecamatan Krejengan Kecamatan Besuk Kecamatan Pakuniran Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Gading										
3)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Gondang Wetan- Probolinggo	Kecamatan Tongas dan Kecamatan Sumberasih	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
4)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Probolinggo-Lumajang	Kecamatan Leces, Kecamatan Tegalsiwalan	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
5)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Probolinggo-Kraksaan	Kecamatan Dringu, Kecamatan Leces, Kecamatan Gending,	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
6)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Kraksaan-Gending	Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Maron, Kecamatan Gending	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
7)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Paiton-Kraksaan	Kecamatan Krejengan, Kecamatan Besuk, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
8)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Paiton- Kalipuro	Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
9)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi SUTT 500kV PITON-PEC	Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
10)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi SUTET 500kV PITON-JAPO	Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
3.3.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik											
1)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran	Kabupaten Probolinggo	APBN, BUMN	PLN dan Swasta								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Udara Tegangan Menengah (SUTM)											
2)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kabupaten Probolinggo	APBN, BUMN	PLN dan Swasta								
3.3.3	Gardu Listrik											
1)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Gardu induk 500 Kv berupa GITET Paiton	Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
2)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Gardu Induk 150 Kv	Kecamatan Gending, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Tongas	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
3)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi GI 150 kV Paiton	Kecamatan Paiton	APBN, KPBU, BUMN	PLN dan Swasta								
4)	Pengembangan alternatif pembangkit sumber tenaga baru	Probolinggo	APBN, KPBU, BUMN	PLN, Swasta, Masyarakat								
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
4.1	Jaringan Tetap											
1)	Pengembangan Jaringan Telepon <i>Fix Line</i>	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Leces, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Tongas, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Besuk, Kecamatan Krejengan,	BUMN, KPBU	BUMN, Swasta								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Maron.										
4.2	Jaringan Bergerak											
1)	Pengembangan dan pemeliharaan Tower Telekomunikasi Nirkabel / BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)	Kecamatan Bantaran, Kecamatan Banyuwang, Kecamatan Besuk, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gading, Kecamatan Gending, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Krucil, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Leces, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajajaran, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Tiris, Kecamatan Tongas, Kecamatan Wonomerto	SPBN, BUMN, KPBU	Kemneterian Komunikasi dan infomasi, BUMN, Swasta								
2)	Pengembangan wifi pada kawasan publik (taman, sekolah, dll)	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, BUMN, Sumber pembiayaan lain	Pemerintah Kabupaten, PT Telkom, Swasta								
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
5.1	Sistem Jaringan Irigasi											
1)	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Pusat	Daerah Irigasi Pakelan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2)	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	- Daerah Irigasi Gladak - Daerah Irigasi Kedunggaleng	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		- Daerah Irigasi Legundi - Daerah Irigasi Sumber Kareng - Daerah Irigasi Randu - Daerah Irigasi Arah Makam - Daerah Irigasi Jeruk Taman - Daerah Irigasi Krasak - Daerah Irigasi Mbok Siti - Daerah Irigasi Pakis - Daerah Irigasi Ramah Bawah - Daerah Irigasi Sbr. Bondo Jeruk - Daerah Irigasi Taposan - Daerah Irigasi Topi		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas PUPR								
3)	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	- Daerah Irigasi Gladak - Daerah Irigasi Kedunggaleng - Daerah Irigasi Legundi - Daerah Irigasi Sumber Kareng - Daerah Irigasi Randu	APBD	Dinas PUPR, Dinas Pertanian								
4)	Optimalisasi jaringan irigasi pada kawasan pertanian	Kabupaten Probolinggo	APBD	Dinas PUPR, Dinas Pertanian								
5)	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	- Kecamatan Banyuwang, Kecamatan Besuk, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gading - Kecamatan Gending - Kecamatan Kotaanyar - Kecamatan Kraksaan - Kecamatan Krejengan - Kecamatan Krucil - Kecamatan Leces	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Pertanian								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		- Kecamatan Maron - Kecamatan Paiton - Kecamatan Pajarakon - Kecamatan Pakuniran - Kecamatan Sumberasih - Kecamatan Tegalsiwalan - Kecamatan Tongas - Kecamatan Wonomerto										
6)	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	- Kecamatan Bantaran - Kecamatan Banyuwang - Kecamatan Besuk - Kecamatan Dringu - Kecamatan Gading - Kecamatan Gending - Kecamatan Kotaanyar - Kecamatan Kraksaan - Kecamatan Krejengan - Kecamatan Krucil - Kecamatan Kuripan - Kecamatan Leces - Kecamatan Lumbang - Kecamatan Maron - Kecamatan Paiton - Kecamatan Pajarakon - Kecamatan Pakuniran - Kecamatan Sukapura - Kecamatan Sumber - Kecamatan Sumberasih - Kecamatan Tegalsiwalan - Kecamatan Tiris - Kecamatan Tongas - Kecamatan Wonomerto	APBD Kab, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Pertanian								
5.2	Bangunan Pengendalian Banjir											
	Pengembangan, pemeliharaan dan optimalisasi bangunan	- Kecamatan Gading - Kecamatan Gending	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	pengendalian banjir berupa Embung, pintu air, tangkis laut	▪Kecamatan Kotaanyar ▪Kecamatan Krejengan ▪Kecamatan Krucil ▪Kecamatan Kuripan ▪Kecamatan Lumbang ▪Kecamatan Maron ▪Kecamatan Pakuniran ▪Kecamatan Sukapura ▪Kecamatan Sumber ▪Kecamatan Tiris ▪Kecamatan Tongas	Kabupaten	Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas PUPR								
5.2	Bangunan Sumber Daya Air											
1)	Pengembangan, pemeliharaan dan optimalisasi Bangunan Sumber Daya air berupa Bendungan	▪ Bendungan Pakelan di Kecamatan Pajarakan ▪ Bendungan Ampoh di Kecamatan Gading	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas PUPR								
2)	Pengembangan, pemeliharaan dan optimalisasi Bangunan Sumber Daya air untuk pengendali banjir berupa pintu air, dan DAM	▪ Kecamatan Bantaran; ▪ Kecamatan Banyuwanyar; ▪ Kecamatan Besuk; ▪ Kecamatan Dringu; ▪ Kecamatan Gading; ▪ Kecamatan Gending; ▪ Kecamatan Kotaanyar; ▪ Kecamatan Kraksaan; ▪ Kecamatan Krejengan; ▪ Kecamatan Krucil; ▪ Kecamatan Kuripan; ▪ Kecamatan Leces; ▪ Kecamatan Lumbang; ▪ Kecamatan Maron; ▪ Kecamatan Paiton; ▪ Kecamatan Pajarakan; ▪ Kecamatan Pakuniran;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas PUPR								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		- Kecamatan Sumber; - Kecamatan Sumberasih; - Kecamatan Tegalsiwalan; - Kecamatan Tongas; dan - Kecamatan Wonomerto										
6	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
6.1	Sistem Penyediaan Air Minum											
6.1.1	Jaringan Perpipaan											
1)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Unit Air Baku	- Mata air ronggojalu Kecamatan Tegalsiwalan, - Mata air Kolbek Kecamatan Banyuwangi, - Mata Air Ranon di Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran - memanfaatkan danau ranu agung, danau segaran, danau merah di Kecamatan Tiris	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas PUPR, PDAM								
2)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Unit Produksi	- Unit Leces melayani Kecamatan Leces dan Kecamatan Tegalsiwalan - Unit sumber melayani Kecamatan Sumber - Unit bantaran melayani Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Bantaran - Unit Patalan melayani Kecamatan Sumberasih, dan Kecamatan Wonomerto - Unit Sukarpura melayani Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Lumbang - Unit Kraksaan melayani Kecamatan Kraksaan dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas PUPR, PDAM								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Pajarakon ▪ Unit Condong melayani Kecamatan Maron, Kecamatan Tiris dan Kecamatan Gading ▪ Unit Besuk melayani Kecamatan Besuk ▪ Unit Dringu melayani Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Sumberasih ▪ Unit Tirsi melayani Kecamatan Tiris ▪ Unit Pedagangan melayani Kecamatan Tiris ▪ Unit Tongas melayani Kecamatan Tongas ▪ Unit maron melayani Kecamatan Maron ▪ Unit Krucil Melayani Kecamatan Krucil ▪ Unit Gili Ketapang Melayani pulau Gili Ketapang										
3)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi Unit Distribusi ▪ Pengembangan Unit Distribusi SPAM Probolinggo-Lumajang dengan memanfaatkan mata air ronggojalu ▪ Pengembangan Unit Distribusi jaringan perpipaan PDAM. ▪ pengembangan Unit distribusi berupa Himpunan Penduduk	▪ Pengembangan Unit Distribusi SPAM Probolinggo-Lumajang-Kota Probolinggo dengan memanfaatkan mata air ronggojalu ▪ Pengembangan Unit Distribusi jaringan perpipaan PDAM pada Kecamatan Gading, Kotaanyar, Paiton, Kraksaan, Krejengan, Maron, Tegalsiwalan,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas PUPR								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
	Pengguna Air Minum (HIPPAM)	Bantaran, Sumberasih, Wonomerto, Lumbang, Pajarakan, Gending, dan Besuk. ▪ Pengembangan unit distribusi jaringan perpipaan PDAM pada Pulau Gili Ketapang di Kecamatan Sumberasih ▪ pengembangan Unit distribusi berupa Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) pada Kecamatan Paiton, Tiris, Besuk, Tegalsiwalan, Bantaran, Wonomerto, Pajarakan, Sukapura, Kuripan, Sumber, dan Kraksaan											
4)	Pengelolaan dan pelestarian air tanah	Kabupaten Probolinggo	APBD	Dinas PUPR									
6.1.2	Jaringan Non Perpipaan												
1)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi jaringan non perpipaan	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, BUMN, BUMD	Kementerian Pekerjaan Umum perumahan rakyat, PDAM									
6.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)												
1)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berupa 50 IPAL Kawasan Permukiman	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD, CSR	Dinas PUPR, Swasta dan Masyarakat									
2)	Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD, CSR	Dinas PUPR, Swasta dan Masyarakat									
3)	Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Probolinggo	APBN, APBD, CSR	Dinas PUPR, Swasta dan Masyarakat									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
6.3	Sistem Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3)												
1)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi pembangunan pusat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3)	Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Dringu, Kecamatan Tongas dan Kecamatan Gending	APBN, APBD, CSR	Dinas PUPR, Swasta dan Masyarakat									
6.4	Sistem Jaringan Persampahan												
1)	Pengembangan TPA	- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional di Kecamatan Krejengan - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leces di Kecamatan Leces - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lumbang di Kecamatan Lumbang	APBN, APBD	KLHS, DLH									
3)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Optimalisasi TPS	- Kecamatan Bantaran, - Kecamatan Banyuwang, - Kecamatan Besuk, - Kecamatan Dringu, - Kecamatan Gending, - Kecamatan Kotaanyar, - Kecamatan Kraksaan, - Kecamatan Leces, - Kecamatan Maron, - Kecamatan Paiton, - Kecamatan Pajarakan, - Kecamatan Sukapura, - Kecamatan Sumberasih, - Kecamatan Tongas, - Kecamatan Wonomerto	APBD, CSR	DLH, Swasta dan Masyarakat									
4)	Optimalisasi TPST 3R	TPST Sumberkedawung	APBD, CSR	DLH, Swasta dan Masyarakat									
5)	Pengembangan TPST 3R	Probolinggo (desa-desa diluar perkotaan yang belum	APBN, APBD, CSR	DLH, Swasta dan Masyarakat									

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		terjangkau)										
6)	Sosialisasi dan implementasi konsep <i>zero waste</i>	Probolinggo	APBN, APBD, CSR	DLH, Swasta dan Masyarakat								
6.4	Sistem Evakuasi Bencana											
1)	Penyusunan dokumen KRB dan PRB	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	BPBD								
2)	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	BPBD								
3)	Pengembangan sistem evakuasi sementara kelompok	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	BPBD								
6.5	Sistem Drainase											
1)	Integrasi drainase lingkungan dengan drainase sistem kota	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Dinas PUPR								
2)	Integrasi drainase dengan sungai	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Dinas PUPR								
3)	Pembangunan dan pemeliharaan drainase Sekunder	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gading, Kecamatan Gending, Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Besuk, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuwanyar, Kecamatan Krucil, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Tongas, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Tiris	APBD Kabupaten	Dinas PUPR								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3)	Pengembangan jalur air limpasan air hujan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR	Dinas PUPR, Swasta dan Masyarakat								
B. PERWUJUDAN POLA RUANG												
B.1 KAWASAN LINDUNG												
1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya												
1.1 Kawasan Hutan Lindung												
1)	Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung	Kecamatan Bantaran, Kecamatan Banyuwang, Kecamatan Gading,	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2)	Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Krucil, Kecamatan Kuripan,	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
3)	Penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung	Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Tiris	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2 Kawasan Perlindungan Setempat												
1)	Pelestarian dan pengawasan kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu Kecamatan Gading	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRCK, Dinas PUPR, DLH								
2)	Perlindungan kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Gending Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Kraksaan Kecamatan Krejengan Kecamatan Krucil Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pajajaran Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tongas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRCK, Dinas PUPR, DLH								
3)	Pemanfaatan sempadan pantai	Pesisir utara Kabupaten	APBD Kabupaten,	Dinas PUPR, DLH,								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	untuk wisata alam	Probolinggo	CSR	Masyarakat, Swasta								
4)	Pengembangan pengaman pantai dari abrasi	Pesisir utara Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR	Dinas PUPR, BPBD, Masyarakat, Swasta								
3	Kawasan Konservasi											
3.1	Kawasan Suaka Alam (Kawasan Suaka Margasatwa (SM))											
1)	Pelestarian kawasan Cagar alam	Sungai Kolbu pada Kecamatan Krucil	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2)	Pembatasan penggunaan lahan secara langsung yang dapat merusak cagar alam		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
3)	Penanaman vegetasi yang dapat memberikan perlindungan cagar alam		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
4)	Penegasan dan penetapan kawasan cagar alam		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
5)	Pelarangan kegiatan wisata yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran di kawasan cagar alam		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
6)	Kawasan Suaka Margasatwa	Dataran Tinggi Yang dan Puncak Argopuro di Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading										
3.2	Kawasan Pelestarian Alam											
1)	Pelestarian kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional dan Taman Wisata Alam	Kecamatan Lumbang Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2)	Pembatasan penggunaan lahan secara langsung yang		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	dapat merusak pelestarian alam			Kehutanan								
3)	Penanaman vegetasi yang dapat memberikan perlindungan kawasan pelestarian alam		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
4)	Penegasan dan penetapan kawasan pelestarian alam		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
5)	Pelarangan kegiatan wisata yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran di kawasan pelestarian alam		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
6)	Pengembangan wisata alam berbasis masyarakat	- TWA Gunung Bromo, padang savana atau bukit teletubies Gunung Bromo, - Gunung Argopuro, - Pulau Gili Ketapang, - Air Panas Desa Tiris, - Air Terjun Madakaripura, - Air Terjun Umbulan, - Air Terjun Watu Lawang, - Air Terjun Triban, - Air Terju Kedung Amis, - Air Terjun Sumber Pakis II, - Air Terjun Kali Pedati, - Wisata Tirta Ageng, - Gowa Lawa/Gua Batman, - Puncak Seruni Point, - Metigen View/Pusung Agung, - Gunung Kembang Puncak Sari, - Wisata Tirta Ronggojalu, - Danau Agung/Ranu Agung, - Ranu Segaran.	APBN, APBD, CSR	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata, Swasta, Masarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		- Danau Taman Hidup, - Puncak Pundak Lembu, - Pantai Dutah, - Pantai Bahak, Pantai Tambaksari, - Air Terjun Dewi Rengganis dan - Air Terjun Darungan										
4	Kawasan Ekosistem Mangrove											
1)	Penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove	Kecamatan Dringu Kecamatan Gending Kecamatan Kraksan Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tongas	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup								
2)	Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk penelitian dan/atau pariwisata berbasis alam	Kecamatan Dringu Kecamatan Gending Kecamatan Kraksan Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tongas	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup								
3)	Pemeliharaan Kawasan Ekosistem Mangrove	Kecamatan Dringu Kecamatan Gending Kecamatan Kraksan Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tongas	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup								
4)	Pengelolaan ekosistem Mangrove berbasis masyarakat (<i>Community Based Management</i>)	Kecamatan Dringu Kecamatan Gending Kecamatan Kraksan Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Sumberasih	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR	Dinas PUPR, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Tongas										
5)	Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada ekosistem mangrove	Kecamatan Dringu Kecamatan Gending Kecamatan Kraksan Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tongas	APBN, APBD, CSR	Dinas PUPR, DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
B.2	KAWASAN BUDIDAYA											
1	Kawasan Hutan Produksi											
1.1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Kawasan Hutan Produksi Tetap & Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi)											
1)	Inventarisasi potensi hutan produksi	Kecamatan Bantaran, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Besuk,	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2)	Pemantauan pengelolaan kawasan hutan produksi	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gading, Kecamatan Gending,	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
3)	Perlindungan Hutan Produksi	Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Krucil,	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
4)	Pengelolaan kawasan hutan produksi secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan	Kecamatan Kuripan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Maron, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Tiris, Kecamatan Tonggas dan Kecamatan Wonmerto	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2	Kawasan Perkebunan Rakyat											
1)	Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Bantaran Kecamatan Gading Kecamatan Kotaanyar	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2)	Pengembangan perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan	Kecamatan Krucil Kecamatan Kuripan Kecamatan Lumbang Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Tiris Kecamatan Wonomerto	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3)	Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan porofesional		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
4)	Pengembangan agribisnis Perkebunan		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
5)	Peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
6)	Rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
7)	Intensifikasi komoditi perkebunan		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
8)	Pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
9)	Diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
10)	Pengelolaan kawasan perkebunan rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan		APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
11)	Peningkatan manajemen pengairan	Kecamatan Bantaran Kecamatan Gading Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Krucil Kecamatan Kuripan Kecamatan Lumbang Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Tiris	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Wonomerto										
13)	Penyediaan Gudang Alat Pertanian	Kecamatan Bantaran Kecamatan Gading Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Krucil Kecamatan Kuripan Kecamatan Lumbang Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Tiris Kecamatan Wonomerto	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3	Kawasan Pertanian											
3.1	Kawasan Tanaman Pangan											
1)	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	Kecamatan Bantaran Kecamatan Banyuwangi Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu Kecamatan Gading Kecamatan Gending Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Kraksan Kecamatan Krejengan Kecamatan Krucil Kecamatan Kuripan Kecamatan Leces Kecamatan Lumbang Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pajajaran Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tiris	APBD Kabupaten, CSR, KPBU Lain	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Tongas Kecamatan Wonomerto										
2)	Optimalisasi dan Pengembangan Pertanian Lahan Basah, berupa Sawah Irigasi Teknis, Sawah non Irigasi dan Sawah Tadah Hujan	Kecamatan Bantaran Kecamatan Banyuwang Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu Kecamatan Gading Kecamatan Gending Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Kraksan Kecamatan Krejengan Kecamatan Krucil Kecamatan Kuripan Kecamatan Leces Kecamatan Lumbang Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tiris Kecamatan Tongas Kecamatan Wonomerto	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3)	Identifikasi dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kecamatan Bantaran Kecamatan Banyuwang Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu Kecamatan Gading Kecamatan Gending Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Kraksan Kecamatan Krejengan Kecamatan Krucil	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Kuripan Kecamatan Leces Kecamatan Lumbang Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tiris Kecamatan Tongas Kecamatan Wonomerto										
4)	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pertanian untuk Mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
5)	Mengoptimalkan Pelayanan Jaringan Irigasi dengan Peningkatan Layanan dan Perbaikan Sistem Irigasi	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
6)	Pemberian Insentif bagi pemilik Lahan LP2B	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
7)	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
8)	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
9)	Mengembangkan prasarana dan sarana serta infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas Pertanian dan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	penunjang agropolitan											
10)	Mengembangkan Kapasitas dan SDM petani dan Kelompok Tani	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
11)	Mengembangkan Penyediaan Bibit Unggul, Pupuk serta Sarana Prasarana Produksi Pertanian	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
12)	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi para petani	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3.2	Kawasan Hortikultura											
1)	Pengelolaan kawasan hortikultura	Kecamatan Bantaran, Kecamatan Banyuwang, Kecamatan Gading, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Krucil, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Leces, Kecamatan Lumbang, Kecamatan PAiton, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Tiris dan Kecamatan Wonomerto	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
2)	Optimalisasi dan Pengembangan Pertanian Hortikultura	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3)	Peningkatan pangsa pasar produk hortikultura	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
4)	Pembinaan industri pengolahan hasil pertanian hortikultura	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten,								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
				Swasta, Masyarakat								
5)	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi para petani	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3.3	Kawasan Perkebunan											
1)	Pengembangan Tanaman Perkebunan sesuai dengan Potensi atau Kesesuaian Lahannya secara optimal	Kecamatan Bantaran Kecamatan Banyuwang Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu Kecamatan Gading Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Krejengan Kecamatan Krucil Kecamatan Kuripan Kecamatan Leces Kecamatan Lumbang Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tiris Kecamatan Tongas Kecamatan Wonomerto	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten								
2)	Mengembangkan prasarana dan sarana serta infrastruktur meningkatkan produktivitas perkebunan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten								
3)	Pelestarian kawasan perkebunan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten								
3.4	Kawasan Peternakan											
1)	Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung	Kecamatan Sukapura, Kecamatan Tegalsiwalan,	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Kegiatan Peternakan	Kecamatan Tonggas dan Kecamatan Wonomerto		Kabupaten, swasta, Masyarakat								
2)	Pengembangan Teknologi untuk Meningkatkan Produktivitas Peternakan dengan Tetap Memperhatikan Kelangsungan Ekosistem	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
3)	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Peternak	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
4)	Peningkatan Akses terhadap Pemasaran Hasil Peternakan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
5)	Penataan Kawasan Peternakan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas PUPR, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
6)	Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah Peternakan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
7)	Pengembangan sistem data, statistik dan informasi Peternakan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
4	Kawasan Pertambangan & Energi											
1)	Pengembangan pertambangan batuan	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Sumberasih dan	APBN, APBD Provinsi, CSR Lain	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Swasta								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Tongas										
2)	Pengembangan Pertambangan minyak dan gas bumi	- Gunung Argopuro, Kecamatan Krucil - Gunung Lamongan Kecamatan Tiris - kawasan pesisir, Kecamatan Paiton - sekitar Pegunungan Hyang	APBN, APBD Provinsi, CSR Lain	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Swasta								
3)	Pengembangan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton di Kecamatan Paiton	APBN, APBD Provinsi, CSR Lain	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Swasta								
5	Kawasan Perikanan Budi Daya											
1)	Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Tongas	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perikanan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
2)	Pengembangan Industri Perikanan	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Tongas	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perikanan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
3)	Peningkatan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan perikanan	Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Tongas	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perikanan Kabupaten, swasta, Masyarakat								
6	Kawasan Peruntukan Industri											
1)	Identifikasi potensi industri	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten,	Dinas Perindustrian								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
			KPBU, CSR	dan Perdagangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
2)	Pengembangan kawasan industri	Kecamatan Bantaran Kecamatan Banyuwangi Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3)	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Gading Kecamatan Gending Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Kraksaan	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
4)	Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Sarana Pendukung Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Krejengan Kecamatan Krucil Kecamatan Leces Kecamatan Lumbang Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pajajaran Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tiris Kecamatan Tongas Kecamatan Wonomerto	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
5)	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Kecil dan menengah Berbasis Komoditas Unggulan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
6)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri	Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Gending, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
7)	menyediakan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten, KPBU, CSR	Dinas Lingkungan Hidup, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat											
7	Kawasan Pariwisata											
	Optimaliasasi, Pengembangan Kawasan Pariwisata Antisipasi Terhadap Bencana Tambahkan	Kecamatan Gending Kecamatan Kraksan Kecamatan Paiton Kecamatan Tiris	APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pariwisata Kabupaten								
8	Kawasan Permukiman											
1)	Pengembangan kawasan permukiman Perkotaan	Kecamatan Bantaran Kecamatan Banyuwang Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu Kecamatan Gading Kecamatan Gending Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Kraksan Kecamatan Krejengan Kecamatan Kuripan Kecamatan Leces Kecamatan Lumbang Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pajarakan Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tiris Kecamatan Tongas Kecamatan Wonomerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
2)	Pengembangan kawasan permukiman Pedesaan	Kecamatan Bantaran Kecamatan Banyuwang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi,								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Kecamatan Besuk Kecamatan Dringu Kecamatan Gading Kecamatan Gending Kecamatan Kotaanyar Kecamatan Kraksan Kecamatan Krejengan Kecamatan Krucil Kecamatan Kuripan Kecamatan Leces Kecamatan Lumbang Kecamatan Maron Kecamatan Paiton Kecamatan Pajajaran Kecamatan Pakuniran Kecamatan Sukapura Kecamatan Sumber Kecamatan Sumberasih Kecamatan Tegalsiwalan Kecamatan Tiris Kecamatan Tongas Kecamatan Wonomerto	Kabupaten, CSR, KPBU Lain	Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
3)	Pengembangan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
4)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana & prasarana		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Swasta, Masyarakat								
5)	Peningkatan sistem utilitas		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
6)	Penyelenggaraan aktivitas sosial ekonomi yang harmonis dengan seluruh komponen pengembangan wilayah seperti dengan aktivitas perdagangan dan jasa, industri, pertanian, dan lain-lain		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
7)	Pengembangan kawasan permukiman yang adaptif terhadap bencana		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
8)	Perbaikan kampung mengadopsi konsep pembangunan hunian yang lengkap dan asri dengan jenis konstruksi jalan beton, pedestrian dan pohon peneduh		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
9)	Penataan kawasan permukiman kumuh	Kawasan Kumuh Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
10)	menyediakan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
13)	Penerapan ketentuan tata bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
14)	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
15)	Penyediaan sarana dan prasarana dasar di kawasan permukiman		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
16)	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan permukiman		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
17)	Penyediaan lahan dan sarana pendidikan	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan, Swasta, Masyarakat								
18)	Pemeliharaan kawasan cagar budaya, termasuk revitalisasi Danau Li'it	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Pariwisata, Pengelola, Masyarakat								
20)	Pengawasan penerapan pengelolaan wajib terkait IPAL komunal dan TPST	Kabupaten Probolinggo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat								
21)	Pengembangan rest area	Kecamatan Tongas, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Paiton	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, KPBU	Dinas Perhubungan, Swasta, Masyarakat								
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan											

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1)	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Dringu, Kecamatan Paiton dan Kecamatan Gending	APBN, Lantamal 5	Kementerian Pertahanan								
2)	Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan		APBD Kabupaten	Dinas PUPR								
C PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS												
1 Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
1.1	kawasan agropolitan regional yang merupakan Sistem Agropolitan Bromo - Tengger - Semeru (BTS)	Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sumber Kecamatan Sukapura	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Bappeda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR								
1.2	pusat industri pengolahan pupuk dan pengolahan hasil ikan	- Wilayah pengembangan barat yaitu Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas. - Wilayah pengembangan bagian timur yaitu Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Gading	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Bappeda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR								
1.3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Tongas, Kecamatan Leces, Kecamatan Paiton, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Gading dan Kecamatan Pajarakan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Bappeda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR								
1.4	Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Probolinggo	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Bappeda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Probolinggo	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Bappeda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR								
2	Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya											
2.1	Pengembangan masyarakat Tengger yang hidup di lereng Gunung Bromo, dan permukiman adat Suku Tengger	Kecamatan Sukapura dan sekitarnya	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR								
2.2	Pengembangan kawasan sekitar candi, yaitu Candi Jabung, Candi Kedaton dan reruntuhan makam Dewi Rengganis	Kecamatan Paiton										
2.3	Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan sudut kepentingan sosial budaya	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR								
2.4	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan strategis sosial budaya	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR								
3	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi											
3.1	Pengembangan PLTU Paiton	Kecamatan Paiton	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Kementerian ESDM, Bappeda, Dinas PUPR								
3.2	Kawasan pengembangan potensial panas bumi di Dataran Tinggi Yang	Kecamatan Krucil	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Kementerian ESDM, Bappeda, Dinas PUPR								
3.3	Pengembangan kawasan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	strategis pertumbuhan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup			Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
3.4	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
4	Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup											
4.1	Pengembangan ekosistem DAS Pekalen Sampean, Rondoningo, Pandanlaras, Kali Kertosono, Pancarglagas dan Kresek	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
4.2	Pemeliharaan kawasan konservasi Cagar Alam Sungai Kolbu	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
4.3	Pelestarian terumbu karang di Pantai Gili Ketapang	Kecamatan Sumberasih	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
4.4	Konservasi sumber daya air	Taman Nasional Bromo tengger Semeru	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
4.5	Pelestarian kawasan resapan air hujan		APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
4.6	Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Puncak Argopuro	Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR								
4.7	Perlindungan Beberapa jenis satwa di SM Dataran Tinggi Yang	Kecamatan Krucil	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta/ Masyarakat	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR								
4.8	Pengembangan kawasan	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	strategis pertumbuhan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup			Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
4.9	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kabupaten Probolinggo	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
5	Perwujudan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Dikawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan											
5.1	Kawasan Prioritas Bromo - Tengger- Semeru:	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.2	Pelebaran jalan Tongas ke Sukapura	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.3	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Lumajang	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.4	Pelebaran Jalan Naional Probolinggo - Lumajang	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.5	Peningkatan Jalan Lingkar Kota dan Kab. Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
5.6	Percepatan Pembangunan Double Track Lintas Bangil - Jember- Banyuwangi	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.7	Revitalisasi pipa SPAM Kab - Kota Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.8	Penguatan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (proyek KSPN Peningkatan fasilitas BTS)	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.9	Pelebaran Jalan Lawean - Sukapura (18,91 KM)	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.10	Pembangunan SPAM Regional Probolinggo - Lumajang	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.11	Pembangunan TPA Regional Kab/Kota Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.12	Pengembangan Kawasan Pariwisata Air Terjun Madakaripura	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					RPJMD 1					RPJMD 2	RPJMD 3	RPJMD 4
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
5.13	Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan - Kawah Bromo	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								
5.14	Pembangunan Gedung dan Kantor BLK, Peralatan Praktik dan Vokasi BLK	Kabupaten Probolinggo	APBN, CSR	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta								

Sumber: RTRW Kabupaten Probolinggo 2024-2044

Tabel 2. 112
Kegiatan Pembangunan Drainase Tahap II, III, IV Tahun 2023 – 2037 dalam Masterplan Drainase Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 - 2037

No	Uraian Program	Tahap Rencana Pelaksanaan Kegiatan			SKPD
		II	III	IV	
1	Kajian, Studi Kelayakan dan DED serta Ijin Lingkungan Perencanaan Pengendalian Banjir Limpasan Hujan Pada Sungai Utama				Bappeda, PUPR, DLH
	- Studi Kelayakan Bangunan Pengendalian Banjir Limpasan Hujan Pada Sungai Utama				
	- DED Bangunan Pengendalian Banjir Limpasan Hujan Pada Sungai Utama				
	- Kajian Lingkungan/ Ijin Lingkungan Bangunan Pengendalian Banjir Limpasan Hujan Pada Sungai Utama				
2	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir				PUPR
	- Kolam Penampungan Air Sungai yang berlokasi di di desa Dringu				
	- Kolam Penampungan Air Sungai K. Kertosono yang berlokasi di desa Kraksaan Wetan				
	- Pembangunan Tanggul di wilayah Desa Gejukan				
3	Evaluasi kinerja sistem Bangunan Pengendalian Banjir dan Pemeliharaan fungsi bangunan serta Pembinaan Pengelola				PUPR
4	Program pengerukan sedimen pada semua saluran primer dengan frekuensi 2 kali dalam setiap tahun				
5	Program pengerukan sedimen pada semua saluran sekunder dengan frekuensi 2 kali dalam setiap tahun				
6	Program pengerukan sedimen pada semua saluran tersier dengan frekuensi minimal 1 kali setiap 2 bulan. Pemeliharaan saluran tersier ini dilakukan berdasarkan program pemeliharaan yang berkelanjutan dengan masyarakat setempat				
7	DED Peningkatan Jaringan Drainase				Perkim dan PUPR
8	Pelaksanaan Peningkatan Saluran Drainase :				Perkim dan PUPR
	- Desa Gejukan				
	- Desa Banyuanyar Tengah				
	- Desa Kalisalam				
	- Desa Penambangan				
	- Desa Dringu				
	- Desa Pesisir				

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No	Uraian Program	Tahap Rencana Pelaksanaan Kegiatan			SKPD
		II	III	IV	
	- Desa Pajurangan				
8	Review Master Plan Drainase				
9	Pemeliharaan fungsi bangunan drainase dan kondisi fisik saluran (dinding saluran) dengan frekuensi 1 kali setiap 2 tahun.				Perkim dan PUPR
11	Kajian, Studi Kelayakan dan DED serta Ijin Lingkungan Perencanaan IPAL, Komunal Pengolahan <i>Grey & Black Water</i>				Bappeda, PUPR, DLH
	- Studi Kelayakan Bangunan IPAL, Komunal Pengolahan <i>Grey & Black Water</i>				
	- DED Bangunan IPAL, Komunal Pengolahan <i>Grey & Black Water</i>				
	- Kajian Lingkungan/ Ijin Lingkungan IPAL, Komunal Pengolahan <i>Grey & Black Water</i>				
12	Pelaksanaan Pembangunan IPAL Komunal, Pengolahan <i>Grey & Black Water</i>				Perkim dan PUPR
13	Evaluasi kinerja sistem IPAL Komunal dan Pemeliharaan fungsi bangunan serta Pembinaan Pengelola				
14	Survey lokasi yang berpotensi sebagai lokasi pembuatan sumur resapan				
15	Pelaksanaan Pembangunan Biopori, Sumur Resapan				DLH
16	Evaluasi kinerja sistem Biopori, Sumur Resapan dan Pemeliharaan fungsi bangunan serta Pembinaan Pengelola				
17	Kajian, Studi Kelayakan dan DED serta Ijin Lingkungan Perencanaan Pembangunan Embung				Bappeda, PUPR Pusat, PUPR
	- Studi Kelayakan Pembangunan Embung				
	- DED Bangunan Embung				
	- Kajian Lingkungan/ Ijin Lingkungan Embung				
18	Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan pembangunan embung, dam parit dan long storage				PUPR
19	Pelaksanaan Konstruksi pembangunan embung, dam parit dan long storage				Pertanian
20	Evaluasi kinerja sistem embung dan Pemeliharaan fungsi bangunan serta Pembinaan PengelolaTaha				Pertanian

Tahap II = 2021 – 2026; Tahap III = 2027 – 2031; Tahap III = 2032 - 2037

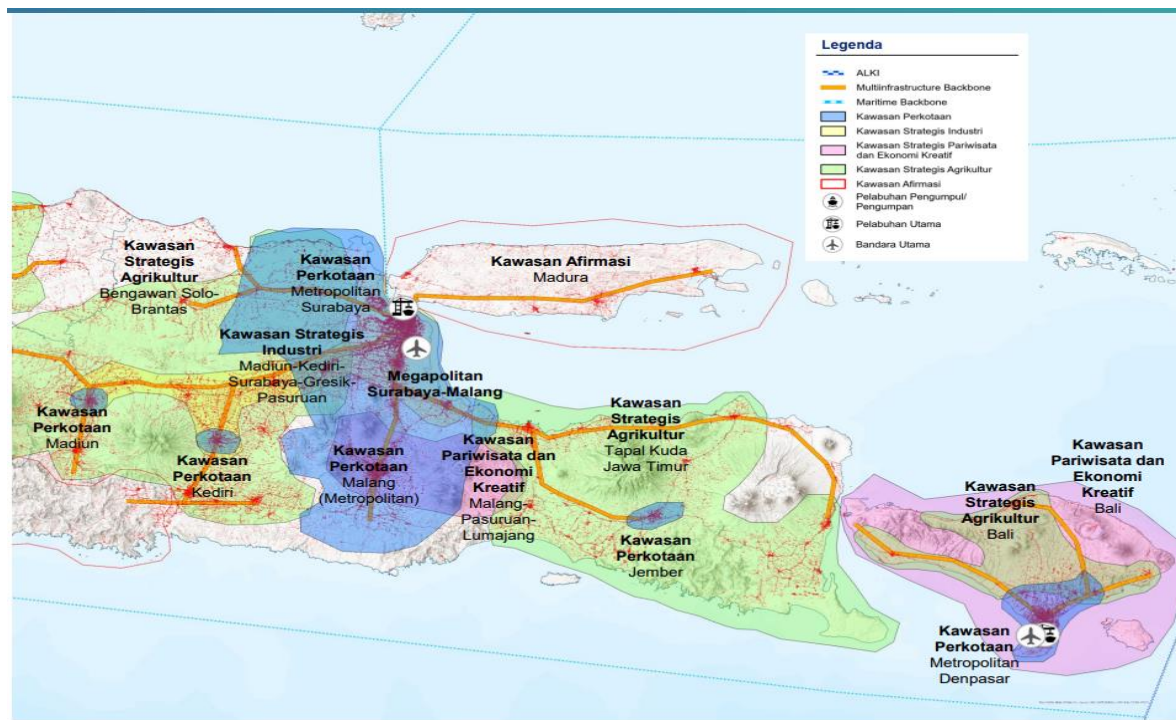
Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Probolinggo merupakan strategi khusus percepatan pembangunan melalui implementasi program kewilayahan serta lintas sektoral. Program lintas sektoral diartikan sebagai program khusus pemerintah yang untuk mencapai tujuannya harus melibatkan berbagai sektor atau urusan penyelenggaraan pemerintahan. Program kewilayahan diartikan sebagai sebuah program lintas sektoral yang akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh perangkat daerah terkait di suatu kawasan atau lokasi tertentu untuk mewujudkan peruntukan lokasi atau kawasan tersebut. Dalam konteks ilmu perencanaan pembangunan, program kewilayahan merupakan implementasi dari konsep Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial (THIS). Melalui program ini, sebuah TEMA pembangunan disepakati untuk dilakukan di sebuah lokasi/kawasan/wilayah tertentu (SPASIAL). Untuk mewujudkannya, semua kebutuhan program/kegiatan dalam pembangunan wilayah tersebut didaftarkan sedemikian rupa (HOLISTIK), dan selanjutnya dikerjakan bersama-sama oleh perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan (INTEGRATIF). Melalui program kewilayahan diharapkan bahwa akan ada kawasan atau lokasi potensial tertentu di Kabupaten Probolinggo yang tumbuh cepat dan dapat memberikan *multiplier effect* kepada wilayah sekitarnya.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo, maka di setiap tahap pembangunan jangka menengah, terdapat program kewilayahan dan lintas sektoral yang menjadi prioritas pengembangannya. Penetapan program kewilayahan prioritas dapat mengacu pada berbagai rencana pembangunan kawasan strategis dalam RTRW maupun rencana pembangunan pariwisata yang dianggap mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi daerah.

RPJPN 2025-2045 memiliki arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang sekaligus menjadi amanah bagi daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung dan mengikuti arah kebijakan tersebut. RPJPN mengarahkan transformasi wilayah Jawa ke “Megapolitan yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Jawa Timur menjadi mata rantai penting ketahanan industri nasional dan pusat pengembangan agrikultur, agroindustri, dan ekonomi biru nasional. Rancangan Tema Pembangunan Jawa Timur pada pembangunan ekonomi wilayah adalah berfokus pada Agrikultur;

Agroindustri/Bioindustri; Industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (*consumer goods*); Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan *Blue economy* (perikanan). Sementara itu, Visi, Aspirasi, Potensi Pengembangan Jawa Timur adalah Megapolitan Surabaya-Malang towards global city; Pendidikan, riset, inovasi; dan *Green economy* (Energi Baru Terbarukan/EBT, *organic agriculture*).

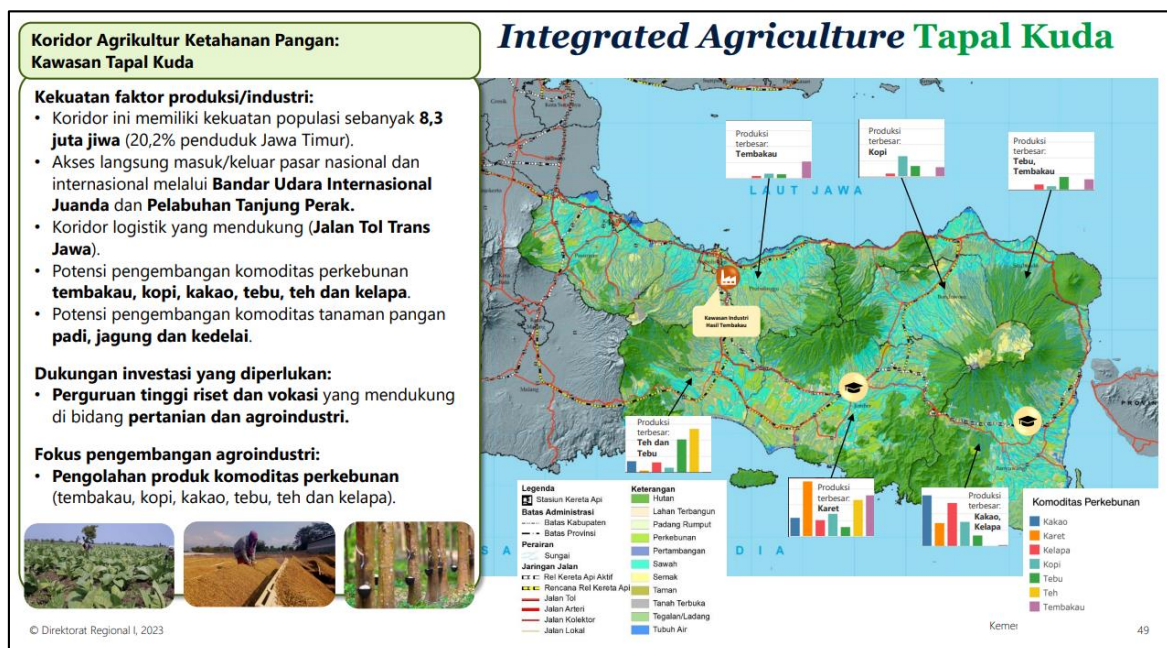
Gambar 2. 108
Zonasi Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Jawa Timur
dalam RPJPN 2025-2045



Sumber: Rancangan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Provinsi Jawa Timur

Pad transformasi ekonomi pembangunan nasional di Jawa Timur, RPJPN 2025-2045 juga telah mengarahkan berbagai zonasi kawasan di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.108. Terdapat kawasan megapolitan dan perkotaan, kawasan strategis agrikultur maupun industri, kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Madura dan pengunungan Sewu. Kabupaten Probolinggo menjadi bagian kawasan strategis agrikultur di Tapal Kuda Jawa Timur.

Gambar 2. 109 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Tapal Kuda Jawa Timur dalam RPJPN 2025-2045

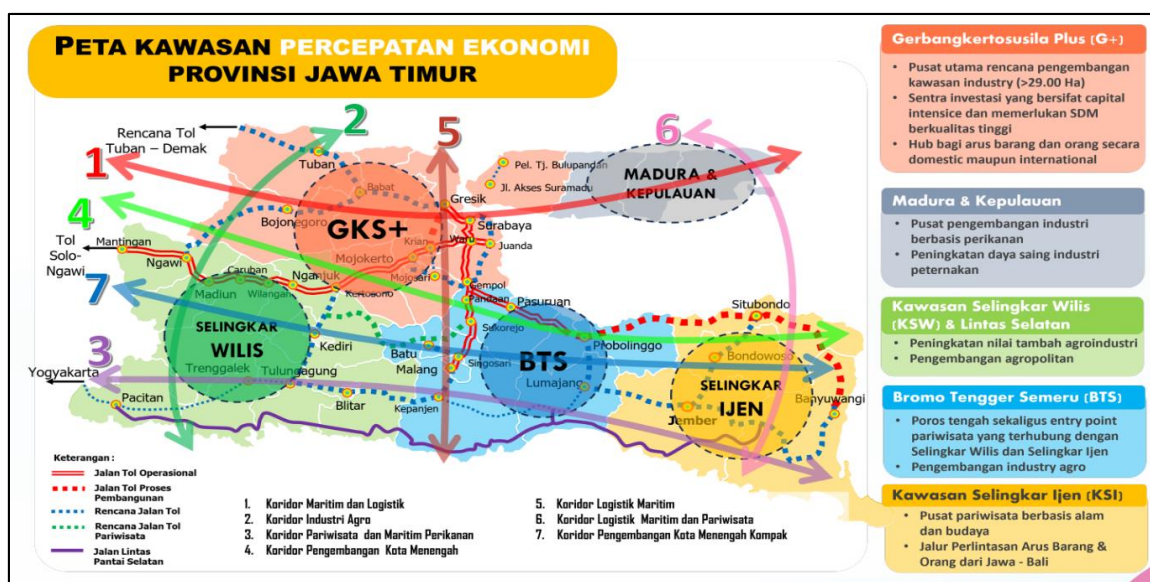


Sumber: Rancangan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu lokasi transformasi ekonomi pembangunan nasional di Jawa Timur, yaitu pada Koridor Agrikultur Ketahanan Pangan Tapal Kuda (Gambar 2.109). Kabupaten Probolinggo diarahkan sebagai lokasi pengembangan kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo (industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (consumer goods)) serta Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada ruas Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi dan Surabaya-Lamongan. Dinyatakan pula bahwa fokus pengembangan agroindustry adalah pada pengolahan produk komoditi perkebunan (sesuai potensinya) dengan dukungan investasi dari perguruan tinggi berupa riset dan vokasi yang mendukung bidang pertanian dan agroindustri. Karenanya, agar sinergi dan mendukung implementasi kebijakan nasional tersebut, fokus pembangunan pembangunan kewilayahan Kabupaten Probolinggo juga diarahkan ke pengembangan pertanian dan agroindustry tersebut.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 juga memiliki arah kebijakan pembangunan kewilayahan, di mana Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu lokasi arah kebijakan tersebut diterapkan. Arah transformasi ekonomi Jawa Timur masih berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila, Bromo-Tengger-Semeru (BTS) serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Gambar 2.109). Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan BTS yang diarahkan sebagai poros tengah sekaligus entry point pariwisata yang terhubung dengan Selingkar Wilis dan Ijen, serta pengembangan industri agro. Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka pembangunan kewilayahan Kabupaten Probolinggo diarahkan pada pengembangan industri agro (sesuai potensi) dan juga pariwisata.

Gambar 2. 110
Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

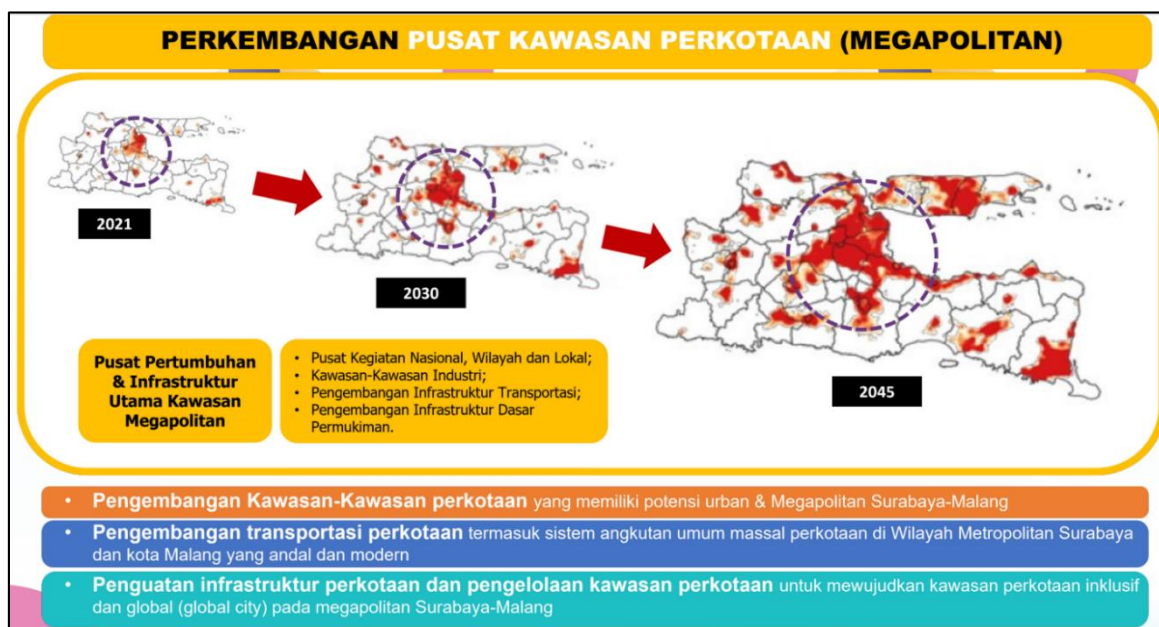


Sumber: Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Sementara itu, pengembangan pusat kawasan perkotaan (megapolitan) di Jawa Timur juga diharapkan sedikit banyak mempengaruhi pembangunan Kabupaten Probolinggo. Keberadaan jalan tol serta pintu keluar (masuk) di empat titik/lokasi di Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu membawa Kabupaten Probolinggo sebagai perluasan pusat perkotaan di Jawa Timur, khususnya di

tahun 2045 (Gambar 2.110). Dengan demikian, infrastruktur wilayah, baik transportasi maupun dasar permukiman juga akan berkembang. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Probolinggo, khususnya pengembangan kawasan perkotaan dan permukiman, juga sejalan dengan kebijakan tersebut.

Gambar 2. 111
Proyeksi Perkembangan Pusat Kawasan Perkotaan dalam RPJPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045



Sumber: Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Probolinggo harus sejalan dan selaras mendukung arah kebijakan pembangunan kewilayahan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pengembangan atau transformasi ekonomi Kabupaten Probolinggo setidaknya diarahkan untuk memperkuat pembangunan agroindustri sesuai potensi dan pariwisata. Pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan perkotaan diarahkan untuk mendukung kebijakan tersebut tanpa menegasikan pembangunannya di lokasi lain secara merata di Kabupaten Probolinggo. Arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Probolinggo harus dapat menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah kabupaten.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan harus dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini maupun proyeksi kondisi di masa mendatang. Rumusan permasalahan dan isu strategis dalam bab ini merupakan bagian terpenting dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang (selama 20 tahun) yang diuraikan dalam Bab ini harus mampu dijawab penyelesaiannya dalam RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 mendatang dapat diidentifikasi dari perkembangan data tentang kondisi empat aspek penting pembangunan daerah, evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025, proyeksi kondisi demografi dan kebutuhan sarana prasarana layanan publik, maupun pengembangan pusat pengembangan wilayah yang disajikan dalam Bab II dokumen ini.

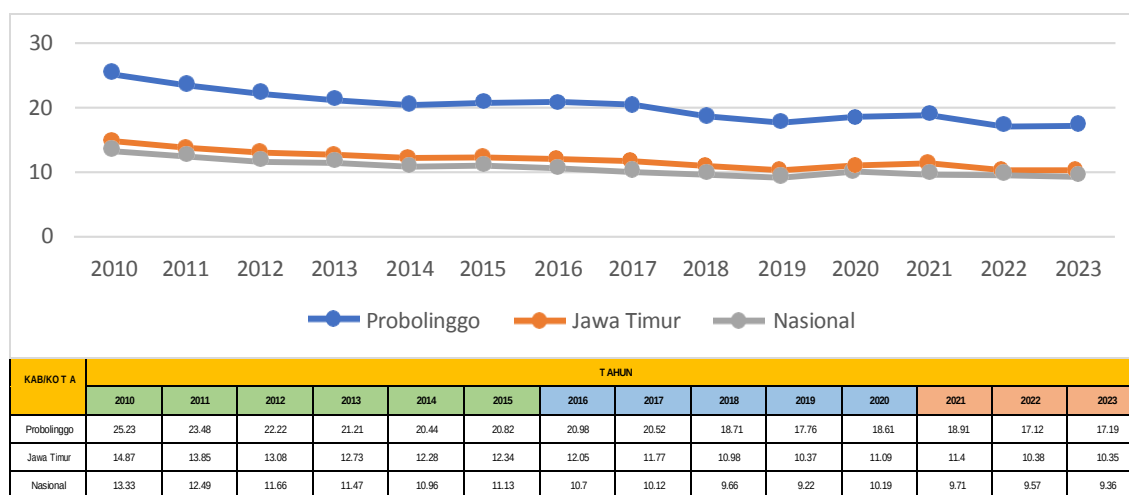
Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat wajib.

Berdasarkan data di Bab II, khususnya pada aspek kesejahteraan masyarakat serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah, yaitu:

1. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi

Persentase Penduduk Miskin adalah salah satu indikator yang memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010 – 2023

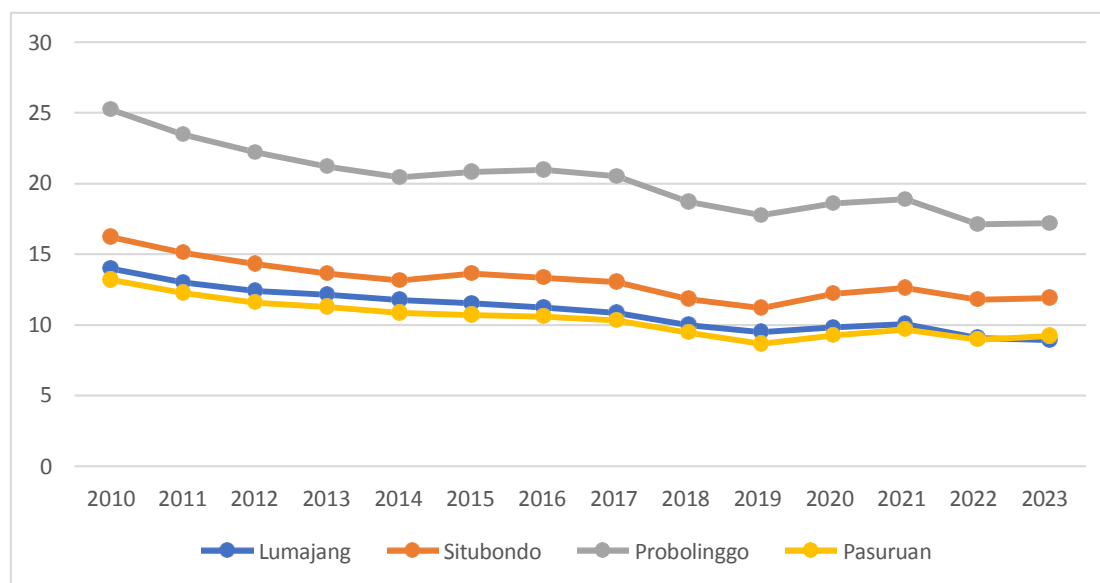


Sumber Data: BPS Kabupaten Probolinggo

Data memperlihatkan bahwa pola perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo mirip dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur maupun nasional (Gambar 3.1). Dari kurun waktu 2017 – 2019 telah terjadi penurunan yang cukup menggembirakan, namun mengalami kenaikan saat pandemi covid-19 (tahun 2020 dan 2021). Kondisi persentase penduduk miskin tahun 2022 membaik dengan penurunan yang bahkan lebih besar dari pada penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun, di tahun 2023, persentase penduduk miskin kembali meningkat. Secara keseluruhan, jika dilihat dari besarnya, persentase

penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo jauh berada di atas Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Gambar 3.2
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)
Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo dan Pasuruan Tahun
2010 – 2023.



	TAHUN													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lumajang	13.98	13.01	12.4	12.14	11.75	11.52	11.22	10.87	9.98	9.49	9.83	10.05	9.06	8.93
Situbondo	16.23	15.11	14.34	13.65	13.15	13.63	13.34	13.05	11.82	11.2	12.22	12.63	11.78	11.9
Probolinggo	25.23	23.48	22.22	21.21	20.44	20.82	20.98	20.52	18.71	17.76	18.61	18.91	17.12	17.19
Pasuruan	13.18	12.26	11.58	11.26	10.86	10.72	10.57	10.34	9.45	8.68	9.26	9.7	8.96	9.24

Sumber: Data Diolah

Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, yaitu Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pun tertinggi (Gambar 3.2). Hal ini berarti bahwa dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Timur, kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih sangat besar dan menjadi pekerjaan besar untuk mencoba menanggulangnya di masa mendatang.

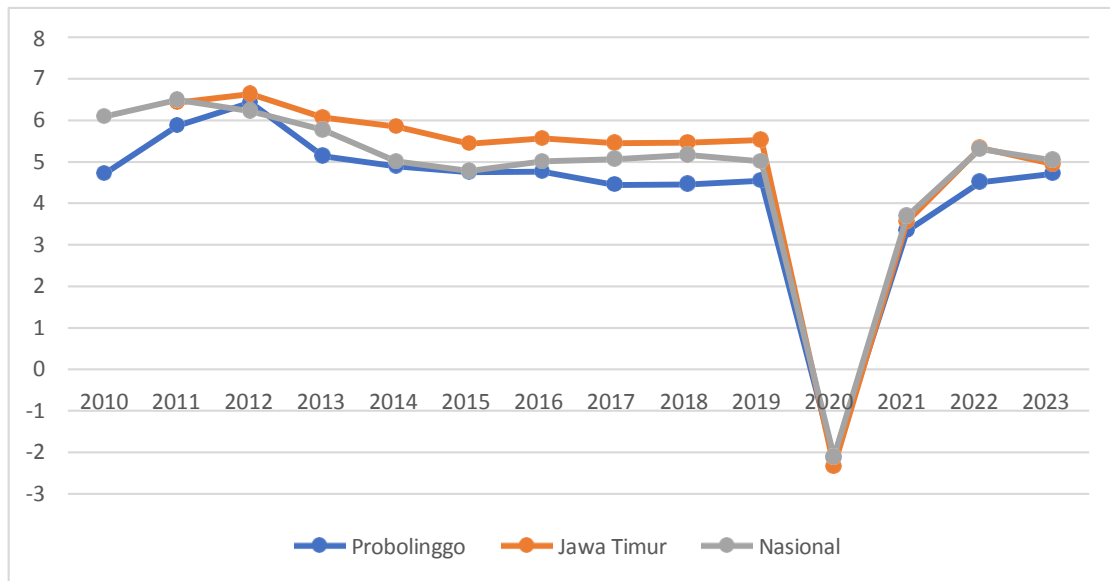
Penyelesaian permasalahan atau penurunan/penanggulangan kemiskinan akan menjadi isu pembangunan di Kabupaten Probolinggo di masa mendatang. Kemiskinan umumnya terjadi karena masyarakat (miskin atau

rentan miskin) memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Saat terjadi goncangan internal maupun eksternal, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan, mereka dengan mudah menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tergolong ke dalam masyarakat miskin. Untuk mengangkat masyarakat miskin agar keluar dari kategori kemiskinan atau menjaga agar masyarakat (yang rentan miskin) tidak jatuh ke kelompok miskin, maka upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar maupun memberikan jaminan agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi menjadi keharusan dalam pembangunan di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar sosial (pendidikan, kesehatan serta layanan sosial lainnya), peningkatan pendapatan/perekonomian, maupun penyediaan sarana-prasarana/infrastruktur dasar pendukungnya, harus dilakukan agar mereka bisa berdaya, bangkit dari kemiskinannya, hingga mampu bertahan agar tidak terjatuh ke kelompok miskin.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Relatif Rendah

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo juga memiliki kesenderungan yang mirip dengan kondisi yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Walaupun demikian, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo lebih berfluktuasi (tidak stabil), hal tersebut dijelaskan pada gambar 3.3.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011 - 2023

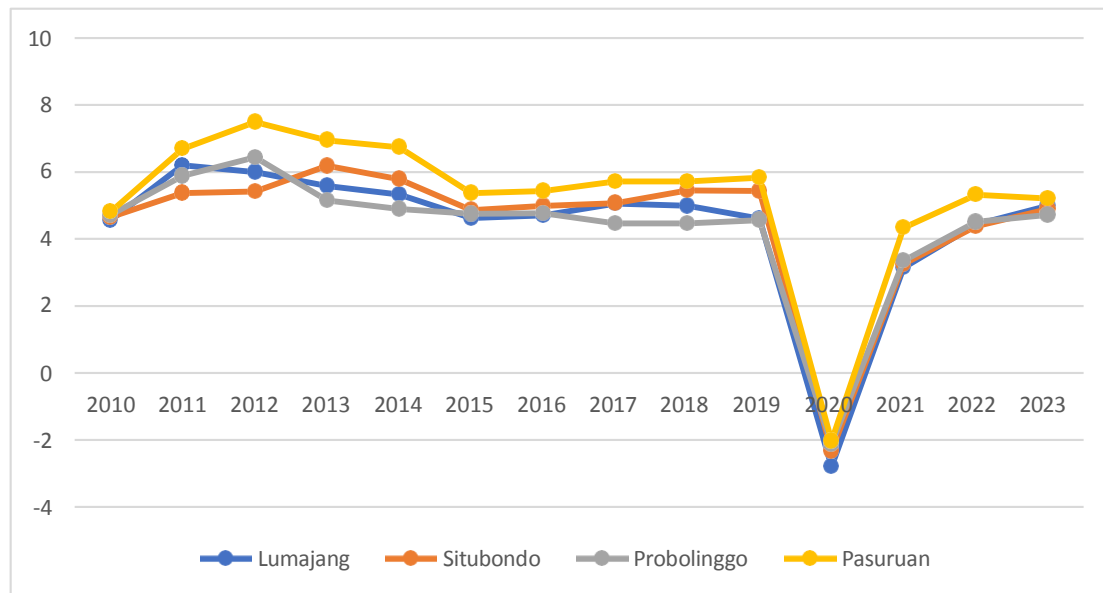


	T A H U N													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Probolinggo	4.73	5.88	6.44	5.15	4.9	4.76	4.77	4.46	4.47	4.56	-2.12	3.35	4.52	4.73
Jawa Timur	-	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44	5.57	5.46	5.47	5.53	-2.33	3.57	5.58	4.95
Nasional	6.1	6.5	6.23	5.78	5.02	4.79	5.02	5.07	5.17	5.02	-2.1	3.69	5.31	5.04

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo

Gambar 3.3. memperlihatkan ketidakstabilan laju pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan fundamental perekonomian Kabupaten Probolinggo yang belum stabil pula. Keterpurukan yang ditandai oleh kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Probolinggo juga menjadi masalah tersendiri. Meskipun kontraksi ekonomi di Kabupaten ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun membutuhkan upaya yang besar untuk mengembalikan kondisi perekonomian. Tahun 2022-2023, kondisi perekonomian Kabupaten Probolinggo telah membaik dengan pertumbuhan sebesar 4,52% dan 4.73%, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Timur maupun nasional yang masing-masing sebesar 5,58% dan 5,31% di tahun 2022 serta 4,95% dan 5,04% di tahun 2023.

Gambar 3.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang
Situbondo, Probolinggo dan Pasuruan Tahun 2010-2023



	TAHUN													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lumajang	4.56	6.2	6	5.98	5.32	4.62	4.7	5.05	5	4.61	-2.79	3.14	4.43	5
Situbondo	4.66	5.38	5.43	6.19	5.79	4.86	5	5.07	5.46	5.44	-2.33	3.26	4.39	4.9
Probolinggo	4.73	5.88	6.44	5.15	4.9	4.76	4.77	4.46	4.47	4.56	-2.12	3.35	4.52	4.73
Pasuruan	4.82	6.69	7.5	6.95	6.74	5.38	5.44	5.72	5.73	5.83	-2.03	4.34	5.32	5.21

Sumber: Data Diolah

Jika dibandingkan dengan daerah sekitar pun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo lebih fluktuatif, meskipun di beberapa tahun memperlihatkan capaian yang lebih tinggi daripada Kabupaten Lumajang dan Situbondo (Gambar 3.4). Karenanya, untuk menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi serta mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim dan nasional, maka percepatan pembangunan ekonomi hampir di semua sektor harus diprioritaskan. Kabupaten Probolinggo juga harus mampu melakukan diversifikasi sektor ekonomi supaya tidak tergantung hanya pada satu atau beberapa sektor ekonomi saja. Penguatan sektor-sektor ekonomi unggul dan potensial untuk unggul harus dilakukan agar ekonomi tetap stabil saat salah satu sektor sedang terpuruk.

Jika dilihat distribusi atau peran PDRB berdasarkan lapangan usaha, diketahui bahwa Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2023 masih didominasi oleh sektor primer atau pertanian (dalam arti luas) meskipun terlihat kecenderungan yang terus menurun. Di sisi lain, kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (perdagangan) cenderung semakin meningkat. Hal ini berarti transformasi struktural perekonomian di Kabupaten Probolinggo sudah terjadi dan akan mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor sekunder dan tersier cenderung memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Walaupun demikian, transformasi struktural ekonomi ini juga harus diimbangi dengan transformasi kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor tersebut. Saat kontribusi sektor primer semakin menurun, namun kontribusi tenaga kerja di sektor ini masih tetap dominan dan/atau meningkat, maka menunjukkan produktifitas sektor primer yang relatif rendah. Karenanya, di masa mendatang, kontribusi tenaga kerja di sektor sekunder dan tersier pun harus sejalan dengan perubahan kontribusi PDRB di sektor-sektor tersebut. Lebih jauh lagi, dengan potensi unggulan perekonomian di sektor pertanian, maka pembangunan sektor ini harus tetap ditingkatkan dengan memperkuat linkage-nya dengan pembangunan sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, pembangunan sektor sekunder dan tersier (sektor hilir dalam supply chain perekonomian) diutamakan pada hilirisasi sektor pertanian maupun pembangunan sektor industri, perdagangan dan jasa berbasis sektor pertanian.

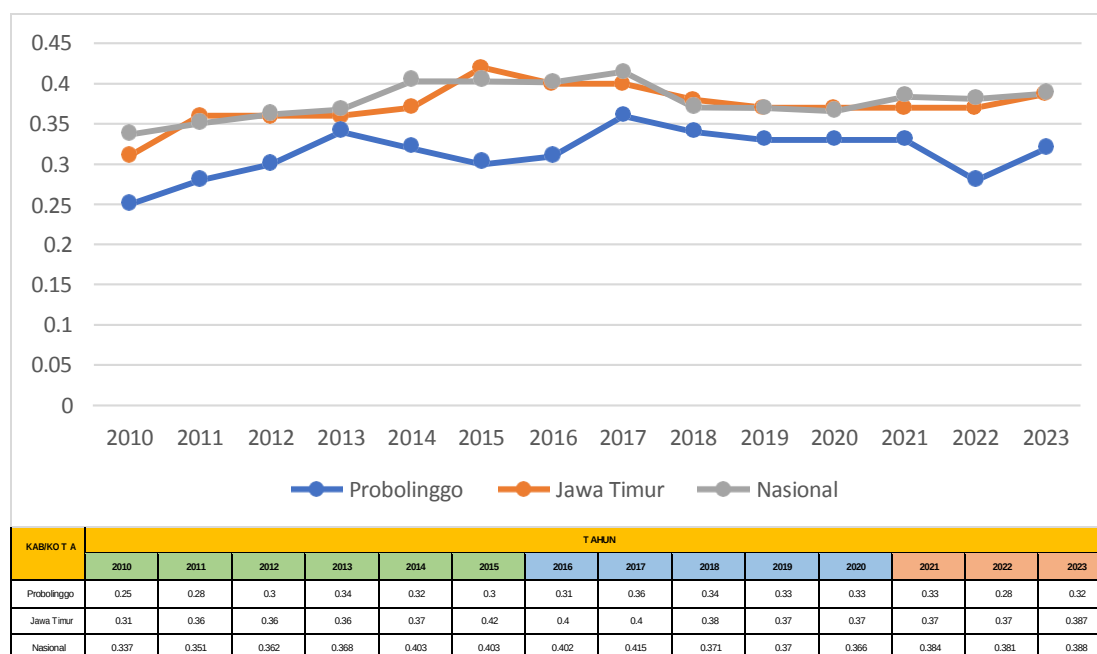
Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa isu perekonomian yang harus diselesaikan di masa mendatang. Pertama, peningkatan produktivitas seluruh sektor, khususnya sektor potensial daerah (pertanian dalam arti luas). Kedua, pembangunan sektor hilir (industri, perdagangan dan jasa) yang mendukung potensi unggul atau berbasis sektor pertanian. Ketiga, penyiapan sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang sesuai kebutuhan terkini dan menjamin transformasi tenaga kerja yang seimbang dengan transformasi struktural perekonomian. Jika dihubungkan dengan potensi bonus demografi

yang terjadi hingga beberapa tahun mendatang, maka perlu dipastikan bahwa penduduk usia produktif harus benar-benar produktif secara ekonomi.

3. Rasio Gini yang Rendah saat Tingkat Kemiskinan Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Rendah: Kemiskinan yang relatif Merata

Indikator kesejahteraan makro daerah lainnya adalah Indeks Gini yang memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Secara umum, kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Probolinggo tergolong “sedang”, meskipun di tahun 2022 sempat membaik berkategori “rendah”. Dibandingkan dengan nilai Indeks Gini di Jawa Timur dan nasional, nilai Kabupaten Probolinggo juga relative lebih kecil yang menunjukkan kondisi yang lebih baik (Gambar 3.5).

Gambar 3.5
Rasio Gini Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo

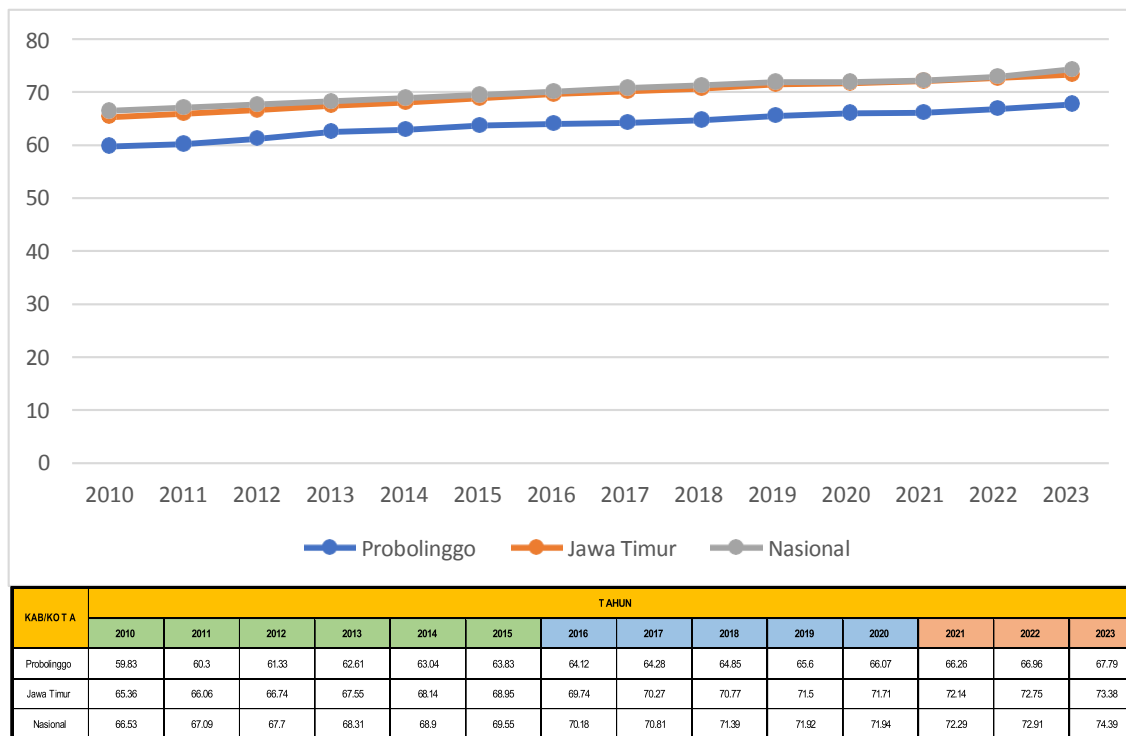
Walaupun demikian, jika dikombinasikan dengan kondisi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, maka kondisi ketimpangan yang rendah ini bisa mengindikasikan adanya “kemiskinan yang merata”. Karenanya, permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Probolinggo adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomiannya, namun dengan tetap mempertahankan tingkat pemerataan yang sudah cenderung baik.

Untuk menciptakan pemerataan pendapatan (gini rasio yang rendah) pada kondisi perekonomian yang baik (pendapatan per kapita tinggi serta kemiskinan yang rendah), maka pembangunan Kabupaten Probolinggo haruslah inklusif atau melibatkan semua pihak/keompok masyarakat maupun merata di seluruh daerah. Kebijakan yang berpihak pada kelompok atau wilayah yang marjinal harus dilakukan di masa mendatang. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja atau sektor ekonomi yang bernilai ekonomi rendah, serta percepatan pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur ramah lingkungan di seluruh wilayah dan antar kelompok masyarakat merupakan beberapa isu penting yang harus dilakukan.

4. Indeks Pembangunan Manusia yang Relatif Rendah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator makro pembangunan yang dipergunakan secara nasional. Indeks ini memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

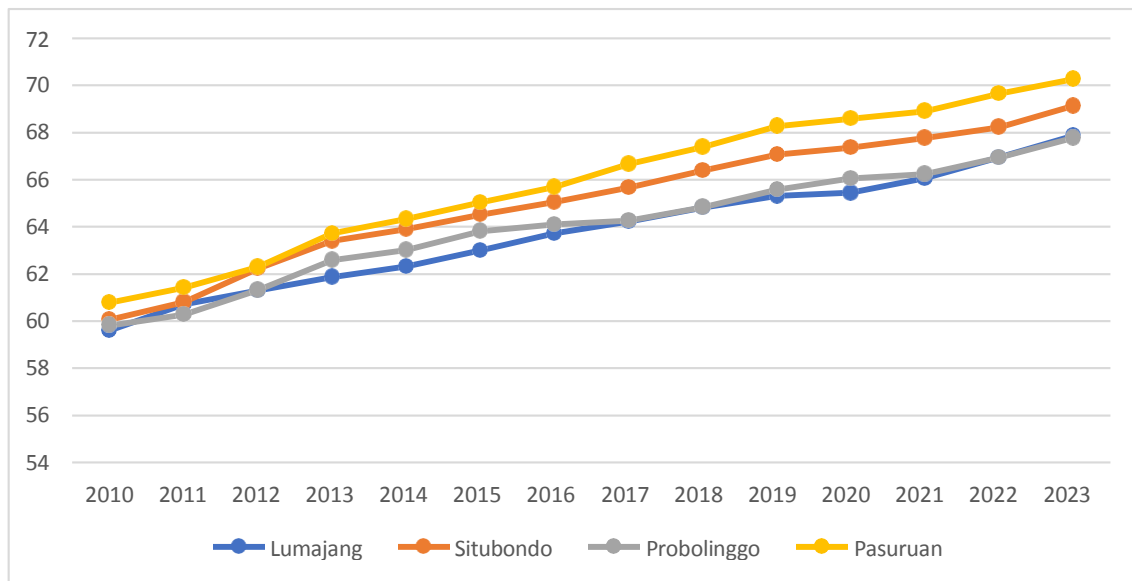
Gambar 3.6
IPM Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Gambar 3.6, Capaian IPM Kabupaten Probolinggo untuk Tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 cenderung lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Timur maupun nasional, meskipun secara umum IPM mengalami peningkatan.

Gambar 3.7
IPM Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Situbondo dan Pasuruan
Tahun 2010 – 2023



	TAHUN													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lumajang	59.62	60.72	61.31	61.87	62.33	63.02	63.74	64.23	64.83	65.33	65.46	66.07	66.95	67.87
Situbondo	60.07	60.82	62.23	63.43	63.91	64.53	65.08	65.68	66.42	67.09	67.38	67.78	68.25	69.16
Probolinggo	59.83	60.3	61.33	62.61	63.04	63.83	64.12	64.29	64.85	65.6	66.07	66.25	66.96	67.79
Pasuruan	60.79	61.43	62.31	63.74	64.35	65.04	65.71	66.69	67.41	68.29	68.6	68.93	69.68	70.29

Sumber: Data Diolah

Dibandingkan dengan kabupaten sekitar (Gambar 3.7), IPM Kabupaten Probolinggo pun cenderung lebih rendah. Karenanya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tiga aspek pembangunan manusia di masa mendatang harus diprioritaskan untuk mengejar ketertinggalan capaiannya.

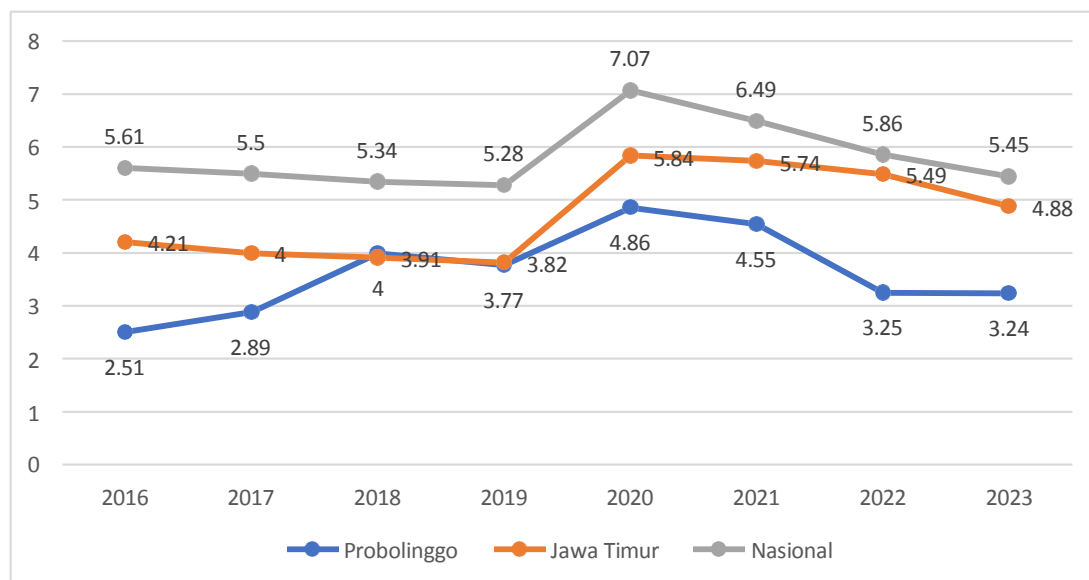
Jika dilihat per komponen penyusun IPM-nya, kondisi empat komponen penyusun IPM Kabupaten Probolinggo memang relatif rendah dibandingkan dengan kondisi komponen tersebut untuk Provinsi Jawa Timur, meskipun terlihat kecenderungan yang terus meningkat. Rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah di Kabupaten Probolinggo di tahun terakhir (2023) masing-masing mencapai 6,29 dan 12,63 tahun, sementara di Provinsi Jawa Timur sudah mencapai angka 8,11 dan 13,38 tahun. Pada komponen tentang kondisi kesehatan, yaitu usia/angka harapan hidup tahun

2023 di Kabupaten Probolinggo sebesar 68,12 tahun, sementara di Provinsi Jatim sudah mencapai angka 72,11 tahun. Pun demikian dengan pengeluaran per kapita di Kabupaten Probolinggo yang masih mencapai Rp. 11,77 juta, sementara di Provinsi Jawa Timur sudah mencapai Rp. 13,87 juta. Dengan demikian, Kabupaten Probolinggo harus mampu mempercepat dan meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan perekonomian masyarakatnya, sehingga dapat mengejar ketertinggalan kualitas pembangunan manusianya.

5. Tingkat Pengangguran yang Cenderung Meningkat

Permasalahan makro lain yang perlu diperhatikan di Kabupaten Probolinggo adalah kecenderungan meningkatnya angka atau tingkat pengangguran.

Gambar 3.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Berdasarkan Gambar 3.8, Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya mulai dari 2017 hingga 2018. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2019, namun kembali meningkat di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19, meskipun tidak sebesar peningkatan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Angka yang cenderung berada di bawah angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional menunjukkan bahwa kondisi penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Probolinggo lebih baik. Kondisi yang baik ini pun terlihat dengan kecenderungan turunnya tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Probolinggo tahun 2021 hingga 2023. Walaupun demikian, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2023 yang lebih tinggi daripada tahun 2016 menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan tidak lebih baik daripada tahun 2016. Hal ini tidak boleh dianggap hal yang sepele. Karenanya, di masa mendatang, upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka masih menjadi hal utama yang harus dilakukan di Kabupaten Probolinggo.

Tingkat pengangguran terkait erat dengan kesesuaian antar supply dan demand tenaga kerja di daerah. Saat terjadi kesesuaian antara jumlah maupun kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar/perekonomian dengan yang tersedia, maka tingkat pengangguran akan dapat ditekan. Karenanya, isu terkait yang harus diselesaikan di masa mendatang antara lain: (a) ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan penawaran/jumlah tenaga kerja yang membutuhkannya. Untuk memenuhi hal ini maka investasi dan perekonomian harus terus tumbuh; (b) kesesuaian kompetensi/keahlian tenaga kerja yang tersedia dengan yang dibutuhkan pasar; (c) pengendalian jumlah penduduk sehingga pertumbuhan tenaga kerja tetap terkendali dan sesuai dengan kebutuhan pasar/perekonomian.

6. Kualitas Lingkungan Hidup serta Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur relatif Rendah

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Probolinggo yang diukur melalui indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) memperlihatkan kisaran di angka 60,38 hingga 64,14 di tahun 2019-2023 yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang di tahun 2022 masing-masing sebesar 69.92 dan 72.42, maka kualitas lingkungan hidup (yang dilihat dari kualitas air, udara dan tutupan lahan) Kabupaten Probolinggo relatif lebih rendah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 juga mengemukakan permasalahan lingkungan yang harus diselesaikan di masa mendatang. Beberapa permasalahan yang dimaksud adalah kualitas air yang masih rendah dan belum mencapai target yang telah ditetapkan, budaya penanganan sampah yang masih berpeluang merusak lingkungan (dibakar atau dibuang ke sungai/laut), sarana prasarana pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas, serta target pengelolaan sampah jangka pendek dan panjang yang belum tercapai. Lebih lanjut, dokumen KLHS menyebutkan bahwa aktivitas primer yang memiliki dampak ri

siko tinggi terhadap lingkungan ada pada kawasan industri dan pertambangan.

Capaian pembangunan infrastruktur sekaligus bidang lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo juga diukur melalui Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan. Indeks ini merupakan kombinasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Keterjangkauan Layanan Infrastruktur. Nilai indeks ini di tahun 2022 sebesar 64.98 dan menurun menjadi 64.6 di tahun 2023. Angka yang menurun dan masih relatif jauh dari angka maksimal (100) ini berarti penyediaan layanan infrastruktur serta lingkungan hidup yang berkualitas masih menjadi permasalahan.

Kondisi infrastruktur wilayah Kabupaten Probolinggo juga masih terbatas. Hingga tahun 2023, saluran irigasi dalam kondisi baik masih di angka 47,81%, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih baru mencapai

64.02%, rumahtangga bersanitasi baru mencapai 63,18%, persentase kawasan pemukiman layak sebesar 75,41%, serta Indeks jalan berkeselamatan baru mencapai 32%. Berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, serta perhubungan, baik yang teridentifikasi di jangka menengah maupun panjang, menjadi faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo yang perlu diselesaikan di masa mendatang. Permasalahan utama yang dimaksud di antaranya adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berbasis penataan ruang, baik karena keterbatasan dana, sumberdaya manusia, maupun kelembagaan/tata kelola pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur dasar maupun wilayah. Budaya masyarakat/stakeholders yang belum mendukung penyediaan maupun pemanfaatan infrastruktur dasar (perumahan) yang baik juga mempengaruhi upaya pemenuhan infrastruktur wilayah.

Kejadian bencana alam yang berdampak pada rusaknya infrastruktur turut mempengaruhi upaya pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah khususnya serta keberlanjutan pembangunan pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak negatif yang nyata di dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Probolinggo, termasuk risiko terjadinya bencana. Indeks risiko bencana di Kabupaten Probolinggo memang relatif menurun, yaitu yang semula 156,7 pada tahun 2019, menjadi 152,40 di tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan indeks risiko bencana Jawa Timur yang pada tahun 2023 sebesar 118,61, maka ketahanan terhadap bencana daerah Kabupaten Probolinggo harus terus ditingkatkan sehingga risiko terhadap bencana pun bisa ditekan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka mendukung pembangunan secara optimal di masa mendatang, maka diperlukan: (1) penyelesaian permasalahan lingkungan hidup sekaligus peningkatan daya dukung dan tampung lingkungan; (2) peningkatan dana atau optimalisasi penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah; serta (3) penurunan risiko bencana atau peningkatan ketahanan bencana. Hal ini urgen diperlukan

karena kuantitas dan kualitas infrastruktur yang tahan terhadap bencana serta kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi pendukung utama pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

7. Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Perlu Ditingkatkan

Kinerja tata kelola pemerintahan juga menjadi hal krusial dalam menentukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik setidaknya dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien dan selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah pada khususnya dan penyelenggara pemerintahan daerah pada umumnya. Ukuran kinerja tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Di tahun 2020, IRB Kabupaten Probolinggo sebesar 65,72 dan berpredikat B atau terkategori Baik dan menurun di tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 62,81 dan 63,05 meskipun tetap terkategori Baik. Pada tahun 2023, IRB Kabupaten Probolinggo meningkat tajam menjadi 77,26 atau berpredikat BB. Walaupun demikian, dengan kondisi ini, pemerintah Kabupaten Probolinggo tetap harus meningkatkan kualitas tata kelolanya untuk menuju predikat A atau AA berkategori memuaskan atau sangat memuaskan dengan angka di atas 80.

Peningkatan tata kelola pemerintahan identik dengan peningkatan kualitas atau kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan, termasuk meningkatkan pelayanan publik. Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur, sarana prasarana maupun sistem kelembagaan pendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan kuantitas dan kualitas sesuai kebutuhan terkini merupakan keniscayaan. Pengembangan sumberdaya penyelenggaraan tata kelola tersebut juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini maupun hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan riset sehingga selalu inovatif. Selain itu, mengingat pembangunan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, maka peningkatan pelibatan seluruh stakeholders dalam pembangunan juga

menjadi keniscayaan. Dengan demikian, berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di atas menjadi isu yang harus dijawab dalam pembangunan Kabupaten Probolinggo di masa mendatang.

Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 menyimpulkan faktor-faktor penghambat pembangunan yang sekaligus menjadi permasalahan pembangunan saat ini dan yang akan datang. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain:

1. Keterbatasan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah masih menjadi faktor penghambat yang seringkali muncul;
2. Struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo yang masih bertumpu pada sektor pertanian yang cenderung rentan mengalami goncangan membuat pertumbuhan ekonomi daerah seringkali berfluktuatif;
3. Kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang masih terbatas juga menjadi faktor penghambat sekaligus pendorong jika hal ini dapat teratasi. Permasalahan lingkungan alam dan sumberdaya alam juga muncul dan dapat mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang;
4. Kemiskinan dan ketidak-merataan pembangunan masih menjadi isu yang muncul;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pentahelix, sudah menjadi tuntutan. Demikian pula program pembangunan yang multi sektor sesuai kebutuhan pembangunan sudah menjadi keharusan. Pendekatan implementasi program pembangunan yang THIS (tematik, holistic, integratif, dan spasial) diharapkan mampu menghasilkan program yang komprehensif sesuai kebutuhan;
6. Kondisi tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor penghambat sekaligus pendorong saat permasalahan teratasi dari berbagai capaian misi dan sasaran RPJPD Tahun 2005-2025. Komitmen dan upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem tata kelola sesuai kebutuhan good dan clean;

governance yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi keharusan di masa mendatang.

Faktor-faktor penghambat pembangunan Kabupaten Probolinggo tersebut harus diselesaikan di masa mendatang. Karenanya, RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045 harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang terjadi hingga tahun terkini maupun menyelesaikan berbagai faktor penghambat yang telah diuraikan di atas.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Isu internal permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya (sub bab 3.1) merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya hingga saat ini. Hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan yang disajikan dalam dokumen evaluasi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Beberapa isu internal berdasarkan permasalahan daerah adalah:

- (i) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- (ii) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari berbagai aspek/urusan atau dengan kata lain pembangunan manusia;
- (iii) Percepatan pembangunan sektor lain (industri dan jasa), khususnya yang berbasis pertanian, untuk memperkuat fundamental ekonomi Kabupaten Probolinggo di masa mendatang, sekaligus memberikan kesempatan kerja yang lebih tinggi untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka;

- (iv) Percepatan pembangunan sarana prasarana wilayah hendaknya dilakukan secepatnya di masa mendatang. Bagaimana pun, ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai secara langsung atau tidak langsung akan memberikan multiplier effect bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- (v) Urgensi implementasi pembangunan berwawasan lingkungan sehingga keberlanjutan pembangunan akan terjamin;
- (vi) Keberpihakan pada wilayah atau kelompok termajinalkan;
- (vii) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pentahelix, sudah menjadi tuntutan. Demikian pula program pembangunan yang multi sektor sesuai kebutuhan pembangunan sudah menjadi keharusan. Pendekatan implementasi program pembangunan yang THIS (tematik, holistic, integratif, dan spasial) diharapkan mampu menghasilkan program yang komprehensif sesuai kebutuhan;
- (viii) Perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui komitmen dan upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem tata kelola sesuai kebutuhan good dan clean governance yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, kelompok isu strategis kedua adalah isu yang berasal dari luar atau eksternal Kabupaten Probolinggo, baik yang berupa isu internasional, nasional, maupun berupa kebijakan pemerintah pusat. Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan Kabupaten Probolinggo di masa mendatang, baik positif (dikenal sebagai peluang) maupun negatif (dikenal sebagai tantangan), dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Peluang bisa menjadi isu strategis karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak besar bagi pembangunan Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, tantangan pun bisa menjadi isu strategis yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak diselesaikan dan/atau diantisipasi.

Telaah terhadap isi-isu internasional (global) menghasilkan isu-isu tingkat global yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, yaitu:

A. Isu Strategis Global / Internasional

1. Isu Pencapaian Sustainable Development Goals

Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Pimpinan negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 Millenium Development Goals (hingga tahun 2015) dan dilanjutkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030. Setidaknya hingga tahun 2030, hal ini masih akan menjadi isu global. Seluruh komponen negara, tidak terkecuali seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing.

Terkait isu ini, pembangunan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan pembangunannya, baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Secara berkala, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dievaluasi untuk selanjutnya menjadi rekomendasi rencana pembangunan selanjutnya.

2. Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan Mengatasinya

Isu tentang pembangunan di dunia yang harus memperhatikan lingkungan sebenarnya telah ada sejak tahun 1992 melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Perubahan iklim dan dampak negatifnya yang terus berlanjut menuntut adanya konvensi atau perjanjian internasional antar Negara-negara di dunia untuk bersama-sama melakukan upaya penurunan faktor penyebab pemanasan global, pemicu perubahan iklim. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai aktifitas manusia dianggap sebagai

penyebab rusaknya lapisan ozon bumi yang berimplikasi pada pemanasan global. Karenanya, tuntutan untuk melakukan rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi kebijakan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tidak hanya itu, dampak perubahan iklim telah menyebabkan bentuk bencana alam yang bervariasi dengan intensitas yang semakin tinggi dan beragam. Berbagai upaya untuk mitigasi maupun penanganan bencana menjadi tuntutan global pula.

3. Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, membawa perubahan-perubahan di setiap lini kehidupan. Digitalisasi sebagai akibat perkembangan TIK telah merubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk tatanan dalam berusaha atau pun beraktifitas sehari-hari. Perubahan tatanan kehidupan yang mendasar inilah yang disebut dengan disrupsi. Dunia, tidak terkecuali Indonesia dan wilayahnya sedang memasuki era disrupsi yang akan mengubah perilaku masyarakat hingga kebutuhan-kebutuhannya.

Pada satu sisi, dampak positif sangat dirasakan oleh manusia. Teknologi memudahkan aktivitas sehari-hari sehingga mampu meningkatkan produktifitas. TIK telah mempercepat arus penyampaian informasi (komunikasi) dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi milenial saat ini menuntut masyarakat untuk aktif mengetahui informasi terkini, oleh karena itu teknologi informasi dan komunikasi saat tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat setiap harinya. Hal ini terlihat jelas dari perilaku manusia setiap harinya yang tidak dapat terlepas dari telepon pintar. Adanya perkembangan TIK juga menyebabkan terjadinya efisiensi dalam memperoleh informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan dengan adanya penghematan waktu, tenaga, biaya, dan hal-hal lain yang berdampak pada peningkatan hasil produksi. Dunia telah dihadapkan pada revolusi industri generasi keempat (Revolusi Industri 4.0)

yang ditandai dengan penggunaan supercomputer dan robot pintar. Revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan antara produksi industri dengan dunia online. Tujuan dari revolusi industri ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi digital dan otomatisasi. Akibatnya akan terjadi perubahan komposisi lapangan kerja, karena tenaga kerja pada akhirnya akan digantikan oleh mesin yang lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa.

Pada sisi lain, perkembangan TIK akan berdampak negatif. Saat ini sudah banyak pekerjaan yang semula dilakukan tenaga kerja telah beralih ke mesin, aplikasi atau hasil teknologi lainnya. Hal ini dinilai lebih efisien sehingga mengancam hilangnya berbagai jenis pekerjaan sekaligus lowongan pekerjaan. Jika hal ini tidak terantisipasi, maka akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang cenderung akan meningkat dengan segala dampaknya. Globalisasi dan arus komunikasi serta informasi yang cepat pun dapat merubah perilaku dan masyarakat, utamanya kaum muda/milenial yang lebih melek informasi. Permasalahan akibat pergeseran perilaku dan budaya dapat dengan mudah terjadi. Kecerdasan masyarakat dalam menjaring informasi yang baik/benar sangat dibutuhkan agar dampak positif yang diperoleh dan dampak negatif informasi dapat dieliminasi. Masyarakat pun dituntut untuk melek teknologi dan memanfaatkannya agar tidak 'tertinggal'.

Pemerintah daerah pun, tidak terkecuali Kabupaten Probolinggo, harus memanfaatkan dampak positif perkembangan TIK ini untuk peningkatan produktifitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk: (1) meningkatkan produksi dan produktifitas semua sektor/lapangan usaha perekonomian; (2) meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pelayanan terhadap masyarakat; (3) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan yang mampu menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan revolusi industri 4.0. Diperlukan strategi khusus agar dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mematahkan semangat

pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo, namun dijadikan sebagai pendorong.

4. Isu Geoekonomi dan Geopolitik

Perkembangan ipteks telah menyebabkan globalisasi, termasuk salah satunya dalam aktifitas perekonomian daerah, nasional, maupun internasional. Sumberdaya dan aktifitas ekonomi dapat dengan mudah terjadi tanpa terhalang oleh batas geografi. Perdagangan global sudah terjadi, tidak hanya dilingkup ASEAN, namun juga dunia. Negara-negara yang mampu melakukan efisiensi dalam aktifitas perekonomiannya, maka negara tersebut akan berperan penting dalam perekonomian dunia. Barang, jasa, sumberdaya manusia, modal (investasi), atau sumberdaya lainnya akan mudah keluar dan masuk Indonesia, termasuk Kabupaten Probolinggo. Persaingan di pasar barang/jasa, tenaga kerja, maupun uang, tidak hanya terjadi antar pelaku ekonomi lokal, regional, dan nasional, namun juga internasional. Karenanya, peningkatan daya saing daerah maupun entitas di dalamnya menjadi keniscayaan agar tetap bisa ada, bersaing dan tidak tertinggal.

Perang antara Rusia dan Ukraina serta Israel dan Palestina telah berdampak pada konflik dan ketegangan politik antar negara-negara pendukungnya, tidak terkecuali negara adidaya dan berdampak pada sisi kehidupan lainnya di negara-negara di dunia. Perang dan ketegangan politik telah mengakibatkan tekanan inflasi global yang tinggi serta krisis ekonomi dan pangan sehingga menyebabkan resesi global. Jika tidak diantisipasi maka Indonesia akan terpengaruh, tidak hanya terseret pada ketegangan politik antar negara namun juga terimbas resesi dunia.

Pemerintah Indonesia pun memproyeksikan bahwa resesi ekonomi global tersebut akan berdampak pula pada perekonomian Indonesia, meskipun diharapkan tidak menimbulkan resesi ekonomi di Indonesia. Beberapa dampak resesi perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia antara lain pada perdagangan luar negeri. Saat ekspor komoditi unggulan Indonesia terkendala oleh turunnya permintaan global akibat resesi ekonomi, maka Neraca perdagangan akan defisit.

Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari ekspor-pun menurun sehingga menurunkan pendapatan negara secara keseluruhan. Nilai tukar rupiah yang semakin merosot seiring melemahnya perekonomian negara-negara besar juga berdampak pada nilai impor yang semakin besar dan memberatkan Indonesia, sehingga defisit neraca perdagangan juga semakin besar. Neraca yang defisit akan mengurangi Pendapatan Nasional secara keseluruhan.

Bagi pemerintah daerah, resesi global akan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Bagi daerah yang perekonomian daerahnya terkait langsung dengan perdagangan luar negeri, tentu akan terpengaruh langsung, sebagaimana uraian sebelumnya. Sementara itu, dampak tidak langsungnya adalah implikasi dari menurunnya penerimaan negara dan/atau meningkatnya pengeluaran negara untuk mengurangi dampak resesi dunia terhadap Indonesia. Daerah yang tingkat kemandiriannya rendah, di mana sumber utama penerimaan daerahnya adalah dana transfer, maka sedikit banyak akan terpengaruh. Saat alokasi dana negara untuk transfer ke daerah berkurang karena penerimaan negara berkurang, maka penerimaan daerah bersumber dari dana transfer pun akan menurun. Saat hal ini tidak diimbangi dengan sepadan oleh peningkatan sumber penerimaan daerah yang lain, maka penerimaan total daerah juga akan menurun. Implikasi berikutnya adalah kapasitas fiskal daerah pun dalam membiayai proses pembangunan daerah juga akan menurun.

Selain itu, perekonomian negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang diperkirakan terus meningkat dan akan menguasai sebagian besar perekonomian dunia. Kemampuan setiap negara melalui kebijakan makro ekonominya dalam 'bersaing' dalam perekonomian global akan menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonominya dari negara maju. Kebijakan perdangan interregional atau internasional yang terbuka dan tepat, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumberdaya manusia yang mendukung akan menjadi penentu bagi negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia,

untuk maju mengejar negara-negara maju. Kabupaten Probolinggo pun diharapkan dapat berkontribusi di dalamnya.

B. Isu Strategis Nasional

Kondisi eksternal lain yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Probolinggo di masa mendatang adalah amanah kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan nasional tersebut harus ditelaah untuk selanjutnya menjadi pertimbangan/diperhatikan saat menyusun isu strategis, tujuan, sasaran hingga program/kegiatan pembangunan ke depan.

1. Telaah terhadap arahan RPJPN tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045 telah mengarahkan pembangunan nasional yang harus diacu dan didukung oleh pembangunan seluruh daerah melalui visi, misi dan arah kebijakannya. Visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2025 – 2045 adalah “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Untuk mencapainya, ditetapkan 8 misi dan 17 arah (tujuan) pembangunan, yaitu:

- i. Transformasi Sosial dengan arah kebijakan (i) Kesehatan untuk semua; (ii) Pendidikan Berkualitas yang merata; dan (iii) Perlindungan sosial yang adaptif;
- ii. Transformasi Ekonomi dengan arah (iv) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; (v) penerapan ekonomi hijau; (vi) transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; (vii) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- iii. Transformasi Tatakelola dengan arah (viii) regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
- iv. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan arah (ix) hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi sustansial; (x) stabilitas ekonomi makro; (xi) ketangguhan diploma dan pertahanan berdaya gentar kawasan);

- v. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan arah (xi) beragama mashlahat dan berkebudayaan maju; (xii) keluarga berkualitas, kesadaran gender, dan masyarakat inklusif; (xiii) lingkungan hidup berkualitas; berketahanan energy, air, dan kemandirian pangan; (xiv) Resiliansi terhadap bencana dan perubahan iklim;
- vi. Pembangunan Kewilayah yang merata dan berkeadilan dengan arah (xv) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- vii. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan arah (xvi) mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- viii. Kestinambungan pembangunan dengan arah (xvii) mewujudkan Kestinambungan pembangunan).

RPJPN pun mengarahkan pentahapan Pembangunan Indonesia Emas 2045 dalam empat tahapan yang masing-masing adalah: (1) Tahapan pertama (2025-2029) : Perkuatan pondasi transformasi; (2) Tahapan kedua (2030-2034) : Akselerasi transformasi; (3) Tahapan ketiga (2035-2039) : Ekspansi global; dan (4) Tahapan keempat (2040-2045) : Perwujudan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, sasaran utama dari Visi Indonesia Emas adalah: (1) Pendapatan per kapita setara dengan negara maju; (2) Kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) Daya saing SDM meningkat; dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju nett zero emission.

RPJPN Tahun 2025-2045 pun telah memberikan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang mencakup Kabupaten Probolinggo di dalamnya. Sebagaimana telah diuraikan di Bab IV, Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu lokasi transformasi ekonomi pembangunan nasional di Jawa Timur, yaitu pada Koridor Agrikultur Ketahanan Pangan Tapal Kuda dengan pengembangan agro industri sesuai potensi, serta lokasi lanjutan

pembangunan jalan tol Trans Jawa. Hal ini tentu saja menjadi peluang tersendiri yang harus dimanfaatkan oleh Kabupaten Probolinggo.

Visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 harus selaras dengan apa yang telah diuraikan RPJPN. Selain itu, arahan tentang pengembangan pusat dan pengembangan kewilayahan RPJPN, khususnya yang mencakup wilayah Kabupaten Probolinggo, juga harus dirujuk untuk pembangunan kewilayahan di Kabupaten Probolinggo dalam 20 tahun mendatang.

2. Isu pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada Penyelenggaraan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar

Pemerintah pusat melalui kementerian penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan telah menetapkan standard pelayanan minimal (SPM), khususnya pada urusan wajib terkait pelayanan dasar. Pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Probolinggo, dituntut mampu memberikan layanan minimal sama dengan SPM yang telah ditetapkan. Karenanya, pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 harus mampu menjawab pemenuhan SPM ini.

3. Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan, termasuk kebijakan tentang pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kondisi ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Terbitnya kebijakan yang tidak jelas akan mempengaruhi ketidakjelasan pembangunan di daerah. Termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana banyak kewenangan yang mana obyek pembangunan adalah masyarakat di daerah ditarik oleh Pusat dan Provinsi. Hal ini tentu akan membuat masyarakat dan pemerintah daerah menjadi bingung, tidak dilaksanakan karena bukan kewenangan, namun apabila dilaksanakan menyalahi aturan.

C. Isu Strategis Regional (Provinsi Jawa Timur)

Isu strategis regional yang perlu diperhatikan adalah isu strategis Provinsi Jawa Timur yang diungkapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Terdapat tujuh isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu pembangunan di tahun 2025-2045, yaitu: (1) Penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumberdaya lokal; (2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan; (3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat; (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kepedulian sosial dan nilai-nilai budaya lokal; (5) Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan; (6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas penanggulangan bencana; dan (7) Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, pembangunan di Kabupaten Probolinggo pun berusaha berkontribusi bagi penyelesaian berbagai isu strategis tersebut di atas.

Isu strategis regional/Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan jangka panjang kabupaten Probolinggo adalah pada arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045, khususnya yang terkait dengan pembangunan kewilayahan yang mencakup Kabupaten Probolinggo. Seperti telah diuraikan dalam Bab II, Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu lokasi transformasi ekonomi pembangunan nasional di Jawa Timur, yaitu pada Koridor Agrikultur Ketahanan Pangan Tapal Kuda. Kabupaten Probolinggo diarahkan sebagai lokasi pengembangan kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo (industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (consumer goods)) serta

Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada ruas Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi dan Surabaya-Lamongan. Dinyatakan pula bahwa fokus pengembangan agroindustri adalah pada pengolahan produk komoditi perkebunan (sesuai potensinya) dengan dukungan investasi dari perguruan tinggi berupa riset dan vokasi yang mendukung bidang pertanian dan agroindustri. Karenanya, agar sinergi dan mendukung implementasi kebijakan nasional tersebut, fokus pembangunan pembangunan kewilayahan Kabupaten Probolinggo juga diarahkan ke pengembangan pertanian dan agroindustry tersebut.

Arahan transformasi ekonomi Jawa Timur masih berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila, Bromo-Tengger-Semeru (BTS) serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan BTS yang diarahkan sebagai poros tengah sekaligus entry point pariwisata yang terhubung dengan Selingkar Wilis dan Ijen, serta pengembangan industri agro. Sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Timur, maka pembangunan kewilayahan Kabupaten Probolinggo diarahkan pada pengembangan industri agro (sesuai potensi) dan juga pariwisata. Dalam peraturan ini telah disebutkan program/proyek infrastruktur wilayah, kabupaten/kota yang menjadi lokasinya, beserta sumber pembiayaan yang harus dilakukan, tidak terkecuali di Kabupaten Probolinggo. Hal ini juga menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mempercepat pembangunan daerahnya.

D. Isu Strategis Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang daerah Lainnya

1. Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Hasil Evaluasi SDGs Kabupaten Probolinggo.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo juga mengacu pada rekomendasi hasil KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo. KLHS seringkali diidentikkan dengan evaluasi capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dokumen KLHS Kabupaten Probolinggo telah tersedia dan merekomendasikan 8 (delapan) isu strategis yang dirumuskan dari hasil evaluasi terhadap capaian SDGs kabupaten, serta berbagai masukan dari rangkaian Konsultasi Publik (KP) yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen KLHS ini.

Terdapat 8 isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo dalam 20 Tahun mendatang yang direkomendasikan KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo, yaitu:

1. Peningkatan Jaminan Kesehatan Dan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi;
2. Perluasan Akses Dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan (Khususnya Perguruan Tinggi);
3. Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan, Stabilitas Harga Pangan Dan Penurunan Gizi Buruk Dan Stunting;
4. Pemerataan Ekonomi Dan Penurunan Angka Kemiskinan;
5. Pengelolaan Dan Pemerataan Sanitasi Yang Berkelanjutan;
6. Konservasi sumberdaya air, lahan serta mitigasi bencana;
7. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Secara Merata Pada Seluruh Lapisan Masyarakat; dan
8. Peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Dan Daya Saing Daerah.

Jika dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) pilar SDGs, maka isu strategis KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045 pada Pilar Sosial adalah isu kesatu hingga ketiga, pada Pilar Ekonomi adalah isu strategis keempat,

Pilar Lingkungan adalah isu strategis kelima dan keenam, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola pada isu strategis ke 7 dan 8.

Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo juga telah merekomendasikan adanya “upaya tambahan” untuk memperbaiki capaian indikator-indikator SDGs yang belum mencapai target. Upaya tambahan harus dilakukan untuk mencapai target 67 indikator yang hingga tahun ini belum tercapai. Dokumen KLHS ini telah menguraikan sasaran serta rekomendasi indikasi program/kegiatan untuk setiap isu strategis yang telah teridentifikasi di atas. Sementara itu, untuk indikator SDGs yang telah berhasil mencapai target berdasarkan hasil proyeksi indikator untuk tahun 2045 berdasarkan data baseline yang ada dirumuskan rekomendasi dengan skenario tanpa upaya tambahan. Adapun rekomendasi yang diusulkan untuk mempertahankan capaian indikator agar tetap pada progres ataupun capaian yang tepat maka dirumuskan beberapa rekomendasi, yaitu: (1) Mempertahankan/meningkatkan capaian keseluruhan indikator yang telah mencapai target melalui intervensi pelaksanaan program/ kegiatan; dan (2) Mempertahankan/meningkatkan capaian keseluruhan indikator yang telah mencapai target dengan melakukan pembagian peran secara optimal dengan stakeholders.

2. Arahan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2044 serta Dokumen Rencana Jangka Panjang atau Masterplan Sektoral yang Tersedia.

RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 – 2044 telah memberikan arahan tentang pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kaedah yang berlaku. Fokus arahan RTRW yang menjadi perhatian dan acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Probolinggo adalah pada penetapan lokasi kawasan-kawasan strategis maupun zonasi lainnya. Rencana Kawasan Strategis, Khususnya Strategis Kepentingan EKONOMI menjadi acuan untuk perencanaan yang THIS (tematik, holistik, Integratif dan Spasial) di masa mendatang untuk percepatan pembangunan ekonomi

kabupaten. Sementara itu, Rencana zonasi lainnya menjadi acuan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Arah tentang pusat-pusat pertumbuhan maupun kawasan dalam RTRW telah diuraikan dalam Bab IV dokumen ini.

Begitu pula dengan arahan dokumen rencana pembangunan jangka panjang atau masterplan pembangunan sektoral yang saat ini tersedia. Tercatat terdapat dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2037, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2052, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 – 2034, serta Masterplan Drainase Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – 2037. Arahan rencana pengembangan dari berbagai dokumen ini telah diuraikan pada Bab IV dokumen RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 ini.

Analisis lanjutan dilakukan terhadap berbagai dokumen rencana pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut. Hasilnya adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan (yang diprioritaskan) pada periode tahun 2025 – 2045. Arah kebijakan yang dimaksud telah diuraikan pula dalam Bab II, dokumen RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 ini.

E. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045.

Berdasarkan seluruh isu, baik internal maupun eksternal daerah, maka dipilihlah isu yang dianggap prioritas untuk diselesaikan (jika dalam bentuk permasalahan), dihadapi (jika dalam bentuk tantangan), atau pun dimanfaatkan/ditangkap (jika dalam bentuk potensi dan peluang). Isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah. SDM Kabupaten Probolinggo harus ditingkatkan agar

unggul, mampu bersaing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi tantangan kehidupan yang menglobal dan tuntutan jaman, termasuk persaingan global dan ekses negatif perkembangan jaman terhadap perilaku dan budaya masyarakat. Isu ini juga mencakup berbagai upaya peningkatan layanan dan jaminan kesehatan, khususnya bagi ibu dan bayi, serta perluasan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu hingga pendidikan tinggi, sebagaimana direkomendasikan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo;

2. Penurunan kemiskinan yang masih tinggi dan penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan penduduk miskin. Pemenuhan kebutuhan sosial dasar secara merata maupun penciptaan lingkungan sosial yang sehat diharapkan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Isu ini mencakup pula peningkatan kualitas ketahanan pangan, stabilitas harga pangan dan penurunan gizi buruk dan stunting, pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, serta pengelolaan dan pemerataan sanitasi yang berkelanjutan, sebagaimana direkomendasikan oleh KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo;
3. Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Probolinggo ke arah dominasi sektor-sektor bernilai tambah tinggi, namun tetap berbasis (berhulu) dari sektor dominan saat ini, yaitu pertanian dalam arti luas. Struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo yang masih bertumpu pada sektor pertanian yang cenderung rentan mengalami goncangan, khususnya karena perubahan iklim, membuat pertumbuhan ekonomi daerah seringkali berfluktuatif. Pembangunan sektor potensi lokal (pertanian dalam arti luas) harus didukung oleh sektor-sektor lainnya yang memberikan nilai tambah tinggi dan/atau memberikan efek pengganda (multiplier effect) tinggi, namun tetap berbasis pada sektor pertanian. Sektor yang dimaksud, misalnya industri, perdagangan, jasa – misalnya pariwisata – yang berbasis sektor pertanian/unggulan Kabupaten

Probolinggo. Kontribusi sektor-sektor non pertanian tersebut harus ditingkatkan sehingga transformasi struktural perekonomian akan terjadi. Perubahan ini harus diiringi dengan perubahan struktur ketenagakerjaan yang juga sejalan sehingga produktivitas tenaga kerja sektor perekonomian akan meningkat (terjadi transformasi struktural perekonomian yang seimbang). Isu ini merupakan upaya penciptaan perekonomian yang inklusif yang sejalan dengan isu pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, sebagaimana di rekomendasikan oleh KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo;

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang dipastikan berwawasan lingkungan dan aman bencana. Kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat (air bersih dan sanitasi) maupun infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur sumberdaya air lainnya, infrastruktur transportasi, dll) yang merata dan mendukung perekonomian wilayah harus dipenuhi secara merata dan berkualitas. Infrastruktur berwawasan lingkungan berarti upaya untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan ekonomi dengan mempertimbangkan konsekuensi terhadap lingkungan dan ekosistem alam. Sementara infrastruktur aman dari bencana berarti infrastruktur telah didesain dan dibangun sedemikian rupa sehingga berkualitas dan diharapkan tahan dan aman dari bencana serta berkelanjutan. Isu ini sejalan dengan rekomendasi isu KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo, khususnya pada pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan serta pengelolaan dan pemerataan sanitasi yang berkelanjutan;
5. Penyelesaian permasalahan lingkungan alam dan sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, termasuk akibat perubahan iklim, maupun keterbatasan dan/atau degradasi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Isu ini mencakup pula upaya konservasi sumberdaya air, lahan serta mitigasi bencana, sebagaimana direkomendasikan KLHS Kabupaten Probolinggo. Isu ini pun sejalan

- dengan isu strategis internasional, yaitu mengatasi dan memitigasi perubahan iklim beserta berbagai dampaknya;
6. Peningkatan partisipasi seluruh stakeholders dalam pembangunan, khususnya hexahelix (masyarakat, swasta/pebisnis, pemerintah dan akademisi, media massa, dan kelembagaan masyarakat), sudah menjadi tuntutan. Demikian pula program pembangunan yang multi sektor sesuai kebutuhan pembangunan yang mengharuskan kerjasama antar perangkat daerah sudah menjadi keharusan. Pendekatan implementasi program pembangunan yang THIS (tematik, holistic, integratif, dan spasial) diharapkan mampu menghasilkan program yang komprehensif sesuai kebutuhan. Kolaborasi pentahelix dalam pembangunan menjadi keharusan. Selain itu, kerjasama/kolaborasi antar pemerintah daerah juga ditingkatkan untuk bersama-sama mempercepat pembangunan daerah. Isu ini pun mencakup upaya pelibatan hexahelix pembangunan dalam penciptaan kemandirian keuangan daerah untuk percepatan pembangunan, baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak maupun sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) lainnya, peningkatan dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), atau pun kolaborasi/partisipasi dalam penyediaan berbagai fasilitas publik;
 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang gesit (agile) dan pelayanan publik yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Perlu komitmen dan upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem tata kelola sesuai kebutuhan good dan clean governance yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi keharusan di masa mendatang. Peningkatan dan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan serta inovasi menjadi keharusan sekaligus menjadi dasar dalam pengelolaan kebijakan/program pembangunan. Dalam isu ini, peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola dan daya saing daerah adalah keharusan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakatnya. Karenanya, perlindungan dan penegakan hukum secara merata pada seluruh lapisan

- masyarakat harus terus ditingkatkan, sebagaimana direkomendasikan oleh KLHS RPJPD Kabupaten Probolinggo;
8. Internalisasi nilai-nilai toleransi, kesetaraan, kebebasan politik (berpendapat) yang mendukung kehidupan masyarakat yang tentram dan nyaman;
 9. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Iptek, hasil riset, inovasi dalam penyelenggaraan semua misi pembangunan.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 ini selaras dengan isu strategis global/internasional, pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Keselarasan tersebut terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo dengan Isu Strategis Internasional, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025-2045

Isu Strategis Global/ Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Timur	Isu Strategis Kabupaten Probolinggo
Pencapaian Sustainable Development Goals	Kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang masih rendah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar	Peningkatan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal	Penurunan kemiskinan yang masih tinggi dan penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan penduduk miskin.
Pencapaian Sustainable Development Goals, Isu Geoekonomi	Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global	Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas,	Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Probolinggo ke arah dominasi sektor-sektor bernilai tambah tinggi,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Isu Strategis Global/ Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Timur	Isu Strategis Kabupaten Probolinggo
	Yang Semakin Meningkat.	Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	namun tetap berbasis (berhulu) dari sektor dominan saat ini, yaitu pertanian dalam arti luas.
	Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah.		
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata.		
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut.		
	Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi		
	Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas		
	Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal.		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Isu Strategis Global/ Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Timur	Isu Strategis Kabupaten Probolinggo
	Ketimpangan Antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang dipastikan berwawasan lingkungan dan aman bencana
Pencapaian Sustainable Development Goals Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan Mengatasinya	Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan.	Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan	Penyelesaian permasalahan lingkungan alam dan sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, termasuk akibat perubahan iklim, maupun keterbatasan dan/atau degradasi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	
Pencapaian SDGs, Isu Geopolitik	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang gesit (agile) dan pelayanan publik yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.
	Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah		Peningkatan partisipasi seluruh stakeholders dalam pembangunan, khususnya hexahelix (masyarakat, swasta/pebisnis, pemerintah dan akademisi, media massa, dan kelembagaan masyarakat)
	Demokratisasi Belum Optimal		Internalisasi nilai-nilai toleransi, kesetaraan, kebebasan politik (berpendapat) yang mendukung kehidupan masyarakat yang tentram dan nyaman.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Isu Strategis Global/ Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Timur	Isu Strategis Kabupaten Probolinggo
Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN).		Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Iptek, hasil riset, inovasi dalam penyelenggaraan semua misi pembangunan.
	Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas		

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 memuat visi dan misi pembangunan daerah dalam periode tersebut. Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terjadi pada tahun 2045. Visi menggambarkan masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah Kabupaten Probolinggo dan menjadi dasar/basis bagi semua pelaku atau pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalaikan pembangunan daerah. Visi merupakan mimpi sekaligus komitmen untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan terjadi pada dua puluh tahun mendatang berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Karenanya, visi harus mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo yang perlu diselesaikan dalam dua puluh tahun mendatang, sebagaimana diuraikan dalam Bab III dokumen RPJPD ini. Visi akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Misi pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi pembangunan memuat substansi antara lain upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur

maupun nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

4.1. Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045

Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045 dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Probolinggo ini nantinya akan diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan dan akan menjadi acuan bagi (calon) Bupati dan Wakil Bupati dalam merumuskan visinya pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045 adalah:

**“KABUPATEN PROBOLINGGO YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2045, yaitu “Maju”, “Sejahtera”, dan “Berkelanjutan”. Ketiga pokok visi ini menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2045. Makna terinci dari ketiga pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

1. **Maju** berarti Kabupaten Probolinggo: (1) memiliki atau didukung oleh **sumberdaya manusia (SDM) Maju**, yaitu SDM yang modern dan adaptif menghadapi segala perubahan jaman, namun tetap berkarakter, berbudaya, dan memegang teguh nilai-nilai agama dan masyarakat; (2) **Daerah dengan Pemerintahan yang maju**: tangguh, adaptif atau

mampu memberikan **pelayanan terbaiknya** sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan jaman yang semakin kompleks dan modern, serta mandiri;

2. **Sejahtera** berarti Kabupaten Probolinggo **(1) Probolinggo memiliki SDM berdaya saing** berarti SDM yang unggul, berkarakter dan beradab. Unggul berarti **SDM yang social dasarnya** terpenuhi secara berkelanjutan, berpendidikan, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjawab kebutuhan jaman dan menghadapi tantangan kehidupan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. SDM berkarakter dan beradab berarti SDM yang berpikiran modern dan inovatif namun tetap memegang teguh aturan agama dan kemasyarakatan; **(2) Probolinggo berdaya saing ekonomi tinggi**: perekonomian inklusif yang **produktif** dan tumbuh mantap, berbasis pada potensi lokal, modern dengan transformasi struktural ekonomi yang seimbang, dan memanfaatkan Iptek serta inovasi secara berkelanjutan;
3. **Berkelanjutan** berarti Kabupaten Probolinggo didukung oleh **infrastruktur yang berwawasan lingkungan**, aktifitas yang ramah lingkungan sehingga **lingkungan hidup** terpelihara dan pembangunan berkeadilan antar generasi. Sarana prasarana (infrastruktur) dasar maupun wilayah harus memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang memperhatikan kelestarian lingkungan, inovatif, memanfaatkan energi baru terbarukan. Produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan dan mendekati zero waste. Praktek baik pengembangan kawasan atau kota ramah lingkungan diimplementasikan dengan baik dan mulai merata di berbagai lokasi di Kabupaten Probolinggo.

Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045 ini selaras dengan visi Indonesia Emas dalam RPJPN maupun visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

Visi RPJPN Tahun 2045 dikenal dengan Visi Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Terdapat empat pokok visi Indonesia Emas, yaitu: (1) **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu** bermakna negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia; (2) **Berdaulat** bermakna Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya; (3) **Maju** bermakna Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil; dan (4) **Berkelanjutan** bermakna Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Pokok visi "Maju" Kabupaten Probolinggo merujuk pada pokok visi "Berdaulat" RPJMN karena bermakna kondisi pemerintahan daerah dengan tata kelola yang tangguh, adaptif dan mandiri. Pokok visi "Maju" Kabupaten Probolinggo juga merujuk pada pokok visi "Maju" RPJMN karena bermakna kondisi SDM yang modern, adaptif, berkarakter. Pokok Visi "Sejahtera" Kabupaten Probolinggo setara dengan Pokok Visi "Berdaulat" RPJMN karena bermakna Ketahanan Sosial yang mantap maupun Pokok Visi "Maju" RPJMN karena bermakna SDM dan perekonomian daerah yang unggul, berdaya saing, inovatif, dan inklusif (adil). Sementara itu, Pokok Visi "Berkelanjutan" Kabupaten Probolinggo selaras dengan Pokok Visi "Berkelanjutan" RPJMN karena bermakna pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan. Pokok Visi "Berakhlak" bermakna pada

masyarakat berkesalehan sosial sehingga tercipta kerukunan hidup beragama dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok ini selaras dengan Pokok Visi “Sejahtera” Kabupaten Probolinggo yang salah satu maknanya adalah kondisi SDM yang unggul dan berkarakter serta memiliki ketahanan sosial yang mantap. Pokok Visi “Maju, Mendunia” Jawa Timur bermakna kesejahteraan, di mana terpenuhinya segala kebutuhan pokok, pendidikan yang layak, terpenuhi jaminan Kesehatan, jaminan sosial, rendahnya tingkat kriminalitas, serta tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi, kesempatan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan serta kesehatan. Jawa Timur pun memiliki stabilitas ekonomi makro terutama kinerja industri, perdagangan dan ekonomi syariah yang kuat untuk melakukan ekspansi perdagangan luar negeri, didukung melalui potensi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global, serta sumber daya alam yang melimpah sehingga produksi dalam negeri memenuhi pasar internasional. Hal ini selaras dengan makna Pokok Visi “Sejahtera” dan “Maju” Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, Pokok Visi “Berkelanjutan” Provinsi Jawa Timur selaras dengan Pokok Visi “Berkelanjutan” RPJPD Kabupaten Probolinggo pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien tanpa merusak lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kualitas kehidupan manusia. Gambar 4.1 memperlihatkan keselarasan visi tersebut.

Gambar 4.1
Keselaran Visi RPJPD Kabupaten Probolinggo dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur



Keselaran Visi pembangunan Kabupaten Probolinggo dengan visi pembangunan jangka panjang nasional maupun Provinsi Jawa Timur berimplikasi pada keselaran sasaran pokok visi dalam RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kabupaten Probolinggo. Sasaran pokok visi mencakup lima kondisi, yaitu terciptanya pendapatan per kapita masyarakat yang setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0% dengan ketimpangan yang terus berkurang, kepemimpinan dan pengaruhnya di Dunia Internasional meningkat, daya saing sumberdaya manusia yang meningkat, dan intensitas emisi gas rumahkaca/GRK menurun menuju Net Zero Emission). Mengingat terdapat perbedaan cakupan dan kewenangan antara pusat dan daerah, maka terdapat pula perbedaan pada indikator sasaran pengaruh kepemimpinan dan daya saing negara dan daerah. Begitu pula dengan target capaian indikatornya. Secara rinci, sasaran visi, indikator sasaran serta target capaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.2. Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045

Sebagai upaya untuk mencapai visi “**Kabupaten Probolinggo Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2045 telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi pertama dan kedua, yaitu Kabupaten Probolinggo yang “Maju” dan “Sejahtera”. Untuk mewujudkan SDM sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang sejahtera, pemerintah Kabupaten Probolinggo harus melakukan transformasi sosial agar masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang tinggi. Transformasi sosial berarti memastikan pemberian pelayanan kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan inklusif yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif. Karenanya, penyediaan penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas harus dilakukan.

2. Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi.

Misi ini juga diselenggarakan untuk mencapai pokok visi pertama dan kedua, yaitu Kabupaten Probolinggo yang “Maju” dan “Sejahtera”. Perlindungan serta pemberian jaminan sosial kepada masyarakat dari segala bentuk bencana maupun gangguan keamanan, ketertiban, dan berbagai konflik harus dilakukan seoptimal mungkin untuk penciptaan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis. Penanganan dan mitigasi bencana harus dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

3. Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap.

Misi ini pun diselenggarakan untuk mencapai pokok visi pertama dan kedua, yaitu Kabupaten Probolinggo yang “Maju” dan “Sejahtera”. Berbagai upaya

pengendalian penduduk serta pemberdayaan perempuan juga menjadi keharusan untuk kesetaraan gender maupun mendukung penciptaan keluarga-keluarga sejahtera. Selain itu, upaya peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat serta berkehidupan kebangsaan menjadi keharusan agar masyarakat hidup rukun tanpa konflik yang berarti.

4. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi kedua, yaitu Kabupaten Probolinggo yang “Sejahtera”. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi, maka pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata dan inklusi, khususnya bagi kelompok masyarakat dan daerah yang termarginalkan. Sektor pertanian yang saat ini masih menjadi kontributor perekonomian daerah sekaligus mata pencaharian sebagian besar masyarakat harus dikuatkan agar tidak rentan akibat perubahan iklim atau guncangan ekonomi dan sosial lainnya. Transformasi struktural ekonomi, yaitu menggeser struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo yang semula didominasi oleh sektor pertanian (primer) yang cenderung memiliki produktifitas relatif rendah menjadi dominasi sektor-sektor industri (sekunder), perdagangan dan jasa-jasa (tersier) yang memiliki produktifitas lebih tinggi. Transformasi juga harus seimbang, di mana pergeseran nilai produksi perekonomian diiringi dengan pergeseran tenaga kerja, sehingga produktifitas tenaga kerja akan meningkat. Karenanya, pembangunan sektor-sektor maupun sub daerah atau kawasan potensial lainnya, khususnya yang mampu memberikan multiplier effect tinggi harus dilakukan secara bertahap, terarah, komprehensif dan konsisten. Kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Probolinggo harus dibuka seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan ekonomi juga harus diupayakan.

Penerapan hasil riset, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi menjadi keharusan dalam peningkatan produktifitas

ekonomi. Transformasi digital dalam aktifitas ekonomi serta integrasi perekonomian Kabupaten Probolinggo ke perekonomian regional Jawa Timur, nasional, bahkan dunia juga harus dilakukan untuk menangkap peluang globalisasi ekonomi maupun teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi, maka green economy maupun blue economy harus diimplementasikan.

5. Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Misi ini juga diselenggarakan untuk mencapai pokok visi kedua, yaitu Kabupaten Probolinggo yang “Sejahtera”. Infrastruktur merupakan salah satu sumberdaya yang harus disediakan untuk mendukung pembangunan. Penyediaan infrastruktur dasar, seperti sanitasi, air bersih, energi, dll., harus dilakukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana transportasi, dll, harus dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah. Infrastruktur yang disediakan seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, termasuk di dalamnya aman bencana. Selain itu, mengingat penyediaan infrastruktur terkait langsung dengan pemanfaatan ruang/lingkungan, maka demi keberlanjutan pembangunan seluruh penyediaan infrastruktur harus memperhatikan dan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata.

Misi ini juga diselenggarakan untuk mencapai pokok visi Kabupaten Probolinggo yang “Maju” dan “Sejahtera”. Masyarakat Kabupaten Probolinggo akan maju dan sejahtera jika pembangunan dilakukan di semua bidang dan merata di seluruh pelosok kabupaten. Karenanya, pembangunan kewilayahan yang holistik dan integratif di seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo menjadi keharusan.

7. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Misi ini pun diselenggarakan untuk mencapai pokok visi ketiga, yaitu Kabupaten Probolinggo yang “Berkelanjutan”. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan dampak perubahan iklim menjadi keharusan. Begitu pula pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, hasil riset dan inovasi harus dioptimalkan untuk penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ini.

8. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi pertama, yaitu Kabupaten Probolinggo yang “Maju”. Untuk mencapai pokok visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus membangun kelembagaan dan/atau sistem tata kelola melalui pembuatan sekaligus penegakan regulasi atau kebijakan- kebijakan yang adaptif terhadap segala perubahan jaman dan kebutuhan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan menjadi keniscayaan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan harus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, khususnya bagi pemuda, perempuan, maupun kelompok masyarakat termarginalkan. Berbagai upaya atau program untuk meningkatkan keterlibatan aktif stakeholders lain dalam pembangunan menjadi keharusan. Pembangunan desa, masyarakat dan kelembagaan desa dioptimalkan. Selain itu, harus dilakukan pula upaya- upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.

Misi Kabupaten Probolinggo ini sejalan atau selaras dengan misi pembangunan nasional maupun provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam

RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Keselarasan misi dapat terlihat pada Tabel 4.2.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2045

Tabel 4.1
Sasaran Visi Kabupaten Probolinggo dan Keselarasannya dengan Sasaran Visi Provinsi Jawa Timur

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,00 - 78,39	396,86 - 475,84	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	PDRB per kapita (Rp Juta)	23.7	71.67
		Kontribusi PDB maritim (%)	8,1	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	63,17	243,87		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	27.35	35.82
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	30,60 - 30,66	36,27 - 36,88				
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 - 9,40	0,21-0,71	Menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah Kab. Probolinggo	Tingkat Kemiskinan (%)	15.61	1.18
		Rasio gini	0,379 - 0,382	0,290 - 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,381 - 0,386	0,319-0,370		Rasio gini (Indeks)	0.31	0.21
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi	14,31	12,36		Kontribusi PDRB Probolinggo thd provinsi (%)	1.43	2.9

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
						Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10 – 5,41	4,57 – 5,65		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.09	7.71
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,80	4,00	Meningkatnya produktivitas daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2.82	3.61
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,62	0,78	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71.42	84.67
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GKR menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	81,71	Terwujudnya net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq)	1.242.828,20	22.496.893,63
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,17	75,82		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.77	76.35

Tabel 4.2

Keselarasan Misi Kabupaten Probolinggo dengan Misi Provinsi Jawa Timur dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045

Misi RPJPN	Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur	Misi RPJPD Kabupaten Probolinggo
Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi sosial dalam menunjang SDM berkualitas	Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter (M1)
Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif (M4)
Transformasi tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima (M8)
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi (M2)
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap (M3)
Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata (M6)
Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan (M5)
Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (M7)

4.3. Hubungan antara Isu Strategis dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045

Salah satu kriteria visi dan misi RPJPD yang baik adalah kemampuannya dalam menjawab permasalahan dan/atau isu strategis pembangunan saat ini hingga dua puluh tahun mendatang. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045 yang telah diuraikan di sub bab sebelumnya diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan pada periode tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Bab III. Tabel 4.3. memperlihatkan kaitan pokok visi dan misi dalam menjawab isu-isu strategis yang telah teridentifikasi.

Tabel 4.3
Hubungan Isu Strategis dan Visi – Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi
(1) Peningkatan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan, baik dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah (8) Internalisasi nilai-nilai toleransi, kesetaraan, kebebasan politik (berpendapat) yang mendukung kehidupan masyarakat yang tentram dan nyaman. (9) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Iptek, hasil riset, inovasi dalam penyelenggaraan semua misi pembangunan	Maju	Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter (M1)
(7) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang adaptif (6) Peningkatan partisipasi seluruh stakeholders dalam pembangunan, khususnya pentahelix. Penciptaan dan peningkatan kolaborasi antar sektor (perangkat daerah), stakeholders, maupun antar daerah dalam pembangunan		Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima (M8)
(1) Peningkatan kualitas atau kompetensi sumberdaya manusia pelaku pembangunan, baik dari masyarakat,	Sejahtera	Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi
pelaku usaha, maupun aparatur pemerintah daerah (2) Penurunan kemiskinan yang masih tinggi melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar secara merata maupun penciptaan lingkungan sosial yang sehat. Termasuk pula peningkatan kualitas ketahanan pangan, stabilitas harga pangan dan penurunan gizi buruk dan stunting. (3) Perubahan/transformasi struktur perekonomian Kabupaten Probolinggo ke arah dominasi sektor-sektor bernilai tambah tinggi, namun tetap berbasis (berhulu) dari sektor dominan (6) Peningkatan partisipasi seluruh stakeholders dalam pembangunan, khususnya pentahelix. Penciptaan dan peningkatan kolaborasi antar sektor (perangkat daerah), stakeholders, maupun antar daerah dalam pembangunan (9) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Iptek, hasil riset, inovasi dalam penyelenggaraan semua misi pembangunan		Manusia yang berdaya saing dan berkarakter (M1) Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi (M2) Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap (M3) Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif (M4) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata (M6)
(4) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang dipastikan berwawasan lingkungan dan aman bencana. (5) Penyelesaian permasalahan lingkungan alam dan sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang (6) Peningkatan partisipasi seluruh stakeholders dalam pembangunan, khususnya pentahelix. Penciptaan dan peningkatan kolaborasi antar sektor (perangkat daerah), stakeholders, maupun antar daerah dalam pembangunan (9) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Iptek, hasil riset, inovasi dalam penyelenggaraan semua misi pembangunan	Berkelanjutan	Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan (M5) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata (M6) Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (M7)

BAB V**ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 memuat arah kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di tahun 2045. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai visi dan menyelenggarakan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan menggambarkan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan pada setiap tahapan selama periode RPJPD. Dalam Konteks RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan daerah berarti prioritas yang harus dilakukan pada tahap lima tahun pertama (2025-2029), kedua (2030-2034), ketiga (2025-2039) dan keempat (2040-2045) pembangunan di kabupaten Probolinggo hingga tahun 2045. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045.

Sasaran pokok adalah kondisi yang diharapkan terjadi saat penyelenggaraan misi berjalan baik sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan. Untuk mengukur ketercapaian sasaran pokok, maka dirumuskan indikator (kinerja) dari setiap sasaran pokok beserta target capaian indikator tersebut. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode/tahap.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menguraikan arah kebijakan setiap tahapan pembangunan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Walaupun misi berbeda, namun model pentahapan yang dilakukan adalah sama, yaitu: (1) Tahapan pertama (2025-2029) diarahkan untuk

perkuatan pondasi transformasi; (2) Tahapan kedua (2030-2034) diarahkan untuk akselerasi atau percepatan transformasi; (3) Tahapan ketiga (2035-2039) diarahkan untuk ekspansi global; dan (4) Tahapan keempat (2040-2045) doarahkan kepada Perwujudan Indonesia Emas 2045. Mengacu kepada pentahapan tersebut, maka secara umum pentahapan pembangunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 adalah:

1. Tahapan pertama (2025-2029) diarahkan kepada penguatan pondasi penyelenggaraan setiap misi. Pondasi yang dimaksud dapat berupa penguatan kebijakan, sistem kelembagaan, maupun modal dasar pembangunan, meliputi SDM, tatakelola, Infrastruktur, Regulasi yang mendukung kemantapan ekonomi inklusif, social, budaya, ketentraman, da ketertiban umum;
2. Tahapan kedua (2030 – 2034) diarahkan kepada percepatan penyelenggaraan setiap misi. Pada tahap ini dilakukan pemanfaatan secara optimal kebijakan, sistem kelembagaan maupun modal dasar pembangunan yang telah dikuatkan ditahap pertama untuk akselerasi transformasi bidang strategis dan perluasan ke berbagai bidang pembangunan melalui optimalisasi potensi daerah melalui kerjasama multifihak guna menuju keunggulan daerah;
3. Tahapan ketiga (2035 – 2039) diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan misi menuju daya saing regional dan nasional. Fokus tahapan ini adalah pada peningkatan kualitas segala bidang yang mendorong kesejahteraan dan daya saing daerah serta diperhitungkan di tingkat regional Jawa Timur dan Nasional;
4. Tahapan keempat (2040 – 2045) diarahkan pada upaya perwujudan visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045, yaitu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang diindikasikan dengan ketercapaian target pembangunan jangka Panjang. Prioritas akan diberikan kepada penyelenggaraan misi yang masih lemah dalam memberikan layanan yang merata dan berkualitas.

Gambar 5.1
Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045



Secara terperinci, berikut adalah uraian arah kebijakan untuk setiap penyelenggaraan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Probolinggo:

A. Arah Kebijakan Tahapan I (2025-2029)

Misi pertama, **Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter**, mencakup penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan peningkatan sumberdaya manusia, mencakup urusan pendidikan, kesehatan, sosial, maupun urusan terkait lainnya. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi 1 ini menjalankan **Transformasi Sosial**. Arah kebijakan tahap I pada penguatan pondasi penyelenggaraan misi ini meliputi penyediaan kebijakan atau sistem kelembagaan lainnya, penguatan dan/atau penyediaan sumberdaya atau modal dasar yang dibutuhkan hingga memperluas lingkup/cakupan (kuantitas/pemerataan). Karenanya, arah kebijakan dirumuskan dengan Penguatan pondasi dan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata.

Misi kedua, **Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi**, mencakup penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan penciptaan lingkungan sosial yang tentram, tertib, serta melindungi masyarakat dari berbagai gangguan keamanan. Misi ini juga mencakup upaya mitigasi dan penanganan bencana daerah. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi ini menjalankan agenda **Supremasi Hukum dan Kepemimpinan Indonesia**. Arah kebijakan tahap I pada penguatan pondasi penyelenggaraan misi ini meliputi penyediaan kebijakan atau sistem kelembagaan lainnya, penguatan dan/atau penyediaan sumberdaya atau modal dasar yang dibutuhkan hingga memperluas lingkup/cakupan (kuantitas/pemerataan). Karenanya, arah kebijakan dirumuskan dengan Penguatan pondasi dan pemenuhan pelayanan stabilitas keamanan dan ketertiban umum yang merata.

Misi ketiga, **Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap**, mencakup penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan penciptaan lingkungan sosial dan keluarga yang berkualitas dan rukun, mencakup urusan pengandaian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perlindungan anak, serta kesatuan bangsa dan politik. . Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi ini menjalankan agenda **Ketahanan Sosial**. Arah kebijakan tahap I pada penguatan pondasi penyelenggaraan misi ini meliputi penyediaan kebijakan atau sistem kelembagaan lainnya, penguatan dan/atau penyediaan sumberdaya atau modal dasar yang dibutuhkan hingga memperluas lingkup/cakupan (kuantitas/pemerataan). Karenanya, arah kebijakan dirumuskan dengan Penguatan pondasi dan pemenuhan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta kesatuan bangsa yang merata.

Misi keempat, **Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif**, mencakup penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang terkait

dengan pembangunan urusan pilihan yang sesuai dengan potensi daerah, urusan wajib terkait ketenagakerjaan, perijinan berusaha, investasi, maupun peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi ini menjalankan agenda **Transformasi Ekonomi dan Stabilitas (ekonomi) makro**. Arah kebijakan tahap I adalah penguatan pondasi penyelenggaraan misi ini dalam bentuk penyediaan kebijakan atau kelembagaan lainnya yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif berusaha/berinvestasi untuk peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja maupun sumberdaya produksi lain, khususnya sektor-sektor potensial lokal daerah, dan mendukung transformasi struktural ekonomi yang seimbang. Di satu sisi, pembangunan ekonomi yang inklusif diimplementasikan melalui keberpihakan atau penguatan sektor hulu (pertanian dalam arti luas), peningkatan kesejahteraan pelaku sektor ekonomi berproduktivitas rendah atau membutuhkan perlindungan serta stimulus agar mandiri – seperti petani, nelayan, pengusaha mikro dan kecil, khususnya di daerah yang marginal/terbelakang. Namun, di sisi lain, pengembangan sektor ekonomi dengan produktivitas dan multiplier effect yang tinggi, seperti pengembangan industri, perdagangan, dan jasa (khususnya pariwisata), juga dilakukan berbasis sektor pertanian (dalam arti luas), khususnya di kawasan strategis cepat tumbuh. Pembangunan ekonomi pun mulai dan terus dipastikan menerapkan prinsip-prinsip dari Ekonomi Hijau (Green Economy) maupun Ekonomi Biru (Blue Economy).

Pembangunan tahap ini pun diarahkan memulai implementasi kebijakan tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi semua sektor, khususnya sektor potensial daerah dan pendukungnya, hingga penyediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Karenanya, rumusan arah kebijakan adalah Penguatan pondasi peningkatan produktivitas sektoral dan ekonomi daerah yang merata.

Misi kelima, **Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**, mencakup penyelenggaraan penyediaan sarana

prasarana dasar dan daerah yang aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi ini menjalankan agenda penyediaan **Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**. Arah kebijakan tahap I adalah memulai implementasi kebijakan terkait penyediaan infrastruktur pendukung yang dibangun dalam penyelenggaraan misi pembangunan lainnya untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Karenanya, rumusan arah kebijakan adalah Pemenuhan Infrastruktur dasar dan wilayah yang merata.

Misi keenam, **Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, mencakup penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan upaya peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi ini menjalankan agenda **Kesinambungan Pembangunan dan ketahanan ekologi**. Arah kebijakan tahap I adalah penguatan pondasi penyelenggaraan misi ini dalam bentuk penyediaan kebijakan atau kelembagaan lainnya yang menjamin penyelenggaraan misi pembangunan yang lain memperhatikan, berwawasan, atau ramah lingkungan. Pembangunan tahap ini pun diarahkan memulai implementasi kebijakan tersebut yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Karenanya, rumusan arah kebijakan adalah Penguatan pondasi peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang merata. Arah kebijakan detail mencakup: (a) penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di segala bidang, termasuk di dalamnya upaya penciptaan budaya cinta lingkungan, berproduksi dan berkonsumsi ramah lingkungan; (b) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas air, udara dan tanah; (c) Implementasi berbagai program/kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam

peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk di dalamnya pembiasaan/budaya berproduksi dan berkonsumsi ramah lingkungan.

Misi ketujuh, **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata**, terkait erat dengan penyelenggaraan misi-misi lainnya, sehingga mencakup semua penyelenggaraan urusan di pemerintah daerah. Misi ini memastikan bahwa pembangunan di semua bidang dilakukan merata di seluruh pelosok kabupaten. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi ini menjalankan agenda **Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**. Arah kebijakan penguatan pondasi penyelenggaraan misi ini meliputi penciptaan dan mulai implementasi pembangunan kewilayahan (Implementasi RTRW) dengan pendekatan THIS dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek.

Misi kedelapan, **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima**, mencakup penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan urusan penunjang dan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, misi ini menjalankan agenda **Transformasi Tata Kelola**. Arah kebijakan tahap pertama adalah penguatan pondasi penyelenggaraan misi ini mencakup Penguatan sumberdaya tata kelola dan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Arah Kebijakan Tahapan II (2030-2034)

Arah kebijakan tahap II difokuskan pada memastikan pemerataan penyelenggaraan misi ke seluruh wilayah dan golongan masyarakat serta percepatan peningkatan kualitasnya. Pada Misi **Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan**

berkarakter, sumberdaya maupun kelembagaan input dan proses yang telah dikuatkan pada tahap I diharapkan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendorong percepatan penyelenggaraan misi ini. Karenanya, arah kebijakan tahap II dirumuskan dengan Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang merata dan berkualitas.

Arah kebijakan tahap II pada misi **Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi** dirumuskan dengan Pemenuhan pelayanan stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari bencana yang merata dan berkualitas. Arah kebijakan tahap II pada misi **Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap** dirumuskan dengan Percepatan pemenuhan pelayanan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesatuan bangsa yang merata dan berkualitas.

Arah kebijakan tahap II pada percepatan penyelenggaraan misi **Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif** adalah memastikan pembangunan ekonomi telah merata di seluruh pelosok wilayah. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk percepatan peningkatan pembangunan ekonomi berkualitas dan inklusif. Karenanya, rumusan arah kebijakan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Arah kebijakan tahap II pada misi **Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan** adalah pada percepatan penyelenggaraan misi ini sehingga memastikan penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah telah merata di seluruh pelosok wilayah. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk percepatan penyediaan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan (berwawasan lingkungan). Karenanya, rumusan arah kebijakan adalah percepatan pemenuhan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Arah kebijakan tahap II misi **Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** adalah pada percepatan upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rumusan arah kebijakan adalah percepatan peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Arah kebijakan penyelenggaraan misi **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang**

Merata di tahap kedua pembangunan jangka panjang adalah pengelolaan pembangunan kewilayahan (Implementasi RTRW) secara berkelanjutan dengan pendekatan THIS dan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek yang berkelanjutan. Sementara itu, arah kebijakan tahap II pada misi **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima** adalah percepatan penyelenggaraan misi dalam mencapai tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang baik. Karenanya, pembangunan misi ini diarahkan pada Percepatan Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informatif, dan masyarakat yang partisipatif. Pembangunan tahap I diharapkan telah mampu menciptakan dasar kelembagaan/sistem/aturan yang kuat, SDM ASN yang kompeten, dan menyediakan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pembangunan tahap II melanjutkan upaya-upaya yang belum selesai dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam misi ini.

C. Arah Kebijakan Tahapan III (2035-2039)

Arah kebijakan tahap III difokuskan pada memastikan penyelenggaraan misi telah berkualitas dan merata ke seluruh wilayah dan golongan masyarakat, setidaknya sesuai standard yang telah ditetapkan sebelumnya. Optimalisasi (upaya semaksimal mungkin dengan kendala yang ada) implementasi berbagai program/kegiatan sesuai arah kebijakan yang ditentukan pada tahap II dilanjutkan pada tahap III sehingga penyelenggaraan misi berjalan mantap menuju target yang telah ditetapkan. Berbagai upaya perbaikan dan/atau penyesuaian kebijakan dan implementasinya dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan), sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Karenanya, arah kebijakan tahap III pada misi **Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter** dirumuskan dengan

Pemantapan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang berkualitas dan merata.

Arah kebijakan tahap III pada misi **Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi** dirumuskan dengan Pemantapan pemenuhan pelayanan penciptaan ketertiban, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan mitigasi serta penanganan bencana yang merata dan berkualitas. Arah kebijakan tahap III misi **Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap** dirumuskan dengan Pemantapan pemenuhan pelayanan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesatuan bangsa yang merata dan berkualitas.

Arah kebijakan tahap III pada misi **Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif** adalah memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif telah optimal dan merata di seluruh pelosok wilayah. Selain itu, orientasi pembangunan ekonomi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan daerah sendiri, namun juga pada pemenuhan daerah lain, nasional, bahkan internasional. Karenanya, rumusan arah kebijakan misi kedua pada tahap III adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi menuju daya saing regional dan nasional.

Arah kebijakan tahap III misi **Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan** adalah memastikan penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang layak dan berkualitas (berwawasan lingkungan) telah merata di seluruh pelosok wilayah. Karenanya, rumusan arah kebijakan misi ini pada tahap III adalah pemantapan penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar daerah. Arah kebijakan misi **Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** pada tahap III adalah pemantapan upaya peningkatan daya dukung dan tampung lingkungan hidup yang berkualitas dan merata. Arah kebijakan penyelenggaraan misi **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata** di tahap ketiga pembangunan jangka panjang adalah Pengelolaan pembangunan kewilayahan (Implementasi RTRW) secara berkelanjutan dengan pendekatan THIS dan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek

yang berkelanjutan serta Optimalisasi Perluasan cakupan pembangunan kewilayahan. Dalam tahap ini dipastikan pembangunan merata di seluruh pelosok kabupaten Probolinggo. Selain itu, memastikan pengelolaan pembangunan kewilayahan tetap berlanjut dan meluas ke seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, arah kebijakan misi **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima** tahap III adalah pemantapan penyelenggaraan misi dalam mencapai tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang baik sesuai kebutuhan masyarakat terkini. Karenanya, pembangunan misi ini diarahkan pada Pemantapan Kelembagaan adaptif, SDM ASN Kompetitif, regulasi adaptif dan masyarakat yang mandiri. Kualitas kelembagaan, SDM ASN serta sistem pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin tinggi. Walaupun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik mampu beradaptasi seiring perubahan/tuntutan yang terjadi.

D. Arah Kebijakan Tahapan IV (2040-2045)

Arah kebijakan tahap IV difokuskan pada memastikan seluruh sasaran maupun target jangka panjang yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan misi telah tercapai. Pada misi **Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter**, perkembangan zaman sangat memungkinkan tuntutan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan sosial dengan standard yang semakin tinggi dan/atau berbeda dengan masa atau periode sebelumnya. Karenanya, arah kebijakan tahap IV dirumuskan dengan Pemantapan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang adaptif sesuai tuntutan zaman.

Arah kebijakan tahap IV pada misi **Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi** dirumuskan dengan Pemantapan pemenuhan pelayanan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta mitigasi dan penanganan bencana yang adaptif sesuai tuntutan zaman. Arah kebijakan tahap IV pada misi **Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap** dirumuskan dengan Pemantapan pemenuhan pelayanan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga bencana dan kesatuan bangsa yang adaptif sesuai tuntutan zaman. Sementara itu, arah kebijakan tahap IV pada misi **Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif** adalah memastikan semua sasaran dan target jangka panjang pembangunan ekonomi yang inklusif tercapai dan merata di seluruh pelosok wilayah. Perekonomian Kabupaten Probolinggo telah memiliki pondasi yang kuat sehingga dapat beradaptasi dari berbagai guncangan luar. Produksi daerah secara mantap memenuhi kebutuhan daerah sendiri, dan daya saing untuk pemenuhan kebutuhan daerah lain, nasional, bahkan internasional pun semakin tinggi. Karenanya, rumusan arah kebijakan misi kedua pada tahap IV adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi inklusif berdaya saing nasional dan internasional.

Arah kebijakan tahap IV pada misi **Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan** adalah memastikan semua sasaran dan target jangka panjang penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang layak, berkualitas dan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) merata di seluruh pelosok wilayah. Karenanya, rumusan arah kebijakan misi pada tahap IV adalah pemantapan penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar daerah yang berwawasan lingkungan. Arah kebijakan tahap IV pada misi **Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** adalah pemantapan upaya peningkatan daya dukung dan tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo.

Arah kebijakan penyelenggaraan misi **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata** di tahap keempat pembangunan jangka panjang

adalah Pembangunan kewilayahan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Pengelolaan pembangunan kewilayahan dipastikan terus berjalan/berkelanjutan dan telah menyentuh semua sub wilayah kabupaten. Sementara itu, arah kebijakan tahap IV pada misi adalah memastikan semua sasaran dan target penyelenggaraan misi **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima** dalam mencapai tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang baik sesuai kebutuhan masyarakat terkini dapat tercapai. Karenanya, pembangunan misi ini diarahkan pada Pemantapan Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas dan kolaboratif. Kualitas kelembagaan, SDM ASN serta sistem pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin tinggi dan adaptif terhadap tuntutan perubahan jaman. Tidak hanya itu, pembangunan tata kelola pemerintahan diarahkan menciptakan SDM ASN yang berintegritas tinggi yang didukung oleh sistem/kelembagaan serta sarana parasana yang terintegrasi dan kolaborasi antar stakeholders pembangunan yang sinergi dan kuat.

Secara ringkas, arah kebijakan penyelenggaraan misi disetiap tahap atau periode lima tahunan dapat dilihat dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Misi (Agenda Transformasi) di Setiap Tahapan/Periode Pembangunan Lima Tahun

Misi Kabupaten Probolinggo	Agenda Transformasi Nasional/Provinsi	Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan pondasi transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Akselerasi Transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Kabupaten Probolinggo berkualitas dan berdayasaing	Kabupaten Probolinggo Maju dan Sejahtera
Misi-1; Mewujudkan Transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdayasaing dan berkarakter.	Transformasi sosial	Penguatan pondasi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar pendidikan, Kesehatan dan sosial yang merata.	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang merata dan berkualitas.	Pemantapan Pemenuhan Pelayanan Dasar pendidikan, Kesehatan dan sosial lainnya yang berkualitas dan merata.	Pemantapan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang adaptif sesuai tuntutan zaman.
Misi-2; Menciptakan Masyarakat tentram, tertib dan terlindungi	Supremasi Hukum, dan Kepemimpinan Indonesia	Penguatan pondasi dan Pemenuhan pelayanan stabilitas Keamanan Dan Ketertiban umum yang Merata	Pemenuhan pelayanan stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari bencana yang merata dan berkualitas.	Pemantapan Pemenuhan Pelayanan penciptaan ketertiban, Ketertiban umum, Perlindungan masyarakat, dan mitigasi Serta Penanganan Bencana yang merata Dan berkualitas.	Pemantapan pemenuhan pelayanan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta mitigasi dan penanganan bencana yang adaptif sesuai tuntutan zaman.
Misi-3; Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap	Ketahanan sosial budaya	Penguatan pondasi dan pemenuhan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan	Percepatan pemenuhan pelayanan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesatuan	Pemantapan pemenuhan pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana	Pemantapan pemenuhan pelayanan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Misi Kabupaten Probolinggo	Agenda Transformasi Nasional/Provinsi	Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan pondasi transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Akselerasi Transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Kabupaten Probolinggo berkualitas dan berdaya saing	Kabupaten Probolinggo Maju dan Sejahtera
		perempuan dan pemuda, serta kesatuan bangsa yang merata	bangsa yang merata dan berkualitas.	Dan Kesatuan bangsa yang merata Dan berkualitas.	kesatuan bangsa yang adaptif sesuai tuntutan zaman.
Misi-4; Mewujudkan Transformasi ekonomi yang Inklusif	Transformasi ekonomi dan Stabilitas (ekonomi) makro	Penguatan pondasi peningkatan produktivitas sektoral dan ekonomi daerah yang merata	percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.	Pemantapan Pertumbuhan ekonomi Menuju daya saing regional dan nasional.	pemantapan pertumbuhan ekonomi inklusif berdaya saing nasional dan internasional.
Misi-5; Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan Infrastruktur dasar dan wilayah yang merata.	percepatan pemenuhan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Pemantapan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Konektivitas Antar daerah.	pemantapan penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar daerah yang berwawasan lingkungan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Misi Kabupaten Probolinggo	Agenda Transformasi Nasional/Provinsi	Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan pondasi transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Akselerasi Transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Kabupaten Probolinggo berkualitas dan berdaya saing	Kabupaten Probolinggo Maju dan Sejahtera
Misi-6; Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	penciptaan dan mulai implementasi pembangunan kewilayahan (Implementasi RTRW) dengan pendekatan THIS dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek	pengelolaan pembangunan kewilayahan (Implementasi RTRW) secara berkelanjutan dengan pendekatan THIS dan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek yang berkelanjutan	Pengelolaan Pembangunan An Kewilayahan (Implementasi RTRW) Secara Berkelanjutan dengan Pendekatan THIS dan Memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek Yang Berkelanjutan serta Optimalisasi Perluasan Cakupan Pembangunan An Kewilayahan .	Pembangunan kewilayahan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.
Misi-7; Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Kesinambungan Pembangunan dan ketahanan ekologi	Penguatan pondasi peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang merata.	percepatan peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan.	Pemantapan Upaya Peningkatan Daya dukung dan tampung lingkungan hidup yang Berkualitas dan merata.	pemantapan upaya peningkatan daya dukung dan tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Misi Kabupaten Probolinggo	Agenda Transformasi Nasional/Provinsi	Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan pondasi transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Akselerasi Transformasi (penyelenggaraan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo)	Kabupaten Probolinggo berkualitas dan berdayasaing	Kabupaten Probolinggo Maju dan Sejahtera
Misi-8; Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima	Transformasi tata Kelola	Penguatan sumberdaya tata kelola dan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.	Percepatan Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informatif, dan masyarakat yang partisipatif.	Pemantapan Kelembagaan adaptif, SDM ASN Kompetitif, Regulasi adaptif dan Masyarakat yang mandiri.	Pemantapan Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas dan kolaboratif.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Saat pembangunan terbagi ke dalam empat tahapan, maka kuantifikasi sasaran pokok pun dapat ditetapkan di setiap pentahapannya. Sasaran pokok menjelaskan target dari capaian pembangunan setiap tahap lima tahunan dan akhir periode rencana di tahun ke-20. Setiap sasaran pokok dilengkapi dengan indikator kinerja serta target capaiannya pada akhir periode 20 tahun.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Karenanya, arah pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo diturunkan dan akan selaras dengan arah pembangunan nasional/provinsi. Selain itu, sebagai strategi daerah, arah pembangunan Kabupaten Probolinggo menguraikan strategi setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, sasaran pokok pembangunan Kabupaten Probolinggo adalah kondisi yang terjadi saat arah pembangunan berjalan sesuai harapan. Rumusan arah pembangunan serta sasaran pokok pembangunan Probolinggo Tahun 2025 – 2045 disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045

Misi Kabupaten Probolinggo	Agenda Transformasi Nasional/Provinsi	Arah Pembangunan Nasional / Provinsi	Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Misi-1; Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Transformasi sosial	IE1. Kesehatan untuk semua	AP1. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	AP2. Penyediaan Layanan Pendidikan yang berkualitas dan merata	Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang adaptif	AP3. Pemenuhan jaminan sosial dalam menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya Jaminan Sosial sebagai Upaya Penurunan Kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya
Misi-2; Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi	Supremasi Hukum, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan	AP10. Penegakan perda dan Penciptaan Rasa Aman di	Terciptanya penegakan perda dan masyarakat

Misi Kabupaten Probolinggo	Agenda Transformasi Nasional/Provinsi	Arah Pembangunan Nasional / Provinsi	Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo
		Demokrasi Substansial	masyarakat yang demokratis	yang demokratis dan aman
Misi-3; Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap	Ketahanan sosial budaya	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	AP13.Perwujudan masyarakat berbudaya dan rukun	Terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	AP14. Perwujudan Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender
Misi-4; Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif	Transformasi ekonomi dan Stabilitas (ekonomi) makro	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	AP4. Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap dan inklusif
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	AP11. Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Terwujudnya Kestabilan Keuangan Daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	AP12. Peningkatan Daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah
Misi-5; Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	AP5. Penerapan Ekonomi Hijau	Meningkatnya Penerapan Rintisan Ekonomi Hijau Berbasis Karakteristik Daerah
		IE 6. Transformasi Digital	AP6. Pemanfaatan TIK dalam kehidupan	Optimalnya pemanfaatan TIK dalam kehidupan
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	AP16. Mewujudkan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Tersedianya energi, air dan pangan sesuai kebutuhan

Misi Kabupaten Probolinggo	Agenda Transformasi Nasional/Provinsi	Arah Pembangunan Nasional / Provinsi	Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Misi-6; Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	AP7. Peningkatan Kapasitas neraca aset dan perdagangan daerah	Meningkatkan Integrasi Ekonomi Lokal dengan Regional, Nasional dan Global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	AP8. Peningkatan perekonomian dan kemandirian desa	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kemandirian Desa
Misi-7; Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Kestinambungan Pembangunan dan ketahanan ekologi	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	AP15. Pengendalian Kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman serta Persampahan
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan dan Iklim	AP17. Penurunan Risiko bencana	Menurunnya risiko bencana
Misi-8; Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima	Transformasi tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	AP9. Pemantapan Birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik	Mantapnya birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi Kabupaten Probolinggo. Karenanya, arah kebijakan pada bagian ini diuraikan sesuai

dengan transformasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo yang telah diselaraskan pula dengan penyelenggaraan misi pembangunan yang telah dirumuskan.

Arah kebijakan transformasi pertama adalah dalam rangka penyelenggaraan Misi 1, Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Misi ini menyelenggarakan **Transformasi Sosial** sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan;
- 2 Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
- 3 Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- 4 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
- 5 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 6 Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan;
- 7 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- 8 Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo;
- 9 Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo;
- 10 Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
- 11 Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;

- 12 Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga;
- 13 Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- 14 Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah;
- 15 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;
- 16 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;
- 17 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 18 Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah);
- 19 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
- 20 Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik;
- 21 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
- 22 Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan;
- 23 Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- 24 Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo;

- 25 Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo;
- 26 Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics);
- 27 Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global;
- 28 Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo;
- 29 Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo;
- 30 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun Reskilling;
- 31 Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;

- 32 Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo. Pengelolaan data tentang SJSN yang baik menjadi keharusan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penyediaan jaminan sosial ini;
- 33 Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah kantong kemiskinan/wilayah "terisolasi" di Kabupaten Probolinggo;
- 34 Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan budaya hidup sehat – termasuk didalamnya tentang bahaya merokok – urgensi pendidikan bagi kesejahteraan, hingga jaminan sosial untuk Kesejahteraan.

Arah kebijakan transformasi kedua adalah dalam rangka peyelenggaraan Misi 2, Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi. Misi ini menyelenggarakan **Supremasi Hukum dan Kepemimpinan Indonesia** sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
- 2 Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut;

Arah kebijakan transformasi ketiga adalah dalam rangka peyelenggaraan Misi 3, Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap. Misi ini

menyelenggarakan agenda **Ketahanan Sosial Budaya** sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- 2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- 3 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan;
- 4 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan;
- 6 Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila;
- 7 Sertifikasi Seniman, Budayawan agar mampu bersaing secara global;
- 8 Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
- 9 Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
- 10 Penguatan integritas partai politik.

Arah kebijakan transformasi keempat adalah dalam rangka peyelenggaraan Misi 4, Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif. Misi ini menyelenggarakan agenda **Transformasi Ekonomi dan Stabilitas (Ekonomi) Makro** sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian, khususnya di daerah yang terintegrasi dengan daerah lain di wilayah Tapal Kuda;
- 2 Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya);
- 3 Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
- 4 Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;
- 5 Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform;
- 6 Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian;
- 7 Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian;
- 8 Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
- 9 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak;

- 10 Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform;
- 11 Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak;
- 12 Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi Perikanan;
- 13 Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif;
- 14 Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan;
- 15 Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya;
- 16 Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri sesuai arahan RTRW;
- 17 Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages), khususnya pada kawasan perkotaan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi Kreatif;

- 18 Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan Partisipatif;
- 19 Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;
- 20 Peningkatan kompetensi SDM pelaku/pengelola wisata, termasuk Sertifikasinya;
- 21 Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
- 22 Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
- 23 Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
- 24 Standarisasi dan sertifikasi Produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing menuju persaingan global;
- 25 Peningkatan produktivitas BUMD;
- 26 Penguatan pengendalian inflasi daerah;
- 27 Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi , guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 27 Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat, khususnya di sub wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

Arah kebijakan transformasi kelima adalah dalam rangka peyelenggaraan Misi 5, Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Misi ini menyelenggarakan agenda penyediaan **Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion, khususnya di kantong kemiskinan atau sub wilayah terisolasi di Kabupaten Probolinggo;
- 2 Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
- 3 Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik Wilayah;
- 4 Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan;
- 5 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
- 6 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan;
- 7 Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi). Misalnya, pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, pada ruas Probolinggo - Lumajang – Jember dan Probolinggo - Situbondo – Banyuwangi;
- 8 Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda yang disertai dengan transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal;
- 9 Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;

- 10 Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;
- 11 Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk: (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;
- 12 Peningkatan ketahanan pangan dengan kecukupan konsumsi pangan melalui distribusi maupun penyediaan pangan.

Arah kebijakan transformasi keenam adalah dalam rangka peyelenggaraan Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata. Misi ini menyelenggarakan agenda **Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan** sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, di perkotaan Kabupaten Probolinggo;
- 2 Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan Perkotaan;
- 3 Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;
- 4 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;
- 5 Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau Pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan;
- 6 Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan;
- 7 Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan;
- 8 Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;
- 9 City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
- 10 Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi Kreatif;
- 11 Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis;
- 12 Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
- 13 Dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:
 - Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi;
 - Probolinggo-Lumajang-Jember;

- 14 Dukungan Peningkatan prasarana perkeretaapian, termasuk Pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat, pada ruas Pasuruan- Probolinggo-Jember-Banyuwangi (Pembangunan jalur ganda);
- 15 Dukungan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan di Kabupaten Probolinggo;
- 16 Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Kabupaten Probolinggo;
- 17 Peningkatan sarana & prasarana aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif;
- 18 Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.

Arah kebijakan transformasi ketujuh adalah dalam rangka peyelenggaraan Misi 7, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini menyelenggarakan agenda **Kesinambungan Pembangunan dan ketahanan ekologi** sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;
- 2 Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;
- 3 Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;
- 4 Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan Integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;
- 5 Pengelolaan pencegahan dan penanganan pencemaran air, tanah, udara, air limbah B3 serta kerusakan ekosistem;
- 6 Pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dengan masyarakat lokal/swasta dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan daerah tangkapan air, kemitraan dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, peraturan dan kebijakan terkait RTH dan luas sawah dipertahankan, lembaga keuangan yang melayani sektor produktif;

- 7 Penyediaan peraturan/regulasi yang menjamin kelestarian lingkungan;
- 8 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini dan sistem informasi kebencanaan, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Pengelolaan mencakup perencanaan (termasuk studi/kajian risiko bencana), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga tindak lanjut atau rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan berikutnya;
- 9 Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana;
- 10 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, termasuk peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta memitigasi risiko bencana dan krisis air;

Arah kebijakan transformasi terakhir adalah dalam rangka penyelenggaraan Misi 8, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima. Misi ini menyelenggarakan agenda **Transformasi Tata Kelola** sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan transformasi ini di Kabupaten Probolinggo diuraikan sebagai berikut:

- 1 Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah;
- 2 Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
- 3 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir;

- 4 Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas;
- 5 Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
- 6 Percepatan pelaksanaan reforma agraria;
- 7 Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
- 8 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
- 9 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended Finance;
- 10 Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan Daerah;
- 11 Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provins;
- 12 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Nasional;
- 13 Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan

kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan Pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan Berkelanjutan;

- 14 Perkuatan pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen Risiko;
- 15 Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Kabupaten Probolinggo, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand;
- 16 Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah, termasuk dengan kabupaten/kota yang berbatasan untuk pengelolaan kawasan. Misalnya, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik);
- 17 Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global;
- 18 Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya;
- 19 Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi

digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital;

- 20 Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;
- 21 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan;
- 22 Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
- 23 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 24 Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Timur yang profesional dan bebas Korupsi;
- 25 Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- 26 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian Kinerja;
- 27 Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional.

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Karenanya, indikator kinerja diturunkan dari ukuran keberhasilan arah pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo dan ditetapkan targetnya sampai akhir periode pembangunan jangka Panjang tahun 2045 (Tabel 5.3).

Tabel 5.3
Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Probolinggo dan
Targetnya Berdasarkan Misi dan Arah Pembangunan
Tahun 2025 – 2045

Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target	
				2025 (baseline)	2045
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter					
AP1. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) *	Tahun	74.13	79.20
		2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) *	per 100.000 kelahiran hidup	139.86	22.56
		3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (SSGI) *	%	14	6.28
		4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) ***	%	97.1	99.7

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target	
				2025 (baseline)	2045
AP2. Penyediaan Layanan Pendidikan yang berkualitas dan merata	Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan merata	5. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun *	tahun	6.58	8.42
		6. Harapan Lama Sekolah (tahun) *	tahun	12.88	15.25
		7. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi *	%	5.75	6.95
AP3. Pemenuhan jaminan sosial dalam menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya Jaminan Sosial sebagai Upaya Penurunan Kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya	8. Tingkat Kemiskinan *	%	15.61	1.18
Misi 2: Menciptakan Masyarakat Tentram, Tertib dan Terlindungi					
AP10. Penegakan perda dan Penciptaan Rasa Aman di masyarakat yang demokratis	Terciptanya penegakan perda dan masyarakat yang demokratis dan aman	9. Indeks Ketentraman dan Ketertiban **	Indeks	1.4	1.9
Misi 3: Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap					
AP13. Perwujudan masyarakat berbudaya dan rukun	Terciptanya masyarakat berbudaya dan rukun	10. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) **	Indeks	78.82	86.82
AP14. Perwujudan Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender	11. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *	Indeks	0.45	0.21

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target	
				2025 (baseline)	2045
Misi 4: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif					
AP4. Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap dan inklusif	12.Rasio PDRB Industri Pengolahan *	%	27.35	35.82
		13. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum *	%	1.84	2.06
		14. Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	2.98	1.82
		15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan *	%	54.59	65.07
		16. Pembentukan Modal tetap bruto (% PDRB) *	%	24.51	25
		17. ICOR *		5.55	5.16
		18. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten *	%	33.12	90.29
AP11. Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Terwujudnya Kestabilan Keuangan Daerah	19. Rasio PAD terhadap Total Belanja Daerah (%)**	%	13.07	15.02
AP12. Peningkatan Daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	20. Indeks daya saing daerah **	Indeks	2.82	3.61

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target	
				2025 (baseline)	2045
Misi 5: Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan					
AP5. Penerapan Ekonomi Hijau	Meningkatnya Penerapan Rintisan Ekonomi Hijau Berbasis Karakteristik Daerah	21. Penurunan intensitas emisi GRK Kumulatif	Ton Co2 eq	1.242.828, 20	22.496.8 93,63
AP6. Pemanfaatan TIK dalam kehidupan	Optimalnya pemanfaatan TIK dalam kehidupan	22. Indeks Pembangunan TIK **	Indeks	5.85	7.05
AP16. Mewujudkan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Tersedianya energi, air dan pangan sesuai kebutuhan	23. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) *	%	9.29	0.58
		24. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)*	%	8.5	100
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata					
AP7. Peningkatan Kapasitas neraca aset dan perdagangan daerah	Meningkatkan Integrasi Ekonomi Lokal dengan Regional, Nasional dan Global	25. Realisasi Investasi *	Rp (Triliun) ^{4*}	5.17	6.42
			Rp (Milyar)	475	975
AP8. Peningkatan perekonomian dan kemandirian desa	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kemandirian Desa	26. Persentase Jalan berkeselamatan **	%	62.27	79.18
		27. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan *	%	62	100
		28. Persentase Desa Mandiri *	%	6.15	22.15

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan (AP) Kabupaten Probolinggo	Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Probolinggo	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Target	
				2025 (baseline)	2045
Misi 7: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan					
AP15. Pengendalian Kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman serta Persampahan	29. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *	Indeks	74.77	76.35
		30. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman *	%	0.34	77
		31. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah *	%	10	92
		32. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah *	(% RT)	18.87	100
AP17. Penurunan Risiko bencana	Menurunnya risiko bencana	33. Indeks Risiko Bencana (IRB) *	Indeks	139,66	118,94
Misi 8: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima					
AP9. Pemanapan Birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik	Mantapnya birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektornik	34. Indeks Reformasi Birokrasi **	Indeks	78.26	83.26
		35. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *	Indeks	3.92	5
		36. Indeks Inovasi Daerah **	Indeks	58	75

Keterangan:

* Merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) mandatory Provinsi Jawa Timur. Terdapat 26 Indikator yang telah ditentukan (mandatory) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai IUP Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Untuk Target IUP Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045 telah ditetapkan pula oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.7.2.1/17076/201.2/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang “Edaran Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045”;



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Probolinggo

Tahun 2025-2045

- ** IUP yang ditambahkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- *** IUP tambahan yang direkomendasikan oleh Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/426/KPTS/013/2024 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045";
- 4* Terdapat 2 jenis satuan dan target pada indikator realisasi investasi. Pertama adalah bersatuan Rp. Triliun untuk realiasi investasi termasuk proyek strategis nasional (PSN). Kedua adalah bersatuan Rp.milyar untuk realisasi investasi tanpa PSN.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting karena akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan empat tahap pembangunan jangka menengah daerah dalam mencapai visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2045. RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam untuk mencapai kondisi yang dicita-citakan bersama (visi) 2045.

RPJPD Kabupaten Probolinggo disusun sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Proses penyusunan dilakukan sedemikian rupa untuk menjamin integrasi RPJPD Kabupaten Probolinggo dengan dokumen rencana lainnya dan mendukung ketercapaian tujuan hingga visi pembangunan daerah maupun nasional, sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini pun disusun dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan dan memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah yang tersedia seoptimal mungkin. Dengan demikian perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan dilakukan secara benar berdasarkan kondisi daerah saat ini. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang ingin dituju di tahun 2045 pun didasarkan pada kondisi saat ini untuk mencapai cita-cita kondisi Kabupaten Probolinggo di tahun 2045.

6.1. Kaidah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dijadikan :

- a. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan yang berkelanjutan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati pada empat tahap pembangunan jangka menengah;
- b. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di kabupaten serta terintegrasi dengan arah pembangunan tingkat provinsi dan nasional.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintahan.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Pengendalian terhadap RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 dilakukan pada tahap perencanaan yang bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Pengendalian ini berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Probolinggo melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (a) penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten ke dokumen RPJMD Kabupaten, RPJMD Kabupaten ke dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten; dan (b) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Sementara itu, pengendalian jangka pendek mencakup: (a) penjabaran perencanaan RPJMD Kabupaten ke dokumen RKPD Kabupaten, RKPD Kabupaten ke dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Probolinggo; dan (b) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pada RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 juga akan dilakukan pengendalian pelaksanaannya. Pengendalian pada tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, Pemantauan dan Evaluasi mencakup: (a) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (b) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (c) Evaluasi pencapaian kinerja utama pembangunan daerah.

6.1.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- c. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Kabupaten tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Kabupaten kurang dari 7 (tujuh) tahun;
- d. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran Pembangunan yang signifikan dari tahapan – tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran Pembangunan jangka panjang, target RPJP Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

6.1.4 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan system pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan

6.2. Pendanaan Pembangunan

Upaya mewujudkan Visi ***"Kabupaten Probolinggo yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"***, memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah. Disamping optimalisasi PAD, Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Probolinggo juga diharapkan didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Dengan berbagai sumber pembiayaan daerah tersebut, alokasi belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program Pembangunan berdampak, mengatasi permasalahan dan isu strategis Pembangunan, sehingga terwujud Visi Kabupaten Probolinggo 2045.

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO